



Departemen Ilmu Politik
Fisip UNAIR



Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



PEREMPUAN dalam PEMILUKADA

Kajian Tentang Kandidasi Perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia
2011





Departemen Ilmu Politik
Fisip UNAIR



Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



PEREMPUAN dalam PEMILUKADA

Kajian Tentang Kandidasi Perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara

**Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia
2011**

Judul Buku:

PEREMPUAN DALAM PEMILUKADA

Kajian Tentang Kandidasi Perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara

Penanggung Jawab:

Utama Sandjaja

Setio W. Soemeri

Penulis:

Tim Peneliti Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Editor:

Aquino Hayunta

Agung Wasono

Tim Kemitraan:

Utama Sandjaja

Setio W. Soemeri

Agung Wasono

Didik Supriyanto

Rafaella Wulandari

Rallo Tangdilintin

Dhien Kautsarina

Tim Lapangan:

Tim FISIP Universitas Airlangga

Yayasan Swara Parangpuan Sulawesi Utara

Cetakan Pertama:

Januari 2011

Diterbitkan oleh:

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, INDONESIA

Phone +62-21-7279-9566, Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.co.id>



TIM PENELITIAN

DEPARTEMEN POLITIK FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA

Ketua Peneliti:

Dr. Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Dra., MA.

Peneliti Utama:

Prof. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D.

Dr. Budi Prasetyo, Drs., Msi.

Anggota Peneliti:

Drs. Priyatmoko, MA.

Drs. Haryadi, Msi.

Drs. Wisnu Pramutanto, MSi

Drs. Aribowo, MSi.

Drs. Kris Nugroho, MA.

Drs. Sutrisno, MSi

Airlangga Pribadi, S.IP., MA.

Ucu Martanto, S.IP., MA.

Ali Shahab, S.IP., MSi.

Hari Fitrianto, S.IP

Fahrul Muzaqqi, S.IP

Wira Yuda Alam, S.IP

Baskoro Wicaksono, S.IP

Sigit Aris Setaiawan, S.IP

M. Denny Puja Andrianto, S.IP

Asisten Peneliti:

Lily Djenaan

Fitri Mamonto

Vivi George

Moen Djenaan

Nurhayati



SEKAPUR SIRIH

Salah satu bisnis utama perguruan tinggi adalah memproduksi karya-karya ilmiah. Karenanya, salah satu tolok ukur utama keberhasilan sebuah lembaga perguruan tinggi adalah kuantitas dan kualitas karya-karya ilmiahnya. Semakin tinggi kuantitas dan kualitas karya ilmiah yang diproduksi sivitas akademika, semakin berhasil perguruan tinggi itu. Karya-karya ilmiah itu bisa berupa buku, makalah, kumpulan makalah, laporan penelitian, artikel semi-populer, jurnal, laporan tahunan, skripsi, tesis dan disertasi.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) menyadari sepenuhnya bisnis utamanya itu, sehingga sejak berdiri tahun 1977 fakultas ini terus memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memproduksi karya-karya ilmiah. Fakultas ini memprioritaskan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti diskusi ilmiah, seminar, kursus, ceramah, kuliah umum, bedah buku, dan pelatihan penulisan ilmiah. Fakultas ini menerbitkan *Masyarakat Kebudayaan dan Politik* (ISSN 2086-7050), jurnal yang terbit teratur sejak 1987 dan terakreditasi. Fakultas juga menerbitkan jurnal ilmiah berbahasa Inggris sejak 2009 lalu, namanya *Indonesian Journal of Social Sciences* (ISSN 1978-760X).

Fakultas ini juga mendorong agar departemen-departemennya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah dan memproduksi karya-karya ilmiah. Sejak tahun 2009 lalu, fakultas menyediakan sejumlah dana *block grants* agar departemen lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan-kegiatan ilmiah itu. Seminar, diskusi ilmiah, lokakarya, pelatihan, serta penerbitan jurnal atau buku adalah program-program yang dirancang dan dilaksanakan pada lingkup departemen.

Terbitnya buku ini juga merupakan salah satu buah dari upaya tersebut yang ide pembuatannya disambut dengan sangat cerdas oleh para



staf pengajar di Departemen Politik. Oleh karenanya, fakultas sangat menghargai dan menyambut baik terbitnya buku ini. Fakultas juga berterimakasih kepada Drs Priyatmoko, MA (Ketua Departemen Politik), Dr Dwi Windyastuti Budi Hendrarti (Ketua Peneliti) yang telah mengusahakan naskah buku ini. Fakultas juga berterimakasih kepada Prof A. Ramlan Surbakti, Yayasan Kemitraan dan AusAid yang telah bekerjasama dengan mendukung dana untuk penelitian dan penerbitan buku ini.

Fakultas berharap terbitnya buku ini mendorong departemen-departemen lain di FISIP Unair untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan karya-karya ilmiah staf pengajar maupun mahasiswanya. Pepatah “Menerbitkan atau Binasā” (*Publish or Perish*) sepertinya memang perlu lebih sering kita ingat dan ucapkan berulang-ulang.

Surabaya, Desember 2010

I Basis Susilo

Dekan FISIP Unair



KATA PENGANTAR

Direktur Eksekutif Kemitraan

Kemitraan bersama dengan Departemen Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga (Unair) dibantu oleh LSM Swara Parangpuan di Sulawesi Utara atas dukungan dari AusAID selama lima bulan mulai Agustus sampai dengan Desember 2010 menyelenggarakan kajian tentang kandidasi perempuan di Pemilukada. Kajian ini dilaksanakan di Sulawesi Utara dan Jawa Timur sebagai wilayah yang paling banyak mempunyai kandidat perempuan dalam pemilukada baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota sepanjang tahun 2010.

Kajian tentang kandidasi perempuan dalam pemilukada ini mengeksplorasi tiga hal. *Pertama*, mendeskripsikan kemunculan kandidat perempuan dengan mengkhhususkan pada motivasi kandidat perempuan untuk maju dalam pemilukada di kabupaten. *Kedua*, mengeksplorasi proses bagaimana seseorang akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi kandidat, baik lewat jalur perseorangan maupun jalur partai politik. *Ke tiga*, mengeksplorasi konteks lokal dalam kandidasi perempuan di pemilukada. Kajian ini memotret ketiga hal di atas dan berdasarkan potret tersebut mengajukan rekomendasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemilu/pemilukada baik dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat sipil.

Buku yang kami hadirkan di depan Bapak/Ibu ini adalah salah satu upaya Kemitraan untuk mendiseminasi hasil kajian tersebut kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas sehingga apa yang dihasilkan melalui kajian tersebut dapat menjadi *concern* bagi banyak pihak demi terwujudnya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik terutama dalam upaya mempromosikan peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia.

Kehadiran buku ini tidak lepas dari support banyak pihak yakni AusAID yang memberikan support pendanaan secara penuh, Tim Peneliti dari Departemen Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga, Rekan-rekan di LSM Swara Parangpuan Sulawesi Utara, dan juga para peserta diskusi terbatas yang diselenggarakan di Manado dan Surabaya yang tidak dapat kami sebutkan satu-per-satu. Kemitraan mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang kami sebutkan diatas.

Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca, kami menyadari penelitian ini masih banyak kekurangannya sehingga masukan dan saran membangun dari Bapak/Ibu sangat kami harapkan untuk perbaikan penelitian kami dimasa mendatang. Kami sangat berharap, kajian ini dapat membantu meningkatkan peran perempuan yang sangat krusial bagi suksesnya demokrasi di Indonesia.

Jakarta, 12 Januari 2011

Wicaksono Sarosa

Direktur Eksekutif Kemitraan

KATA PENGANTAR

Tim Peneliti

Maraknya perempuan “*run for office*” dalam pemilukada di Indonesia merupakan fenomena unik. Hadirnya sejumlah perempuan kandidat bahkan keberhasilan perempuan menjadi kepala daerah bisa dimaknai sebagai meluruhnya tatanan patriarki (*the end of patriarchy*) dan sebagai penanda terjadinya transformasi politik di tingkat lokal. Perubahan-perubahan institusional dalam sistem pemilu, kepartaian, hingga moderasi diskursus politik perempuan membuka struktur kesempatan dan proses politik yang lebih ramah bagi perempuan untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik.

Namun demikian, penting juga kiranya untuk menelaah lebih dalam apakah kehadiran perempuan dalam kandidasi mampu merebut ruang pengakuan politik terhadap perempuan? Apakah mereka dapat memuluskan agenda pengarusutamaan gender dan mengakhirinya praktek-praktek ketidakadilan akibat struktur-struktur patriarki di masyarakat? Selain itu, apakah perubahan-perubahan institusional telah membuka akses lebih luas sekaligus memotivasi perempuan untuk eksis di ruang publik dan kemudian memperjuangkan keadilan gender? Pertanyaan obsesif tersebut dicoba dijawab melalui penelitian “Perempuan Dalam Pemilukada 2010: Kajian Tentang Kandidasi Perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara”. Penelitian ini mengambil lokasi di sembilan kabupaten yang berada di wilayah Jatim diantaranya di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten, Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kediri dan di wilayah Sulawesi Utara yaitu di Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Secara keseluruhan buku ini tersusun ke dalam 7 bab. Pada bab pertama memuat latar belakang perlunya dilakukan penelitian kandidasi perempuan ini. Bab kedua berisikan perspektif yang digunakan untuk menjelaskan problema dan temuan-temuan penelitian. Bab ketiga, memuat tentang bagaimana cara memperoleh jawaban atas problema tersebut atau metode penelitian. Bab keempat berisikan profil kandidat dan proses kandidasi di wilayah Jawa Timur yang di dalamnya dideskripsikan motif kandidat, modal sosial, ekonomi dan politik kandidat, proses menjadi kandidat. Bab kelima berisikan profil kandidat dan proses kandidasi di wilayah Sulawesi Utara yang di dalamnya dideskripsikan motif kandidat, modal sosial, ekonomi dan politik kandidat, proses menjadi kandidat. Pada bab keenam berisikan analisis tentang kandidasi perempuan dalam pemilu/kada dari mulai motif dan prosesnya. Bab ketujuh memuat kesimpulan, implikasi teoritik dan rekomendasi dari hasil penelitian.

Penelitian ini bisa terselenggara atas kerjasama Partnership/Yayasan Kemitraan Jakarta, AusAID dengan pihak Departemen Politik, FISIP Universitas Airlangga, khususnya dalam hal pendanaan dan masukan-masukan substansialnya. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Dekan FISIP Unair yang telah memfasilitasi peneliti, para mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unair yang telah membantu di lapangan, dan kepada Suara Parangpuan di Sulut yang telah memberikan akses pertemuan dengan para narasumber di Sulut dan membantu sebagai tenaga lapangan selama berlangsungnya penelitian; para narasumber utama dan tambahan yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan mereka untuk memberikan informasi kepada peneliti.

Tak lupa peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada para politisi, anggota NGO, anggota KPUD, anggota legislatif dan para akademisi yang telah memberikan masukan-masukan dalam pertemuan ahli dan



konsultasi publik untuk penyempurnaan penelitian ini. Acapkali nilai bantuan ini tidak diakui atau tidak dihargai pada saat itu, baik oleh orang yang memberikan dan menerima. Namun peneliti menyadari bahwa ucapan sedalam-dalamnya memang sudah sepatasnya ditujukan kepada mereka atas sumbang saran dan kritiknya.

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberi manfaat dan memberikan inspirasi bagi para perempuan yang ingin mewujudkan ambisi personalnya menjadi ambisi progresif melalui kandidasi di waktu pemilukada mendatang. Bagi para pembelajar politik baik mereka yang berasal dari akademisi, politisi, perempuan penggiat perempuan, mahasiswa, kaum profesional, pemimpin partai diharapkan dengan buku ini akan lebih mampu mengembangkan wawasan dan perspektif gender dalam melihat kandidasi perempuan.

Bagaimanapun juga peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, “tak ada gading yang tak retak”, sebuah filosofi yang mengajarkan kerendahan hati peneliti untuk senantiasa menerima kritik dan saran atas buku ini.

Surabaya, Desember 2010

Tim Peneliti



Daftar Isi

	Tim Peneliti	iii
	Sekapur Sirih	iv
	Kata Pengantar Direktur Eksekutif Kemitraan	vi
	Kata Pengantar Tim Peneliti	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	10
	C. Tujuan Penelitian	13
	D. Signifikansi Penelitian	14
BAB II	LANDASAN TEORI	15
BAB III	METODE PENELITIAN	19
	A. Penelitian Eksploratif-Kualitatif	19
	B. Desain Penelitian	20
	C. Unit Analisa	21
	D. Menyeleksi Perempuan Kandidat Sebagai Subyek Penelitian	21
	E. Cara Pengumpulan Data	25
	F. Data Yang Dibutuhkan	29
	G. Instrumen Penelitian	30
	H. Lokasi Penelitian	33
	I. Cara Menganalisa Data	35

BAB IV	PROFIL PEREMPUAN KANDIDAT DAN PROSES KANDIDASI DI JAWA TIMUR	37
A.	KARTIKA HIDAYATI	39
A.1.	Profil Kandidat	39
A.1.1.	Biografi	39
A.1.2.	Motivasi Kandidat	40
A.1.3.	Modal Sosial	43
A.1.4.	Modal Politik	45
A.2.	Proses Kandidasi	47
A.2.1.	Persiapan Kandidasi dan Partai Pengusung	47
A.2.2.	Kandidat dan Partai Pengusung	48
A.2.3.	Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu	49
A.2.4.	Kandidat dan Institusi Sosial	50
B.	EMY SUSANTI HENDRARSO	50
B.1.	Profil Kandidat	50
B.1.1.	Biografi	50
B.1.2.	Motivasi Kandidat	52
B.1.3.	Modal Sosial	56
B.1.4.	Modal Politik	58
B.2.	Proses Kandidasi	59
B.2.1.	Persiapan Kandidasi	59
B.2.2.	Kandidat dan Partai Pengusung	63
B.2.3.	Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu	64
B.2.4.	Kandidat dan Institusi Sosial	66

C. YUNIWATI TERYANA	67
C.1. Profil Kandidat	67
C.1.1. Biografi	67
C.1.2. Motivasi Kandidat	68
C.1.3. Modal Sosial	70
C.1.4. Modal Politik	72
C.2. Proses Kandidasi	72
C.2.1. Persiapan Kandidasi	72
C.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung	74
C.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu	76
C.2.4. Kandidat dan Institusi Sosial lainnya	76
D. HJ. EMILIA CONTESSA	77
D.1. Profil Kandidat	77
D.1.1. Biografi	77
D.1.2. Motivasi Kandidat	78
D.1.3. Modal Sosial	80
D.1.4. Modal Politik	82
D.2. Proses Kandidasi	84
D.2.1. Persiapan Kandidasi	84
D.2.2. Kandidat Dan Partai Pengusung	89
D.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu	90
E. HJ. NURLAILA	92
E.1. Profil Kandidat	92
E.1.1. Biografi	92
E.1.2. Motivasi Kandidat	93
E.1.3. Modal Sosial	96
E.1.4. Modal Politik	97

E.2.	Proses Kandidasi	98
E.2.1.	Persiapan Kandidasi	98
E.2.2.	Kandidat dan Partai Pengusung	99
E.2.3.	Kandidat dan Institusi Sosial	100
F.	HARYANTI	101
F.1.	Profil Kandidat	101
F.1.1.	Biografi	101
F.1.2.	Motivasi Kandidat	103
F.1.3.	Modal Sosial	106
F.1.4.	Modal Politik	107
F.2.	Proses Kandidasi	109
F.2.1.	Persiapan Kandidasi dan Partai Pengusung	109
F.2.2.	Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu	110
F.2.3.	Kandidat Dan Organisasi Sosial	111
G.	TRI RISMALARINI	111
G.1.	Profil Kandidat	111
G.1.1.	Biografi	111
G.1.2.	Motivasi Kandidat	114
G.1.3.	Modal Sosial	118
G.1.4.	Modal Politik	121
G.2.	Proses Kandidasi	121
G.2.1.	Persiapan Kandidasi	121
G.2.2.	Kandidat dan Partai Pengusung	126



BAB V	PROFIL DAN PROSES KANDIDASI PEREMPUAN KANDIDAT DI SULAWESI UTARA	129
A.	NETTY AGNES PANTOW	130
A.1.	Profil Kandidat	130
A.1.1.	Biografi	130
A.1.2.	Motivasi Kandidat	133
A.1.3.	Modal Sosial	134
A.1.4.	Modal Politik	135
A.2.	Proses Kandidasi	135
A.2.1.	Persiapan Kandidasi	135
A.2.2.	Kandidat dan Partai Pengusung	137
A.2.3.	Kandidat dan Penyelenggara Pemilu	138
A.2.4.	Kandidat dan Institusi Sosial	138
B.	INGGRID SONDAKH	139
B.1.	Profil Kandidat	139
B.1.1.	Biografi	139
B.1.2.	Motivasi Kandidat	140
B.1.3.	Modal Sosial	141
B.1.4.	Modal Politik	141
B.2.	Proses Kandidasi	142
B.2.1.	Persiapan Kandidasi	142
B.2.2.	Kandidat dan Partai Pengusung	143
B.2.3.	Kandidat dan Institusi Sosial	144
B.2.3.	Kandidat Dan Penyelenggara Pemilu	144
C.	SHINTIA PANAMBUNAN	144
C.1.	Profil Kandidat	144
C.1.1.	Biografi	144
C.1.2.	Motivasi Kandidat	145
C.1.3.	Modal Sosial	148
C.1.4.	Modal Politik	149
C.2.	Proses Kandidasi	150
C.2.1.	Persiapan Kandidasi	150
C.2.2.	Kandidat Dan Jalur Perseorangan	154
C.2.3.	Kandidat dan Institusi Sosial	154



D.	FRANSISCA MAGDALENA TUWAIDAN	156
D.1.	Profil Kandidat	156
D.1.1.	Biografi	156
D.1.2.	Motivasi Kandidat	157
D.1.3.	Modal Sosial	158
D.1.4.	Modal Politik	162
D.2.	Proses Kandidasi	164
D.2.1.	Persiapan Kandidasi	164
D.2.2.	Kandidat dan Partai Pengusung	168
D.2.3.	Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu	172
D.2.4.	Kandidat dan Institusi Sosial	172
E.	YULISA BARAMULI	172
E.1.	Profil Kandidat	172
E.1.1.	Biografi	172
E.1.2.	Motivasi Kandidat	173
E.1.3.	Modal Sosial	176
E.1.4.	Modal Politik	176
E.2.	Proses Kandidasi	177
E.2.1.	Persiapan Kandidasi	177
E.2.2.	Kandidat dan Partai Pengusung	178
E.2.3.	Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu	181
F.	LINEKE SYENNIE WATOELANGKOW	183
F.1.	Profil Kandidat	183
F.1.1.	Biografi	183
F.1.2.	Motivasi Kandidat	184
F.1.3.	Modal Sosial	185
F.1.4.	Modal Politik	186
F.2.	Proses Kandidasi	188
F.2.1.	Persiapan Kandidasi	188
F.2.2.	Kandidat dan Partai Pengusung	188
F.2.3.	Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu	193

G. MEITY OCHOTAN	194
G.1. Profil Kandidat	194
G.1.1. Biografi	194
G.1.2. Motivasi Kandidat	196
G.1.3. Modal Sosial	196
G.1.4. Modal Politik	197
G.2. Proses Kandidasi	198
G.2.1. Persiapan Kandidasi	198
G.1.2. Kandidat dan Partai Pengusung	202
G.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara KPU	204
G.2.4. Kandidat Dan Institusi Sosial	205
H. DYANE MERUKH	205
H.1. Profil Kandidat	205
H.1.1. Biografi	205
H.1.2. Motivasi Kandidat	207
H.1.3. Modal Sosial	209
H.1.4. Modal Politik	211
H.2. Proses Kandidasi	212
H.2.1. Persiapan Kandidasi	212
H.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung	219
H.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara KPU	222
I. MERLY BUDIMAN	222
I.1. Profil Kandidat	222
I.1.1. Biografi	222
I.1.2. Motivasi Kandidat	226
I.1.3. Modal Sosial	227
I.1.4. Modal politik	229
I.2. Proses Kandidasi	230
I.2.1. Persiapan Kandidasi	230
I.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung	236
J. CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU	238
J.1. Profil Kandidat	238
J.1.1. Biografi	238
J.1.2. Motivasi Kandidat	239
J.1.3. Modal Sosial	240
J.1.4. Modal Politik	241

J.2.	Proses Kandidasi	245
J.2.1.	Persiapan Kandidasi	245
J.2.2.	Kandidat dan Partai Pengusung	250
J.2.3.	Kandidat dan Institusi Sosial	253
K.	KARTINI SIMBAR	256
K.1.	Profil Kandidat	256
K.1.1.	Biografi	256
K.1.2.	Motivasi Kandidat	258
K.1.3.	Modal Sosial	260
K.1.4.	Modal Politik	262
K.2.	Proses Kandidasi	262
K.2.1.	Persiapan Kandidasi	262
K.2.2.	Kandidat Dan Partai Pengusung	266
L.	SOELTJE RAMBI	267
L.1.	Profil Kandidat	267
L.1.1.	Biografi	267
L.1.2.	Motivasi Kandidat	268
L.1.3.	Modal Sosial	270
L.2.	Proses Kandidasi	271
L.2.1.	Persiapan Untuk Kandidasi	271
L.2.2.	Kandidat dan Pasangan	274
M.	FELLY ESTELITA RUNTUWENE	275
M.1.	Profil Kandidat	275
M.1.1.	Biografi	275
M.1.2.	Motivasi Kandidat	275
M.1.3.	Modal Sosial	276
M.1.4.	Modal Politik	277
M.2.	Proses Kandidasi	279
M.2.1.	Persiapan Kandidasi	279
M.2.2.	Kandidat dan Partai Pengusung	283
M.2.3.	Kandidat Dan Lembaga Penyelenggara Pemilu	284
M.2.4.	Kandidat Dan Institusi Sosial	285

BAB VI KANDIDASI PEREMPUAN DALAM KEPOLITIKAN LOKAL 287

A. Motivasi Kandidat	291
A.1. Ambisi Personal	292
A.2. Motivasi Idiologis.	300
A.3. Pengasuhan Politik	307
A.4. Pulangnya Putera Daerah	310
A.5. Dorongan Eksternal (lingkaran dalam dan luar kandidat)	311
B. Proses Kandidasi	316
B.1. Relasi Perempuan Kandidat dengan Pasangan	318
B.2. Relasi Uang dan Kekuasaan	322
B.3. Relasi Partai Politik dan Kandidat	325
B.4. Relasi Tim Sukses dan Perempuan Kandidat	330
B.5. Relasi Perempuan Kandidat dengan Organisasi Masyarakat.	337
B.6. Relasi Perempuan Kandidat dengan KPU	333
C. Struktur Peluang Politik Perempuan Dalam Konteks Lokal	334

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 341

A. Kesimpulan	341
A.1. Siapa Mereka?	342
A.2. Apa Motivasi Maju Dalam Kandidasi?	343
A.3. Bagaimana Dinamik Kandidasi?	345
B. Implikasi Teoritik	349
C. Rekomendasi	352

DAFTAR PUSTAKA 355



TABEL

Tabel 1	Kandidat Perempuan dalam Pemilu di Jatim dan Sulut (2010)	7
Tabel 2	Nama Narasumber Penelitian	24
Tabel 3	Materi Pertanyaan Wawancara Mendalam	30

DIAGRAM

Diagram 1. Profesi Perempuan Kandidat	295
Diagram 2. Pengalaman Perempuan di Pemilu	297
Diagram 3. Perempuan Kandidat Dan Incumbent	298
Diagram 4. Pengalaman Politik Perempuan Kandidat	299
Diagram 5. Pendidikan Politik Perempuan Kandidat	309
Diagram 6. Keterikatan Daerah	310
Diagram 7. Relasi Perempuan Kandidat dengan Pengurus Parpol	316
Diagram 8. Posisi Perempuan Sebagai Kandidat	317
Diagram 9. Profesi Pasangan Kandidat	319
Diagram 10. Pasangan Kandidat	319
Diagram 11. Pola Pasangan	320
Diagram 12. Prosedur Kandidasi	321

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran sosok perempuan dalam panggung kontestasi politik Indonesia, baik pada pemilihan umum (pemilu) nasional maupun pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di daerah-daerah, kian tampak nyata. Kehadiran sosok perempuan itu tak bisa disangkal dan dipungkiri telah ikut meramaikan dan mewarnai dinamika politik. Di daerah-daerah di mana pemilukada berlangsung sejumlah nama dan gambar tokoh perempuan muncul terpampang di ruang-ruang publik: disosialisasikan! Mereka menawarkan diri dan/atau ditawarkan sebagai alternatif pemimpin pemerintahan, berusaha memberi dan menumbuhkan harapan, dan tidak jarang memancing serta menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan. Di antara sosok-sosok yang tampil ada yang sekadar meramaikan sampai pada tahapan nominasi, ada yang berhasil lanjut ke tahap kandidasi, bahkan ada yang telah berhasil memenangi kontestasi.

Kehadiran sejumlah sosok perempuan dalam kontestasi politik di daerah-daerah dapat dikatakan sebagai fenomena baru, seiring dengan arus demokratisasi yang kian menguat hingga ke daerah-daerah. Boleh jadi fenomena ini merupakan kecenderungan yang akan terus menguat, sebagai buah dari terus menguatnya gerakan dan tuntutan, serta meluasnya kesadaran tentang kesetaraan gender. Ruang dan jabatan politik kian terbuka, tidak boleh lagi ditutup-tutupi, tidak boleh lagi diperuntukkan eksklusif bagi laki-laki, dan tidak boleh ditabukan bagi perempuan. Perempuan berhak dan berpotensi memberikan kontribusi di arena politik. Namun demikian, tetap saja

fenomena makin banyaknya sosok perempuan dalam kontestasi politik di daerah telah memancing diskusi, perdebatan, dan tak jarang masih menyisakan keraguan, khususnya yang terkait dengan kapasitas kontributif perempuan dalam memajukan demokrasi, mengendalikan dinamika politik, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tampilnya sosok politisi perempuan baik dalam politik lokal maupun kontestasi pemilu di Indonesia ini bukanlah fenomena yang unik. Seperti diutarakan oleh Manuel Castells (1997, 134-138) dalam *The Power of Identity* bahwa transformasi politik dunia menjelang abad ke-21 salah satunya ditandai oleh fenomena runtuhnya tatanan patriarki (*the end of patriarchy*) di berbagai belahan dunia. Keruntuhan patriarki disini bukan semata-mata dalam pengertian tampilnya perempuan di wilayah publik mengimbangi dominasi laki-laki baik dalam jumlah maupun kapasitas, namun secara mendasar lebih mengarah pada perubahan fundamental formasi sosial politik dan budaya baik dalam ranah privat maupun publik yang menempatkan dominasi kaum laki-laki dalam pembagian kerja dan peran. Dalam konteks ini maka ranah politik yang selama ini dimaknai sebagai dunia laki-laki, baik dalam pengertian dipenuhi oleh aktifitas kaum laki-laki, maupun dipengaruhi oleh karakter maskulinitas, mengalami transformasi besar-besaran yang tidak saja menempatkan hadirnya kaum perempuan namun juga tampilnya diskursus feminis dalam arena politik.

Kenapa perempuan perlu masuk politik? Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan sendiri karena pengalaman hidup dan kondisi biologisnya. Perempuan terkait erat dengan persoalan-persoalan penghidupan, pencarian nafkah, pemenuhan kebutuhan anak, persoalan seksualitas dan kesehatan reproduksi; dan banyak hal-hal



lainnya yang sering dianggap sebagai “masalah sehari-hari yang tidak penting”. Laki-laki sering memaknai politik hanya untuk memenuhi hal-hal yang kolosal, pembangunan infrastruktur, pertahanan negara, perluasan ekspansi dan eksploitasi ekonomi dan larut dalam pertengkarannya serta persaingan politik; sehingga melupakan hal-hal yang bersifat kesejahteraan dan kemanusiaan. Indonesia sendiri masih memiliki angka kematian ibu yang tinggi (307/100.000) karena persoalan kesehatan ibu hamil dan melahirkan sering dilupakan oleh para politisi laki-laki. Dengan jumlah keterwakilan yang memadai di lembaga eksekutif dan legislatif, diharapkan perempuan mampu memberi perhatian lebih pada permasalahan perempuan yang kerap dilupakan laki-laki. Studi yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan adanya kaitan erat antara keterwakilan perempuan di parlemen dengan penurunan kasus korupsi. Angka korupsi di negara-negara yang keterwakilan perempuannya tinggi, dalam legislatif maupun eksekutif, sangat kecil. Negara-negara Skandinavia dengan keterwakilan perempuan lebih dari 40%, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat lebih baik serta diiringi pemerintahan yang lebih efisien.

Di Indonesia harapan serupa muncul, yaitu bagaimana perempuan bisa membawa perubahan dalam peta serta diskursus politik yang ada. Karena itu munculnya sejumlah perempuan kandidat dalam pemilu-kada-pemilu-kada di Tanah Air mendapat perhatian khusus. Perhatian serta perdebatan yang muncul menyentuh beragam isu, yang spektrumnya mencakup soal-soal ‘keadilan sosial’ hingga yang berdimensi substantif dan kompetensi kepemimpinannya. Berbagai perdebatan, yang sebagian direkam dalam liputan media massa, barangkali sekadar fenomena permukaan yang mengekspresikan betapa kompleksnya kaitan antarfaktor dan variabel yang mempengaruhi proses pemrosesan keterlibatan perempuan dalam politik dan memosisikannya setara dengan

laki-laki, yang sebelumnya telah sangat lama mendominasi dan menjadikan politik sebagai domain yang terkesan androsentris, macho, dan maskulin.

Secara normatif dan empiris perlu terus dikaji, seberapa jauh upaya perekayasaan institusi-institusi politik demokratis – seperti pencantuman kuota perempuan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang kepartaian – telah berhasil membuka akses politik bagi perempuan. Seberapa jauhkah telah mengubah suasana dan proses politik ke arah makin ramah terhadap permasalahan, peran, dan kontribusi perempuan. Perlu lebih dicermati, apakah kebijakan formal telah mulai meluruskan kendala-kendala struktural dan kultural bagi peningkatan peran perempuan dalam politik. Sebaliknya, apakah perempuan sendiri telah makin banyak yang tergugah, termotivasi, terpenggil, berambisi, dan berhasil meningkatkan keterampilan politik dan jejaring politik, serta membangun dan memobilisasi basis dukungan politik, sehingga merasa telah makin siap berkompetisi dengan politisi laki-laki? Benarkah akseptabilitas terhadap perempuan dalam politik telah meningkat, atau hanya sekadar euforia, bahkan “kegenitan” atau “jebakan politik”? Apakah aksesibilitas perempuan dalam pemilukada berelasi signifikan dengan keterwakilan perempuan?

Menurut kajian Dahlerup (2006), keterwakilan perempuan dalam politik tak bisa dilepaskan kaitannya dengan empat jenis perubahan.

Pertama, perubahan institusional/prosedural; yang merujuk pada tindakan-tindakan untuk mengubah sifat institusi sehingga menjadi lebih “ramah perempuan”. Perubahan-perubahan kultural, seperti sensitivitas yang besar terhadap gender harus disertai pula oleh perubahan-perubahan prosedural yang dirancang untuk menjembatani perempuan dalam perpolitikan. Peningkatan

sensitivitas gender bukanlah semata-mata persoalan melibatkan perempuan, tetapi juga sensitivitas bahwa perempuan sebagai katagori universal yang mempunyai pengaruh desisif terhadap kehidupan perempuan, sama seperti apa yang mereka lakukan terhadap kehidupan laki-laki.

Kedua, perubahan representasi yang melibatkan tindakan-tindakan khusus untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan. Perubahan ini menyangkut dorongan terhadap kandidat perempuan, penggunaan secara sadar tentang kapasitas model peran, memajukan legislasi kesetaraan gender, dan perubahan-perubahan yang layak dalam undang-undang pemilihan dan kampanye pemilu.

Ketiga, dampak/pengaruh terhadap keluaran (*output*) terutama merujuk pada "feminisasi" legislasi dan keluaran kebijakan lainnya. Seberapa jauh undang-undang dan kebijakan dibuat atau dipengaruhi oleh kehendak dan kepentingan perempuan. Perubahan ini mencakup pecantuman isu-isu perempuan dalam agenda dan menjamin agar seluruh proses legislasi selalu "ramah perempuan" dan responsif gender.

Keempat, perubahan diskursus yang melibatkan perubahan-perubahan dikursus politik bahwa perempuan berpolitik adalah sebuah konsep yang wajar sebagaimana laki-laki berpolitik. Dari empat aspek tersebut, perubahan institusional dan tindakan khusus (kuota) sebenarnya telah dilakukan, yang antara lain ditandai adanya adopsi dan implementasi kebijakan 30% keterwakilan perempuan di dalam nominasi legislatif, dan saat ini menghasilkan sekitar 18% anggota parlemen perempuan. Tetapi, di beberapa kepengurusan DPP dan juga di DPD/DPW (Pasal 20, UU No. 2/2008) kuota perempuan memang belum sepenuhnya terpenuhi.

Sementara itu, aspek yang terkait dengan perubahan diskursus politik perihal kewajaran kehadiran perempuan dalam kandidasi politik nasional maupun lokal, juga mulai mengedepan. Setidaknya, hal ini diperkuat oleh temuan penelitian terbatas yang dilakukan Kompas Edisi Jawa Timur menjelang Pemilu Kota Surabaya 2010. Secara khusus, terungkap dalam penelitian itu betapa sebagian besar pemilih dalam beragam segmen publik tak membedakan antara kandidat perempuan dengan kandidat laki-laki.

Salah satu hal yang sekilas tampak cukup fenomenal dari serangkaian Pemilu 2010 ini adalah meningkatnya keberadaan kandidat perempuan di berbagai daerah. Dari 18 kabupaten/kota di Jawa Timur yang mengagendakan pemilu 2010, 11 sosok perempuan ikut dalam persaingan politik, di antaranya di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan di Sulawesi Utara, kehadiran jumlah perempuan cukup mengejutkan di antaranya di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bahkan ditingkat pemilu Propinsi Sulawesi Utara. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel yang menggambarkan sejumlah nama perempuan yang maju dalam pemilu di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Utara.

Tabel 1
Kandidat Perempuan dalam Pemilu di Jatim dan Sulut (2010)

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Pasangan Kandidat		Partai Pengusung
		Gubernur/ Bupati/ Walikota	Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota	
Jawa Timur	Kota Surabaya	Tri Rismaharini	Bambang D.H.	PDIP
	Kabupaten Kediri	Haryanti	Maskuri	PDI – P, Golkar, PPP, Hanura, PKNU
		Nurlaila	Turmudi Abror	PAN, Gerindra, PKPI, PDP, Patriot, PNI Marhaenisme, PPS, PPI, PPRN
	Kabupaten Sidoarjo	Yuniwati Teryana	H. Sarto	Demokrat
		DR. Emy Susanti Hendrarso	Khulaimi Djunaidi	PAN
	Kabupaten Banyuwangi	Emilia Contessa	Zainuri Ghozali	Gerindra, PAN, Republikan)
	Kabupaten Lamongan	Handoyo	Kartika Hidayati	PDIP
	Kabupaten Ngawi	Hj. Ratih Sanggarwaty, SE –	H. Khoirul Anam Mu'min, Sh, M.Hi	PPP PKB
		M. Rosyidi, Se, MM	Dra. Hj. Siti Amsiyah, M.Pd	Perseorangan
	Kabupaten Mojokerto	Mustafa Kemal Pasya, SE	Dra. Hj. Khoirunnisa, M.Pd	PPP, PBB, PKPB, Patriot, PAN, PKS, PKB
	Kabupaten Ponorogo	Amin	Yuni Widyastuti	Golkar
Kabupaten Sumenep	Azasi Hasan	Dewi Kholifah	PKB	

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Pasangan Kandidat		Partai Pengusung
		Gubernur/ Bupati/ Walikota	Wakil Gubernur/ WakilBupati/ Wakil Walikota	
Wilayah Sulut	Provinsi Sulut	Ely Lasut	Henny Wulur	Partai Gabungan
		Vrijke Runtu	Marlina Moha Siahaan	Golkar
	Kota Tomohon	Linneke Sjennie Watoelangkow,S.Si	Jimmy Wewengkang	Demokrat, PDIP
	Kabupaten Minahasa Utara	Netty Agnes Pantauw	Inggried Sondakh	Golkar
		Piet Lutungan	Sintia Panambunan	Perseorangan
		Sompie Singal	Yulisa Baramuli	Demokrat,PKPI, PPD
		Francisca Tuwaidan	Jimmy Kumentas	PDIP dan partai non parlemen
	Kabupaten Minahasa Selatan	Prof. Lombok	Kartini Simbar	PDP,PNBK, PKPB, HANURA
		Christiany Eugenia Tetty Paruntu	Sonny Tandayu	Golkar
		Gemmy Kawatu	Felly Runtuwene	PDS,Barnas, Partai Indonesia Sejahtera, PPRN)
		Andre	Soultje Rambi	Perseorangan
	Kabupaten Bolaang MONGONDOW Timur.	Sudibyso Mamonto	Dyane A Merukh	PDIP, Hanura
		Sehan Mokoapa Mokoagow	Meity Ochotan	Golkar
		Sunardi Sumantha	Merly Budiman	Demokrat
	Kota Manado	Yongki Limen	Marieta Kuntag	Partai Gabungan
		Djeli Wisye Massie	Harry Pontoh	Perseorangan

Sumber: Wawancara, dokumen dan diolah, 2010

Keterangan: Yang dicetak miring dan tebal adalah kandidat perempuan

Sebagian ahli menjelaskan peningkatan keberadaan perempuan dalam proses kandidasi kepala daerah/wakil kepala daerah itu berjalan beriringan dengan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Sedangkan sebagian lainnya menjelaskan bahwa ini mencerminkan posisi perempuan sebagai instrumen kepentingan kekuasaan laki-laki, karena dunia politik dipersepsi sebagai dunia laki-laki. Terlepas dari pandangan yang berbeda diantara para ahli perihal kandidasi perempuan ini, ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa fenomena kandidasi perempuan dalam pemilu-kada itu menarik untuk diteliti. Sejumlah pertanyaan dapat dikemukakan dalam isu kandidasi perempuan tersebut. Semisal, apakah munculnya peningkatan jumlah kandidat perempuan dalam pemilu-kada mengindikasikan adanya keterbukaan partai politik terhadap perempuan? Apakah perempuan sebagai pemimpin politik lebih bisa diterima? Apakah fenomena ini hanya sebuah gejala temporer belaka? Apakah kehadiran perempuan dalam kandidasi pemilu-kada mencerminkan diadopsinya *gender mainstreaming* di Indonesia? Apakah meningkatnya jumlah bakal calon perempuan dalam pemilu-kada sudah mencerminkan kesetaraan gender sebagaimana yang tercantum dalam maklumat MDGs? Apa yang diperlukan agar munculnya kandidat perempuan dalam pemilu-kada menjadi kecenderungan yang terus menguat, bahkan makin merata ke semua daerah di Indonesia?

Berpijak pada pertanyaan tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi proses kandidasi perempuan di dua wilayah administratif yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Utara, karena kedua wilayah provinsi ini teratas dalam jumlah kandidasi perempuan untuk Pemilu-kada 2010 di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Memilih untuk maju menjadi kandidat dalam pemiluakada merupakan keputusan penting dan penuh pertimbangan. Setiap kandidat tidak hanya menghitung kapasitas diri tetapi juga viabilitas di luar dirinya yang dapat mempengaruhi upaya untuk memenangkan pemiluakada. Karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari tahu bagaimana kandidat perempuan memenangkan pemiluakada, maka pelacakan atas motivasi-motivasi kandidat dan dukungan-dukungan yang memperkuat –atau melemahkan– motif kandidat perempuan untuk bertanding dalam pemiluakada (proses kandidasi) menjadi topik pembahasan utama.

Dalam penelitian ini motivasi dan proses kandidasi perempuan dalam pemiluakada haruslah dibaca saling mengandaikan atau tidak dapat dibaca secara terpisah. Apapun motivasi kandidat untuk maju dalam pemiluakada hanya mungkin teraktualisasi melalui keberhasilannya dalam mengelola proses kandidasi. Sementara mengelola proses kandidasi mencakup dua dimensi yang saling berlawanan, yaitu dukungan (*supports*) dan hambatan (*obstacles*). Secara skematik hubungan antara variabel motivasi, proses kandidasi, dan dukungan dan oposisi dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema Hubungan Variabel

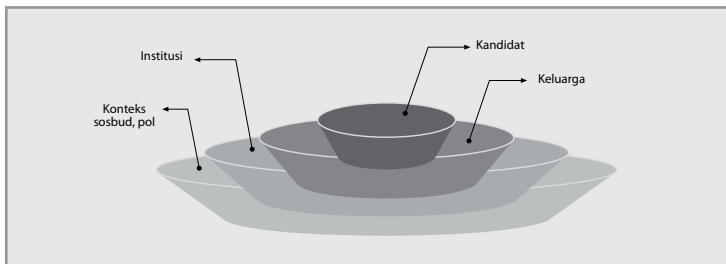


Skematika di atas menyiratkan bahwa dukungan dan hambatan pada proses kandidasi perempuan dalam pemiluakada merupakan

ruang yang dapat dipergunakan oleh kandidat perempuan untuk mengaktualisasi motivasinya. Ruang ini dapat juga diterjemahkan sebagai ruang kesempatan politik kandidat perempuan dalam pemilukada. Bagaimana mengisi ruang kesempatan politik dalam proses kandidasi adalah pertanyaan metodis yang akan digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini, dukungan dan hambatan dapat berupa: keuangan, popularitas, massa pemilih, dan wacana. Jika dilihat berdasarkan aktor/institusi variabel-variabel motivasi dan dukungan/hambatan dalam proses kandidasi perempuan pada pemilukada dapat dianalogikan seperti spiral (lihat gambar 1). Kandidat dengan segala motivasi serta dukungan/hambatan berada pada pusat spiral. Pada lapisan kedua terdapat motivasi serta dukungan/hambatan keluarga. Lapisan ketiga adalah motivasi serta dukungan/hambatan dari institusi. Lapisan terakhir adalah motivasi serta dukungan/hambatan sosial budaya.

Gambar.1. Spiral Motivasi dan Dukungan/Hambatan



Dari problema di atas, penelitian ini berfokus pada lima pertanyaan dasar.

Pertama, mempertanyakan motif politik kandidat dalam pemilukada. Pertanyaan ini mencakup identifikasi inisiasi politik perempuan

dalam berkiprah sebagai kandidat dalam pemilu, kapan motif tersebut muncul dan bagaimana proses kemunculannya, apa saja faktor yang menguatkan atau sebaliknya melemahkan motif tersebut, dan bagaimana keputusan akhirnya ditentukan, siapa saja terlibat pengambilan keputusan dalam kandidasi, apa saja yang dipertimbangkan, bagaimana respons keluarga inti saat mengetahui motif dan pencalonan itu.

Kedua, mempertanyakan keterkaitan isu kesetaraan gender dalam penominasian perempuan. Pertanyaan ini akan memusatkan pada isu apakah gender menjadi landasan bagi calon perempuan dalam proses kandidasi atau sebaliknya isu gender dimanipulasi untuk penominasian perempuan, apakah calon perempuan maju dalam kandidasi karena memiliki kesadaran dan kepentingan gender, apakah isu gender digunakan calon sebagai strategi untuk promosi dan penominasian

Ketiga, mempertanyakan proses kandidasi di partai politik dan jalur perseorangan. Problem kandidasi di Partai politik ini mencakup bagaimana calon melakukan transaksi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada seperti partai, organisasi massa/kemasyarakatan/keagamaan, bagaimana kandidat perempuan dapat menembus petinggi parpol, yang cenderung paternalis, sehingga dinominasikan oleh parpol, faktor-faktor pendukung apa saja yang dapat membuat para petinggi parpol untuk menominasikan kandidat perempuan, bagaimana peran parpol dalam memberikan dukungan terhadap kandidat perempuan yang diusung, apakah secara materiil dan imateriil parpol telah mengerahkan sumber dayanya untuk keperluan kampanye dan kegiatan terkait untuk kandidat perempuan, apakah parpol juga memandang kesempatan kandidat untuk menang lebih tinggi, pilihan strategi seperti apa dalam upaya promosi dan penominasian. Sedangkan pada jalur perseorangan akan

mengeksplorasi seperti apa tahapan calon bisa mendaftarkan diri sebagai kandidat.

Keempat, mempertanyakan dukungan penyelenggara pemilu dan lembaga CSO (*civil society organization*) terhadap kandidat perempuan. Apakah penyelenggara pemilu dan CSO juga menjadi kekuatan pendukung dalam keberhasilan perempuan menominasikan diri sebagai kandidat di pilukada.

Kelima, mempertanyakan konteks politik lokal yang memberikan peluang bagi perempuan muncul sebagai kandidat. Pertanyaan ini akan memusatkan pada identifikasi sejauh mana nilai budaya memberikan peluang munculnya perempuan, apakah kandidasi perempuan menjadi kecenderungan politik saat ini atau kandidasi perempuan dalam pilukada merupakan fenomena pasar.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengeksplorasi motif politik kandidat, proses kandidasi, dukungan lembaga penyelenggara pemilu dan CSO, dan isu kesetaraan gender dalam penominasian, dan konteks politik yang memungkinkan munculnya proses kandidasi perempuan.
2. Mendapatkan gambaran tentang profil politik kandidat, proses kandidasi, peran dan dukungan lembaga penyelenggara pemilu dan CSO, dan isu kesetaraan gender dalam penominasian, dan konteks politik dalam proses kandidasi tersebut.
3. Memaknai kehadiran perempuan dalam pilukada 2010.

D. Signifikansi Penelitian

1. Rekomendasi untuk bahan perbaikan UU Pemilu khususnya yang menyangkut pemilukada dan UU Kepartaian.
2. Rekomendasi implementasi *gender mainstreaming* sebagai pencerminan pelaksanaan MDGs di Indonesia.
3. Rekomendasi strategi perempuan dalam kandidasi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dinamika perkembangan wacana politik feminis sejak tahun 1990-an telah menempatkan interaksi antara agensi perempuan dan institusi negara pada posisi yang signifikan. Setelah pada era sebelumnya gerakan perempuan memandang institusi negara secara skeptis sebagai institusi yang merawat, mempertahankan dan memelihara dominasi patriarki dalam arena politik, maka sejak era 1990-an terjadi pergeseran signifikan saat munculnya kesadaran politik untuk melakukan transformasi politik di level institusi negara agar lebih sensitif terhadap kepentingan kaum perempuan dan munculnya kesadaran akan kesetaraan gender diperjuangkan oleh agensi politik yang memperjuangkannya. Sejalan dengan pentingnya merebut ruang pemaknaan dan penguatan kebijakan berbasis kesetaraan gender dilakukan di level institusi negara inilah Barbara Hobson (2003, 64-92) menekankan diskursus politik feminis dalam konteks perjuangan untuk menghadirkan kepedulian (*struggle for recognition*). Politik kepedulian di sini hadir dalam konteks historis, penyebaran diskursus, struktur kesempatan politik yang tersedia, kebijakan dan pelembagaan politik. Pada saat bersamaan interaksi antara peran agensi politik dan kekuasaan dalam konteks politik gender memiliki tujuan untuk memastikan siapakah dan kebijakan seperti apa yang harus diakui dalam konteks bernegara (*who and what gets recognized*). Untuk memahami proses politik kepedulian sebagai agenda politik kesetaraan gender, maka ruang lingkup dari penelitian ini akan melihat bagaimana elit politik perempuan melakukan interaksi dengan gerakan sosial, publik dan partai politik untuk melakukan pembingkaihan gagasan (*framing process*) berbasis

kesetaraan gender yang akan mereka perjuangkan dalam proses kandidasi pada pemilu kepala daerah.

Sebagaimana teori proses pbingkaian isu, David Snow (2004) mengutarakan bahwa perspektif proses pbingkaian (*framing process perspective theory*) berhubungan dengan bagaimana makna yang dihadirkan oleh agensi dalam arena politik tidaklah secara alamiah muncul dan hadir namun pemaknaan tersebut adalah bagian dari proses konstruksi sosial yang muncul dari berbagai pengalaman baik dalam perjumpaan politik dan proses kontestasi dan negosiasi yang dibangun saat agensi politik melakukan interaksi politik baik dalam perjumpaannya dengan kekuatan politik, gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil maupun konstituen. Dalam proses pbingkaian makna, maka makna itu sendiri tampil sebagai bagian dari proses politik yang berjalan secara dinamis.

Dalam konteks keterhubungan antara proses kandidasi politisi perempuan dan gagasan kesetaraan gender, maka secara dinamis teori *framing process* akan dapat membaca bagaimana kandidat politisi perempuan mengkonstruksikan gagasan, ide dan makna yang diperjuangkan dalam proses politik yang dilakukan ketika bertemu dengan kekuatan-kekuatan politik sebagai pendukungnya maupun saat berkontestasi dengan pesaing politiknya. Teori *framing process* dari David Snow ini dapat bertemu dengan teori pbingkaian makna dari Barbara Hobson (2003) dalam konteks perjuangan untuk memperoleh pengakuan (*struggle for recognition*). Menurut Hobson politik kepedulian (*recognition politics*) menempatkan bagaimana interaksi antara peran agensi politik dan kekuasaan dalam konteks siapakah dan apakah yang diakui. Hal ini terkait dengan subyek politik yang seharusnya mendapatkan pengakuan dan isu-isu serta agenda apakah yang seharusnya diakui untuk diperjuangkan dalam arena politik.

Selanjutnya, menggunakan pendekatan teori proses politik dan struktur kesempatan politik (*political process and political opportunity structure theories*) yang beberapa diantaranya dikembangkan oleh Hanspieter Kriesi (2004) dan Douglas Mc Adam (2001) menjadi penting untuk menjelaskan kemunculan perempuan dalam pemilu. Teori ini mencoba untuk memperlihatkan bagaimana aktivitas politik agensi dalam memaknai aktivitas mereka, strategi yang mereka lakukan maupun agenda politik mereka sangat ditentukan oleh kesempatan yang dihadirkan oleh struktur politik baik dalam konteks konfigurasi elit politik maupun kekuatan politik yang ada maupun dinamika kelembagaan politik ditingkat nasional maupun lokal yang dapat menghambat atau memberi kesempatan bagi aktivitas politik yang dilakukan oleh agensi politik. Dalam konteks proses kandidat politik perempuan, maka teori struktur kesempatan politik maupun proses politik ini sangat berkaitan dengan bagaimana pemaknaan agensi politik perempuan terhadap proses politik yang terjadi, agenda politik yang mereka perjuangkan maupun strategi politik yang dikedepankan sangat berhubungan dengan konteks politik dan struktur politik yang terbangun.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perspektif gender sebagai struktur sosial yang digunakan oleh Barbara J. Risman (2004) dalam *Gender as Social Structure: Theory Wrestling with Activism* di *Gender and Society*, Vol. 18, No. 4 (Aug., 2004), halaman 429-450, pengertian tentang gender sebagai struktur sosial dipahami dalam konteks hubungan interaktif antara struktur dan agensi dalam pemahaman teori strukturasi dari Anthony Giddens (1984). Giddens memandang bahwa relasi antara struktur dan agensi tidaklah berlangsung melalui determinasi penuh struktur atas segenap aktivitas dari agensi, namun ketika tindakan agensi memiliki karakter reflektif dan bebas maka relasi antara agensi dan struktur berada dalam hubungan interaktif dan saling membentuk. Struktur sosial

memiliki tendensi untuk membatasi maupun memberdayakan agensi, sementara pada sisi lain tindakan reflektif agensi ikut membentuk struktur sosial yang ada. Memahami relasi gender dalam pengertian struktur sosial adalah melakukan analisis bagaimana hubungan relasi kekuasaan berbasis gender dalam ruang ekonomi, sosial dan politik memberdayakan dan/atau membatasi peran-peran agensi politik (perempuan kandidat) dalam proses politik kontestasi pemilu, serta selanjutnya juga mengkalkulasikan bagaimana inisiatif dan tindakan politik yang dijalankan oleh agensi kandidat memberikan implikasi terhadap relasi gender sebagai struktur sosial politik, terutama pada saat prosesi pemilu dijalankan. Dari berbagai penelitian mengindikasikan bahwa pertimbangan gender (Paul Hermson, 2003) dalam politik pemilu, menentukan inisiasi agensi (perempuan kandidat) untuk memutuskan memasuki arena politik tersebut atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Eksploratif-Kualitatif

Penelitian diawali dengan pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana perempuan maju dalam pemilukada. Peneliti menduga perempuan kandidat pasti memiliki keinginan atau dorongan internal dan eksternal untuk kandidasi; bagaimana mereka sampai diusung oleh partai politik atau maju proses kandidasi yang diikuti perempuan. Akhirnya peneliti memutuskan pendekatan yang memungkinkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada perempuan kandidat, pasangan calon, keluarga calon dan tim sukses. Dan eksplorasi fakta hanya dimungkinkan melalui penelitian kualitatif. Artinya bahwa peneliti memahami perspektif subyek penelitian atau informan, bagaimana subyek penelitian memahami tindakan dan makna dalam konteks sosial mereka.

Dalam mempersepsi realitas secara ontologis peneliti berasumsi bahwa realitas terbentuk secara obyektif dan apa adanya dan berwajah jamak. Sedangkan secara epistemologis, peneliti berasumsi bahwa proses interaksi dengan fenomena yang dipelajari menjadi sangat penting. Oleh sebab itu keterlibatan langsung peneliti mengikuti beberapa kegiatan para kandidat seperti kampanye kandidat baik yang terbuka maupun tertutup, masuk ke dalam kerumunan tim sukses kandidat tertentu, mengikuti debat publik, berbaur dengan beberapa anggota masyarakat, merupakan cara untuk bisa mengumpulkan data secara detail.

Ketika peneliti membangun interaksi dengan para kandidat perempuan, tim sukses dan pasangan kandidat, peneliti menggunakan bahasa personal informan, bahkan menggunakan bahasa-bahasa informal dari informan, misalnya di Sulut istilah bupati sebagai “papan satu” dan wakil bupati sebagai “papan dua” atau di Sidoarjo istilah “W1” untuk kandidat bupati dan “W2” untuk kandidat wakil bupati.

Guna memperoleh data yang lebih kaya, peneliti melakukan pengamatan terhadap baliho-baliho yang terpasang di jalan, misalnya: jargon kampanye, foto-foto kandidat, foto suami yang disertakan oleh kandidat atau gambar pimpinan partai nasional. Tak lupa juga mengamati antusiasme dukungan dari pendukungnya ketika debat publik baik di televisi seperti di Pacific TV Manado atau debat publik yang diselenggarakan KPU Kabupaten, sehingga peneliti mampu menarik simpulan akan besar kecilnya dukungan kandidat dan keterlibatan partai secara emosional kepada calon yang diusung.

Peneliti hanya mengeksplorasi proses kandidasi, artinya proses bagaimana perempuan diusung oleh petinggi parpol atau melalui jalur perseorangan. Penelitian tidak menginvestigasi secara khusus tentang cara-cara pemenangan kandidat yang masuk ke dalam arena strategi pemenangan kandidat, karena menurut hemat peneliti ini adalah sebuah bahasan tersendiri.

B. Desain Penelitian

Oleh karena pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif maka rancangan penelitian lebih terbuka dan relatif tidak terstruktur, dan menghindari konsep dan teori pada tahap awal. Penelitian ini

sejak awal memang lebih banyak difokuskan pada temuan-temuan tertentu, lokalistik dan spesifik sehingga bisa menggambarkan konteks-konteks politik lokal dalam kandidasi perempuan di pemilukada. Dengan demikian teori bukan sebagai landasan pembuktian tertentu, tetapi hanya digunakan sebagai kerangka berpikir saja untuk menjelaskan sebuah fenomena obyektif.

C. Unit Analisa

Guna menjawab problem penelitian, maka peneliti menempatkan aktor politik, proses politik dan konteks lokal sebagai unit yang dianalisa. Aktor politik dianalisa dari aspek profil kandidat yang menyangkut latar belakang, motivasi kandidat, modal sosial, modal politik kandidat dan dukungan keluarga. Proses politik dianalisa untuk menjawab dinamika interaksi antara kandidat (aktor) dengan institusi (Parpol, CSO, KPUD). Konteks Politik lokal dianalisa untuk menjawab apakah konteks lokal telah mendorong dan memungkinkan munculnya keberanian perempuan untuk maju dalam kancah politik yang biasanya diwarnai dengan pertunjukan ketrampilan politik termasuk dengan cara-cara yang paling kasar sekalipun. Dalam kancah ini ditampilkan contoh-contoh penyelenggaraan pemilukada yang paling dramatis, kontroversial dan serta universal kemampuan perempuan mengorganisasi diri untuk maju dalam pemilukada.

D. Menyeleksi Perempuan Kandidat Sebagai Subyek Penelitian

Peneliti memutuskan untuk memilih 20 perempuan yang berhasil diusung oleh parpol atau melalui jalur perseorangan untuk menjadi kandidat baik sebagai kandidat bupati/walikota maupun wakil bupati/

wakil walikota. Jabatan yang hanya bisa diraih melalui pemilihan ini mengharuskan para kandidat untuk melakukan pencarian dukungan dana, kampanye, dan dipilih oleh pendukungnya. Berbagai aktivitas tersebut tidak dialami oleh para pejabat publik yang didapat dari hasil pengangkatan. Peneliti ingin mengetahui mengapa para perempuan bersemangat dan tidak kenal lelah, melakukan perjalanan kampanye dan sanggup menanggung kerasnya kehidupan politik. Dalam memilih perempuan kandidat untuk subyek penelitian peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

Pertama, peneliti sengaja memilih para perempuan yang mampu maju sebagai kandidat karena peneliti berharap mampu mengeksplorasi motif dan kepentingan perempuan untuk mencapai tangga kekuasaan politik. Perempuan yang menjalani proses pemilihan di pemilukada memiliki atribut yang berbeda dengan yang bakal calon. Artinya aspek psikologi mereka yang lolos menjadi kandidat akan berbeda dengan mereka yang tidak lolos. Mereka akan menceritakan motif lebih bersifat spontan, tidak ditutup-tutupi atau tidak menunjukkan kekecewaannya karena tidak lolos. Sehingga bisa dihindari data yang sifatnya hanya permukaan dimana peneliti tidak bisa mendalami lebih jauh. Bahkan peneliti perkirakan, akan susah bagi peneliti untuk menemui bakal kandidat yang gagal menjadi kandidat

Kedua, peneliti memilih perempuan kandidat baik pada posisi bupati dan wakil bupati, karena keduanya membutuhkan energi "perjuangan" bagi kandidat baik modal sosial, politik maupun modal ekonomi untuk meraih kekuasaan.

Pada mulanya kami menyingkirkan prasangka-prasangka karir publik para kandidat tersebut sebelum memasuki arena kandidasi, namun selama wawancara ditemukan bahwa seluruh narasumber berkarir

dalam bidang publik seperti akademisi, birokrat, pengusaha, politisi dan profesional.

Kadang-kadang peneliti menemukan perbedaan yang mencolok di antara ke-20 narasumber, namun kamipun menemukan kemiripan unsur pribadi dan organisasi dalam kandidasi. Dan yang menarik hampir sebagian besar kandidat menyingkirkan penggunaan nama keluarga/suami, dan hanya ada dua narasumber yang menggunakan nama belakang suami/keluarga.

Kecurigaan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sah, sehingga guna menyingkirkan jawaban narasumber yang cenderung ditutupi maka peneliti melakukan *re-check* ke narasumber lain sebagai narasumber tambahan di antaranya pasangan kandidat (laki-laki ataupun perempuan), para petinggi parpol pengusung kandidat, beberapa pimpinan CSO yang menjadi jembatan bagi kandidat dalam kandidasi, beberapa anggota tim sukses, keluarga kandidat dan lembaga penyelenggara pemilu. Di bawah ini tabel yang menunjukkan target narasumber utama dan tambahan.

Tabel 2
Nama Narasumber Penelitian

Kabupaten/ Kota	Narasumber Utama	Narasumber Tambahan		
	Kandidat Bupati/ Wakil Bupati Perempuan	Pasangan Kandidat	Petinggi Parpol/ Tim Sukses	KPUD
Kota Surabaya	<i>Tri Rismaharini.</i>	Bambang D.H.	Wisnu Sakti Buana (Ketua DPC PDIP Surabaya)	Edward Dewaruci
Kabupaten Kediri	<i>Haryanti</i>	Maskuri	PDIP-Golkar	
	<i>Nurlaila</i>	Turmudi Abror	PAN dan Partai Non Parlemen	
Kabupaten Sidoarjo	<i>Yuniwati Teryana</i>	H. Sarto	Slamet Wijaya dan Mashuri (Pengurus DPC Partai Demokrat Sidoarjo)	Bimo Aristyanto
	<i>Emy Susanti Hendrarso</i>	- Menghilang		
Kabupaten Banyuwangi	<i>Emilia Contesa</i>	Zainuri Ghozali	Pengurus Partai Gerindra, PAN	Bambang
Kabupaten Lamongan	<i>Kartika Hidayati</i>	Handoyo	Pengurus DPC PDIP	Dahrul Halim
Kota Tomohon	<i>Linneke Sjennie Watoelangkow,S.Si</i>	Jimmy Wewengkang	Marten M Manoppo (Pengurus Partai Demokrat)	Joudy Sangari
Kabupaten Minahasa Utara	<i>Netty Agnes Pantauw</i>	<i>Inggried Sondakh</i>	Golkar	Doufar
	<i>Sintia Panambunan</i>	Piet Luntungan	Perseorangan	
	<i>Yulisa Baramuli</i>	Sompie Singal	Demokrat,PKPI, PPD	
	<i>Francisca Tuwaidan</i>	Jimmy Kumentas	Ona (Pengurus PAN)	
Kabupaten Minahasa Selatan	<i>Kartini Simbar</i>	Prof. Lombok	Max Rembang	Yurni Sendaouw
	<i>Christiany Eugenia Tetty Paruntu</i>	Sonny Tandayau	Ibu dan ayah Tetty yang kebetulan sebagai Ketua DPD Golkar Sulut.	
	<i>Felly Runtuwene</i>	Gammy Kawatu	PDS,Barnas, Partai Indonesia Sejahtera, PPRN)	
	<i>Soultje S</i>	Andre	Perseorangan	

Kabupaten/ Kota	Narasumber Utama	Narasumber Tambahan		
	Kandidat Bupati/ Wakil Bupati Perempuan	Pasangan Kandidat	Petinggi Parpol/ Tim Sukses	KPUD
Kabupaten Bolang Mongondouw Timur	<i>Dyane A Merukh</i>	Sudibyو Mamonto	Sutarmi (Pengurus Hanura)	Sam Sachrul Mamonto S.Sos.
	<i>Meity Ochotan</i>	Sehan Mokoapa Mokoagow	Sumardiah Modeong(Wakil Ketua Golkar Boltim); Suherni Suarno, ketua tim pemenangan	
	<i>Merly Budimann</i>	Sunardi Sumantha	Haji Ali (Ketua DPC Partai Demokrat Boltim)	

Sumber: Peneliti, 2010

E. Cara Pengumpulan Data

Peneliti sungguh berminat mengetahui bagaimana kandidat terlibat dan berpartisipasi dalam proses politik, sebuah arena yang cenderung maskulin dimana laki-laki selalu menjadi tolok ukurnya. Untuk menjawab problem tersebut ada tiga metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Pertama, wawancara terfokus. Tujuan wawancara ini adalah memberikan basis interpretasi atas temuan data. Wawancara terfokus ini telah memberikan peluang kepada narasumber untuk memberikan definisi subyektif atas situasi yang dihadapi. Wawancara dilakukan dengan para kandidat perempuan, pengurus parpol pengusung calon, tim sukses, pengurus KPUD, keluarga inti (suami atau anak) dan tokoh agama.

Dalam mempersiapkan wawancara peneliti tidak membatasi lama wawancara, jam wawancara dan situasi wawancara. Hal ini penting karena peneliti harus menemui para perempuan kandidat di tengah-tengah kesibukan mereka seperti persiapan kampanye terbuka dan tertutup, konsolidasi internal atau sehabis kampanye terbuka, sehingga peneliti selalu berupaya memenuhi kesepakatan waktu wawancara sekalipun harus menemui di atas jam 24.00 WIT, sungguh pengalaman yang menarik.

Peneliti pun sering menghadapi pembatalan wawancara kendati sebelumnya waktu wawancara telah disepakati. Tetapi yang menarik ada beberapa narasumber yang awalnya benar-benar menolak untuk diwawancara, bahkan kandidat ini senantiasa diproteksi oleh lingkaran dalamnya (tim sukses dan tim kemenangan maupun parpol pengusung) untuk mencegah diwawancara. Oleh karena kesulitan untuk menemui beberapa perempuan kandidat, peneliti terpaksa menggunakan jembatan ketua partai nasional untuk "sedikit memaksa" kandidat yang bersangkutan agar bersedia diwawancara dan cara ini ternyata jitu karena pada hari berikutnya kandidat sangat "welcome" kepada peneliti.

Ada beberapa elemen penting dalam wawancara berfokus: *Pertama*, adalah *non-direction*, yang tidak diarahkan oleh siapapun. Pengalaman cukup menarik berkaitan dengan elemen ini. Pada suatu saat peneliti dijanjikan untuk dipertemukan dengan kandidat oleh tim sukses dalam momen kampanye tertutup. Namun setelah lebih dari tiga jam peneliti menunggu kedatangan kandidat, kenyataannya kandidat tidak bisa hadir dengan alasan sakit kepala. Namun peneliti tidak menyerah dan berupaya mendatangi kediaman kandidat meskipun harus mengalami pengusiran oleh pembantu rumah tangga dari kandidat. Akhirnya pada kesempatan di debat publik di TV peneliti berhasil mendekati pasangan kandidat

untuk diperkenankan mewawancara walau hanya meminta waktu 1 jam. Akhirnya perempuan kandidat yang bersangkutan bersedia diwawancara asalkan didampingi oleh pasangannya. Supaya perempuan kandidat tersebut bebas bercerita, maka peneliti lainnya berupaya mengalihkan perhatian pasangan kandidat dengan mengajak berdiskusi.

Selain pembatalan wawancara, dalam penggalan data ini terkadang narasumber menginginkan adanya surat permintaan resmi untuk wawancara dan ditindaklanjuti dengan pertemuan resmi, baru peneliti membagi diri ke informan yang menjadi subyek penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di tengah kesibukan kandidat kampanye, sebuah kesibukan kandidat yang luar biasa, dimana peneliti harus menunggu berjam-jam (4 jam) untuk menemui narasumber karena yang bersangkutan masih tidur, peneliti akhirnya bisa mewawancarai narasumber di dalam mobil dalam perjalanan menuju lokasi kampanye. Namun ada keuntungan menunggu selama empat jam tersebut karena justru peneliti bisa mendapatkan informasi yang sangat relevan dari para tim pemenangan dan petinggi parpol.

Kedua, kekhususan yang menentukan dampak atau makna peristiwa bagi informan dalam rangka mempertahankan wawancara dari kekokohan level pernyataan umum. Dalam mempertahankan kebenaran pernyataan narasumber maka mengkonfirmasi kepada narasumber tambahan menjadi cara mendapatkan reliabilitas wawancara.

Ketiga, menjamin bahwa semua aspek dan topik yang relevan dengan pertanyaan penelitian disebutkan selama wawancara. Ini supaya menjamin tujuan penelitian dapat dicapai. Peneliti senantiasa melihat daftar pertanyaan, dan memastikan tidak ada pertanyaan

yang belum dijawab informan. Namun ada beberapa pertanyaan yang sensitif yang menyebabkan narasumber menghindar untuk menjawab. Bahkan ada sebagian narasumber yang meminta kepada peneliti untuk mematikan recorder atau "off the record" dan minta kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam narasi.

Keempat, narasumber diberi peluang untuk mengikutsertakan topik baru sesuai sudut pandangnya di dalam wawancara. Posisi peneliti lebih banyak mendengarkan paparan cerita dari narasumber, bahkan topik yang diperkenalkan oleh narasumber tersebut terkadang di luar jangkauan peneliti, sehingga bagi peneliti menjadi sebuah pengkayaan.

Kelima, konteks yang mendalam dan personal yang ditunjukkan oleh narasumber, sehingga peneliti bisa mendapatkan respon emosional narasumber dalam wawancara, terutama yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh narasumber. Sangat menarik bagaimana narasumber terkaget-kaget dengan pertanyaan peneliti yang tak "terduga" dan sulit bagi narasumber untuk dijawab secara langsung.

Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumen. Dokumen diperoleh lewat notulen, koran, internet atau foto, yang berfungsi sebagai data pelengkap dan membantu dalam analisa data. Peneliti memperoleh banyak dokumen penting langsung dari kantor koran Manado Pos dimana peneliti memperoleh koran edisi sejak kandidasi sampai kampanye. Selain itu dengan akses mahasiswa S-2 di FISIP Unair, maka peneliti mendapatkan dokumen tentang pemilukada di Jawa Timur dari Jawa Pos dan Kompas Jawa Timur.

Dokumen juga diperoleh dari KPUD di 9 wilayah penelitian, berupa dokumen DPT, profil kandidat, peta politik kabupaten, legislatif daerah.

Diluar tehnik wawancara terfokus dan pengumpulan dokumen, informasi diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian kualitatif, observasi (peninjauan) merupakan tindakan mengamati secara langsung situasi-situasi pemilukada, seperti kampanye terbuka (orasi dan arak-arakan kampanye) yang umumnya dilakukan di siang hari, kampanye tertutup yaitu kampanye terbatas bagi kader-kader partai yang umumnya dilakukan di sore hari atau malam hari, atau debat tertutup yang dilakukan oleh televisi lokal. Tujuannya untuk mendapatkan fakta obyektif. Ada pengalaman yang diperoleh ketika peneliti menyaksikan kampanye damai dengan melihat 3 kandidat yang bertarung. Kampanye nampak sebagai "*show of force*" dari masing-masing kandidat. Peneliti mulai mencermati dan menghitung jumlah mobil dari masing-masing kandidat dan tulisan di mobil. Dari tiga pasangan tersebut nampak salah satu kandidat sangat minim dukungan mobil dan organisasi sosial-kemasyarakatan pendukung. Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa relasi antara kandidat dengan CSO sangat lemah dibandingkan dengan kandidat lain.

Peneliti juga mengamati setiap baliho kandidat yang dipampang di sepanjang jalan, mengamati dari jargon-jargon politiknya, gambar kandidat bersama tokoh-tokoh atau *incumbent*, spirit persuasi dalam jargon tersebut dan peneliti mendokumentasikannya untuk ditelaah lebih lanjut.

F. Data Yang Dibutuhkan

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dibutuhkan: *Pertama*, data primer yaitu data tentang motif calon, respon keluarga, bagaimana menentukan pasangan, persiapan untuk kandidasi, proses kandidasi, hambatan dalam proses kandidasi, isu-isu yang menjadi pertimbangan kandidasi, peran partai atau tim sukses dalam

kandidasi. *Kedua*, data sekunder yaitu data mengenai jumlah partai pengusung, jumlah pemilih perempuan, DPT, penomoran kandidat, konteks politik lokasi penelitian, peta kekuatan politik di kabupaten seperti konfigurasi keanggotaan di legislatif baik di fraksi maupun komisi.

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian setidaknya ada 3 instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Di antaranya:

- a) *Pedoman Wawancara*; sebagai alat bantu ketika melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci maupun informan tambahan. Di bawah ini materi pertanyaannya

Tabel 3
Materi Pertanyaan Wawancara Mendalam

Narasumber	Materi Pertanyaan
Kandidat Perempuan	<p>Pertanyaan ini mencakup identifikasi inisiasi politik perempuan dalam berkiprah sebagai kandidat dalam pemilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kapan motif tersebut muncul dan bagaimana proses kemunculannya? · Apa saja faktor yang menguatkan atau melemahkan motif tersebut? · Bagaimana keputusan akhirnya ditentukan? · Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kandidasi? · Apa saja yang dipertimbangkan? · Apakah karena anda “perempuan”, maka muncul keinginan untuk maju sebagai calon? Atau justru anda maju sama sekali tidak berpikir mengenai jenis kelamin? · Karena anda adalah perempuan, adakah misi gender dalam pencalonan anda? · Apa pesan suami/keluarga ketika akan maju dalam pencalonan? · Mengapa pasangan calon yang dipilih adalah yang berbeda jenis kelamin? · Apakah berpasangan dengan jenis kelamin laki-laki dalam pencalonan sebagai strategi yang menguntungkan?

Narasumber	Materi Pertanyaan
Pasangan kandidat	<p>Pertanyaan ini mencakup identifikasi alasan menjadikan kandidat perempuan sebagai pasangan dalam pemilukada:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Apa pertimbangan dalam memilih pasangan? · Mengapa anda memilih di posisi calon wabup/wawali?
Keluarga kandidat	<p>Pertanyaan ini mencakup identifikasi respon terhadap kandidat dalam berkiprah di pemilukada:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bagaimana respons anda saat mengetahui motif dan pencalonan itu? · Bagaimana membagi peran dalam keluarga? · Siapa yang mendukung/menolak rencana pencalonan? · Apa yang anda harapkan untuk keluarga dan masyarakat jika nanti istri/ibu/anak/saudara anda terpilih?
Anggota Tim Sukses	<p>Pertanyaan ini menyangkut identifikasi tentang respon dan upaya yang dilakukan oleh tim sukses:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Apakah peran dalam pencalonan kandidat? · Upaya apa yang dilakukan untuk memuluskan pencalonan? · Apa akses pertama kali untuk memuluskan kandidat? · Hubungan apakah yang anda miliki dengan kandidat? · Apakah faktor jenis kelamin menjadi ukuran untuk pencalonan?
Pengurus partai politik pendukung	<p>Pertanyaan mencakup bagaimana calon melakukan transaksi dengan partai politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bagaimana kandidat perempuan dapat menembus petinggi parpol yang cenderung paternalis sehingga dinominasikan oleh parpol? · Faktor-faktor pendukung apa saja yang dapat membuat para petinggi parpol menominasikan kandidat perempuan? · Bagaimana peran parpol dalam memberikan dukungan terhadap kandidat perempuan yang diusung? · Apakah secara materiil dan imateriil parpol telah mengerahkan sumber dayanya untuk keperluan kampanye dan kegiatan terkait kepada kandidat perempuan? · Apakah parpol juga memandang kesempatan kandidat untuk menang lebih tinggi? · Apa pilihan strategi dalam upaya promosi dan penominasian? · Kapan calon menyampaikan keinginannya untuk mencalonkan diri? · Apakah partai melihat calon perempuan karena jenis kelaminnya atau karena aspek lain? · Apakah parpol menentukan pasangan calon harus laki-laki perempuan? · Apakah parpol melihat ada hambatan yang bakal dihadapi calon perempuan? · Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kandidat perempuan?

Narasumber	Materi Pertanyaan
Pengurus CSO	<p>Pertanyaan mencakup bagaimana calon melakukan transaksi dengan organisasi massa/kemasyarakatan/keagamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Apa hubungan kandidat perempuan dengan organisasi anda? · Kapan calon menyampaikan keinginannya untuk mencalonkan diri? · Faktor-faktor pendukung apa saja yang dapat membuat organisasi anda mendukung kandidat perempuan? · Bagaimana peran organisasi anda dalam memberikan dukungan terhadap kandidat perempuan? · Apakah secara materiil dan imateriil organisasi anda telah mengerahkan sumber dayanya untuk keperluan kampanye dan kegiatan terkait kepada kandidat perempuan? · Apakah organisasi anda juga memandang dengan menaruh kandidat perempuan dalam kontestasi pemilu/keputusan kandidat untuk menang lebih tinggi? · Apa pilihan strategi dalam upaya promosi dan penominasian? · Apakah pilihan calon perempuan didasari oleh alasan "jenis kelamin"? · Apakah jenis kelamin perempuan dirasakan menjadi hambatan bagi kandidasi perempuan? · Bagaimana pendapat anda terhadap kandidat perempuan dalam pemilu/keputusan? · Bagaimana agama/adat memandang perempuan sebagai pemimpin? · Apa saja dukungan/hambatan kandidat perempuan ketika menjadi pemimpin politik di daerah? · Apakah ajaran agama mendukung munculnya calon perempuan?
KPU	<p>Pertanyaan mencakup identifikasi pemahaman KPUD terhadap <i>gender awareness</i>?</p> <ul style="list-style-type: none"> · Apakah kerangka <i>gender awareness</i> menjadi diskursus diantara anggota KPU? · Apakah institusi ini mensosialisasi yang memberikan kemungkinan keikutsertaan semua warganegara mempertimbangkan aspek gender?

- b) *Recording* atau alat perekam untuk merekam informasi dari informan. Setiap peneliti dilengkapi dengan alat rekam ini.
- c) Petugas lapangan yang membantu peneliti utama dan peneliti sekunder. Ketika di Sulut, peneliti berkolaborasi dengan LSM Suara Parangpuan di Manado, sehingga memudahkan akses peneliti untuk bertemu dengan para narasumber. LSM ini membuka akses untuk menemukan informan melalui KPUD-KPUD dimana kemudian orang KPUD inilah yang menghubungkan dengan beberapa kandidat yang belum dikenal oleh Suara Parangpuan.
- d) Kamera, yang digunakan untuk memotret peristiwa terkait dengan kandidasi perempuan seperti foto-foto baliho, foto kandidat itu sendiri dan foto peristiwa kampanye.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil dua wilayah penelitian pemilukada yang berlangsung di Jawa Timur dan Sulut. Pemilihan Jawa Timur sebagai area penelitian didasarkan pada pertimbangan jumlah perempuan yang maju sebagai bakal calon cukup banyak; dari 18 kabupaten yang menyelenggarakan pemilukada, di 9 kabupaten terdapat 12 perempuan berpartisipasi baik sebagai bupati maupun sebagai wakil bupati.

Sedangkan Sulut dipilih dengan alasan yang sama dengan Jawa Timur. Cukup banyak perempuan yang maju dalam pemilukada, indikasinya terlihat dari baliho-baliho yang terpampang sepanjang waktu pemilukada. Dari 7 wilayah penyelenggaraan pemilukada (6 kabupaten/kota dan 1 provinsi) hanya di satu kabupaten perempuan tidak terlibat sebagai bakal calon. Bahkan dari 7 momen pemilukada di kabupaten/kota tersebut melibatkan sebanyak 17 perempuan sebagai kandidat bupati dan wakil bupati.

Namun dengan pertimbangan waktu, tenaga dan pendanaan maka tidak semua kabupaten yang menyelenggarakan pemilukada dipilih sebagai arena penelitian. Peneliti hanya memilih 9 kabupaten yakni 4 kabupaten/kota di Sulut dan 5 kabupaten/kota di Jatim. Penelitian lebih banyak dilakukan di Jatim dengan pertimbangan jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilukada lebih banyak dibandingkan dengan di Sulut.

Adapun 9 pemilukada yang dipilih untuk menjadi obyek penelitian ini yaitu:

- a. Pemilukada di Kota Surabaya, diikuti oleh satu perempuan calon walikota yang mantan ketua Bapeko;
- b. Pemilukada di Kabupaten Kediri, diikuti oleh dua kandidat yang merupakan isteri bupati Kediri;
- c. Pemilukada di Kabupaten Lamongan, diikuti oleh satu calon wakil bupati dimana si calon menyeberang dari partai politiknya karena diusung oleh partai lain;
- d. Pemilukada Kabupaten Sidoarjo diikuti dua calon perempuan sebagai bupati dimana salah satu kandidat adalah isteri bupati dan satu dari korporasi, sebagai Humas Lapindo;
- e. Pemilukada Kabupaten Banyuwangi diikuti satu calon bupati yang berprofesi sebagai artis;
- f. Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan yang diikuti oleh 4 calon perempuan;
- g. Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara yang diikuti 5 calon perempuan dan salah satu pasangan calon perempuan kesemuanya perempuan;
- h. Pemilukada Kabupaten Bolang Mangondow Timur diikuti oleh 3 calon wakil bupati, dan mayoritas penduduk beragama muslim;
- i. Pemilukada Kota Tomohon yang diikuti oleh satu calon perempuan sebagai walikota yang kebetulan merupakan incumbent.

I. Cara Menganalisa Data

Metode analisa data adalah dengan memilah-milah, mengelompokkan data kualitatif agar dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan data yang lain. Tujuan akhir analisa adalah menetapkan hubungan-hubungan antara suatu gejala/unsur tertentu dengan gejala/unsur yang lain, dan menetapkan jenis hubungan yang ada di situ.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretif dimana peneliti berupaya menginterpretasi fenomena kandidasi perempuan dalam pemilukada dengan mengembangkan (subyektif) makna peristiwa atau tindakan sosial. Peneliti berupaya memahami tindakan orang dalam keadaan dan situasi sosial dengan melakukan klasifikasi, membuat eksplanasi makna dari beberapa fenomena kandidasi perempuan, sehingga dalam hal ini lebih daripada sekedar menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena.

Peneliti membangun asumsi bahwa manusia belajar mengenai realitas dari makna yang mereka berikan pada fenomena sosial. Jadi peneliti lebih memberikan banyak deskripsi dan interpretasi yang berlapis-lapis tentang pengalaman para kandidat perempuan dalam fenomena pemilukada. Dalam mengembangkan interpretasi dibuat kesepakatan di antara tim peneliti untuk menyusun kategori-kategori secara umum dan kategori khusus. Setelah disusun kategori tersebut maka seni dan politik penafsiran atas narasi informan menjadi otoritas peneliti dalam memaparkan hasil analisa.

Prinsip dari metode interpretif adalah menggunakan pendekatan hermeneutika yang dibentuk dari analisa dokumen, observasi dan ungkapan informan (wawancara), peneliti lantas mengabstraksikan dengan menggunakan nalar dialogis dengan mendasarkan pada paradigma penelitian. Hakekat kontekstual dari fenomena proses kandidasi perempuan dalam pemilu pada dipelajari dan peneliti memaknainya.

BAB IV

PROFIL PEREMPUAN KANDIDAT DAN PROSES KANDIDASI DI JAWA TIMUR

Keraguan orang akan peningkatan partisipasi perempuan di tingkat lokal dalam diskursus demokrasi mampu ditepis oleh sejumlah fakta dimana kehadiran sosok perempuan dalam panggung kontestasi politik Indonesia di daerah-daerah melalui pemilukada 2010 kian tampak nyata.

Dalam pemilukada 2010 bermunculan perempuan kandidat sebagai calon kepala daerah baik sebagai Gubernur/Wakil Gubernur maupun sebagai Bupati/Wakil Bupati). Salah satunya pada pemilukada 2010 di Jawa Timur dimana dari 18 kabupaten yang menyelenggarakan pemilukada setidaknya ada 10 perempuan kandidat yang maju dalam kandidasi. Tidak bisa disangkal kehadiran perempuan telah ikut meramaikan dan mewarnai dinamika politik lokal.

Keikutsertaan perempuan dalam pilkada mengisyaratkan akseptabilitas perempuan dalam jabatan publik. Akseptabilitas perempuan dalam jabatan publik setidaknya ditentukan oleh beberapa aspek. *Pertama*, perempuan setidaknya telah memiliki ambisi personal, sebuah tahapan yang penting untuk mendapatkan kekuasaan politik. *Kedua*, adanya peluang jabatan yang memungkinkan perempuan muncul sebagai kandidat politik. Dalam konteks ini perempuan setidaknya memiliki estimasi sumber-sumber politik sehingga bisa mengkampanyekan dirinya dalam proses kandidasi. *Ketiga*, dukungan organisasi politik yang memungkinkan perempuan dicalonkan oleh partai politik. Dukungan menjadi sangat penting untuk membantu perempuan memutuskan untuk mendapatkan jabatan.

Fakta-fakta tersebut mengusik peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh siapakah perempuan yang berani tampil dalam kontestasi? Sosok yang seperti apa dia? Bagaimana proses dinominasikan oleh partai pengusung atau jalur perseorangan?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui mengenai profil kandidat, mulai dari biografinya, motivasinya, modal sosial dan modal politiknya untuk *running*/maju dalam pemilukada Jatim tahun 2010 dan proses kandidasinya yang mencakup dinamika interaksi kandidat dengan partai, dengan lembaga penyelenggara pemilu dan dengan tim sukses/pemenangan dan organisasi kemasyarakatan. Khusus untuk poin pemaparan analisis kandidasi dilakukan dengan narasi melalui data hasil *indepth-interview* yang telah diinterpretasikan oleh tim peneliti maupun – apabila diperlukan – validasi dengan mengutip transkrip wawancara untuk mempertegas maksud yang ingin disampaikan.

Penelitian ini memusatkan perhatian kepada tujuh orang perempuan kandidat di pemilukada Jawa Timur, yaitu Kartika Hidayati (kandidat Wakil Bupati di Kabupaten Lamongan); Emy Susanti dan Yuniwati Teryana (keduanya adalah kandidat Bupati di Kabupaten Sidoarjo); Emilia Contessa (kandidat Bupati di Kabupaten Banyuwangi); Nurlaila dan Haryanti (keduanya adalah kandidat Bupati di Kabupaten Kediri); Tri Rismaharani (kandidat Walikota Surabaya). Tentu saja dari tujuh kandidat tersebut, sebagian ada yang sudah memenangkan pemilihan kepala daerah di daerahnya, sementara sebagian ada yang mengalami kekalahan. Namun penelitian ini tidak hendak menjelaskan mengenai bagaimana perempuan memenangkan kontestasi, tetapi lebih sebatas mengeksplorasi tentang kandidasi perempuan dalam pemilukada. Berikut ini dikemukakan profil kandidat dan proses kandidasinya.

A. KARTIKA HIDAYATI

A.1. Profil Kandidat

A.1.1. Biografi

Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M., lahir di Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Mei 1967 dan beragama Islam. Suaminya adalah Ali Hafidzi dan memiliki 3 anak, seorang perempuan dan dua laki-laki.

Masa kanak-kanaknya dan pendidikannya dihabiskan di Lamongan. Ia mengenyam pendidikan di SD Negeri I Lamongan (1977-1980), SMP Negeri I Lamongan (1980-1983) dan SMA Negeri 2 Lamongan. Baru setelah memasuki bangku kuliah ia hijrah ke Surabaya untuk mencapai pendidikan tingginya. Ia kuliah di program S-1 Filsafat IAIN Sunan Ampel Surabaya (1986-1990), S-1 Teknik Sipil Universitas Bayangkara Surabaya, dan kemudian melanjutkan program S-2 Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) ABI Surabaya (2001).

Lepas dari bangku kuliah, ia menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Periode 2007-2009 sebagai pengganti antar waktu. Pada tahun 2009 dia lolos menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim dari partai yang sama. periode 2009-2014.

Semasa kuliah Kartika Hidayati aktif di organisasi ekstra kampus dimulai dengan menjadi Ketua Kopri PMII Rayon Ushuludin IAIN Surabaya, Ketua Kopri PMII Komisariat IAIN Surabaya yang kemudian menjadi Ketua IV PMII Cabang Surabaya. Kartika Hidayati juga aktif di Ketua Keputrian Senat Ushuludin IAIN Surabaya.

Kartika memiliki banyak pengalaman organisasi. Ketika masih pelajar ia aktif sebagai Ketua Ikatan Pelajar Putri (IPP) NU anak cabang Kabupaten Lamongan, kemudian menjadi Ketua Ikatan Pelajar Putri (IPP) NU tingkat cabang Kabupaten Lamongan. Aktivitas sosialnya semakin bertambah dengan posisinya sebagai Ketua Muslimat NU Kabupaten Lamongan, diawali menjadi Sekretaris Fatayat NU, yang kemudian naik menjadi Ketua Fatayat Kabupaten Lamongan.

Pun demikian dengan aktivitas politiknya. Kartika semakin bersinar ketika dia mampu menembus jajaran kepengurusan PKB Kabupaten Lamongan. Ia menjabat sebagai Sekretaris DPC PKB Lamongan, kemudian meningkat lagi menjadi Bendahara DPW PKB. Ia juga turut berkontribusi dalam mendirikan Pergerakan Perempuan (PP) PKB. Karena aktivitas politiknya di PKB inilah kemudian yang sedikit banyak mempengaruhi popularitasnya sehingga dia mampu terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan posisi sebagai Ketua Komisi C. Serangkaian prestasi Kartika tersebut – mulai dari pengalaman organisasi hingga politik praktis – membawanya pada level politik yang lebih tinggi, yakni pencalonan diri dalam Pemilu Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2010 ia dipinang untuk maju sebagai calon Wakil Bupati Lamongan oleh PDIP Lamongan dan berpasangan dengan Ir. Suhandoyo SP (populer dengan panggilan Handoyo) sebagai calon bupati.

A.1.2. Motivasi Kandidat

Majunya Kartika Hidayati sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lamongan lebih didasarkan karena dorongan dari kiai-kiai DPW PKB, PC NU Lamongan dan Kiai Aziz yang merupakan Ketua Dewan Syuro PKB. Awalnya memang Kartika Hidayati

diharapkan bisa menjadi calon Bupati untuk menata Lamongan. Namun Ketua DPC PKB Lamongan Makin Abas tidak menyetujui Kartika Hidayati jadi calon Bupati dan akhirnya PKB mendukung pasangan Fadli-Amar Syaifudin bersama partai-partai lainnya seperti PAN, Partai Golkar dan Partai Demokrat.

"....saya ini diperintah oleh Kiai-Kiai Lamongan, diminta oleh PC NU secara institusi Lamongan bahwa saya harus maju untuk mendampingi Pak Handoyo saat itu, sesungguhnya kalau dari DPW Jawa Timur menginginkan saya harus maju tapi nomor satu kan. Tapi namanya proses politik antara DPW, DPP, dan DPC Lamongan yang namanya gesekan-gesekan politik antar internal kan sudah biasa, jadi DPC Lamongan ketuanya terutama kan karena tidak sama, dianggap sebagai rivalitas dan sebagainya maybe lho ya mungkin...dan rekomnya [rekomendasi] kan harus dari Lamongan, kan yang memberangkatkan Lamongan sehingga di pusat pun jadi polemik ya. Ketua Dewan Syuro Kiai Aziz ngotot bahwa harus Kartika yang nomor satu. Tapi di sana sendiri ada sekretaris dewan suro yang tidak sama karena dia sudah dengan Lamongan, Cak Imin ada berdiri di tengah-tengah. Kalau DPW full menginginkan saya nomor satu rekomnya. Nah itu sebagai bagian dari proses the reality di lapangan akhirnya saya harus tetep maju nomor dua untuk menjadi Wakil dan rekomendasi wilayah juga DPW untuk mendampingi Pak Handoyo. Terlebih bahwa itu merupakan perintah dari Kiai-Kiai dan PC NU secara institusi saya harus turun ke Lamongan untuk menata, menata di Lamongan. Ya sudah itu saya lakukan sebagai panggilan sebagai warga Nahdliyin saya lakukan walaupun pada saatnya saya harus meninggalkan Komisi C, sebagai Ketua Komisi C tetep saya pertaruhkan karena itu panggilan dari ulama-ulama di sana."

(wawancara dengan Kartika Hidayati, 9 Agustus 2010).

Setelah resmi berpasangan, Handoyo dan Kartika Hidayati membuat visi dan misi berdasarkan pada keinginan membangun Lamongan yang tidak sekedar pembangunan proyek mercusuar, melainkan juga melihat kebutuhan dasar yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Lamongan. Hal ini diungkapkan oleh Handoyo sebagai pasangan Kartika,

"...semangat membangun Lamongan muncul karena dilandasi oleh satu pemikiran bahwa para pejabat sekarang ini cenderung kepada sebuah program-program yang bersifat mercusuar, tapi tidak melihat seberapa tingkat kemampuan dan ekonomi rakyat..."

Berbagai pembangunan di kabupaten yang dinilai oleh Handoyo sebagai pembangunan yang bersifat mercusuar seperti Plaza Lamongan, Wisata Bahari Lamongan

(*Lamongan Ocean Tourism Ressor*), Lamongan Integrated Sharebased, proyek pelabuhan rakyat, dan proyek lapangan terbang dan eksplorasi minyak Balong Wangi Sarirejo. Pembangunan tempat-tempat di atas belum bisa meningkatkan kesejahteraan dan tidak melihat kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum cukup terpenuhi seperti pangan, kesehatan dan pendidikan. Lebih lanjut Handoyo menyatakan,

“...sebenarnya kebutuhan masyarakat yang utama itu apa? Masyarakat kita sekarang bergerak di bidang apa? Yang jelas sebagian besar petani. Saya punya kriteria dalam menyelesaikan seluruh persoalan bangsa dilandasi kecukupan soal makan... jadi itu satu kebutuhan akan makan, yang kedua kesehatan, yang ketiga baru saya berbicara masalah pendidikan. Ini ternyata responsif masyarakat sangat tinggi sekali di Lamongan sehingga banyak masyarakat yang mendorong saya untuk menjadi Bupati Lamongan... Jadi banyak rakyat-rakyat yang biaya sendiri, cetak gambar sendiri...”

(wawancara dengan Handoyo, 11 Juni 2010).

Sementara bagi Handoyo, ketersediaan infrastruktur seperti jalan juga sangat kurang di Kabupaten Lamongan. Banyak jalan antar kecamatan dan antar desa yang masih rusak parah. Infrastruktur jalan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,

“..coba sampean liat antara Mantub-Kedungpring, Mantub-Samben, Mantub-Kembangbau semua jalannya hancur, itu jalan antar kecamatan, belum sampean masuk ke wilayah desa. Ini yang membuat diri saya ini perlu untuk *pure* keuangan untuk kepentingan rakyat..”

(Wawancara dengan Handoyo, 11 Juni 2010)

Berpijak dari realitas pembangunan di Kabupaten Lamongan selama ini, maka Pasangan Suhandoyo-Kartika Hidayati (dalam kampanye disingkat menjadi ‘Sehati’) memiliki visi untuk pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, motivasi yang diungkapkan oleh Kartika, khususnya, apabila diidentifikasi dari perspektif *gender*

agaknya masih kental nuansa maskulinitas. Terlebih majunya Kartika sebagai salah satu kandidat wakil bupati secara eksplisit menegaskan bahwa bukanlah visi kesetaraan gender yang dikedepankan melainkan justru karena dorongan dari para kiai di internal PKB dan NU. Terlepas pada akhirnya dukungan DPC PKB – karena adanya friksi internal perihal siapa calon yang didukung – beralih ke calon lain (pasangan Fadli-Amar Syaifudin), namun variabel ulama (para kiai) menjadi sangat determinan dalam penentuan pilihan-pilihan politik yang diambil oleh Kartika. Lebih jauh, variabel determinan itu pula yang mempengaruhi Kartika untuk beralih kendaraan menggunakan kendaraan PDI-P pada akhirnya, walaupun, dalam perhitungan politiknya, sesungguhnya langkah itu (beralih kendaraan) sangat beresiko bagi karir politiknya ke depan.

A.1.3. Modal Sosial

Kartika Hidayati sejak tahun 1998 mulai aktif di organisasi NU. Berbagai jabatan ketua disandangnya, ia pernah menjadi Ketua Ikatan Pelajar Putri (IPP) NU Kabupaten Lamongan, Ketua Muslimat NU Kabupaten Lamongan, Ketua Fatayat NU Kabupaten Lamongan, Sekretaris DPC PKB Lamongan, Bendahara DPW PKB, dan pendiri Pergerakan Perempuan (PP) PKB. Banyaknya pengalaman dalam organisasi membuat kemampuan Kartika Hidayati tertempa. Banyaknya organisasi yang diikutinya membuat Kartika Hidayati mempunyai banyak jaringan, terutama kaum perempuan, ini merupakan modal sosial (*social capital*).

Kartika Hidayati bersama Koffiah Indar Parawangsa mendirikan Organisasi Pergerakan Perempuan (PP) yang

merupakan wadah bagi perempuan PKB. Pada pemilu pada 23 Mei 2010 kemarin Kartika Hidayati juga memanfaatkan mesin organisasi NU dan organisasi-organisasi perempuan di bawah NU seperti Fatayat dan Muslimat.

Kartika Hidayati dalam pencalonannya banyak terbantu dengan modal sosial tersebut selain modal materi. Kekayaan Kartika Hidayati sesuai yang dilaporkan ke KPUD Kabupaten Lamongan cukup banyak yaitu mencapai Rp.15.102.079.000. Namun yang secara signifikan berperan menyumbangkan suara adalah posisi Kartika Hidayati sebagai orang NU dan menjadi pengurus organisasi sayap NU seperti menjadi Ketua Ikatan Pelajar Putri (IPP) NU, maupun Fatayat dan Muslimat NU. Dengan menjadi pengurus berbagai organisasi sayap NU, Kartika banyak bepergian ke pelosok-pelosok untuk menemui anggotanya atau mengikuti pengajian. Sehingga banyak pemilih perempuan yang memilih Kartika. Hal ini bisa dilihat sewaktu Kartika mengunjungi undangan dari konstituennya untuk acara pengajian, banyak masyarakat yang antusias bahkan ada yang memberi Kartika Hidayati “berkat” dan bahkan ada yang memberi uang, sebagaimana pernyataannya,

“...di Lamongan ini mayoritas komunitasnya adalah Nahdliyin sehingga bisa dibayangkan hampir tidak pernah tidur pulang jam tiga-jam tiga karena jadwal ini kita banyak nolak, karena faktor di sana mayoritas Nahdliyin sehingga harus saya yang datang...jadi sehari bisa delapan titik bayangkan...dan di bawah itu nggak mau diwakilkan, harus Bu Kartika sendiri datang. Kita ini difasilitasi bukan memfasilitasi lho ya, lain. Orang lain, mungkin calon lain itu memberikan dana untuk membikin acara tapi kita ndak..malah disangoni. Jujur disangoni duit juga saya ndak mau. Ya udah ok saya terima, tapi berikan untuk berkat juga....delapan kali pertemuan, delapan kali makan...”

(wawancara dengan Kartika Hidayati, 9 Agustus 2010).

Alhasil, modal sosial sebagai ketua berbagai organisasi sayap NU tersebut turut memudahkan Kartika dalam proses

kandidasi sebagai calon wakil bupati. Kartika mampu memanfaatkan segala posisinya di organisasi-organisasi sayap itu untuk menggalang dukungan, khususnya dari kalangan perempuan. Di sini terdapat poin yang cukup menarik untuk diperhatikan. Bahwa majunya Kartika yang lebih dominan karena dorongan para kiai (bukan secara dominan dari keinginannya sendiri ataupun karena memiliki visi memperjuangkan kepentingan perempuan ataupun bukan karena dia adalah perempuan) bertemu dengan mayoritas pendukungnya yang berasal dari kalangan perempuan. Maksudnya, motivasi Kartika yang bernuansa maskulin itu tidak mempengaruhi perolehan dukungannya yang sebagian besar (dalam penuturannya) berasal dari kalangan perempuan. Interpretasi yang mungkin dari dua variabel ini adalah bahwa para pemilih perempuan agaknya mengidentifikasi dirinya kepada calon perempuan namun bukan kepada visinya, yakni apakah memperjuangkan kepentingan perempuan atau tidak. Pendek kata, terdapat hubungan yang cukup kuat antara pemilih perempuan dengan calon perempuan namun hubungan itu tidak selalu – untuk tidak mengatakan tidak ada – mengandaikan visi kepentingan perempuan secara spesifik masuk di dalamnya. Hubungan seperti itu lebih dekat kepada pola hubungan patron-klien, dimana Kartika menjadi patron dari para pendukungnya yang mayoritas perempuan tersebut.

A.1.4. Modal Politik

Kartika Hidayati mulai terjun politik sejak tahun 1998, dengan bergabung ke PKB. Ia mulai mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada tahun 2004. Namun karena penentuan anggota legislatif masih didasarkan nomor urut, Kartika Hidayati gagal menjadi anggota DPRD I Jawa Timur

walaupun perolehan suaranya cukup signifikan, bahkan mendapat suara tertinggi se-Indonesia untuk tingkat DPRD Provinsi.

Baru pada tahun 2007 Kartika Hidayati bisa menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur melalui prosedur Pergantian Antar Waktu (PAW). Pengalamannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama 2 tahun ini yang menjadikan modal politik bagi dia untuk maju ke dalam Pemilu Legislatif di Provinsi pada tahun 2009. Akhirnya di tahun 2009 itulah Kartika Hidayati kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, bahkan mampu menduduki posisi Ketua Komisi C.

Kartika Hidayati yang notabene teman satu Komisi Handoyo yang juga di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, awalnya memang menerima lamaran dari semua kandidat Bupati di Kabupaten Lamongan, seperti Fadli, Tsalis, dan Handoyo sendiri. Akan tetapi atas perintah DPW PKB dan para Kiai, pada akhirnya Kartika Hidayati mau menurunkan keinginannya dari kandidat nomor satu ke kandidat nomor dua, yakni menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan Handoyo sebagai calon bupati.

Pertimbangan lain Kartika untuk menerima pinangan dari Handoyo karena Suhandoyo dinilai mempunyai kesempatan untuk menang, sesuai hasil survei, berikut kata Kartika:

“... kalau survei hampir sesungguhnya semua bupati minta ke saya, ya itu tadi saya saat itu ada komitmen kalau tidak nomor satu. Kalau disurvei sesungguhnya *kan* kita bisa agak berbangga ya...karena surveinya memang *acceptable* sekali...”

Dukungan dari DPW PKB dan para kiai termasuk Ketua Dewan Syuro PKB K.H. Aziz Mansyur menjadi bekal dia

masuk dalam bursa calon di PDIP, meskipun dalam internal PKB sendiri terjadi gesekan atau persaingan diantaranya dengan Ketua DPC PKB Lamongan Makin Abas yang sejak awal selalu tidak sepaham dengan Kartika Hidayati,

“....saya mau jadi wakil itu pun atas perintah DPW. Saya *ndak* mau *kan* waktu itu, saya *ndak* mau jadi wakil. Tapi atas perintah K.H. Aziz Mansyur sebagai Ketua Dewan Syuro saya berangkat dengan segala resiko..”

A.2. Proses Kandidasi

A.2.1. Persiapan Kandidasi dan Partai Pengusung

Ketika mencalonkan diri menjadi calon wakil bupati, Kartika Hidayati pada awalnya tidak direstui oleh anak-anaknya. Namun suaminya yang sudah mengetahui kesibukan Kartika Hidayati sejak awal mendukung penuh untuk mencalonkan menjadi wakil bupati, bahkan suaminya bertindak menjadi bendahara tim pemenang. Walaupun Kartika Hidayati mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati, namun masih tetap menjalankan sebagian peran domestiknya.

“Satu kebiasaan yang tidak bisa saya tinggal adalah saya baru mau keluar setelah saya masak, jadi pagi-pagi mungkin saya masak. Ya itu yang saya lakukan untuk keluarga. Setelah itu saya minta maaf kepada keluarga untuk tidak bisa nemanin, tidak bisa menyiapkan. Suami sejak kita nikah memang kebiasaan saya harus masak, itu yang saya lakukan. Jujur memang ada yang dirugikan, anak-anak saya yang kecil masih labil-labil ini ada yang berubah nilainya. Awalnya anak saya juga tidak setuju dengan pencalonan saya, namun akhirnya bisa menerima itu.”

(wawancara dengan Kartika Hidayati, 9 Agustus 2010).

Dalam pandangan Kartika, DPW sepenuhnya menginginkan dia maju di nomor satu. Namun sebagai bagian dari proses dinamika di lapangan, akhirnya Kartika harus tetap maju walaupun hanya di nomor dua untuk menjadi wakil. Di lain pihak rekomendasi wilayah (DPW) menghendaki Kartika sebagai pendamping Pak Handoyo.

Perintah dari Kiai-Kiai dan PC NU menginginkan Kartika kembali ke Lamongan untuk menata, menata daerah tersebut,

“...ya sudah itu saya lakukan sebagai panggilan sebagai warga Nahdliyin saya lakukan walaupun pada saatnya saya harus meninggalkan Komisi C, sebagai Ketua Komisi C tetep saya pertaruhkan karena itu panggilan dari ulama-ulama di sana...”

Pencalonan Kartika melalui PDIP memang menimbulkan gesekan politik di internal PKB. KH. Su’udy Karim, Rais Syuriah DPW PKB Jawa Timur memberikan penjelasan atas konflik internal PKB terkait rekomendasi untuk cabup dan cawabup Lamongan. Menurutnya sesuai dengan undang-undang partai, rekomendasi untuk pencalonan bupati dan walikota merupakan wewenang dewan pimpinan wilayah dan bukan dewan pimpinan pusat (DPP). DPP hanya memberikan restu yang tidak bisa dijadikan dasar pencalonan calon tapi rekomendasi cabup dan cawali adalah wewenang DPW. Dia menambahkan DPC PKB Lamongan yang telah merekomendasi pasangan Fadli dan Amar Syaifudin (FAHAM) merupakan pelanggaran partai. Sebab sesuai dengan keputusan DPW bahwa rekomendasi cabup dan cawabup Lamongan hanya diberikan kepada pasangan Handoyo-Kartika. Dalam pandangan Kartika, DPW sepenuhnya menginginkan dia maju di nomor satu. Namun melihat realita politik di lapangan akhirnya Kartika harus tetap maju di nomor dua untuk menjadi wakil. Di lain pihak rekomendasi wilayah (DPW) menghendaki Kartika sebagai pendamping Pak Handoyo.

A.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

PDI Perjuangan sendiri memasang Suhandoyo yang merupakan kader partainya dengan Kartika Hidayati karena keinginan akan mengulang kesuksesan calon NU pada saat pemilukada gubernur Jatim. Menurut Sa’im

Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, pada putaran kedua di Kabupaten Lamongan Khofifah Indar Parawansa menang atas Soekarwo. Sebagai Ketua Muslimat NU Kabupaten Lamongan, Kartika diharapkan mampu memobilisir anggota-anggotanya ataupun masyarakat yang berafiliasi terhadap NU. Faktor kedua yang membuat Kartika dipilih karena pemilih kebanyakan perempuan.

“...Jadi satu, saya kepengen mengulang sukses pada saat pemilu gubernur putaran kedua. Putaran kedua *kan* lamongan menang KAJI.. jadi salah satunya yang menjadi pertimbangan adalah dari NU nya. Ketua muslimatnya bertepatan Bu Kartika. Pengen masuk ke basis massa NU. Kedua pemilih itu banyak perempuan...”

(wawancara dengan Sa'im, Ketua DPC PDI Perjuangan, 10 Juni 2010).

Penentuan nama Kartika Hidayati juga demi kepentingan partai, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau tidak memikirkan kepentingan partai Sa'im mau dilamar sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Fadli.

“Saya sudah lama komunikasi dengan Fadli, tapi *kan* yo, kembali pada aturan main partai. Saya masih sayang partai sehingga partai ini tidak carut marut sehingga saya memutuskan untuk satu komando”

(wawancara dengan Sa'im, Ketua DPC PDI Perjuangan, 10 Juni 2010).

Sedangkan menurut Suhandoyo pemilihan Kartika lebih ditentukan dari hasil survei.

“...kita hanya melihat dari nilai survei saja, pertimbangan kita dari nilai survei, kita survei intern.”

(wawancara dengan Handoyo.)

A.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pasangan Handoyo-Kartika tidak menemukan problem yang berarti ataupun menghambat dalam pencalonan mereka.

A.2.4. Kandidat dan Institusi Sosial

Jejaring NU, Muslimat dan Fatayat setidaknya telah menjadi modal dasar bagi pasangan ini, apalagi dengan pemberian restu para kiai. Kemampuan Kartika memobilisir massa Fatayat dan Muslimat NU mengukuhkan eksistensi Kartika Hidayati di dalam organisasi tersebut dan dijadikan modal dasar untuk kandidasi dalam pemilukada Lamongan.

B. EMY SUSANTI HENDRARSO

B.1. Profil Kandidat

B.1.1. Biografi

Perempuan kelahiran Pacitan pada 19 Maret 1959 ini sehari-harinya berkantor di Jurusan Sosiologi-FISIP, Universitas Airlangga sebagai dosen pada program sarjana maupun pascasarjana. Pekerjaan ini sudah ia geluti semenjak tahun 1983 selepas meraih gelar sarjana sosiologi pada Universitas Indonesia. Karir mengajar beliau berkembang seiring dengan keberhasilannya menyabet gelar *master of art* dari University Adelaide Australia pada tahun 1993 dan gelar doktoral pada program sosiologi di UGM tahun 2003 (sesuai keterangan yang diperoleh pada 23 Agustus 2010 dari <http://emysusanti.com/author/>).

Emy Susanti Hendrarso atau biasa disapa Emy memilih kajian sosiologi-gender sebagai minat utama dalam aktivitas akademiknya. Minat Emy terhadap kajian tersebut tidak hanya diterapkan secara teoritik dalam perkuliahan (seperti: sosiologi gender, gender dan HAM, seminar riset kajian gender, serta gender dan pembangunan) melainkan juga

ia praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Paling tidak, hal ini tampak dari jabatannya sebagai Ketua Pusat Studi Wanita (PSW), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan.

Dalam berbagai kesempatan, Emy selalu menjelaskan bahwa aktivitasnya di organisasi perempuan sebagai bentuk komitmennya untuk menempatkan kesetaraan gender tidak hanya sebatas wacana tetapi juga diimplementasikan. Masyarakat perlu diperkenalkan tentang pentingnya kesetaraan gender. Emy percaya bahwa kesetaraan gender harus dimulai dari lingkup keluarga dan bertahap ke lingkup pemerintahan. Kepercayaan ini membuat Emy bersama anggota organisasi lainnya melakukan pendampingan terhadap perempuan di Jawa Timur maupun Kabupaten Sidoarjo hingga sekarang.

Kesibukan Emy sebagai dosen dan aktivis di organisasi kampus semakin ditambah lagi dengan aktivitas sosial yang harus ia jabat sebagai istri Bupati Sidoarjo. Suami Emy, Win Hendrarso, terpilih sebagai Bupati Sidoarjo selama dua periode, yaitu: 2000-2005 dan 2005-2010. Jabatan yang harus ia emban karena statusnya sebagai istri Bupati, antara lain sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo yang dijabatnya sejak tahun 2000, Ketua Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo sejak tahun 2002, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sidoarjo sejak tahun 2000. Posisi-posisi strategis tersebut memberikan kesempatan bagi Emy untuk mewujudkan idealisme-idealismenya tentang pemberdayaan

perempuan di Kabupaten Sidoarjo. Terlebih lagi, jabatan-jabatan publik tersebut memiliki pertanggungjawaban politis kepada masyarakat Sidoarjo.

“Ketika amanah sudah diberikan oleh publik, saya pasti bertanggung jawab mengembannya, serta berusaha mewujudkan kebutuhan publik yang mengamanahkannya kepada saya.”

(<http://emysusanti.com/author/>).

Kesibukan Emy dengan berbagai kegiatan diorganisasinya telah menyita waktunya untuk keluarga. Meski demikian, Emy mengandalkan komunikasi dengan anak sematawayangnya, Praditya Ardinugroho, melalui telepon. Pada saat wawancara Emy dengan *Jawa Pos* (8 Februari 2009), misalnya, Emy mengatakan,

“Sebisa mungkin pada hari libur, saya mengosongkan jadwal untuk keluarga. Namun, jika benar-benar sibuk, saya hanya menelepon anak dan suami untuk melakukan komunikasi.”

Emy memantau anaknya melalui telepon dengan cara menanyakan kabar atau sekadar cerita-cerita. Bagi Emy, keterbukaan dalam berkomunikasi dapat mengenal dan mendekatkan dirinya dengan anaknya sehingga mereka dapat saling percaya. Disisi lain Emy juga mengajarkan kemandirian bagi anaknya.

B.1.2. Motivasi Kandidat

Dalam wawancara dengan sebuah koran nasional, Emy menjelaskan dengan singkat bahwa keinginannya untuk maju sebagai kandidat calon walikota Sidoarjo karena ingin melanjutkan pembangunan yang telah sukses dilakukan oleh Bupati Win Hendrarso (*Media Indonesia*, 19 Juni 2010). Untuk melanjutkan visi dan misi pembangunan Sidoarjo tentunya tidak terlalu sulit bagi Emy karena sepanjang 10 tahun ia telah “magang” mendampingi Win Hendrarso. Dibanding dengan

perempuan kandidat lainnya, posisinya sebagai istri Bupati membuat Emy lebih mengenal potensi dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah Sidoarjo. Selain itu, motivasi ini memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding perempuan kandidat lain setidaknya jika diukur dari kinerja Win Hendrarso sebagai bupati telah diakui keberhasilannya oleh masyarakat Sidoarjo. Pengakuan keberhasilan ini paling tidak ditunjukkan dari keberhasilan Win Hendrarso menjabat posisi Bupati Sidoarjo selama dua periode.

Ketetapan hati dan motivasi Emy untuk maju menjadi sebagai kandidat calon Bupati Sidoarjo diambil setelah melewati masa berliku dan fase pasang-surut. Itu pun sangat dipengaruhi oleh pihak luar dan baru diputuskan pada detik-detik terakhir. Saat itu Emy Susanti-Khulaim Junaidi (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) mendaftarkan diri ke KPUD Sidoarjo pada 3 Mei 2010 dan menjadi pendaftar terakhir di hari terakhir pendaftaran. Mereka mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN), meskipun pada hari yang sama pasangan Imam Sugiri-Fathoni juga mendapat rekomendasi dari PAN untuk mencalonkan diri sebagai kandidat pasangan Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo. Saat itu, Ketua KPUD Sidoarjo mengatakan akan melakukan klarifikasi kepada DPP PAN tentang adanya dua pasangan calon yang diusulkan oleh PAN. Menurutnya, dalam aturan yang ada satu partai politik hanya bisa mencalonkan satu pasangan kandidat kepala daerah (keterangan diambil pada 3 Mei 2010 dari [http://www. antaraneews.com/berita/1272893131/](http://www.antaraneews.com/berita/1272893131/)).

Awalnya, Emy tidak memiliki keinginan untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sidoarjo. Emy beranggapan

akan muncul anggapan dari masyarakat bahwa ia hanya memanfaatkan keberadaan suaminya sebagai Bupati dan ingin melanggengkan kekuasaan. Sebaliknya, dengan tidak maju sebagai kandidat Bupati Sidoarjo maka ia dan keluarganya dapat menepis anggapan tersebut. Untuk mengalahkannya, Emy memilih untuk maju sebagai kandidat calon Walikota Surabaya meskipun ia gagal pada fase verifikasi pendaftaran di KPU Surabaya.

“...ketika itu saya merasa nanti kalau (maju menjadi kandidat bupati) di Sidoarjo kayak apaan saja. Seperti melanggengkan kekuasaan...kedua karena saya merasa kalau harus muncul (sebagai kandidat) mengapa harus didorong suami (Win Hendrarso)...”

(Wawancara dengan Emy Susanti, 23 Agustus 2010)

Emy mengakui bahwa dorongan untuk maju sebagai kandidat calon Bupati sebenarnya dari pihak luar, yaitu suami dan teman-temannya di organisasi kemasyarakatan dan dunia pendidikan. Mereka menilai selama ini dirinya telah magang selama 10 tahun mendampingi suami memimpin Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, sebagai akademisi maupun sebagai aktivis perempuan, ia hanya berkiprah secara pasif menjadi konsultan bagi pemerintah-pemerintah daerah di Jawa Timur tanpa memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan. Kontribusi konsultan terhadap perumusan kebijakan publik sangat terbatas bagi pemberdayaan perempuan di daerah. Untuk itu, mereka mendorong Emy untuk tidak hanya menjadi konsultan tetapi menjadi pembuat kebijakan atau pembuat keputusan agar tujuan ideal pembangunan daerah lebih mudah diimplementasikan dalam kebijakan daerah. Emy mengatakan dorongan pihak luar ini datang pada akhir tahun 2009.

Menurut Emy setidaknya ada empat kondisi yang mempengaruhi tekadnya untuk memilih maju menjadi kandidat calon bupati di Kabupaten Sidoarjo (wawancara dengan Emy Susanti, 23 Agustus 2010). *Pertama*, desakan yang kuat dari orang-orang yang dekat dengan dirinya baik dari keluarga, kolega, maupun tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *Kedua*, Emy mencermati perkembangan dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo terutama menjelang pendaftaran calon kandidat. Menurut perhitungan Emy, dan koleganya, kandidat calon-calon Bupati yang hendak mendaftarkan diri kurang memiliki visi pembangunan. Bahkan, saat itu ada artis yang memiliki reputasi kurang baik yang mendaftar untuk jadi calon Bupati. *Ketiga*, bagi Win Hendrarso suksesor kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo haruslah sosok yang mampu melanjutkan visi dan program pembangunan yang telah dirancang dan dirintisnya. Untuk itu, sejak awal Win Hendrarso telah mempersiapkan (mengkader) individu-individu yang dapat mewarisi kepemimpinannya di Kabupaten Sidoarjo. Dari beberapa nama yang masuk sebagai kandidat, pilihan Win Hendrarso jatuh kepada Ir Bambang Joelianto yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas DPU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi pria berdarah Pamekasan Madura itu meninggal akibat serangan jantung pada 23 Desember 2009. Kekosongan kader ini yang mengkondisikan Win Hendrarso untuk mendorong Emy agar mau maju menjadi calon kandidat bupati. *Keempat*, kegagalan Emy mendaftar menjadi calon kandidat Walikota/Wakil Walikota Surabaya bersama Fandi Utomo membuka peluang untuk maju sebagai kandidat calon bupati di Kabupaten Sidoarjo. Keempat kondisi ini setidaknya menjadi pemicu Emy untuk maju dalam pemilu kepala daerah di Sidoarjo.

B.1.3. Modal Sosial

Bagi Emy, menjadi calon bupati perempuan bukanlah kelemahan melainkan kekuatan. Saat mencalonkan diri menjadi kandidat Bupati, Emy menjadikan pengalaman Khoffah Indar Parawangsa (kandidat calon Gubernur Jawa Timur) sebagai *role model* untuk mendongkrak kepercayaan dirinya. Dalam pemilu gubernur Jawa Timur Khoffah Indar Parawangsa berhasil meraup suara terbanyak dibanding calon-calon gubernur lainnya. Pengalaman ini sekaligus menandakan bahwa pilihan politik pemilih di Kabupaten Sidoarjo cukup moderat terhadap pemimpin perempuan. Menurut perhitungan Emy, konteks sosial-budaya patriarki yang biasanya menjadi momok calon pemimpin perempuan untuk maju dalam pemilu gubernur ternyata tidak terlalu signifikan mempengaruhi pilihan politik pemilih di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu jumlah pemilih tetap perempuan di Kabupaten Sidoarjo lebih banyak dibanding dengan pemilih laki-laki. Ini semua menjadi modal sosial bagi Emy untuk maju dalam pemilu gubernur Kabupaten Sidoarjo.

Pada awalnya Emy tidak terlalu memperdulikan statusnya sebagai perempuan yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Bupati. Namun wacana yang berkembang selama fase kandidasi menyebabkan ia berusaha untuk mengantisipasi persoalan yang dapat mengganjal perolehan suaranya nanti. Untuk itu, Emy mengorganisir jaringan organisasi-organisasi sosial khususnya organisasi kewanitaan dan para ulama daerah yang selama ini telah berhubungan selama ia menjadi istri bupati untuk mendukung pencalonannya. Sungguhpun dukungan ini telah dikantongi Emy namun hingga pelaksanaan pemilu gubernur berakhir Emy mengaku

isu perempuan sebagai pemimpin tidak menjadi isu utama yang mengganjal pencalonannya. Justru Emy menyakini kalau dirinya bersama perempuan kandidat lain mendapatkan tempat yang menguntungkan dibandingkan kandidat laki-laki dihadapan pemilih.

Kekuatan lain yang juga menjadi modal sosial Emy adalah jaringan aktivis perempuan, akademisi, dan tokoh masyarakat. Aktifitasnya dalam berbagai organisasi sosial memberikan keuntungan bagi Emy untuk proses kampanye maupun dukungan suara. Organisasi-organisasi yang berada di bawah binaannya tersebut mendukung kampanye Emy dikala mesin politik pengusung Emy tidak bekerja dengan sempurna. Pekerja-pekerja sosial yang selalu bersama-sama dengan Emy dalam menjalankan organisasi banyak yang menjadi sukarelawan tim pendukung pencalonan Emy.

Sementara itu, aktivitas Emy di perguruan tinggi dan jaringan yang luas dikalangan akademisi memberikan keuntungan dalam pembuatan survei pemilih dan elektabilitas Emy dalam pemilukada Sidoarjo.

"Kegiatan survei banyak dikelola oleh mantan mahasiswa saya yang memiliki kemampuan dalam menggalang survei pemilih dan elektabilitas"

(Wawancara dengan Emy Susanti, 23 Agustus 2010).

Jaringan tokoh masyarakat maupun agama yang telah dibangun suaminya dan dirinya selama 10 tahun menjadi bupati dan istri bupati memberikan manfaat luar biasa dalam peningkatan elektabilitas dirinya, terutama untuk meredam isu-isu sosial-keagamaan. Kerisauan Emy tentang perempuan dalam politik dijawab oleh ulama bahwa kriteria pemimpin umat adalah kecakapan dan kapasitas

untuk membawa umat ke kehidupan lebih baik. Para ulama pendukung Emy menilai Emy memiliki prasyarat untuk menjadi pemimpin Sidoarjo, disamping itu Emy memiliki keunggulan dalam hal pengalaman dan pengetahuan karena telah mendampingi suaminya memimpin Sidoarjo selama 10 tahun.

“...Saya tahu bahwa kekuatan saya di perempuan. Bukan karena saya perempuan tetapi saya punya hubungan baik (dengan sesama perempuan). Modal sosial saya adalah dengan sesama perempuan karena merekalah yang selama ini saya dampingi. Jadi modal sosial saya adalah perempuan se-Sidoarjo, termasuk tim sukses saya banyak sekali perempuan terutama yang berada di lapangan...”

(Wawancara dengan Emy Susanti, 23 Agustus 2010).

B.1.4. Modal Politik

Latar belakang Emy sebagai akademisi, aktivis, dan istri bupati dapat dijadikan modal politik yang cukup mumpuni untuk maju sebagai kandidat calon Bupati. Emy memiliki akses baik kepada para pembuat keputusan dan politisi di Kabupaten Sidoarjo karena statusnya sebagai istri bupati. Modal politik lain yang dimiliki Emy adalah pasangannya yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. Jaringan politik Khulaim Junaidi di PAN dan partai politik lain merupakan keuntungan politik bagi Emy saat mencalonkan diri sebagai kandidat calon bupati.

Status sebagai istri Bupati juga lebih memudahkan Emy untuk mendapatkan akses ke masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan dibanding kandidat lain. Emy misalnya tidak memerlukan biaya banyak untuk meningkatkan popularitasnya, merekrut tim pendukung kampanye, dst. Meskipun status Emy dapat juga dimaknai lain oleh kandidat lain, seperti penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye. Untuk hal yang terakhir

sempat membuat Emy mengurungkan niatnya untuk tetap melangkah menjadi kandidat calon bupati.

Jika analisa kekuatan dan modal politik didasarkan pada bekerjanya politik patronase dalam bangunan politik di tingkat lokal, maka kekuatan dan modal politik yang dimiliki Syaiful Illah (kandidat calon bupati lainnya) lebih besar dan menguntungkan. Hal ini disebabkan posisi Emy bukan sebagai penentu kebijakan pemerintah sehari-hari. Posisi Emy saat itu lebih sebagai pemberi pengaruh keputusan politik sebagai aktivis organisasi sosial, konsultan pemerintah daerah, ataupun istri bupati. Ini berbeda dengan Syaiful Illah yang menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo. Meski posisi Syaiful Illah hanyalah wakil bupati, namun dalam beberapa kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, posisi Syaiful dapat menjadi seorang penentu. Politik patronase akan bekerja jika keputusan politik Syaiful semasa menjadi Wakil Bupati Sidoarjo memberikan insentif bagi kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dan baik secara langsung maupun tidak langsung, menempatkan Syaiful sebagai patron politik-ekonomi bagi mereka.

B.2. Proses Kandidasi

B.2.1. Persiapan Kandidasi

Proses kandidasi Emy dimulai dengan pencarian partai politik yang mau mengusungnya dalam pemilukada di Sidoarjo. Kriteria partai politik yang diajukan tim sukses pencalonan Emy adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat menjadi partai pengusung calon dalam pemilukada. Selain itu, tim sukses juga menegaskan bahwa dalam pendaftaran pasangan di

KPUD Emy harus sebagai calon bupati bukan wakil bupati. Dengan kriteria yang telah ditetapkan tersebut, tim sukses kemudian melamar partai-partai politik yang ada dan kira-kira memiliki potensi untuk menang dalam pemilukada. Emy mengakui bahwa keterlibatan langsung dirinya dalam proses kandidasi sangat minim karena saat itu Emy sedang berada di Amerika Serikat bersama anak dan suaminya. Emy menyerahkan proses ini kepada suaminya dan tim sukses untuk mencarikan partai politik yang mau pengusungan dirinya.

“...Ketika itu, (awalnya) saya tidak mau, terus Pak Win bilang (kepada saya agar saya mau) maju dan Pak Win akan *back up* saya 100%. Sepanjang Pak Win bisa bantu (maka akan Pak Win bantu dan orang-orang yang selama ini meminta saya maju (juga) akan bantu. Saya sempat mengatakan bahwa saya ini tidak mengerti apa-apa, *kudu piye* (harus bagaimana)? (Saat itu Pak Win mengatakan kalau) Pak Win yang menjamin proses tersebut sehingga saya *oke* (untuk maju)... Pak Win dan teman-teman yang berjanji akan mengatur mencarikan parpol pengusung. Ketika saya tidak jadi (kandidat calon walikota) Surabaya dan (saya) sudah mulai akan berpikiran mau maju di Sidoarjo, (saat itu) saya (sedang ada) di Amerika Serikat. Nah, saat saya dan keluarga (suami dan anak) di sana, orang-orang yang di Sidoarjo yang getol mencarikan partai politik dan menego-nego partai politik untuk saya..”

(wawancara dengan Emy Susanti, 23 Agustus 2010).

Tim sukses Emy menjajaki Partai Demokrat mengingat partai tersebut pernah mengusung Bambang Joelianto, kader yang dipersiapkan oleh Win Hendrarso. Namun semenjak Bambang Joelianto meninggal dunia, praktis Partai Demokrat belum memiliki calon yang akan diusung dalam pemilukada Sidoarjo. Namun Partai Demokrat memutuskan Yuniwati Teryana dan Sarto sebagai pasangan calon yang akan diusung dalam pemilukada. Setelah gagal di Partai Demokrat, tim sukses menjajaki PDIP untuk mengusung Emy dalam pemilukada walaupun jumlah kursi PDIP di DPRD Sidoarjo hanya 7 kursi atau kurang dari batasan sebagai partai pengusung yaitu minimal 8 kursi. Selagi tim sukses mengurus proses pendaftaran calon di

PDIP, pada saat yang bersamaan tim sukses juga menjajaki partai-partai politik lain. Sementara, PAN dan Partai Gerindra justru melamar Emy untuk menjadikan Emy sebagai calon dari mereka dalam pilukada Sidoarjo.

Emy mengaku kecewa terhadap proses pencalonan dirinya dalam PDIP karena meskipun ia telah mengikuti prosedur pendaftaran di PDIP dalam pengusungan calon namun ia tidak menerima surat resmi dari PDIP apakah dirinya dipilih atau tidak sebagai calon dari PDIP. Informasi hasil pemilihan calon dari PDIP hanya Emy dapatkan dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Sidoarjo melalui telepon. Saat itu, menurut pengurus DPC PDIP, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menetapkan Bambang Prasetyo Widodo dan Khoirul Huda sebagai pasangan calon yang diusung bersama koalisi Partai Golkar, PKNU, dan Hanura). Meskipun hasil tersebut adalah kebijakan internal PDIP yang tidak dapat diintervensi oleh orang di luar PDIP, kekecewaan Emy masih membekas.

Saya mengikuti *fit and proper test* di Jakarta....setelah pulang tidak ada pemberitahuan hasilnya apakah saya diterima (sebagai calon yang diusung oleh PDIP) atau tidak. Tiba-tiba saya terima SMS (*short message service*) yang isinya bahwa ada telepon dari pusat yang mengatakan bahwa yang diterima bukan ibu tetapi orang lain. Saya tidak mau ramai, saya diamkan saja. Padahal saya mendaftar ke PDIP secara resmi, seharusnya pemberituannya secara resmi

(wawancara dengan Emy Susanti, 23 Agustus 2010).

Keputusan untuk menjadikan PAN sebagai partai pengusung dimulai dari adanya tawaran pengurus DPD PAN untuk menjadikannya calon wakil bupati dari pasangan yang diusung oleh DPD PAN. Tawaran ini kemudian ditolak oleh Emy dan tim suksesnya karena Emy dan timnya menginginkan posisi calon bupati. Tawaran kedua PAN datang dari kelompok yang berbeda. Kelompok ini

menawarkan Emy untuk menjadi calon bupati berpasangan dengan Khulaim Junaidi. Menurut Emy, tawaran dari kelompok kedua ini telah mendapatkan restu dari DPP PAN, sementara kelompok pertama hanya mendapat restu dari DPW PAN Jawa Timur. Pinangan Khulaim Junaidi yang diterima Emy pada akhirnya meletupkan perpecahan dalam tubuh DPD PAN Sidoarjo karena DPD PAN juga mengukung pasangan Imam Sugiri dan Ahmad Fathoni Rodhli.

Pada saat pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, kedua pasangan sama-sama mendaftar di hari terakhir dengan membawa pendukung masing-masing. Pasangan Emy dan Khulaim mendapat restu dari DPP PAN sementara pasangan Imam dan Ahmad mendapat restu dari DPW PAN Jawa Timur. KPUD Sidoarjo akan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati berdasarkan rekomendasi dari masing-masing DPP partai politik. Akibat dari prosedur tersebut, Emy-Khulaim ditetapkan oleh KPUD sebagai pasangan yang sah diusung oleh PAN.

Tentang visi dan misi, Emy mengatakan kalau dirinya lebih banyak berperan dalam merumuskan visi dan misi pencalonan sebagai bupati dan wakil bupati. Rumusan visi dan misi tersebut, diakui oleh Emy, memang tidak terlalu sulit dibuat karena sejatinya program yang akan diusung oleh dirinya dan pasangannya adalah melanjutkan program pembangunan yang belum sempat diselesaikan oleh bupati sebelumnya. Hal ini juga ditunjang dengan informasi dan pengetahuan Emy tentang program-program pembangunan yang dilakukan oleh suaminya.

B.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Sengketa di dalam tubuh PAN terjadi karena DPD PAN Sidoarjo yang dipimpin oleh Khulaim Junaidi sebagai ketua dan Sungkono sebagai wakil ketua tidak mengidahkan rekomendasi DPW PAN Jawa Timur yang mencalonkan Imam Sugiri dan Ahmad Fathoni Rodhli. Akibat dari sikap DPD PAN, maka muncul surat keputusan DPW PAN yang memberhentikan Khulaim dan Sungkono sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPD PAN Sidoarjo. Pertikaian ini terjadi sepanjang proses pemilukada Sidoarjo hingga akhirnya DPP PAN menjembatani ketegangan antara pengurus DPD PAN dan DPW PAN. Menurut Emy, dampak dari sengketa ini sangat merugikan dirinya dan pasangannya dalam kampanye.

Hubungan antara Emy dengan PAN, sebagai partai pengusung, tidak semulus hubungan antara kandidat lain dengan partai pengusungnya. Meskipun hanya pasangan Emy-Khulaim yang ditetapkan sebagai pasangan yang diusung oleh DPP PAN, namun persaingan antarpasangan menyebabkan kinerja DPD PAN untuk mendukung Emy-Khulaim dalam pemilukada menjadi tidak maksimal. Pasangan lain DPD PAN, yaitu Iman Sugiri dan Ahmad Fathoni, yang tidak lolos penetapan KPUD melakukan gugatan hukum yang menyedot energi dan konsentrasi tim Emy-Khulaim dalam berkampanye. Sementara kinerja partai pengusung lainnya, Partai Gerindra, belum maksimal karena sebagai partai politik baru belum memiliki pengalaman dalam pemilukada. Seperti diungkapkan Emy sendiri, bahwa kinerja PAN dalam pencalonan dirinya tidak terlalu maksimal, tidak lebih dari 25%, sementara Gerindra belum punya pengalaman dan kinerjanya hanya 45% (wawancara dengan Emy, 23 Agustus 2010).

Tidak maksimalnya kinerja PAN akibat konflik internal menyebabkan beban tugas Emy dan timnya dalam kampanye menjadi besar. Khulaim yang sejatinya adalah Ketua DPD PAN Sidoarjo yang diharapkan dapat menggerakkan mesin partai untuk mensukseskan pemilu ternyata tidak terlalu maksimal dalam memerankan fungsinya. Emy juga mengaku biaya yang dikeluarkan untuk partai tidak sebanding dengan dukungan PAN dalam proses pencalonannya. Untuk kegiatan kampanye sehari-hari kubu Emy lebih banyak mengeluarkan dana.

Pembagian tugas antara Emy dan pasangannya juga kurang maksimal mengingat status Khulaim sebagai Ketua DPD PAN. Selain masalah sengketa, Emy menilai pasangannya terlalu percaya diri karena telah menggandeng istri bupati. Istilah "Pendopo 2" (menunjuk pada istri Bupati) sering kali diutarakan oleh Khulaim untuk menegaskan bahwa dirinya dan pasangannya cukup kuat dan mampu memenangkan pemilu. Akibat terlalu percaya diri ini, kampanye yang dilakukan tidak seintensif yang dilakukan oleh pasangan kandidat lain.

B.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Munculnya perempuan kandidat dalam pemilu di Sidoarjo dianggap oleh anggota KPUD sebagai sesuatu yang biasa karena setiap warga negara, tidak memperdulikan jenis kelamin, memiliki hak politik untuk dipilih. Selain itu, kewenangan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu hanya sebatas administrasi dan verifikasi. Dalam fase pendaftaran kandidat, misalnya, KPUD akan menerima semua pasangan yang secara administrasi memenuhi syarat untuk mendaftar

sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, baik dari jalur pengusungan partai politik maupun jalur independen. Sementara itu, penetapan kandidat calon bupati dan wakil bupati juga telah diatur dalam keputusan KPU sehingga KPUD tinggal menjalankannya saja. Seperti yang terjadi pada konflik didalam tubuh PAN soal adanya dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, KPUD tinggal mengikuti peraturan yang ada bahwa rekomendasi yang digunakan untuk menetapkan adalah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai politik. Untuk itu dalam kasus PAN, menurut Anshori Ketua KPUD Sidoarjo menetapkan pasangan Emy dan Khulaim sebagai pasangan yang sah dalam mengikuti pemilukada Sidoarjo.

Menurut anggota KPUD bisa jadi keberadaan kandidat calon bupati perempuan cukup diuntungkan oleh kondisi dimana jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Sidoarjo lebih dari 54% nya adalah perempuan. Jika menggunakan data pemilu legislatif 2009 ataupun pemilukada gubernur, pemilih perempuan di Kabupaten Sidoarjo juga lebih banyak yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan pemilih laki-laki. Data statistik ini memang menunjukkan keberpihakan untuk perempuan kandidat, namun menurut KPUD semuanya kembali kepada strategi yang dijalankan masing-masing kandidat.

Emy sendiri sebetulnya menyesalkan keputusan KPUD yang menerima pendaftaran dari pasangan Imam Sugiri dan Ahmad Fathoni Rodhli. Menurut Emy, jika KPUD tidak menerima pendaftaran pasangan Imam Sugiri dan Ahmad Fathoni Rodhli, maka sengketa PAN tidak terlalu berimbas pada kinerja Emy dan pasangannya dalam kampanye pemilukada.

B.2.4. Kandidat dan Institusi Sosial

Dukungan bagi Emy dari organisasi sosial Nahdlatul Ulama seperti Muslimat dan Fatayat tidak seperti dukungan kedua organisasi sosial saat suaminya, Win Hendrarso, mencalonkan diri sebagai calon Bupati. Padahal Emy mengharapkan kedua organisasi tersebut memberikan dukungan kepada dirinya baik sebagai perempuan, aktivis perempuan, maupun istri bupati yang telah menjalin hubungan baik dengan kedua organisasi. Menurut Emy, hal ini terjadi karena ada perpecahan dukungan di dalam organisasi Muslimat dan Fatayat. Pasangan Saiful Illah dan Hadi Sutjipto yang didukung oleh PKB merupakan pesaing Emy dalam memperebutkan pengaruh di Muslimat dan Fatayat. Saiful Illah yang juga wakil bupati mendapat akses yang lebih baik untuk mendapatkan pengaruh di kedua organisasi.

Politik uang di Sidoarjo merupakan hal yang lumrah dalam pelaksanaan setiap pemilu. Praktek ini dianggap biasa karena setiap kali pemilu kepala desa, warga desa selalu diberi uang untuk mendukung calon kepala desa. Kebiasaan ini semakin besar kegiatan pemilu yang lebih besar, seperti pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, maupun pemilu presiden. Politik uang hanya akan menguntungkan para kandidat yang memiliki dana besar. Sementara, kandidat yang tidak memiliki dana tetapi memiliki kapasitas dan kepemimpinan akan sulit bersaing dalam pemilu. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh Emy. Emy mengaku tidak disokong oleh dana yang besar dan ini menyulitkan dirinya untuk mendapatkan suara dari pemilih jika politik uang memang menjadi determinan dalam memenangkan pemelukada.

C. YUNIWATI TERYANA

C.1. Profil Kandidat

C.1.1. Biografi

Yuniwati Teryana lahir pada 1 Juni 1956. Bapakny adalah anggota TNI. Istri pengusaha Achmansjah Hasan ini telah dikaruniai dua orang anak. Pendidikan tinggi terakhirnya adalah *Master of Business Administration* (M.B.A.) dalam bidang *Human Resource* yang diperoleh dari City University Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1992. Bersama dengan tim suksesnya dalam pemilukada Sidoarjo, Yuniwati mencitrakan dirinya sebagai "Srikandi".

Yuni, demikian biasa ia disapa, sebelum mencalonkan diri sebagai kandidat bersama dengan H.Sarto adalah *Vice President Public Relations and Communications* Lapindo Brantas Inc. Jabatan strategis ini merupakan puncak karir profesional Yuni. Jabatan ini pula yang mengangkat nama Yuni sehingga dikenal luas masyarakat Sidoarjo, terutama semenjak semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang terjadi pada 29 Mei 2006 lalu. Sebagai seorang *vice president public relations and communications* pada perusahaan yang terkena masalah, ia harus berinteraksi langsung dengan masyarakat korban lumpur Lapindo maupun berkomunikasi dengan pemerintah dan media massa tentang kemajuan penanganan semburan lumpur hingga penanganan ganti rugi korban lumpur.

C.1.2. Motivasi Kandidat

Yuniwati bukan satu-satunya kandidat pemilukada yang bekerja pada PT Lapindo Brantas dan anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ). Selain Yuniwati yang diusung Partai Demokrat, terdapat Bambang Prasetyo Widodo (Direktur Operasional PT MLJ) yang diusung oleh Partai Golkar, Hanura, dan PKNU dan Gesang Budiarmo (Komisaris PTM MLJ) namun nama yang terakhir gagal ditetapkan sebagai kandidat. Motivasi keberadaan mereka dalam kompetisi memperebutkan jabatan politik tertinggi di Kabupaten Sidoarjo, tempat terjadinya semburan lumpur lapindo, merupakan pertanyaan besar.

Ketika ditanya apakah dirinya maju menjadi calon Bupati Sidoarjo karena panggilan nurani atau ada agenda tertentu, Yuni menjawab bahwa nurani saja tidak cukup. Kalau soal nurani, lanjut Yuniwati, sudah jelas karena dirinya mencintai rakyat Sidoarjo. Menurutnya hal itu sudah dibuktikan dengan upaya dia dalam penanganan proses ganti rugi korban lumpur. Namun Yuni menganggap masih banyak persoalan besar seperti kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan di Sidoarjo. Agenda ini yang mendorong dirinya untuk maju dalam pemilukada.

“..begitu saya masuk ke beberapa wilayah, ke pelosok-pelosok desa di Sidoarjo ternyata yang semula saya anggap Sidoarjo ini sudah sedemikian bagus, makmur, ternyata tidak. Banyak masyarakat yang masih miskin. Anak-anak ada yang belum bisa bersekolah, itu mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) ya, anak usia dini mengeluhkan. Juga saya lihat juga ada sektor-sektor wilayah yang jalannya saja susah sekali sampai mereka tidak bisa, susah melakukan aktivitas sementara di sana ada ratusan kepala keluarga yang hidup. Artinya, ada kehidupan, ada suatu wilayah desa-desa gitu, tidak ada penerangan, air bersih juga sulit. Ini yang saya berpikir sebetulnya Sidoarjo ini memang masih memerlukan banyak yang perlu digarap...”

(Wawancara dengan Yuniwati Teryana, 14 Juli 2010).

Pengalaman Yuni saat melakukan *roadshow* keberbagai wilayah di Sidoarjo telah mengubah pandangannya selama ini tentang Sidoarjo. Berdasarkan pengamatan itu Yuni berkesimpulan bahwa masyarakat Sidoarjo di desa-desa masih banyak kekurangan pada aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penghasilan. Persoalan kemiskinan baginya masih merupakan agenda penting untuk diselesaikan. Ini yang menjadi motivasinya untuk maju sebagai calon bupati. Untuk keluar dari persoalan-persoalan sosial-ekonomi tersebut, menurut Yuni, diperlukan juga sentuhan dari tangan-tangan profesional yang memiliki pengetahuan lebih segar untuk duduk sebagai pengambil kebijakan.

"...Salah satunya (motivasi) saya ingin berbuat banyak untuk Sidoarjo. Kita ini sudah melakukan banyak sebetulnya, dengan masyarakat korban lumpur. Susah teriak-teriak, demo sampai akhirnya mereka mengucapkan terima kasih. Itu *kan* satu kepuasan batin yang luar biasa. Jadi bagaimana *men-treat* mereka. Orang yang merasa putus asa, sekarang itu mereka sebagian sudah jadi orang semua. Kaya-kaya gitu *kan*. Iya bu, itu *kan* gak pernah diekspos. Tapi dengan pembayaran 1,5 juta, 1 juta, seperti itu membuat mereka terangkat kehidupannya. Walaupun masih ada sebagian kecil yang belum selesai itu *kan* karena ada permasalahan surat-menyurat juga. Kemudian memang dengan berjalannya waktu, perusahaan ini *kan* tidak semua-semuanya ada di atas, adakalanya dia ada di bawah. Sekarang ini sedang proses cicilan. Sebenarnya dengan pembayaran 20 juta itu mereka sebenarnya sudah bisa membeli rumah yang baru dengan nilai yang baru itu lho..."

(Wawancara dengan Yuniwati Teryana, 14 Juli 2010).

Peningkatan partisipasi perempuan Sidoarjo dalam pembangunan merupakan agenda lain yang akan diperjuangkan oleh Yuni. Peran ideal perempuan saat ini menurut Yuni tidak hanya berhasil menjalankan kodratnya sebagai perempuan, istri, dan ibu dari anak-anaknya tetapi perempuan juga dapat memiliki kontribusi lebih besar di masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut para perempuan Sidoarjo ataupun komunitas perempuan harus memiliki keinginan untuk maju dan berperan lebih banyak. Sementara, pemerintah memiliki kewajiban untuk terus

mendorong melalui program-program pemberdayaan perempuan.

C.1.3. Modal Sosial

Secara umum, modal sosial yang dimiliki Yuni tidak terlalu besar dibandingkan dengan perempuan kandidat lain yang aktif dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Setidaknya ada tiga modal sosial yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan Yuni ketika berniat untuk maju sebagai calon kandidat Bupati Sidoarjo yaitu kedekatannya dengan organisasi keluarga dan purnawirawan TNI, interaksi yang intensif dengan masyarakat dan kelompok-kelompok di Kabupaten Sidoarjo yang terkena musibah Lumpur Lapindo, dan jaringan profesional/pengusaha di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Pekerjaan Yuni sebagai profesional pada perusahaan-perusahaan perminyakan nasional maupun internasional menyebabkan cakupan jaringan yang dimiliki hanya meliputi sesama profesional. Sementara, aktivitas suaminya sebagai pengusaha turut memberikan andil saat berjejaring dengan kalangan pengusaha di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Dalam memaksimalkan jaringannya dengan kalangan profesional dan pengusaha di Kabupaten Sidoarjo, Yuni memanfaatkan organisasi-organisasi perburuhan yang banyak terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kawasan industri di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggandeng pengusaha industri dan organisasi buruh maka suara dari kalangan buruh merupakan aset politik yang dapat dimanfaatkan oleh Yuni untuk memenangkan pemilukada. Modal sosial ini yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat lainnya.

Walaupun begitu, Yuni kurang memiliki jaringan dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo, walaupun ada itupun sebatas penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat semburan lumpur Lapindo. Kedekatannya dengan organisasi keluarga dan purnawirawan TNI merupakan modal yang utama.

Karir profesional Yuni juga sulit untuk dijadikan modal sosial sebagai pemimpin daerah. Pengetahuan dan pengalaman profesionalnya sebagai humas perusahaan hanya dapat berguna pada saat kampanye, yaitu saat mempersiapkan strategi meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Pengetahuan dan pengalaman memimpin di perusahaan tidak serta merta dapat diterapkan saat memimpin pemerintahan. Jabatan Bupati adalah jabatan politik. Keputusan politik (kebijakan) seorang Bupati tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar keuntungan atau kerugian bagi pemerintah, tetapi lebih pada seberapa banyak keputusan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Perbedaan *nature* ini yang juga pernah dikeluhkan oleh keluarga Yuni. Pada awalnya keluarga lebih menyarankan untuk tetap berkiprah pada dunia profesional, namun karena sudah terlanjur berjalan akhirnya mereka mendukung langkah Yuni.

Status sebagai perempuan tidak dirasakan Yuni sebagai modal sosial. Seperti di dunia profesional yang tidak membedakan jenis kelamin, penilaian terhadap pencalonan dirinya pun bukan karena jenis kelamin melainkan karena visi, kualitas dan kinerja.

C.1.4. Modal Politik

Pengalaman politik yang relatif tidak dimiliki oleh Yuniwati membuat dirinya mesti mencari kendaraan politik untuk maju ke “W-2”. Yuniwati bukan sosok yang meniti karir politik sejak awal. Untuk kepentingan ambisinya dalam pemilukada Yuniwati mendapatkan kendaraan politik dari Partai Demokrat. Dukungan dari Partai Demokrat, menjadi modal politik dia untuk maju sebagai kandidat, karena partai ini menjadi pemenang pemilu legislatif di Sidoarjo dan dalam pemilihan presiden.

C.2. Proses Kandidasi

C.2.1. Persiapan Kandidasi

Persiapan Yuni untuk maju sebagai kandidat calon Bupati diawali dengan mengukur popularitas dan memperbaiki citra diri. Upaya itu dilakukan semata-mata untuk menghapus kesalahan persepsi masyarakat tentang dirinya dan lumpur Lapindo. Selain itu, upaya ini juga dilakukan untuk menarik perhatian partai politik yang akan mengusung dirinya, karena saat itu belum ada satupun partai politik yang mendekati dirinya.

Strategi *branding* yang dijalankan Yuni mulai membuahkan hasil. Di samping popularitas semakin meningkat serta citra buruk dirinya dan lumpur Lapindo mulai berkurang, beberapa partai politik mulai mendekati Yuni. Sembari kegiatan *branding* tetap dilakukan tim sukses, Yuni mulai memutuskan untuk melakukan lobi-lobi dengan partai politik. Targetnya tentu saja adalah partai politik besar dan memiliki kursi di DPRD yang cukup untuk mengusungnya sebagai kandidat calon bupati. Pilihan

kemudian jatuh kepada Partai Demokrat yang memiliki 11 kursi di DPRD Sidoarjo. Jumlah kursi ini melebihi *threshold* yang dipersyaratkan sehingga tidak mengharuskan untuk berkoalisi dengan partai politik lain.

Pendaftaran, pemaparan visi dan misi, hingga *fit and proper test* di Partai Demokrat yang diikuti 12 peserta turut dijalani Yuni sesuai dengan prosedur partai. Akhirnya Tim 9 Partai Demokrat (tim yang bertugas menentukan calon kepala daerah) memutuskan untuk membawa nama Yuniwati ke DPP Partai Demokrat untuk kemudian direkomendasikan. Tidak terlalu lama menunggu surat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat turun. Sementara itu, pasangan yang diajukan untuk mendampingi Yuni sebagai calon wakil bupati adalah H. Sarto yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Sidoarjo.

Pada awalnya keluarga tidak menyetujui Yuni untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sidoarjo. Pertimbangan keluarga saat itu adalah bahwa dunia politik dan birokrasi selalu penuh dengan intrik, persaingan dan kotor. Persepsi ini terbangun karena interaksi suami Yuni sebagai pengusaha ketika berurusan dengan birokrasi. Namun setelah Yuniwati bersikeras untuk menekuni dan sudah masuk dalam proses kandidasi maka suami dan keluarganya mendukung jalan yang diambil oleh Yuniwati.

“...Keluarga mulai mengeluh. (suami saya berkata)...kamu itu *kan* profesional, mama tetap saja di profesional. (pikiran suami saya) birokrasi itu *kan* ada KKN-nya, unsur begini, politis, begitu *kan* kalau kita lihat awalnya. Tapi setelah kita sudah menekuni dan sudah di tengah jalan, ya akhirnya mereka mau tidak mau sekarang *all-out, supporting..*”

(Wawancara dengan Yuniwati Teryana, 14 Juli 2010)

C.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Setidaknya ada empat alasan mengapa Partai Demokrat menjatuhkan rekomendasi kepada Yuni. *Pertama*, popularitas Yuni yang semakin meningkat sungguhpun Yuni belum dijagokan oleh Partai Demokrat. Peningkatan popularitas Yuni tidak terlepas dari strategi yang dijalankan oleh tim sukses yang dituangkan melalui *banner*, spanduk dan liputan media massa. *Kedua*, Yuni membangun pencitraan sebagai “Srikandi”, juga menebar jargon-jargon kampanye, seperti “Sido Sehat” “Sido Pinter”, dan “Sido Makmur”. Pencitraan dan jargon ini sudah sering terdengar oleh masyarakat Sidoarjo dan pesannya sangat kuat sehingga menjadi keunggulan buat Yuni. *Ketiga*, kesamaan visi dan misi yang ditawarkan Yuni dengan Partai Demokrat. *Keempat*, jenjang pendidikannya yang telah meraih gelar master. Selain dari keempat alasan diatas sebagaimana yang diungkapkan Slamet Wijaya, Sekretaris DPD Partai Demokrat dan anggota tim sukses, rumor yang beredar di masyarakat juga sebagian diakui oleh tim sukses Yuni adalah kekuatan modal yang dimiliki oleh Yuni dibanding kandidat-kandidat lain yang melamar di Partai Demokrat.

Berbeda dengan kondisi yang terjadi di PAN saat mengusung Emy Susanti, tidak ada perpecahan yang muncul seiring dengan pengusungan Yuni oleh Partai Demokrat. Solidnya dukungan 18 PAC Partai Demokrat se-Sidoarjo memudahkan langkah pasangan Yuni dan Sarto untuk berkonsentrasi pada kampanye. Komunikasi politik yang dijalankan oleh Yuni dan Sarto dengan cara bersilaturahmi dengan seluruh Ketua PAC Partai Demokrat memberikan hasil positif berupa lahirnya tekad dari 18 PAC Partai Demokrat untuk mengamankan surat rekomendasi

bernomor 131/AKMD/DPP.PD/III/2010 dari DPP Partai Demokrat kepada pasangan Yuni dan Sarto.

Partai Demokrat berhasil menggerakkan mesin partainya hingga ke tingkat desa. Pengurus Partai Demokrat yang tersebar di 351 desa di Kabupaten Sidoarjo rutin disambangi oleh tim sukses untuk menjaga komitmen mereka sekaligus mendukung kampanye mereka di tingkat desa.

Komposisi pasangan yang menempatkan Sarto (Ketua DPC Partai Demokrat) sebagai calon wakil bupati tidak terlalu menjadi persoalan serius bagi pengurus maupun kader Partai Demokrat. Sebab, sebelum penetapan pasangan oleh DPP Partai Demokrat para pengurus telah menyosialisasikan bahwa ada jaminan pengurus partai yang akan maju dalam pemilukada. Para pengurus juga menjelaskan bahwa komposisinya sangat bergantung pada keputusan dari DPP Partai Demokrat apakah Sarto menjadi “W1” atau “W2”. Alternatif yang juga telah disiapkan adalah menempatkan Daud, Ketua DPRD Sidoarjo dari Partai Demokrat sebagai penghubung antara Yuni-Sarto dan kader Partai Demokrat.

Kelebihan lainnya adalah Yuni dan Sarto memiliki segmentasi pemilih yang berbeda,

“...Yuniwati diproyeksikan untuk menarik pemilih perempuan dan kalangan ekonomi menengah-atas. Sementara, Sarto memiliki segmentasi pemilih menengah-bawah...”

(Wawancara dengan Slamet Wijaya, 14 Juli 2010).

Menjadikan Yuniwati sebagai penarik pemilih pada segmentasi kalangan menengah-atas dan berpendidikan tinggi dapat dikatakan keluar dari standar baku pembagian peran dan posisi perempuan dalam masyarakat. Selama

ini pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan selalu menempatkan perempuan untuk wilayah kerja domestik. Sementara dalam kasus ini, Yuniwati diberikan peran untuk menggarap pemilih dari kalangan berpendidikan dan ekonomi menengah-atas yang tentu tidak berkesan domestik.

Hubungan antara Yuni dan Partai Demokrat dalam kampanye sempat terganggu akibat adanya dua tim sukses, yaitu tim sukses yang sejak dulu telah menggarap Yuni dan tim sukses Sarto dari Partai Demokrat. Komunikasi antar kedua pihak sering kurang bagus di lapangan dan tidak terkoordinasi sehingga yang muncul adalah persaingan antar tim sukses. Untuk mengatasi masalah ini jalan keluarnya adalah menggabungkan kedua tim sukses.

C.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Dalam prosedur pendaftaran, pasangan “YeS” (sebutan populer untuk pasangan Yuni dan Sarto) relatif tidak menemui kendala karena tidak adanya friksi internal di dalam Partai Demokrat.. Lebih lanjut, sama seperti yang dialami oleh Emy Susanti, sikap KPUD Kabupaten Sidoarjo terhadap kandidat calon bupati perempuan tidak dibedakan dengan kandidat calon bupati laki-laki.

C.2.4. Kandidat dan Institusi Sosial lainnya

Penjajakan dan pendekatan Yuni dan Sarto terhadap organisasi sosial-keagamaan sangat intens dilakukan. Hal ini tidak hanya dilakukan untuk mengantisipasi isu perempuan kandidat tetapi juga upaya untuk meraih simpati para pengikut NU dan Muhammadiyah. Strategi yang mereka

jalankan adalah melakukan *sowan* kepada ulama-ulama NU dan Muhammadiyah untuk mendapatkan restu. Strategi *sowan* hanya untuk membuka “pintu”, sementara penggalangan dukungan langsung ke massa akar rumput merupakan hal yang paling utama. Strategi ini, diakui Slamet, mengikuti jejak yang dilakukan SBY dalam pemilu presiden tahun lalu.

D. Hj. EMILIA CONTESSA

D.1. Profil Kandidat

D.1.1. Biografi

Hj. Emilia Contessa terlahir di Banyuwangi dari pasangan Hasan Ali dan Anna Susiani, yang sudah cukup lama tinggal di Banyuwangi, tokoh Partai Nasional Indonesia di kota itu, bahkan keluarga besarnya masih tinggal di Banyuwangi. Sebagaimana dinyatakan “seluruh keluarga besar saya tinggal di Banyuwangi”. Hobby menyanyi dan semenjak kecil ibunya selalu mendorongnya untuk berprestasi. Di tahun 1970-an Emilia diajak rekaman di Singapura oleh pencari bakat Lee Kuan Yew didampingi oleh ibunya. Jalan menuju penyanyi profesional terbuka setelah Emilia berhasil menjuarai pop singer di tahun 1976.

Popularitasnya semakin menguat setelah tampil di TVRI melalui acara hiburan yang dibawakan oleh Chris Pattikawa. Popularitasnya semakin meningkat karena Emilia Contessa (nama Contessa ditambahkan belakangan setelah tampil di TVRI, sebelumnya ia dikenal dengan Emilia Hasan) merupakan penyanyi dijamannya memiliki suara khas—

sopran yang *powerfull* dan lantang—dan juga memiliki *performance* atau aksi panggung yang cukup berbeda dengan penyanyi lainnya.

Emilia menikah pertama kalinya dengan Rio Tambunan, seorang pejabat Pemda DKI, dan dikarunia 2 orang anak, Denada Elizabeth Anggia Ayu dan Enrico Wendri Rizky. Pernikahan yang kedua adalah dengan Abdullah Surkaty dan dikarunia seorang anak. Pernikahan ketiga dengan seorang duda beranak dua keturunan Arab, purnawirawan TNI dan mantan Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dari pernikahan ini Emilia mendapat keturunan seorang anak laki-laki yang diberi nama Kaisar Hadi Haggy Al-Hadar.

Denada sang anak pertama, memberikan dukungan kepada ibunya untuk mengikuti pencalonan Bupati Banyuwangi, karena menurut penilaiannya ibunya *itukan* “pantas dari segi kualitas” dan mamanya itu punya banyak keinginan untuk warga Banyuwangi. Motivasi Emilia untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada warga Banyuwangi dimaknakan oleh seorang anggota tim suksesnya sebagai berikut:

“...saya mengenali cukup lama dengan Emil, bahkan ketika masih di PPP dan mencalonkan sebagai DPC Banyuwangi...yang saya tangkap dari dia adalah bahwa dia bersungguh-sungguh ingin pengabdianya bagi Banyuwangi dan dengan menempati jabatan bupati maka akan lebih leluasa untuk mewujudkan keinginannya itu”.

D.1.2. Motivasi Kandidat

Motivasi Emilia untuk maju sebagai kandidat Pemilukada Banyuwangi terutama karena dilandasi keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat daerah kelahirannya. Berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya melalui berbagai kegiatan untuk ikut serta mengatasi permasalahan yang

dihadapi masyarakat Banyuwangi, sebagaimana dinyatakan Emilia bahwa Banyuwangi selalu menjadi prioritas buat dirinya. Ada perasaan memiliki terhadap Banyuwangi sehingga segala keburukan, keresahan masyarakat ataupun bencana tidak pernah luput dari perhatiannya meskipun dia bermukim di Jakarta.

Sege nap perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Banyuwangi diupayakan penyelesaiannya melalui berbagai cara, melalui penggalangan dana dan memanfaatkan jejaring sosial yang dimiliki. Sebagai contoh ketika kejadian tsunami di Banyuwangi, Emilia berupaya membantu Banyuwangi dengan mengadakan penggalangan dana bagi orang Banyuwangi yang hidup di luar Banyuwangi terutama di Jakarta.

“sebagai seorang Osing sini dan saya merasa, pak *kalah* saya bilang, bukannya saya sok, tapi di sepanjang hidup saya, Banyuwangi itu selalu menjadi prioritas buat saya. Apapun yang terjadi, apabila ada sekelompok orang ingin memperbaiki atau membenahi, pasti saya akan kejar. Itu sejak saya muda, seperti itu. Misalnya seperti kejadian kemarin di Banyuwangi, waktu tsunami terjadi di Banyuwangi, saya orang Banyuwangi yang hidup diluar Banyuwangi yang pertama bangkit. Saya mengumpulkan teman-teman saya, saya mengajak Pak Murdono..kami membuat *show*, pertunjukan sosial, untuk penggalangan dana untuk mencari dana bagi korban tsunami pada waktu itu. Hasil dari pagelaran di gospit, tahun 1994. Kita dapet uang 2 milyar, saya serahkan sama teman-teman bukan di Banyuwangi, kita berikan ke korban-korban. Pada waktu 2004 seperti itu juga kejadiannya...”

(Wawancara dengan Emilia Contessa, tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Banyuwangi selalu diamati dan dicermati yang menurut Emilia, di Banyuwangi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat,

"....terjadi banyak demonstrasi, banyak pasukan kuning sudah selama 9 bulan tidak menerima gaji, dan guru lauk pauknya tidak diperhatikan, tenaga honorer, 3000 *booker* tidak dibayar, padahal Banyuwangi memiliki dana dan kekayaan alam yang luar biasa, yang kalau pemerintah berusaha akan bisa menghilangkan *booker* yang ada di Banyuwangi..."

(Wawancara dengan Emilia Contessa, tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Keyakinan untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Banyuwangi dengan membandingkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Situbondo (Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Banyuwangi) sebagaimana dinyatakan Emilia:

"Situbondo yang lebih rendah uangnya dan tidak sebanyak Banyuwangi, tetapi Situbondo tidak pernah memiliki *booker*, "...ini *kan* sebetulnya hanya masalah mau capek atau *ndak* aja *kan*, simpel sekali. Terus, banyak sekali lah, seperti kasus lamper, banyak sekali lah kasus-kasusnya, dan ini tidak terselesaikan dan mencuat dan meresahkan warga Banyuwangi..."

(Wawancara dengan Emilia Contessa, tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Tidak tersirat dan terucap dalam proses wawancara bahwa kandidasi ini dimotifkan oleh kepentingan ekonomi, menurutnya secara ekonomis jauh lebih besar pendapatannya sebagai artis, tetapi karena ada pemikiran ingin membangun keterpurukan Banyuwangi maka ia harus mendapatkan jabatan tersebut. Hanya dengan mendapat jabatan Banyuwangi ia bisa mengubah kondisi.

D.1.3. Modal Sosial

Jejaring sosial Emilia Contessa sebenarnya lebih berada di Jakarta, pengembangan jejaringnya melalui organisasi sosial kemasyarakatan dimulai ketika menjadi istri Rio Tambunan. Dalam konteks Banyuwangi jejaring sosialnya lebih mengandalkan pada ikatan-ikatan kekerabatan serta pendukung dari PPP (jejaring lama ketika Emilia Contessa menjadi salah seorang calon dalam pemilihan Ketua DPC

PPP Banyuwangi), komunitas-komunitas budaya baik Mataraman maupun Osing. Status sebagai anak daerah Banyuwangi dan sebagai “Wong Osing” menjadi modal sosial Emilia untuk maju dalam pemilukada. Bagaimanapun keterikatan emosional Emilia sebagai putra daerah Banyuwangi menjadikan ia ingin memperbaiki apa yang menurutnya masih buruk dan perlu dibenahi. Sebagaimana dinyatakan seorang tokoh budaya Osing, Syeh Narso:

“.....Saya tidak langsung menjadi tim sukses tetapi lebih memilih dukungan pribadi karena menurutnya lebih bebas dan biar diterima semua kalangan, komunitas yang selama ini menjadi kelompoknya seperti para seniman, budayawan, kalangan pengusaha dan pemerhati budaya Osing...”

(Wawancara dengan Syeh Narso, tanggal 12 Juli 2010)

Selain sebagai putra Banyuwangi, menyandang predikat “artis” menjadikan ia sangat percaya diri untuk memasuki arena kontestasi politik. Kepopuleran sebagai membuatnya tidak perlu bersusah payah untuk “*mem-branding*” dirinya diberbagai media sebagaimana yang dilakukan kandidat lain.

Emilia sangat sadar akan keartisannya dan keperempuannya bisa dimanfaatkan sebagai modal untuk mendapatkan dukungan politik. Baginya anggapan bahwa perempuan itu lemah dan tidak sebandai serta tidak sekuat laki-laki, justru menguntungkan dia dan dijadikan sebagai nilai lebih. Dengan anggapan ini orang justru akan bersimpati pada perempuan. Menurut Emilia apa yang menjadi kelemahan yang ada pada perempuan bisa diubah dan dimanfaatkan menjadi kekuatan buat perempuan. Disisi lain Emilia pun sadar bahwa ia relatif kurang cukup waktu untuk menggalang massa, maka pemanfaatan fisik keperempuannya dan keartisannya menjadi andalannya.

D.1.4. Modal Politik

Perhatiannya Emilia pada Banyuwangi cukup tinggi, ditunjukkan dari pemahaman yang cukup mendalam atas berbagai persoalan, potensi serta kendala-kendala yang dihadapi daerahnya. Emilia mengaku bahwa setiap tiga bulan ia bolak-balik Jakarta-Banyuwangi, dan hal ini menurutnya dikarenakan rasa persaudaraan dan *sense of belonging* dirinya termasuk keluarganya, terhadap Banyuwangi sungguh besar.

Suami Emilia *kanyang* seorang mantan perwira menengah AD, yang juga mantan anggota DPR dari Fraksi PPP Periode 2004-2009, yang juga berasal dari Kabupaten Banyuwangi, karir politiknya di legislatif nasional setidaknya mendorong dia untuk berkarir dalam jabatan-jabatan di luar legislatif yakni sebagai bupati. Keberadaannya di kepengurusan di DPP PPP merupakan akses dia untuk meniti karir politiknya. Meskipun dia tidak mendapat rekomendasi dari partainya, tetapi kemampuan lobinya ke Prabowo sebagai Pembina Partai Gerindra memuluskan jalan dia untuk maju ke dalam pemilukada.

Emilia mengawali karir politiknya di bawah naungan PPP dimana sejak tahun 2004-2009 menjadi anggota DPR RI, dan pada tahun 2009 dia menjadi anggota DPR RI yang kedua dari PPP. Pada tingkat lokal (Kabupaten Banyuwangi) Emilia pernah mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PPP Banyuwangi namun harus menelan kekalahan dari rivalnya Zainuri, yang kini dipilih sebagai wakilnya dalam pemilukada.

"...jadi kita berteman, tapi saya *kan* pernah mencalonkan menjadi Ketua DPC PPP Banyuwangi, dulu di atas kertas saya sudah menang, saya sudah itung mayoritas. Nah, tiba-tiba kebetulan salah satu saingan saya yang paling kecil suaranya, itu namanya Haji Ikhrom, itu adalah temennya Pak Zainuri itu, temennya juga ada beberapa teman saya yang lain. Mereka bersama-sama menghabsi saya...Jadi, beberapa orang PAC yang memilih saya adalah santrinya Kiai Bawair. Jadi mereka minta ke Kiai Bawair untuk supaya yang mendukung saya itu supaya mengundurkan diri. Nah, dari situ lepas-lepas-lepas saya *kan* kalah. Pada waktu itu *kan* calonnya ada tiga, saya, Fauzan, Haji Ikhrom. Saya sudah bilang sama Fauzan, mendingan kita bersatu saya ketua, kamu sekretaris. Kenapa? Saya bilang, karena saya hidup di Jakarta. Saya kesini mungkin hanya dua bulan sekali. Kamu sekali menjadi sekretaris, kamu yang akan menjalankan roda organisasi. Saya bilang, tapi saya perlu jabatan sebagai Ketua, karena saya akan biyai PPP di Banyuwangi. Saya akan berikan kantor. Saya hanya minta dua hal, nggak bisa diganggu waktu pileg dan pada waktu pilgub. Tapi selebihnya silahkan kamu memutuskan. Saya bilang, apa saja terserah kamu. Tidak mau, si Fauzannya. Dia yakin dia juga menang. Padahal di atas kertas dia sudah pasti kalah. Dia *kan* melobi saya, dia minta jadi ketua, saya jadi sekretaris. Saya bilang kalau kamu mau *sharing*, saya Ketua. Nah, yang ngacak-ngacak ini adalah Ikhrom. Dengan memanfaatkan Kiai Bawair bersama-sama Haji Zainuri. Jadi begitu saya tahu di belakangnya ini adalah Haji Zainuri langsung saya putuskan hubungan saya dengan Haji Zainuri. Suami saya bencinya luar biasa sama Haji Zainuri. Karena dianggapnya bisa dia bersahabat dengan kami dan dia menjatuhkan saya. Trus sudah selesai, bertahun-tahun saya tidak bertemu dengan Haji Zainuri.."

(Wawancara dengan Emilia Contessa, tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Pengalaman di partai politik membawa serta pada dorongan memperluas sayapnya di eksekutif. Pada Pemilu 2005 sebenarnya keluarga dan teman-temannya telah mendorong Emilia untuk maju sebagai Calon Bupati Banyuwangi,

"...pada saat itu sebetulnya paling penting untuk saya, dan pintu sangat lebar terbuka, karena saya anggap lawan-lawannya tidak sekuat yang sekarang. Karena itu sayang sekali. Sejujurnya, pada waktu Bu Mega, saya dipanggil oleh Pak Agum Gumelar, beliau menjadi menteri perhubungan, saya dipanggil untuk dihadapkan kepada Ibu Presiden pada waktu itu untuk dijadikan Bupati Banyuwangi. Saya pada waktu itu menolak..kalah kita bicara jujur, sejujur-jujurnya, duitnya artis lebih banyak daripada bupati. Oh, *ndak* bisa, bupati *kan* lebih banyak duitnya. Darimana? *kan* berarti tidak jujur.."

(wawancara dengan Emilia Contessa, tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

D.2. Proses Kandidasi

D.2.1. Persiapan Kandidasi

Sebenarnya Emilia awalnya mendorong suaminya untuk maju dalam pemilukada di Banyuwangi, namun ternyata suaminya sama sekali tidak tergerak untuk maju dalam kandidasi.

Emilia mendorong suaminya karena melihat potensi yang dimiliki suaminya. Suaminya yang kebetulan mantan tentara, mantan anggota DPR-RI, yang tentunya memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyelesaikan carut marutnya Banyuwangi. Namun rupanya suaminya tak tergerak sekalipun, sehingga Emilia mengambil keputusan untuk tetap mengikuti pemilukada. Sebagaimana dinyatakan Emilia

“...jadi sebetulnya sejak 2009 itu saya sudah mendorong-dorong suami saya dan minta kepada suami saya karena mantan tentara, mantan anggota DPR-RI, tentu memiliki kapasitas yang lebih lebar, saya merasa seperti itu”.

(wawancara dengan Emilia Contessa, tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Proses pengambilan keputusan untuk maju dalam pemilukada Banyuwangi melibatkan seluruh anggota keluarga. Orangtua Emilia (ibu), merasa bahwa anaknya memiliki modal yang cukup untuk memperoleh dukungan masyarakat. Sebagai artis yang terkenal lebih mudah untuk dipromosikan kepada masyarakat dibanding mempromosikan suaminya sebagai mantan tentara, sebagaimana dinyatakan ibu dari Emilia:

"Kalau orang itu diadu pasti milih Emil, *kalau* maju dua-duanya, yang dipilih Emil..*kan* lebih baik satu yang maju daripada dua-duanya..ini *kan* karena tentara, terlalu saklek, ngomongnya *kan* kepotong-potong. Pendiam dan lagi ngomongnya ya kaya tentara gitu..*kan* sungkan ya pak ya..cerita ya bisa, cuman lebih---apa ya namanya, umpamanya orang dijual biar lebih laku..tempo hari *kan* mau nyalon dua..mohon maaf bu, kalau saya *njajanin* jajanan, *gedhang* goreng misalnya, saya *njajanin* bu Emil gampang daripada *njajanin* bapaknya..karena pembelinya dimana saja saya *ndak* tahu..kalau bu Emil gampang, itu kiasan ya pak ya.."

(Wawancara dengan Ibu dari Emilia Contessa, tanggal 13 Juli 2010)

Dan menurutnya lagi anak-anak Emilia lebih menyerahkan keputusan kepada Emilia meski Denada lebih menunjukkan kerisauannya,

"..ma, *nggak* enakan nyanyi, ma? Apa *nggak* didemo orang? Nyanyi *aja* sudah, nanti orang tersinggung malah marah..udah lah ma, santai aja, apa sih yang dicari? Kita semua sudah ada, sudah ada dari bapaknya, dari dia sendiri"

(Wawancara dengan Ibu dari Emilia Contessa, tanggal 13 Juli 2010)

Problematika yang diangkat sebagai isu publik di Banyuwangi dalam rangka kandidasinya berangkat dari realitas perseptual Emilia. Isu pendidikan, kemiskinan, kesehatan tak luput dari Emilia karena memang penyelesaian masalah itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat Banyuwangi.

"...dan saya rasa bukan hanya Banyuwangi. Saya lihat kemarin di *Kompas*, justru bupati-bupati, kepala daerah yang berhasil mendapatkan suara mutlak, mayoritas. Antara lain, salah satunya adalah suaminya Ratna ini. Dan saya nggak usah mencari-cari karena semua sebetulnya program yang ada pada misi visi saya itu betul-betul itu adalah kreasi saya. Tidak ada sama sekali campur tangan dari manapun. Saya hanya minta, saya bilang, saya mau mengangkat masalah ini, masalah ini, *udah*. Makanya saya tidak punya bayangan-bayangan, *mega-project*. Pikirkan rakyatmu, berikan mereka pekerjaan yang dibutuhkan. Tapi *kan mega project* itu bisa menyerap, katanya, pabrik gula bisa menyerap tenaga 15 ribu. Lima belas ribu darimana? Muluk-muluk saya bilang. Saya *kan* pernah cerita, *nggak* usah, yang saya butuhkan gimana masyarakat Banyuwangi bisa makan. Itu adalah kebutuhan yang paling utama, setiap manusia, termasuk orang Banyuwangi. *Kan* makanya dia bilang paling norak program kerjanya. Tapi apa-apa saja, proyek-proyek mungkin akan menaikkan PAD, jelas itu akan saya pikirkan. Sampai Pak Jalal mau bikin sekolah internasional, itu terlalu mengada-ada *deh*. Sekolah yang ada *aja* masih belum kepanangan. Ternyata pun program dan dana anggaran yang dari pusat, yang besarnya itu sudah sesuai dengan undang-undang yaitu 20 % dari anggaran belanja negara, saya bilang, itu tidak mencukupi. Terbukti *kan* masih banyak sekolah di Banyuwangi ini yang rusak, yang masih tidak punya bangku sekolah, tidak punya meja sekolah, banyak, saya bilang *gitu*. Sekarang ini itu *aja* dulu dipenuhin. Sarana dan prasarana, tingkatkan SDM, sesuai dengan program pusat, SDM para gurunya. *Kan* mereka ini aneh disini. Jadi saya cerita dari salah satu pengurus PPP. Dia bilang, bu, saya ini S1, saya mau sekolah S2, saya bilang ke bupati, tidak boleh. *Lho*, saya bilang kenapa bisa begitu, kalau problemnya anggaran di APBN, itu bahkan pada salah satu anggaran yang mengharuskan setiap pengajar itu meningkatkan SDM nya, kalau tadinya dia lulus SMA ya menjadi S1, dan itu dibiayai oleh negara. Saya bilang, ini dia biaya sendiri, dia pengen jadi S2 dan dilarang oleh bupati. Jadi saya bilang, mendingan itu aja, sebelum kita mimpi kita bikin sekolah internasional, segala macem, kok jauh banget..."

(wawancara dengan Emilia Contessa, tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Dalam pengamatan Emilia isu perempuan khususnya dalam masalah pendidikan masih tidak adil,

"...kalau menurut saya, masih tidak berpihak kepada perempuan. Misalnya dulu saya tahu, kalau orang tua itu punya anak dua, satu laki satu perempuan. Kemudian dia hanya mampu menyekolahkan satu anak, maka yang dia sekolahkan adalah yang laki-laki. Perempuan lebih baik *nulungi* ibu masak. Sangat tidak berpihak pada perempuan, tapi menurut saya seharusnya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Walaupun kalau kita bicara kodrat, bagaimanapun tidak bisa kita menggantikan tempat laki-laki sepenuhnya. Karena kita lihat saja, ya kita harus akui, kita membutuhkan yang namanya cuti, waktu hamil, melahirkan dan lain sebagainya. Ini kekurangan dari perempuan. Kalau dilihat dari kerja, panjangnya waktu kerja laki-laki dan perempuan, *kan* seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau saya bilang, haknya laki-laki dan perempuan seharusnya pemerintah memberikan hak yang sama kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki. Tapi, kalau boleh saya sebutkan lagi, banyak juga kelebihan perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Seperti yang kemarin dengan sangat polosnya disebutkan oleh calon wakil bupatinya Aswar Annas, pada waktu debat. Jadi wakil *kan* debat kemarin, kemudian ditanya, ini *kan* masalah, saya *nggak* ngerti ya masalah perekonomian, ekonomi mikro ya? Bagaimana cara menggerakkannya, *gitu kan*. Karena akhirnya semua tidak bisa menjawab, diarahkan oleh panelisnya. Kalau menurut saya, menggerakkan yang namanya koperasi dan UKM, dia bilang *gitu*. Langsung dia jawab, iya betul dan untuk menggerakkan koperasi dan UKM itu yang paling mampu adalah perempuan. Kenapa perempuan? Kita harus akui, bahwa perempuan itu lebih sabar, lebih ulet, lebih teliti, lebih ini.. terus langsung saya, mangkane milho bupati wedhok. Saya percaya dia bicara seperti itu karena dia panik, begitu dia turun dia ditegur sama tim suksesnya. Jadi disitulah memang kelebihan perempuan..."

(wawancara dengan Emilia Contessa, tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Sebenarnya Emilia telah mengantongi 13 nama untuk dijadikan wakil bupati, mereka ini terdiri dari politisi, birokrat dan praktisi bisnis. Namun yang sesuai dengan kriterianya hanya dua orang yakni Ketua DPC Republikan dan mantan kepala pengairan di Bondowoso. Pada saat itu Golkar pernah menghubungi Emilia untuk memasang calonnya, namun dengan persyaratan tertentu. Namun hal ini ditolak oleh Emilia,

“...harusnya Golkar itu sama saya, karena ditelpon sendiri oleh Golkar, menawarkan sendiri pada saya, Pak Cicip Lho. Pak Cicip itu adalah korwil seluruh Jawa Timur. Pak Cicip itu adalah orang yang paling dipercaya masalah partai itu oleh Pak Aburizal Bakrie. Pak Cicip berkali-kali menelpon saya seperti itu...”

(Wawancara dengan Emilia Contessa tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Ketika Emilia kebingungan mencari pasangan calon dalam pendaftaran di KPU, tiba-tiba ada lelaki yang menyelongong bahwa dia diutus partai pendukungnya sebagai calon pasangan wakil dari Emilia,

“...terus dia bilang, saya calon wakilnya, langsung dia tulis di situ. Saya tidak mengerti, saya tidak mengenal dia, saya tidak tahu namanya. Langsung saya tanya, Mas, anda siapa? Itu adalah yang dicalonkan oleh Gerindra, Ketua DPCnya. Dan tanpa dia berkomunikasi dulu dengan saya, *kan* mestinya dia kenalkan diri. Jadi harus ada pembicaraan dulu. Saya sebetulnya nama Zainuri itu sudah pernah saya lempar ke koalisi partai dan kepala tim sukses. Semuanya menolak. Karena mereka sama-sama tahu *kan* orang sama-sama pemain. Nah, itu *kan* menurut mereka, saya juga punya penilaian sendiri. Ya udah, saya lepas nama Zainuri ini, tapi karena saat itu saya betul-betul tidak tahu siapa yang mau menjadi calon wakil, saya tanda tangan...”

(wawancara dengan Emilia Contessa tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Karena peristiwa “menyelongong” itulah akhirnya Emilia, memilih mantan Ketua DPC PPP Situbondo sebagai pasangannya. Zainuri ternyata menjadi anggota DPR Propinsidari PPP. Selama menjadi anggota DPR Propinsi, yang diberangkatkan dari Dapil III, dia menangani masalah-masalah yang ada di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso.

Baru pada tahun 2009 kemarin, Zainuri menyelesaikan masa baktinya sebagai anggota DPRD di propinsi.

Komunikasi antara Emilia dan Zainuri membaik setelah adanya pemilukada ini. Perasaan bersalah Zainuri terhadap Emilia membuatnya berupaya mendekati ke Emilia dalam pemilukada ini. Setelah berkomunikasi dengan intensif akhirnya Zainuri diangkat sebagai tim sukses Emilia.

"...kemarin dia mungkin merasa bersalah beberapa kali dia datang ke kakak saya di Surabaya, berkali-kali dia datang ke sana hanya untuk minta maaf pada saya. Trus kita nggak pernah ketemu. Kemarin ketika dia denger saya mencalonkan, dia SMS saya, ibu selamat, ibu sudah mencalonkan. Ah, belum tentu, saya bilang begitu *kan*. Sekarang *kan* saya sudah mikir, oh saya *kan* lama-lama sakit hati juga *kan* hilang. Ini kita sudah empat tahun, saya bilang, saya marah sama dia. Saya bilang saya sudah tidak ini lagi sama dia. Akhirnya kita berkomunikasi lagi. Akhirnya dia bilang, Bu, kalau Ibu mencalonkan menjadi bupati, boleh nggak saya menjadi tim suksesnya Ibu? Oh, boleh saja saya bilang gitu. Akhirnya jadilah dia jadi tim sukses. Dia ini punya pengalaman. Pak Suroso itu yang menjadikan Bupati adalah dia. Dia tim suksesnya yang mengatur anggaran, mengatur strategi, semua sampai jadi itu adalah dia. Bukan hanya dia, ada satu lagi kalau nggak salah, Sumenep. Ini orang emang punya kemampuan, jadi saya bilang oke. Tapi setelah kita bicara, bicara, bicara, *kan* memang betul kita di politik *kan*, kita selalu percaya bahwa tidak ada kawan abadi. Semua adalah kepentingan. Trus begitu saya bicara banyak sama dia, kita banyak *sharing*, akhirnya saya memutuskan dia menjadi ketua tim pemenang...."

(wawancara dengan Emilia Contessa, tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Sejak mendaftar sebagai bakal calon Bupati 2010-2015 lewat PDI Perjuangan, Emilia bekerja keras untuk mengenalkan visi misinya kepada masyarakat. Artis sekaligus mantan tim sukses Mega Bintang dan Mega Pro terus melakukan koordinasi pemenangan bertempat di rumah Dino, adik kandungnya. Langsung dipimpin dan arahan Didie Noerhadi, SE. dedengkot politik Banyuwangi dan mantan anggota DPRD jaman Orde Baru. Ia memberikan arahan dan strategi dan metode sosialisasi kepada anggota tim yang berjumlah 18 orang.

Konvensi bakal calon bupati dari PDI Perjuangan diikuti oleh Emillia Contessa (PPP), Ratna Anie Lestari (Bupati yang sedang menjabat), Azwar Anas (PKB) dan Dadang Wahyu (PDIP). Ani Lestari mendulang kemenangan dalam Muscabsubs PDI Perjuangan mengalahkan kandidat lainnya dengan memperoleh 248 suara dari 560 suara peserta yang hadir sedangkan Emilia Contessa memperoleh dukungan hanya 25 suara saja. Emilia Contessa tidak mengendorkan semangatnya tetap mencalonkan diri meski kalah dalam konvensi PDI Perjuangan. Pada akhirnya Emilia Contessa menggunakan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Nasional dan banyak partai non-parlemerter di Banyuwangi.

D.2.2. Kandidat Dan Partai Pengusung

Keikhlasan Emilia Contessa terhadap partai pengusung sudah nampak sejak awal. Sebagaimana dinyatakan Emilia,

"...jadi memang sejak awal, bagaimanapun saya berterima kasih dengan bekerjasamanya saya atau bermitranya saya dengan partai koalisi itu. Sebab tanpa mereka *kan* juga saya tidak bisa berangkat menjadi calon, gitu *kan*".

(wawancara dengan Emilia Contessa, tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Kesepakatan telah dibangun semenjak awal antara kandidat dengan partai bahwa masing-masing memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana diungkapkan Emilia:

“...selalu dalam segala hal kita itu ada namanya kewajiban..kita terikat kepada saya, jadi mereka juga harus terikat pada saya, begitu. Akhirnya, mereka merasa saya nggak *ngopeni*, begitu *kan*. Saya merasa saya sudah memberikan segala yang sudah menjadi kewajiban saya kepada mereka, tapi saya mengharapkan mereka memberikan kewajibannya kepada saya, tetapi saya tidak dapatkan, begitu. Jadi akhirnya itu yang membuat saya tidak terlalu dekat dengan para koalisi partai. Dan itu saling iri-irian. Misalnya, ini *kan* terbagi menjadi beberapa belas partai, kita bagi bersama dalam Gerindra, terus ada PAN dan Republikan. Jadi, memang direduksi. Kemudian, saya sebetulnya tidak melihat itu, ini hanya satu contoh saja, begitu kita memberikan kontribusi untuk menggerakkan mesin partai mereka, seharusnya mereka lakukan apa yang saya butuhkan sebagai calon. Dan ternyata mereka diam, gitu. Berjalannya waktu proses selama dua bulan, saya *kan* melihat, siapa yang belum bekerja untuk saya dan siapa yang tidak, maka kemaren *kan* ada sewa mobil ya. Ada 5 mobil. Lima mobil ini saya berikan kepada partai yang beneran, kepada Gerindra, PAN, Republikan. PAN itu adalah ketua tim pemenang. Kemudian saya berikan kepada Republikan, karena Republikan betul-betul bekerja buat saya. Dan saya hanya memberikan kepada beberapa partai yang betul-betul bergerak. Akhirnya, yang nggak kebagian, *kan* mobil ada lima, partai ada sebelas, kebetulan ada yang punya mobil, tapi yang tiga partai, mereka nggak punya mobil, dan mereka nggak dapet mobil dari saya. Jadi inilah yang menjadi kurang harmonis dengan saya, ya tiga partai itu. Tiga partai itu adalah Parnas, PKPD, sama Patriot. Jadi kurang harmonis. Saya melihat seperti PDP, masya Allah, siang malem mereka kerja buat saya. Ya tentu saja *donk* saya akan berikan fasilitas lebih, karena saya melihat mereka nggak berhenti kerja. Nah ini jadi saya dengan partai koalisi itu tidak ada masalah yang terlalu serius. Begitu kita ndaftar, terdaftar, gitu *kan*. Tapi belakangan ini hanya masalah fasilitas aja yang membuat saya tidak harmonis lagi dengan partai saya. Bahkan saya pernah diklarifikasi media, dia bilang, bagaimana, apa pendapat ibu ini dengan, katanya ada tiga partai yang mencabut dukungan pada ibu? Oh tidak apa-apa, ya saya santai aja. Nanti *kan* mengurangi, ibu nggak kuatir?. Itu *kan* masalah pilihan hati, saya bilang gitu. Kalau ternyata mereka tidak memilih saya sebagai calon bupati, ya tidak apa-apa...”

(wawancara dengan Emilia Contessa, tanggal 9 dan 10 Juli 2010)

Memang satu kelemahan diusung oleh banyak partai adalah bagaimana menjaga harmonisasi antar partai pendukung, bahkan kadang-kadang memiliki banyak partai pendukung dapat melemahkan calon itu sendiri.

D.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pemilukada 2010 di Banyuwangi diwarnai dengan proses gugat-menggugat pada saat proses penentuan calon kepala daerah di KPU. Bakal calon kepala daerah yang diusung oleh

Golkar semula adalah bupati yang sedang menjabat (Ratna Ani Lestari - perempuan), namun terjadi konflik antara faksi di internal Golkar dan berdampak pada pemecatan Ketua DPC Golkar Banyuwangi dan memunculkan kandidat lainnya (laki-laki) sehingga konstelasi politik lokal Banyuwangi berubah dalam proses pemilukada. Ratna Ani Lestari merupakan bakal kandidat yang cukup disegani di Banyuwangi karena kesuksesannya dalam proses pemilukada 2004. Sekretaris KPU Daerah, Bambang, mengatakan bahwa Ratna Ani Lestari merupakan calon yang sangat ditakuti oleh calon yang lain, dan posisinya masih sangat kuat di pedesaan terutama di bagian selatan. Ini karena program pembangunan yang dibuatnya langsung menyentuh masyarakat. Namun di perkotaan, kelompok guru dikatakan kurang mendapatkan perhatian dari Ratna Ani Lestari,

"...Pada tanggal 12 April 2010, pada saat penetapan calon, sebelum tanggal 12 itu Ketua KPU, Anggota KPU I dan Kasubag Hukum kami berangkat ke Jakarta. Terakhir koordinasi dan konsultasi, tentang permasalahan Banyuwangi. Ke KPU pusat, yang menemui Pak Putu dan Pak Hafis. Setelah kembali, KPU Banyuwangi disarankan itu menetapkan penetapan calon tanggal 14 - mundur, dengan pertimbangan memberikan kesempatan pada DPD Golkar Jawa Timur untuk melakukan mediasi. Kemungkinan dalam dua hari ada hasilnya. Terus juga memberikan kesempatan kepada PKNU, yang satu terkait dengan PNU yang satunya adalah Golkar. Yang PKNU adalah Jendral Mulyono yang satunya Pak Untung Harjito. Jadi memberikan kedua partai itu untuk melakukan mediasi. Kemungkinan dalam dua hari *kan* ada hasilnya. Teman-teman pulang ke Banyuwangi. Pada saat tanggal 12, kita ditelponi, disuruh kumpul di kantor, ada rapat pleno, saya karena nggak ikut ke Jakarta, saya hanya mendengarkan pada waktu itu. Yang disampaikan dari Ketua KPU, hasil dari Jakarta, saran dari Pak Putu sama Pak Hafis, kita disarankan untuk menetapkan sesuai dengan jadwal. Karena saya nggak ikut, saya oke saja, karena teman yang dua tadi juga tidak menyangka. Kalau mungkin tidak sesuai dengan yang di rundingkan di Jakarta mungkin sebaiknya kita coba sesuai dengan kesepakatan dengan Ketua KPU..."

(Wawancara dengan Bambang, tanggal 14 Juli 2010)

Hasil survei tentang preferensi masyarakat Banyuwangi oleh LSI menunjukkan bahwa kandidat nomor satu yaitu Abdullah Azwar Anas cukup kuat dengan prediksi suara di atas 50% dan kandidat nomor dua yakni Jalal hanya memperoleh suara sekitar 20% yang berarti ada 30%

undecided voters. Tentu muncul spekulasi kemana suara mereka ini ditujukan? Apakah kepada sang *incumbent* Ratna Ani Lestari atau calon perempuan lainnya? Menurut ungkapan Emilia,

“.....pengalaman menunjukkan pada tahun 2005 *incumbent* Pak Samsul Hadi pada saat itu, juga seperti ini kasusnya, nggak diterima oleh KPU. Dua hari sebelum hari H, langsung dialihkan mendukung Bu Ratna. Situasi akhir sebelum hari H upaya partai politik kandidat untuk berburu suara dukungan kepada Ratna Ani Lestari...”

E. HJ.NURLAILA

E.1. Profil Kandidat

E.1.1. Biografi

Hj. Nurlaila, BSc. yang akrab dipanggil Bu Nurlaila atau Bu Lurah, adalah sosok perempuan yang memiliki paras cantik, cerdas dengan kemampuan berbicara yang baik yang memperlihatkan pengalaman dalam dunia politik. Lahir di desa Wates, Kediri, pada tanggal 26 Januari 1961 dari seorang kiai kampung bernama H. Mashudi Bakri dan ibunya bernama Hj. Zakiyah. Nurlaila banyak menghabiskan waktu kecilnya di desa kelahirannya itu. Pengalaman sekolah dasar hingga tingkat menengah ditempuh SD Wates II, lulus pada tahun 1972 dan di SMP Wates 1, lulus pada tahun 1976. Lalu ia melanjutkan ke SMA Muhammadiyah I Surakarta, lulus tahun 1980 dan terakhir melanjutkan di Akademi Uang dan Bank Yogyakarta, lulus pada tahun 1984.

Pengalaman dalam dunia politik tidak lepas dari minat organisasi Nurlaila sejak remaja yang sedikit banyak membentuk kemampuan maupun karakter politiknya.

la pernah aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja Muhammadiyah dan pernah juga menjadi aktivis partai Golkar. Karir keorganisasiannya antara lain: Sekretaris DPD Golkar tahun 1991-1995 dan Bendahara IPHI tahun 2001-2004. Karir organisasinya itu berlanjut ketika Nurlaila terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menjadi kepala desa (lurah) di desa Wates sejak 1986 hingga kini. Sejumlah prestasi dicapainya selama menjadi kepala desa, namun yang paling berkesan baginya adalah pada tahun 1990 mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto sebagai kepala desa perempuan yang berhasil.

Nurlaila menikah untuk kali pertama tahun 1983 dengan seorang pengusaha kaya bernama Suselo yang ketika itu juga menjabat sebagai Manajer KUD Sukamulya di Desa Wates. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai satu orang anak bernama Johan Chandra Nugraha. Pada tahun 1987, suaminya meninggal karena tertembak dalam kejadian perampokan di KUD Sukamulya. Nurlaila kemudian menikah lagi secara siri (menikah dengan hanya menggunakan aturan syari'at Islam namun tidak mencatatkan pernikahan pada kantor catatan sipil) dengan Sutrisno, yang pada saat pemilukada Kediri 2010 duduk sebagai bupati *incumbent*. Selain aktivitas sehari-harinya sebagai kepala desa, Nurlaila juga memiliki usaha di bidang pertanian dan pakan ternak. Ia juga menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Jabal Rahma di Wates.

E.1.2. Motivasi Kandidat

Nurlaila menginginkan perubahan dan merasa tidak puas dengan apa yang telah dijalankan oleh bupati *incumbent* selama dua periode terakhir. Nurlaila, sebagai calon bupati bernomor urut dua, berpasangan dengan Drs. KH. Turmuzi

Abror, M.Pd. (dalam pencalonannya pasangan kandidat itu populer dengan singkatan NATA), secara normatif motivasi pencalonannya sebagai bupati karena ingin merubah pola pembangunan di Kediri, terutama pertanian dalam hal distribusi pupuk yang selama ini dibatasi berdasarkan kecamatan.

Persoalan distribusi pupuk ini sangat ditekankan olehnya, disamping karena memang aktivitas Nurlaila yang sehari-hari bersinggungan dengan usaha di bidang pertanian – salah satunya pupuk – juga karena selama ini kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri yang mengenakan pembatasan bagi petani untuk membeli pupuk berdasarkan batas-batas kecamatan justru malah menyulitkan petani yang terkadang kehabisan pupuk sedangkan di kecamatannya stok pupuk juga telah habis dan tidak diperbolehkan membeli pupuk dari kecamatan lain. Motivasi normatif itu kemudian ditransformasikan dalam visi, misi dan program-program kerja sebagaimana berikut:

Visi: “Membawa masyarakat menuju kemakmuran, kesejahteraan dan kenyamanan dibawah perlindungan Allah SWT (Gemah Ripah Loh Jinawi) melalui implementasi pada program-program sosial, pertanian, Industri, dan perdagangan”

Misi: “Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan; menyelenggarakan pemerintahan demokratis-konstitusional yang bersih dan efektif. Dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang sosial budaya, pertanian, industri, dan perdagangan. Serta peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi.”

Program-program kerja: (1) Memberikan beasiswa diperguruan tinggi bagi anak miskin yang berprestasi; (2) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan serta pendidikan murah yang lebih berkualitas; (3) Meningkatkan kerjasama dengan pimpinan ormas, para ulama dan pemimpin agama untuk menuju masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperhatikan dan memperbaiki kesejahteraan guru agama dan pengurus tempat ibadah; (4) Peningkatan kualitas dan pelayanan puskesmas, membina posyandu, Thibun Nabawi, pengobatan alternatif serta bantuan biaya pengobatan bagi penduduk miskin; (5) Pinjaman modal bagi usaha kecil mikro, petani, perikanan, peternak (sapi, kambing, lebah dll) secara bank teknis yang dijamin oleh pemerintah; (6) Memberi pinjaman modal bagi pelaku/ penghuni pasar tradisional agar pasar dan kepentingan masyarakat pelaku pasar menjadi lebih optimal; (7) Membangun dan memperbaiki pasar lokal serta mewujudkan lapak-lapak di luar daerah untuk kepentingan pasar bagi hasil produksi pertanian, petani Kabupaten Kediri; (8) Pinjaman lunak bagi petani pertanian industri benih padi, palawija, sayuran dalam rangka swasembada benih untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Kediri; (9) Pinjaman untuk para pahlawan devisa/TKI yang dipastikan bisa berangkat untuk bekerja di luar negeri; (10) Pembinaan unsur kepemudaan, olahraga dan seni budaya menuju kualitas dan prestasi; (11) Penerapan Sistem *three in one* (pelatihan, pemagangan dan penempatan) pada lembaga pelatihan dan keterampilan; (12) Meningkatkan status kecamatan Pare menjadi kota administratif dan ikon Pare sebagai kampung Inggris; (13) APBD untuk rakyat dan konsentrasi pembangunan fisiknya melalui pedesaan; (14) Mewujudkan jembatan Ngadiluwih-Mojo, jembatan Papar-Nganjuk pada tahun pertama; (15) Menerbitkan perda untuk menarik investor luar dan memberi kemudahan melakukan investasi di Kabupaten Kediri; (16) Melanjutkan pembangunan yang sudah baik dan memperbaiki program yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat kecil; (17) Memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan pamong desa, RT, RW dengan sungguh-sungguh; (18) *Open house* 1 minggu 1 kali untuk mendengar keluh kesah masyarakat..."

(diambil dari dokumen kampanye tim sukses Nurlaila)

Namun faktanya, di balik motivasi normatif itu terdapat indikasi implisit berupa "kecemburuan" terhadap majunya calon kandidat lain yaitu Haryanti Sutrisno yang notabene adalah istri pertama Sutrisno (bupati *incumbent*/suami siri dari Nurlaila). Kecemburuan itu, dalam interpretasi tim peneliti, pada gilirannya mendorong Nurlaila untuk membuktikan diri bahwa dia pun juga mampu untuk tampil di depan publik sebagai pengganti suami sirinya itu. Pun, dalam wawancara Nurlaila selalu menyebut saingannya itu dengan istilah *incumbent* dan tidak pernah sekalipun menyebut nama Haryanti secara eksplisit, padahal bukan bupati *incumbent* yang mencalonkan diri, melainkan istri pertamanya yang mencalonkan diri untuk menjadi bupati. Tentu saja interpretasi ini masih membutuhkan penguatan-penguatan dari fakta-fakta empiris lebih lanjut.

E.1.3. Modal Sosial

Nurlaila cukup dikenal di masyarakat, khususnya di desanya, sebagai Bu Lurah yang sudah menjabat sebagai kepala desa selama 24 tahun. Walaupun bukan berasal dari keturunan pejabat pemerintahan (ayahnya adalah seorang kiai kampung dan suami pertamanya adalah Ketua KUD), Nurlaila mampu membangun modal sosial yang kuat dengan mengandalkan pengalamannya sebagai kepala desa tersebut. Lebih lanjut, melalui jabatannya sebagai kepala desa, ia berupaya membangun jejaring diantara kepala-kepala desa di Kediri untuk dijadikan sebagai pendukung dalam proses kandidasinya. Modal sosial ini ternyata cukup signifikan mendongkrak suara, khususnya dalam perolehan suaranya yang merupakan terbanyak di desanya diantara tiga kandidat calon bupati.

Di sisi lain, Nurlaila dikenal luas sebagai pengusaha pertanian dan peternakan (pakan ternak) di kalangan petani, khususnya di desanya dan hal ini sedikit banyak turut menguatkan keyakinannya untuk maju dalam arena Pemilu. Di samping itu, sebagai pengasuh pondok Jabal Rahma di Wates, Nurlaila mampu mencitrakan dirinya sebagai perempuan yang religius dan berkomitmen untuk perbaikan moral dan agama di kampungnya. Fakta bahwa Nurlaila adalah istri siri dari Sutrisno (bupati *incumbent*) tidak banyak mendongkrak pengaruhnya di mata masyarakat. Sebaliknya, justru statusnya bisa menjadi kerugian bagi citranya, khususnya dalam konteks pencalonannya sebagai bupati.

Secara materi, Nurlaila tergolong orang yang mampu. Hal ini terlihat dari total harta yang dimiliki atas nama Hj. Nurlaila,

BSc. yang terdiri dari harta tidak bergerak yakni tanah dan bangunan, harta bergerak seperti kendaraan bermotor, pertanian dan bidang usahanya serta kepemilikan giro dan setara kas lainnya sebesar Rp. 4.252.333.750, seperti yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tertanggal 31 Desember 2009.

E.1.4. Modal Politik

Dalam penuturan Nurlaila, walaupun ia pernah aktif di Golkar, dalam proses pencalonan dirinya sebagai bupati ia cukup kesulitan untuk mendapatkan kendaraan partai politik. Ia mengakui bahwa selama ini (menjadi kepala desa) memang kurang memiliki kedekatan dengan partai-partai politik. Satu-satunya partai politik yang sedari awal hingga hari H pencoblosan yang mendukungnya adalah PAN. Memang ada juga partai Gerindra dan beberapa partai gurem yang bersedia berdiri dibelakangnya, namun keputusan untuk bergabung dengan Nurlaila terjadi pada detik-detik akhir pendaftarannya secara resmi di KPUD Kediri. Kesediaan PAN sejak dari awal hingga akhir untuk mengusung Nurlaila juga dipengaruhi oleh *track record*-nya yang memang aktif di kegiatan-kegiatan keorganisasian Muhammadiyah Kediri.

Bahkan, Arifin Tafsir, Ketua DPD PAN Kediri yang saat itu juga mempunyai keinginan untuk mencalonkan diri harus *legowo* untuk memberikan dukungan kepada Nurlaila dengan alasan bahwa nama Nurlaila lebih *marketable* dibanding namanya setelah dilakukan survei beberapa tahap sebelum pemilukada berlangsung. Dalam penuturannya, Arifin menilai bahwa kesediaan PAN untuk mengusung Nurlaila bukanlah langkah yang salah (rugi).

Karena PAN, menurutnya, tidak hanya mempertimbangkan secara pragmatis calon yang hendak diusung melainkan mempertimbangkan juga kontribusi Nurlaila bagi Muhammadiyah dan PAN di Kediri yang telah diberikan semenjak lama. Nurlaila, baginya, adalah kader potensial yang dimiliki oleh Muhammadiyah Kediri. Walaupun Nurlaila adalah perempuan, bagi PAN tidaklah menjadi masalah selama memang mempunyai kompetensi yang memadai. Dalam pemahaman PAN, tutur Arifin, pemimpin politik dibedakan dari pemimpin agama (imam). Pemimpin politik diperbolehkan dari kalangan perempuan sedangkan pemimpin agama haruslah laki-laki. Pencalonan Nurlaila oleh PAN sekaligus juga untuk menjajaki sejauh mana peta dukungan bagi Nurlaila di Kediri. Pun, hasil Pemilukada yang ternyata tidak berpihak pada Nurlaila tidak menyurutkan loyalitas PAN untuk tetap membina hubungan dengan Nurlaila. Dalam jangka panjang, lanjut Arifin, Nurlaila malah akan dicalonkan menjadi salah satu calon legislatif PAN dalam Pemilu 2014.

E.2. Proses Kandidasi

E.2.1. Persiapan Kandidasi

Dalam hal persiapan kandidasi Nurlaila menemui kesulitan-kesulitan yang cukup berarti. Dalam hal pemilihan isu yang diangkat, pada dasarnya ia memiliki perhatian terhadap isu perempuan namun tidak menjadikannya prioritas dibanding dengan isu-isu lain. Selain itu upaya pemetaan kekuatan dengan menggunakan lembaga-lembaga survei juga telah dilakukan oleh Nurlaila.

E.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Dalam hal kendala, sebagaimana telah disebutkan diatas, Nurlaila merasa kesulitan dalam mencari partai-partai pendukung dan juga dalam menentukan pasangan calon. Memang PAN telah menyatakan bersedia sejak awal untuk mendukungnya, namun dukungan PAN belumlah cukup baginya untuk mencalonkan diri (belum memenuhi standar minimal untuk mencalonkan, yakni dukungan 15% perolehan suara dalam Pemilu 2009). Karenanya, Nurlaila merasa perlu untuk mencari partai-partai lain sehingga bisa memenuhi standar minimal pencalonan. Pada detik-detik terakhir, partai Gerindra akhirnya memutuskan untuk berada di belakang Nurlaila. Demikian pula dengan partai-partai kecil non-parlemen yang menurut Nurlaila sulit untuk diikat komitmennya sejak awal. Partai-partai kecil ini baginya terkesan sangat material-pragmatis dalam memberikan komitmen dukungan.

Loyalitas PAN untuk mendukung Nurlaila sejak awal hingga akhir, selain karena faktor yang sudah disebutkan diatas, juga karena ada *deal* antara Nurlaila dengan PAN, yaitu bahwa Nurlaila dan keluarganya akan resmi menjadi anggota dan pengurus PAN pasca pemiluukada berlangsung, dan bahwa pada Pemilu 2014 Nurlaila akan membiayai kampanye PAN dan bahwa Nurlaila (atau salah satu dari keluarganya) bersedia dicalonkan menjadi salah satu calon legislatif (caleg) PAN pada Pemilu 2014.

Alhasil, pada saat mendaftar ke KPUD ia didukung oleh koalisi PAN, Gerindra, PPRN, PKPI, PPD, PPI, PNI Marhaenisme, Partai

Demokrasi Pembaruan dan Partai Patriot dengan modal suara dukungan 17% dengan total perolehan pada Pemilu 2009 sebesar 116.060 suara. Dalam hal penentuan calon wakil, Nurlaila juga mengalami kesulitan. Ia menceritakan bahwa pada awalnya ia ingin merangkul calon wakil dari kalangan militer karena baginya kalangan militer cukup bisa diandalkan dan memiliki disiplin yang tinggi. Namun ketika waktu sudah semakin mepet dan calon yang ia inginkan belum didapatkan, akhirnya ia merangkul seorang tokoh dari NU yaitu H. Turmudzi Abror, M. Pd. dengan alasan bahwa tokoh itu mempunyai karakter yang jujur dan bagus. Disamping itu, secara organisasional ia berasal dari NU hal ini diharapkan dapat mendongkrak suara bagi Nurlaila dari kaum Nahdliyin.

Dalam proses pencalonan yang secara umum terkesan mendadak ini penentuan visi dan misi sangat didominasi oleh Nurlaila sendiri. Ia juga yang sebagian besar mendanai proses persiapan kandidasi dan upaya untuk mendapatkan dukungan resmi dari partai-partai politik.

E.2.3. Kandidat dan Institusi Sosial

Sebagaimana dalam banyak pemilukada di Jawa Timur, peran organisasi Islam kultural seperti NU dan Muhammadiyah juga turut mempengaruhi perolehan suara, itulah yang membuat Nurlaila pada akhirnya memilih wakilnya dari kalangan NU.

Pada kenyataannya upaya menggaet calon wakil bupati dari kalangan NU tersebut ternyata tidak banyak mendongkrak perolehan suaranya. Tiga calon wakil bupati yang ikut pemilukada ternyata sama-sama berasal dari NU. Pertama,

Sulaiman Lubis, S.Ag, MM. merupakan mantan Ketua PC dan DPC NU Kabupaten Kediri yang berpasangan dengan Ir. H. Sunardi, MM. Kedua, Drs. KH. Moh. Turmudi, M.Pd. merupakan mantan Ketua IPNU Cabang Kabupaten Kediri yang menjadi pasangan dari Hj. Nurlaila, B.Sc. Dan ketiga, Drs. H. Masykuri, MM yang masih menjabat sebagai Ketua I Tanfidziah PCNU Kabupaten Kediri yang menjadi pasangan dari dr. Hj. Haryanti.

Apabila ditilik dari kombinasi aliran keagamaan, seharusnya Nurlailalah yang paling potensial mendapat dukungan suara dari masyarakat karena gabungan dari Muhammadiyah (Nurlaila) dan NU (Moh. Turmudi), namun kenyataannya justru Nurlaila yang paling sedikit mendapatkan dukungan.

F. HARYANTI

F.1. Profil Kandidat

F.1.1. Biografi

Hj. Haryanti, calon bupati perempuan Kabupaten Kediri dengan nomor urut 3 ini lebih dekat ke dunia profesional daripada dunia politik. Lahir di Kota Malang pada 7 Agustus 1949, Haryanti merupakan anak dari keluarga muslim terpendang di kotanya, yakni Raden Mas Koesworo yang adalah salah satu pengusaha sukses di kota Malang. Sosoknya khas sebagaimana perempuan ningrat dengan perilaku yang sangat sopan dan agak pendiam.

Dari masa kecilnya hingga sebelum menikah dihabiskan di Malang. Pendidikan tingkat dasar ditempuhnya di

Sekolah Rakyat Negeri Kauman VI Malang dan lulus pada tahun 1961, pendidikan tingkat pertama dijalani di SMPN VI Malang dan lulus pada tahun 1964. Selanjutnya, Haryanti melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMAN II Bogor dan lulus pada tahun 1967. Jenjang pendidikan terakhirnya ditempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang sebagai angkatan pertama pada tahun 1972. Ia tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi karena setelah lulus dan menikah ia mengalami enam kali keguguran. Sejak saat itu ia lebih menyeleksi kesibukannya dan memfokuskan diri pada dunia usaha dan karir sebagai dokter di Kabupaten Kediri, tempat kelahiran dan kediaman suaminya yang berasal dari Desa Kandat.

Walaupun Haryanti lebih dekat ke dunia profesional sebagai seorang dokter, ia juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi, khususnya yang terkait dengan persoalan kedokteran dan kesehatan (walaupun kemudian ia juga terlibat di sejumlah organisasi karena kapasitasnya sebagai istri bupati). Diantara berbagai organisasi tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia yang ia ikuti sejak tahun 1979-sekarang, Ikatan Istri Indonesia tahun 1979-sekarang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri tahun 2000-sekarang, Ketua Forum Komunikasi Organisasi Sosial tahun 2000-2010, Ketua Yayasan GN-OTA Kabupaten Kediri tahun 2000-2010, Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Perempuan tahun 2000-2010, Ketua Yayasan Canda Birawan tahun 2000-2010, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Kediri tahun 2000-2010, Penasehat Gabungan Organisasi Perempuan tahun 2000-2010, Ketua Yayasan Kanker Indonesia tahun 2000-2010. Dalam hal karir profesionalnya sebagai seorang dokter, sejak 15 November

1979 Haryanti telah bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menjadi Kepala Puskesmas Tongas. Kemudian pada 2 Oktober 1982 menjadi Kepala Puskesmas Ngasem di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Haryanti menikah dengan Ir. H. Sutrisno, M.M. (*incumbent* Bupati Kediri) pada akhir tahun 1970 dan kini telah dikaruniai 3 orang anak. Semenjak menikah, Haryanti berpindah menetap di Kediri..

F.1.2. Motivasi Kandidat

Haryanti, sebagai calon Bupati bernomor urut tiga (kini telah menjadi Bupati Kediri) berpasangan dengan Drs. H. Masykuri, M.M. (dalam pencalonannya pasangan kandidat ini disingkat dengan sebutan HARMAS), menjelaskan motivasinya untuk maju dalam Pemilu Kediri untuk meneruskan pembangunan yang telah dilakukan oleh bupati terdahulu dalam dua periode pemerintahan terakhir, khususnya dalam upaya untuk membuka akses bagi desa-desa di Kediri yang selama ini terisolir namun sudah diupayakan untuk dibuka oleh bupati terdahulu.

"Kalau sebagai dorongan, saya selama ini sebagai istri bupati itu menjadi Ketua Tim Penggerak PKK. Dan kita ini banyak turun ke desa. Dan kita tahu bagaimana keadaan di desa yang paling terpencil disini. Walaupun dengan suami saya menjadi bupati ini, banyak desa yang terisolir, itu sudah tidak terisolir lagi dengan adanya, apa, penambahan infrastruktur, ya. Jalan-jalan diperbaiki dan sebagainya. Ini dorongan saya."

(Wawancara dengan Haryanti, 22 Juli 2010)

Haryanti kemudian memaparkan visi-misi berikut program-program kerjanya yang secara umum (didasarkan pada data wawancara) meliputi lima bidang yaitu pendidikan, kesehatan (ini sangat ditekankan karena profesinya yang sebagai seorang dokter), pariwisata, pertanian dan industri dimana kelima bidang itu didukung oleh pemerintahan yang profesional. Lebih detailnya, visi, misi maupun program-program kerja Haryanti adalah sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, mandiri, tenteram, dan sejahtera, yang berbasis pada lima sektor utama pembangunan, yaitu: pendidikan, kesehatan, pertanian, industri-perdagangan dan pariwisata, yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

Misi: (a) Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan serta terwujudnya keluarga sehat; (c) Menumbuh-kembangkan aktivitas pendidikan formal, non-formal dan informal untuk meningkatkan sumber daya generasi muda sebagai upaya mencapai tujuan mencerdaskan bangsa; (d) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat sebagai langkah nyata menuju keluarga sejahtera; (e) Membangun kehidupan masyarakat yang tertata, taat hukum dan peraturan perundangan, saling menghargai satu sama lain sebagai dasar pemahaman atas hak asasi manusia, gotong royong, dan toleran, dalam rangka menciptakan suasana aman, tertib dan damai di masyarakat; (f) Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar bersama koperasi dan UKM; (g) Menggalakkan promosi disektor pariwisata, produk-produk *home-industry*, pertanian, perkebunan, perikanan dll di tingkat regional, nasional, dan global; (h) Menciptakan suasana kondusif sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi tenteram; (i) Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, transparan, akuntabel, responsif terhadap permasalahan masyarakat, sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Program Kerja atau Program Pembangunan:

- (1) Membangun dan meningkatkan keimanan, moral-keagamaan dengan mengaktifkan masyarakat Kabupaten Kediri dalam kegiatan-kegiatan keagamaan:
- (2) Menganangkan lima sektor pembangunan sebagai sektor unggulan yang dapat mengangkat sektor-sektor lainnya. Lima sektor tersebut adalah:
 - (a) Pendidikan, lebih pada mengutamakan moral / budi pekerti untuk membangun watak dan kepribadian bangsa yang kokoh, cinta perdamaian, sadar hukum, anti korupsi dan cinta tanah air, sebagai landasan untuk membentuk sumber daya manusia yang utuh. Meningkatkan pendidikan keilmuan dan ketrampilan sesuai dengan tuntutan IPTEK dan perkembangan kehidupan masyarakat. Serta membebaskan biaya pendidikan pada tingkat tertentu dan/atau menekan biaya serendah-rendahnya, sehingga terjangkau oleh masyarakat, serta memberikan kontribusi sesuai dengan keuangan daerah;
 - (b) Kesehatan, dengan membebaskan biaya berobat bagi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu sesuai dengan keuangan daerah. Melaksanakan penyuluhan kesehatan serta mengoptimalkan kinerja lembaga-lembaga pelayanan kesehatan masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif;
 - (c) Pertanian (termasuk peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan), yaitu: menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penataan sistem produksi melalui intensifikasi pertanian dan diversifikasi produksi; mengatur hubungan petani-peternak disatu pihak dan kalangan industri di pihak lain saling menguntungkan; mengatur sistem distribusi pangan sehingga dapat memperbaiki alur perdagangan produk pertanian dan menstabilkan harga komoditas, terutama yang terkait dengan "sembilan bahan pokok"; meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif kegiatan agribisnis dan agroindustri dan membentuk ikatan kuat antar pertanian, industri dan perdagangan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada petani-peternak agar memperoleh ketrampilan dan wawasan sesuai dengan perkembangan dunia pertanian; membina keluarga petani, buruh tani, dan masyarakat lainnya dan memberikan ketrampilan praktis sebagai upaya menanggulangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan di wilayah pedesaan;

- (d) Industri (termasuk *home-industry*) dan perdagangan (termasuk UKM), yaitu: mengakomodasi dan memfasilitasi sirkulasi produksi pertanian dan industri masyarakat demi tumbuhnya ekonomi masyarakat; perluasan akses pasar dan lajunya alur permodalan melalui kerjasama antara sektor perdagangan dan dunia perbankan; meningkatkan tumbuh kembangnya sektor UKM dan koperasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat; menggalakkan kegiatan promosi untuk memperoleh peluang investasi; mengembangkan kerjasama lokal, nasional, dan global, sekaligus memperoleh informasi pasar secara luas;
- (e) Pariwisata, yaitu: menggali potensi wilayah, yang meliputi: wisata alam, wisata seni-budaya, wisata sejarah, wisata industri, wisata pendidikan, wisata bisnis dan wisata jenis lainnya dengan tujuan utama pada peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat, melalui tumbuhnya tempat-tempat wisata sebagai objek pajak dan retribusi, dan sebagai sumber pendapatan masyarakat karena di lokasi wisata tersebut merupakan tempat pemasaran hasil pertanian dan *home-industry*, Menggalakkan promosi wisata secara nasional dan global untuk meningkatkan kunjungan wisata ke wilayah Kabupaten Kediri, Meningkatkan kualitas SDM kepada para pekerja di sektor pariwisata dengan memberikan pelatihan tentang kepariwisataan.
- (3) Menggalakkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang sadar wisata, sekaligus sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat Kabupaten Kediri agar dapat menjadi tuan rumah yang baik terhadap wisatawan.

(wawancara dengan Haryanti, 18 Juli 2010)

Ketika menjelaskan motivasi, visi, misi maupun program-program kerjanya, Haryanti terlihat sangat berhati-hati memaparkan motivasinya untuk maju sebagai kandidat Bupati Kediri. Hal ini bisa dipahami mengingat latar belakangnya yang sebagai profesional memang bisa dibbilang tidak terlalu sering bersinggungan dengan *real-politics*. Dalam pemaparannya itu ia tidak pernah sekalipun menyinggung Nurlaila sebagai saingan potensialnya. Penjelasan-penjelasan yang diberikan hampir seluruhnya normatif dan jauh dari kesan emosional-praktis.

Namun demikian, ketika motivasi majunya Haryanti yang sangat normatif itu dikaitkan dengan bagaimana sang suami mempertahankan kekuasaannya terdapat indikasi bahwa majunya Haryanti tidak luput dari dorongan dan pengaruh sang suami untuk tetap mempertahankan kekuasaan. Dalam banyak kasus pemilukada, motif mempertahankan

kekuasaan ini biasanya secara positif terkait dengan arah pembangunan yang telah dijalankan dan secara negatif terkait dengan upaya untuk menutupi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

F.1.3. Modal Sosial

Modal sosial utama Haryanti tentu saja fakta bahwa ia adalah istri sah (*de facto* maupun *de jure*) dari Sutrisno (Bupati *incumbent* Kabupaten Kediri). Haryanti menjadi lebih dikenal oleh masyarakat karena statusnya sebagai istri yang sah dari bupati. Hal ini terlihat dari pemasangan gambar Haryanti di kalender 2009 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kediri, baliho, maupun poster-poster yang selalu menyertakan Haryanti dan suaminya dikala kampanye.

Namun demikian, bukan berarti Haryanti hanya mengandalkan sang suami sepenuhnya. Secara personal ia juga memiliki modal sosial yang cukup kuat. Sebagai seorang dokter yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan menjadi Kepala Puskesmas Tongas, kemudian pada 2 Oktober 1982 menjadi Kepala Puskesmas Ngasem di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, ia cukup dikenal luas oleh masyarakat Kediri.

Di samping itu, melalui aktivitas organisasinya selama menjadi istri bupati sebagaimana disebutkan diatas, khususnya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Haryanti cukup aktif bergerak di masyarakat kalangan menengah ke bawah di lingkungan Kediri. Dalam aktivitas PKK itu, Haryanti cukup sering berkeliling dari desa ke desa dan ini sedikit banyak mampu membangun citranya di mata masyarakat.

Secara ekonomi, Haryanti terbilang kaya dan sukses, ia menjadi direktur utama di beberapa perusahaan. Beberapa diantaranya adalah perusahaan kontraktor, pupuk dan pemodalan (investasi) yang terdapat di beberapa negara seperti Singapura, Australia dan Belanda. Total harta milik Haryanti sebesar Rp. 41.792.310.788,-.

F.1.4. Modal Politik

Walaupun pengalaman politiknya bisa dibilang masih di bawah Nurlaila, namun status sebagai istri sah bupati *incumbent* menjadi modal politik yang sangat berarti bagi Haryanti. Sebagai kader PDIP sejak masa Orde Baru, membuat Haryanti tidak susah mendapatkan dukungan dari PDIP. Sang suami sendiri juga merupakan kader loyal PDIP sejak lama (juga sejak masa Orde Baru). Terlebih lagi, sang suami telah diangkat menjadi Ketua DPD PDIP Kabupaten Kediri dalam kepengurusan periode terakhir (belum genap satu tahun/kurang lebih 8 bulan). Menurut Sumantha (Sekretaris DPC PDI-P Kediri sekaligus ketua tim sukses pemenangan HARMAS/Haryanti-Masykuri), sebagai loyalis PDIP sekaligus pada saat itu (moment Pemilukada Kediri 2010) menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Kediri, Sutrisno memiliki modal politik yang signifikan untuk *back up* sang istri, Haryanti, untuk memperoleh dukungan dari PDIP, seperti yang diungkapkan oleh Sumantha:

“...calon itu sendiri *kan* sudah kader partai. Kita pilih-pilih, diantara kader partai yang ada. Nah, itu *kan*, kita apa ya, kita tampilkan terhadap masyarakat maupun kader partai di lingkungan struktural. Jadi partai sendiri dalam menerima lamaran ataupun mengambil sebuah keputusan tertentu memang benar-benar menggunakan mekanisme aturan partai yang ada, baik mulai dari jajaran kepengurusan yang ada di bawah, sampai tingkat pusat memang sudah ada aturannya, juklaknya ada.”

(wawancara dengan Sumantha, 18 Juli 2010, pukul 11.00)

Namun demikian, proses terpilihnya Sutrisno menjadi Ketua DPD dan turunnya rekomendasi dari DPP PDIP kepada Haryanti, dalam penuturan Sumantha terjadi secara beriringan. Hal ini, dalam pandangan Sumantha, memang didasarkan pada mekanisme partai dan jauh dari muatan kolusi.

“...(Jabatan Sutrisno sebagai Ketua DPD PDIP dimulai, *peneliti*) waktu pemilukada. Hampir bersamaan, dimana-mana hampir bersamaan ini. Sama semua. Duluan rekom [rekomendasi-*ed*]... Rekom sementara turun lebih lama. SK turun *kan* ketika kita habis konggres kemaren. Konggres kemaren bulan apa? Bulan empat *kan*? Kita di Sumenep itu, itu bulan apa sebelum konggres, apa, rakerda, musda di Sumenep itu? Jadi kalau masalah itu sebenarnya milih dari awal...”

(wawancara dengan Sumantha, 18 Juli 2010, pukul 11.00)

Tidak sulit menggalang koalisi dari partai-partai lain untuk mendukung Haryanti, dukungan diperoleh dari Golkar, PPP, Hanura dan PKNU karena memang potensi Haryanti untuk menang adalah yang paling besar berdasarkan beberapa kali survei yang dilakukan sebelum pemilukada berlangsung.

“...Masing-masing (Golkar, PPP, Hanura dan PKNU) menawarkan diri. Mereka *kan* mempunyai gambaran sendiri, mempunyai kebijakan sendiri. Nah maka, mereka ikut bergabung ke kami atau tidak bergabung dengan kami. Yang jelas *kan* itu mekanisme sendiri-sendiri. Dan mereka mau bergabung ke kita, tentunya mereka mempunyai kriteria sendiri. Artinya, karena apa, masing-masing partai juga mempunyai data, mempunyai sistem dan cara pengelolaan organisasi sendiri, kira-kira melalui survei juga di masyarakat. Contohnya aja wabup. Wabup itu juga, salah satunya juga yang mengusulkan yang mengusung juga partai lain, seperti Golkar. Ini melalui proses perhitungan sendiri, kalau misalnya peluangnya bukan memang jadi kalau kita paksa, tidak, itu kesadaran sendiri-sendiri. Dan tentunya misalnya partai Golkar, partai Hanura mempunyai dukungan sendiri. Ketika harus bergabung dengan calon itu punya perhitungan sendiri, kalau misalnya peluangnya kecil maka buat apa? Karena apa, secara totalitas dari calon yang ada, melalui survei apapun, itu memang Bu Haryanti menang. Karena memang, ibaratnya sosialisasinya, *kan* pengenalannya terhadap masyarakat memang jauh-jauh hari memang sudah, sudah apa ya.”

(wawancara dengan Sumantha, 18 Juli 2010, pukul 11.00)

Haryanti memang mengambil pasangan dari unsur birokrasi, yakni Drs. H. Masykuri, M.M. yang sebelumnya menjabat sebagai camat di Wates. Namun demikian, pertimbangan

utama pemilihan wakil itu bukan didasarkan pada posisi birokrasinya melainkan lebih pada latar belakang Masykuri sebagai Ketua I Tanfidziyah PCNU Kabupaten Kediri. Kediri merupakan salah satu basis utama NU di Jawa Timur sehingga motif pemilihan Masykuri sebagai calon wakil bupati juga didasarkan untuk meraup pemilih dari basis massa NU. Dalam relasi demikian, simbiosis mutualisme menjadi mungkin antara Haryanti dengan Masykuri. Haryanti menginginkan warga NU mendukungnya, sedangkan Masykuri diuntungkan dengan dijadikan calon wakil bupati.

F.2. Proses Kandidasi

F.2.1. Persiapan Kandidasi dan Partai Pengusung

Walaupun Haryanti juga menemui beberapa kesulitan dalam persiapannya mencalonkan diri, namun situasi yang dihadapinya lebih baik dibandingkan kandidat lainnya. Ia didukung oleh sederet partai besar yang jumlah kursi di parlemen pada Pemilu 2009 sudah lebih dari standar minimal yang dibutuhkan. Partai-partai itu adalah PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Hanura dan PKNU yang memiliki modal suara 51% yaitu setara dengan 346.202 suara.

Dalam relasinya dengan sang suami dan keluarga, Haryanti menuturkan bahwa sang suami sangat mendukung Haryanti, begitupun teman-temannya, bahkan pada awalnya ia sempat menolak dorongan itu.

Dalam penentuan calon wakil Haryanti lebih menekankan karakter daripada kemampuan. Tentunya juga dengan pertimbangan bahwa calon wakil yang ia pilih, sudah

dikenalnya sejak lama sehingga ia tahu betul karakter dari calon wakilnya tersebut. Dalam prosesnya yang diusung oleh PDIP, Haryanti lebih menunggu bola karena memang ia memiliki elektabilitas tertinggi diantara semua calon bupati. Bahkan partai-partai lain yang memutuskan bergabung telah menyadari hal ini. PDIP sendiri sudah sejak awal mengusung Haryanti setelah menyisihkan lima bakal calon dari internal PDIP, walaupun tetap melalui mekanisme pemilihan dalam partai.

F.2.2. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Salah satu momen yang melibatkan KPUD Kediri dan menarik perhatian publik dalam proses pencalonan ialah pada saat pengambilan nomor urut calon bupati. Haryanti tidak datang ke KPUD pada saat itu. Karena ketidakhadiran Haryanti itu, polemik berkembang di masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap ketidakhadiran itu adalah karena sentimen yang berlebihan dari Haryanti terhadap Nurlaila (karena isu yang santer berkembang saat itu adalah dua istri dari bupati *incumbent* mencalonkan diri menjadi bupati). Namun proses pengambilan nomor urut pada akhirnya dapat dilakukan dengan lancar walaupun sempat terjadi perdebatan soal sah atau tidaknya Haryanti sebagai salah satu kontestan calon Bupati karena ketidakhadirannya. Karena memang tidak ada pernyataan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilukada (maupun dalam peraturan KPU) untuk mendiskualifikasi calon yang berhalangan hadir dalam pengambilan nomor urut, maka KPUD mengesahkan pengambilan nomor urut untuk Haryanti. Pun pasca Pemilukada dilakukan, relatif tidak ada konflik atau protes yang berarti dari para kandidat.

F.2.3. Kandidat Dan Organisasi Sosial

Peran organisasi Islam kultural semacam NU dan Muhammadiyah juga turut mempengaruhi perolehan suara. Namun dalam analisis tim peneliti, pengaruh organisasi kemasyarakatan (agama) pada proses perebutan suara di masyarakat tidaklah signifikan. Justru yang lebih menentukan adalah pengaruh tokoh-tokoh personal dalam organisasi kemasyarakatan tersebut atau pengaruh *money politic*. Haryanti, dalam penuturan salah satu tim suksesnya, Komaruddin Hidayat, menjelaskan bahwa kemenangan Haryanti sangat dipengaruhi oleh bergabungnya Khofifah untuk mengerahkan organisasi Muslimat dan Fatayat NU sebagai kompensasi pada saat pilgub dulu Sutrisno membantunya.

G. TRI RISMAHARINI

G.1. Profil Kandidat

G.1.1. Biografi

Ir. Tri Rismaharini, lahir di Kediri, pada tanggal 20 November 1961, yang beragama Islam, adalah seorang birokrat sukses dengan pangkat terakhir sebagai Pembina Tingkat I (IV/B).

Pendidikan sekolah dasarnya diselesaikan di SDN di Kediri pada tahun 1973, kemudian SMPN X di Surabaya diselesaikan tahun 1976, SMUN V di Surabaya selesai pada tahun 1980. Pendidikan S-1 Arsitektur ITS di Surabaya 1987 dan S-2 Manajemen Pembangunan Kota Surabaya selesai tahun 2002.

Berbagai jabatan yang pernah dipegang Risma antara lain: Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeko (1997-2000); Kasie Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan (15 Januari 2001 – 16 Januari 2002); Kepala Cabang Dinas Pertamanan (16 Januari 2002 – 2 September 2002); Kepala Bagian Bina Pembangunan (2 September 2002 – 1 Juni 2005); Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (1 Juni 2005 – 25 November 2005); Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (25 November 2005 – 1 Januari 2008); Kepala Bappeko Surabaya (1 Januari 2008 – Mei 2010); dan kini Wali Kota Surabaya (2010-2015).

Kesuksesan Risma tidak lepas dari berbagai pendidikan non-formal yang dia peroleh selama menjadi birokrat. Di antaranya: diklat fungsional IUDM Belanda (1996); Tata Ruang (1996); Perencanaan Kota Baru (1996); Pemukiman (1999); Transportasi (2000) dan Urban Heritage (2000). Sedangkan diklat struktural yang pernah diikuti di antaranya: ADUM; ADUMLA; SPAMA; DIKLATPIM TK.II di Surabaya (2005).

Kesuksesan Risma ditunjukkan pula oleh berbagai hasil karya diantaranya: E-Procurement Kota Surabaya 2005; Peningkatan Ruang Terbuka Hijau pada Tahun 2008 dari 2153 ha menjadi 2156 ha (6,51% menjadi 6,52%); Tahun 2009 dari 2156 ha menjadi 6826 ha (6,52% menjadi 20,66%); APBD Surabaya diatas Rp 4 triliun pada tahun 2009-2010; alokasi anggaran pendidikan di Surabaya diatas 32% pada tahun 2009-2010; Penambahan Lokasi Sentra PKL 19 sentra dan pasar masyarakat (7 unit) 2009-2010.

Beberapa penghargaan yang pernah diterima Risma: Pelajar Teladan SD; cumlaude pada S2 Manajemen Pembangunan Kota pada tahun 2002; Satya Lencana Karya Satya pada tahun 2005; "Person of The Year" oleh Jawa Pos 2007; 7 Tokoh Seni dan Arsitektur oleh Majalah TEMPO pada tahun 2007; Surabaya Academy Award Kategori: *Board Preference* tahun 2007; Suara Surabaya Media, Harian Surya, Harian Surabaya Post, *Enciety Business Consult*; 12 Tokoh yang merubah wajah Indonesia oleh Koran Tempo tahun 2007 dan muncul dalam rubrik *Sosok* oleh *Kompas* Nasional pada tahun 2007.

Beberapa penghargaan yang relevan dengan jabatannya antara lain: tahun 2005 meraih Jawa Pos Pro Otonomi Award Spesial Achievement dari Warta Ekonomi; tahun 2007 *Award of Excellence for Global Environmental Strategis* (UNESCAP dan IGES); International Green Apple Award pada tahun 2006-2009; ADIPURA tahun 2008-2009; PU Award tahun 2009; *Best Cost Effectiveness Asian Cities of The Future* oleh *Financial Times* FDI Magazine.

Ia bersuamikan Ir. Djoko Saptoadji dan memiliki 2 anak yaitu Fuad Benardi (20 tahun) dan Tantri Gunardi (16 tahun). (sumber Litbang *Kompas*, Biro Jawa Timur, 23 Februari 2010).

G.1.2. Motivasi Kandidat

Tampilnya Tri Rismaharani sebagai kandidat Walikota Surabaya merupakan fenomena menarik, mengingat ia adalah satu-satunya perempuan kandidat yang lolos seleksi dan berhak tampil dalam kontestasi pemilukada Surabaya 2010. Tentang motivasi Tri Rismaharani dalam pencalonan kandidat Walikota Surabaya, terungkap dalam wawancara bahwa ia tidak memiliki ambisi pribadi sebagaimana yang dikatakannya:

"Nggak ada, tidak ada. Sebetulnya prosesnya saya nggak tahu, ya karena saya prinsip bahwa saya tidak mencalonkan diri. kemudian yang kedua saya juga tidak mau melamar. Nah kemudian ada partai-partai yang ingin mengusung dan mereka dengan caranya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada dari saya, apa namanya maksudnya keaktifan itu bukan di saya gitu. Temen-temen menyampaikan bahwa menjelaskan bahwa saya -ya saya- kan nggak tahu, menurut mereka saya bisa lah ya dijadikan calon. Terus saya bilang, 'Oke dasarnya apa?' Kita harus punya perjanjian, yang pertama pokoknya tetap saya tidak mau melamar, kemudian juga saya tidak mau dengan cara-cara menggunakan uang, melamar saya tidak mau apalagi menggunakan uang begitu ya. Apalagi 'mbayar partai gitu kan. Temen-temen saya dasarnya pertemanan. Jadi bukan ambisi untuk saya jadi calon, nggak. Ya karena saya sudah selama ini berteman dengan teman-teman dan saya banyak dibantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah-masalah di pemerintahan kota. Bagaimanapun meskipun saya seorang birokrasi, saya butuh masukan-masukan, saya butuh -apa namanya- pandangan-pandangan dari luar, derajat penyelesaian permasalahan masalah kota. Karena kalau saya putuskan sendiri dengan pandangan saya sendiri itu tidak *fair* ya. Nah teman-teman itu yang selama ini membantu saya menyampaikan seperti itu lah ya. 'Oke', saya bilang gitu. atas dasar pertemanan jadi bukan atas dasar keinginan saya, saya juga tidak ingin mengecewakan teman-teman, oke. Tapi kemudian diciptakanlah standar-standar tertentu, jadi misalkan apa suara harus minimal 20% itu ya. Kemudian oke, saya juga jalan bukan kampanye tapi kita hanya ingin tahu apakah bisa mencapai angka gitu. Tanpa saya *men-declare* mau di calonkan.."

(wawancara dengan Tri Rismaharani, tanggal 17 Juli 2010)

Meskipun pencalonan Tri Rismaharini tidak berdasarkan motif personal namun tampilnya Tri Rismaharini sebagai calon kandidat Walikota Surabaya yang didampingi oleh Bambang DH didorong oleh motif untuk mempertahankan prestasi-prestasi yang telah didapat oleh Kota Surabaya (yang mana tidak dapat dilepaskan dari sosok Tri Rismaharini sebagai birokrat pemerintah Kota Surabaya) dan menyelesaikan persoalan-persoalan publik kota Surabaya. Seperti diuraikan oleh Tri Rismaharini,

“...Sebetulnya itu prestasi itu terakhir ya, terakhir. Sekitar saya terus terang bukan apa namanya bukan ya Alhamdulillah kalau dapat prestasi. Tapi yang betul-betul real itu bagaimana sebetulnya itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, itu yang paling utama. Jadi contohnya begini, misalkan saat Adipura itu kita raih itu saya pertama kali setelah sekian tahun tidak mendapat Adipura kemudian kita dapat. Tapi saat itu saya melihat bahwa banyak kelemahan Adipura, sehingga saya ngomong kalau pendekatannya seperti ini saya sampaikan ke pemerintah pusat. Kalau pendekatannya seperti ini, seorang kepala daerah itu karena dia ingin berprestasi di depan warganya, masyarakatnya, hanya karena tanda petik yang namanya mendapatkan prestasi Adipura, segalanya *kan* dicapai. Contohnya misalkan dia investasikan sekian persen dari belanja APBD nya untuk mendapatkan Adipura dan dia akan kerja sekian bulan pada waktu penilaian. Itu *kan ndak* tabu, itu yang saya sampaikan ke temen-temen penilai pusat. Saya bilang ini harus *based on* masyarakat, kalau masyarakat tidak mengerti itu lepas Adipura sendiri, masyarakat sendiri, seperti prestasi-prestasi yang lain maka itu tidak akan langgeng. Dan itu Surabaya tidak pernah merasakan seperti itu, saatnya Pak Purnomo Kasidi itu tidak pernah tidak ada tahun tidak tanpa Adipura. Tapi kemudian Pak Purnomo Kasidi turun diganti Pak Narto satu kalipun tidak pernah dia dapat. Karena yang dulu itu dicapai dengan pola seperti itu, lha itu yang terus terang saya tidak *anu*, berangkatnya memang dari masyarakat, harus dari masyarakat. Ya jadi saya tujuan utamanya adalah kepuasan masyarakat, ya pelayanan kepada masyarakat, masyarakat luas itu pasti akan otomatis atau tidak, itu akan dampaknya pasti positif ke kota. Nah akhirnya [jadi] prestasi itu...”

(wawancara dengan Trirismaharini, tanggal 17 Juli 2010)

Dari pandangan yang telah diutarakan oleh Tri Rismaharini diatas terlihat bahwa kandidat memaknai pencalonannya menjadi Walikota Surabaya tidak hanya sekedar untuk meraih prestasi-prestasi bagi kota Surabaya namun lebih jauh dari itu adalah untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan dasar berbasis masyarakat. Selanjutnya ia juga menguraikan bagaimana memaknai pencalonannya menjadi kota Surabaya untuk melakukan pembenahan dan perbaikan kota Surabaya secara integratif dan tidak secara parsial. Seperti yang diuraikan oleh Tri Rismaharini:

"Jadi ya gini *kan* kebetulan *kan*, kebetulan saya di birokrasi dua tahun terakhir saya *kan* menjabat di [posisi] yang menentukan kebijakan ya, kebijakan pembangunan, nah sebetulnya tidak bisa lepas kalau kita ngomong kemiskinan. Kemiskinan itu tidak lepas dari pendidikan, dari budaya, dari itu, nggak bisa. Jadi saya ngomong kemiskinan itu saya selesaikan dengan apa, misalkan saya selesaikan dengan pernyataan masalah ekonomi misalkan kita siapkan jaring-jaring ekonomi tapi kalau mental sama kulturunya tidak mendukung ya nggak bisa. Nah kemudian sekarang saya ngomong pendidikan, saya tidak ngomong masalah bagaimana orang tuanya, contohnya misalkan Surabaya sudah digratiskan tapi kok masih ada anak yang nggak sekolah, apa dasarnya orangtuanya minta dia bekerja, belum tentu dia miskin. Tapi memang dia punya budaya itu, jadi itu salah satu masalah, masalah yang tidak berlaku satu permasalahan kota itu harus diselesaikan dan tidak bisa dipotong, dipilah-pilah itu nggak [permasalahan yang ada tidak bisa dipecahkan secara parsial, sepotong-potong]. Kalau mau maju suatu kota maka itu semua harus diangkat gitu, masalah apapun itu, jadi nggak bisa. Contohnya ya itu yang paling gampang misalkan ngomong kemiskinan ya, ngomong kemiskinan kita tidak bisa hanya ngomong, 'ini *tak* [aku] siapkan tempat usaha atau *tak* carikan pekerjaan', jadi nggak bisa seperti itu. Contohnya misalkan ada satu orang atau beberapa keluarga yang *tak* temui, yang laki nggak mau kerja, yang kerja yang perempuan. Yang laki hanya adu ayam aja, [budaya seperti] itu ada mas. Dia *tak* tawari, 'bapak mau jualan di sini?', 'nggak mau'. Ya itu *kan* perkara-perkara seperti itu *kan* namanya penyakit sosial yang juga harus kita selesaikan untuk mengangkat kemiskinan itu. ...Ada seorang suami yang, ya mohon maaf ini, dalam tanda petik jual istrinya. Lha itu ada [kasus seperti] itu. Jadi artinya bahwa tidak bisa kita menyelesaikan itu sepotong-sepotong. Nah ini *kan* yang bahayamiskan dia suka adu ayam, nggak mungkin *kan* dia adu ayam sendiri, pasti ada temennya *kan*, nah ada kelompoknya. Nah kelompok ini *kan* juga artinya bahwa itu juga harus diselesaikan begitu, karena bukan hanya satu orang. ...dan itu *kan* juga di lihat anaknya, contohnya misalkan. Di kawasan prostitusi itu *kan* anak-anak laki *kan* masih kecil-kecil dia sudahtahu [sudah melihat tingkah laku orang dewasa] terus dia jadi ngganggu ke temen-temennya yang perempuan. Nah macam-macam itu nggak bisa diselesaikan hanya satu potong begini, itu nggak bisa..."

(wawancara dengan Tri Rismaharini, tanggal 17 Juli 2010)

Selanjutnya motivasi tampilnya Tri Rismaharani sebagai kandidat Walikota Surabaya juga berhubungan dengan perspektifnya untuk menghubungkan peningkatan pelayanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan keterlibatan dan partisipasi warga dalam proses pembangunan kota Surabaya. Selanjutnya program strategis lain adalah penguatan sentra-sentra ekonomi kecil dan menengah yang sudah mulai dilakukan dan akan terus dipertahankan. Seperti diutarakan oleh Tri Rismaharani:

"...Jadi *kan* begini, kalau misalkan masyarakat itu, dia sudah tahu bahwa kita ini melayani mereka, maka mereka akan sangat mudah untuk diajak berpartisipasi. Nah mudahnya diajak berpartisipasi, saya akan lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan sosial dengan budaya. Karena ini yang paling sulit ini.. Nah seperti tadi misalkan adu jago, masyarakat [dapat menganggap] ternyata ooo enak ya kondisi lingkungan kita seperti ini. Nah mereka akan serta-merta mengajak temennya yang tadi yang suka adu jago, atau tidak mau bekerja, itu akan mereka akan ajak gitu. Nah itu yang sebelumnya tujuan akhirnya, kalau sudah itu berhasil maka ini akan peningkatan ini akan lebih mudah. Nah sebetulnya saya memang belajar juga masalah ekonomi sedikit, pertumbuhan ekonomi di Surabaya ini ditunjang sama konsumsi. Nah kalau kemampuannya masyarakat daya belinya itu rendah, maka pertumbuhan ekonomi itu tidak tercapai. Nah karena itu kita mengangkat untuk masyarakat itu, jadi kita tujuan kita adalah bagaimana masyarakat itu mengurangi pengeluaran, kemudian meningkatkan pendapatan sehingga dia akan mempunyai margin kekuatan ekonomi lebih besar. Nah kalau dia mempunyai kekuatan ekonomi lebih besar, maka dia bisa membelanjakan uangnya. Nah oleh karena itu pelayanan-pelayanan dasar kita tingkatkan seperti itu. Kemudian juga bagaimana meningkatkan ekonomi, mangkanya kita bangun sentra-sentra PKL, kita bangun pasar-pasar masyarakat, kemudian kita bangun pusat-pusat. Misalkan orang *ngomong* taman ... pernahkah kita tahu bahwa di taman itu ada perputaran ekonomi cukup tinggi? Dulu itu PKL Bungkul itu sebelum ada taman itu, itu sehari itu nggak sampai satu juta [penghasilannya]. Sekarang ini satu hari sampai sepuluh sampai lima belas juta, perhari, satu orang. Dan itu kita tidak bohong, pedagang pun mengakui omsetnya itu sehari antara sepuluh sampai lima belas juta. Kita akan melihat itu, karena kemudian *kan* bukan hanya masyarakat Surabaya yang datang ke situ *kan*. Nah itu yang kita harus lihat, jadi bagaimana menumbuhkan apa namanya suatu pusat-pusat dan *center-center* kegiatan yang akan mendorong tadi. Nah itu yang kita buat, *mangkanya* kita *mbangun* yang ada di pinggir-pinggir kota itu sekarang, untuk lebih mendorong itu, gitu..."

(wawancara dengan Tri Rismaharani, tanggal 17 Juli 2010)

Dari apa yang diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tampaknya Tri Rismaharini sebagai kandidat Walikota Surabaya tidak didorong oleh suatu ambisi pribadi untuk maju menjadi Walikota. Motivasi politik yang dimiliki olehnya adalah untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih oleh kota Surabaya. Dalam pandangannya, mengelola dan memimpin Kota Surabaya tidak didasarkan pada capaian prestasi namun lebih pada menginisiasi proses pembangunan kota berbasis masyarakat yang dilakukan dengan menjalankan pelayanan-pelayanan dasar dari pemerintah kota untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan warga kota dan penguatan sentral-sentra ekonomi usaha kecil untuk mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi kota Surabaya.

G.1.3. Modal Sosial

Tri Rismaharini bukanlah sosok aktivis atau politisi kebanyakan. Risma merupakan birokrat profesional, yang mengawali dan mengakhiri karirnya sebagai birokrat di Pemerintahan Kota Surabaya sebelum memutuskan berhenti dan menjadi calon walikota. Modal sosial yang dimiliki justru terbangun ketika dia berkarir sebagai birokrat profesional itu. Ketika bertindak sebagai Kepala Bagian Bina Pembangunan, Sekretariat Daerah Kota Surabaya, antara 2 September 2002 sampai 1 Juni 2005, Risma telah memelopori diberlakukannya *E-procurement* di dalam proses tender di Kota Surabaya. Sebelumnya, proses tender ditengarai berlangsung tidak sehat. *Kongkalikong* antara pejabat dengan peserta tender atau diantara peserta tender sendiri sering terjadi. Konsekuensinya, besaran tender itu dianggap terlalu mahal, tidak efisien dan memiliki aroma KKN. Melalui instrumen *E-procurement*, praktik yang tidak

sehat semacam itu diharapkan bisa berkurang. Terobosan Risma ini cepat menyebar ke mana-mana, bukan hanya ke peserta tender dan di lingkungan pemerintahan Kota Surabaya melainkan juga ke masyarakat luas. Media massa telah menyoroti dan mempublikasikan terobosan ini. Radio-radio yang sering mengadakan acara *talk show* dan melibatkan pendengar juga sering memperbincangkan penggunaan *E-procurement* di awal-awal 2000-an itu.

Ketika Risma dipindah sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, antara 25 Februari 2005 sampai 1 Januari 2008, sempat muncul dugaan bahwa Risma akan 'dikerangkeng' karena terlalu keras di dalam menerapkan *E-procurement*. Penggunaan metode baru dalam proses tender itu dianggap telah merugikan sejumlah pejabat dan peserta tender yang menggunakan pola lama karena tidak bisa lagi leluasa mencari keuntungan untuk diri mereka. Ada dugaan, Risma dipindahkan agar peserta tender bisa lebih mudah melakukan praktek KKN dengan pejabat pemkot kembali. Atas kecurigaan semacam itu, Walikota Bambang DH sempat angkat bicara dan berusaha menampiknya. Menurut Bambang, Risma bukan 'dibuang' melainkan 'dipromosikan'. Selain itu, Risma sendiri pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Dinas Pertamanan, antara 16 Januari 2002 sampai 2 Februari 2002. Dengan demikian, kata Bambang, pekerjaan Risma itu juga bukan sesuatu yang asing sama sekali.

Argumentasi itu mungkin tidak salah. Risma mencatat prestasi yang gemilang ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Risma melakukan gebrakan dengan melakukan perbaikan taman-taman dan

penghijauan, serta penataan wajah kota. Akibatnya Surabaya kemudian berubah menjadi salah satu kota terbersih dan berwajah hijau di Indonesia. Di samping masyarakat yang mengetahui dan menikmati secara langsung prestasi ini, *Jawa Pos* dan media lain juga sering mempromosikan hasil kerja Risma sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Tidaklah mengherankan kalau Risma termasuk kepala dinas terpopuler di Kota Surabaya. Setelah itu, Risma dipromosikan sebagai Kepala Bappeko Kota Surabaya. Ini merupakan posisi strategis karena berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Surabaya.

Posisi dan prestasi semacam itu telah memungkinkan Risma memiliki jaringan yang lebih luas dengan warga Kota Surabaya. Dalam upaya membangun Surabaya sebagai kota bersih dan hijau, Risma sering bekerjasama dengan pengurus RT/RW. Hal yang sama juga dilakukan ketika bertindak sebagai Kepala Bappeko. Karenanya Risma menjadi salah satu pejabat yang memiliki jaringan dengan masyarakat sampai di level bawah. Ketika ia menjadi Kepala Dinas Pertamanan, ia memiliki kader lingkungan yang dibentuk sampai tingkat RT/RW. Kader lingkungan inilah yang menjadi jaringan Risma dan menguntungkannya dalam pemilukada. Sementara itu, prestasi yang diraihinya selama ini telah menumbuhkan kepercayaan terhadap dirinya. Jaringan dan kepercayaan itu, oleh para ahli ilmu sosial, merupakan elemen penting dari modal sosial. Dalam banyak kasus telah terbukti bahwa modal sosial merupakan salah satu modal penting bagi keterpilihan seseorang menjadi kepala daerah melalui pemilihan langsung.

G.1.4. Modal Politik

Mengingat ia bukanlah politisi dan tidak terkait dengan partai tertentu, Risma tidak memiliki modal politik berupa dukungan dari partai pada awalnya. Modal politik yang dimilikinya adalah sebagai pejabat di lingkungan birokrasi, yang memungkinkan dirinya berinteraksi dengan pejabat-pejabat politik dan masyarakat. Modal terbesar yang dimiliki Risma adalah predikat birokrat profesional dan berprestasi. Modal ini pula yang memungkinkan Risma memperoleh kepercayaan dari PDIP untuk dicalonkan.

Posisinya sebagai mantan Kadis Pertamanan dan Kepala Bapeko Surabaya membuatnya diperhitungkan oleh Bambang DH untuk berpasangan sebagai Walikota Surabaya. Kedekatan dengan Bambang DH, yang Walikota Surabaya, menjadikan dia diperhitungkan dalam tubuh PDIP. Tri Rismaharini sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan politik praktis. Oleh karena posisinya sebagai birokrat tidak memungkinkan dia untuk memasuki dunia politik. Ia hanya mengenal politisi ketika harus mewakili eksekutif untuk *hearing* dengan dewan. Bisa dikatakan Risma sama sekali tidak memiliki modal politik.

G.2. Proses Kandidasi

G.2.1. Persiapan Kandidasi

Tampilnya Tri Rismaharini sebagai kandidat pilwali Kota Surabaya berjalan melalui dinamika politik yang melibatkan interaksi antara kandidat, tim pemenangan dan partai politik pengusung (PDIP). Tri Rismaharini adalah kandidat

yang berlatar belakang birokrat non-partai yang diusung oleh partai politik. Seperti diutarakan oleh Jagad Hariseno (Tim Pemenangan pasangan Risma-Bambang) bahwa pada awalnya bursa pencalonan kandidat Walikota Surabaya telah memunculkan beberapa nama yang coba ditawarkan melalui mekanisme internal dari bawah partai politik. Namun demikian dalam mekanisme internal PDIP suara terakhir yang memutuskan rekomendasi partai politik adalah ketua umum partai. Mengetahui mekanisme tersebut maka Jagad Hariseno sebagai tim pemenangan pasangan kandidat Rismadan Bambang melakukan inisiatif untuk langsung menghubungi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, setelah Tri Rismaharini menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan menjadi kandidat Walikota Surabaya.

Wacana untuk mencalonkan Risma mulai muncul secara kuat pada Januari 2010, hanya beberapa minggu setelah pendeklarasian pasangan Saleh Ismail Mukadar dan Bambang DH. Pencalonan Risma sekaligus berarti penolakan sebagian pengurus PDIP Surabaya terhadap pencalonan Saleh. Sucipto, mantan Sekjen PDIP memiliki peran yang sangat penting di dalam proses pencalonan Risma. Secara terang-terangan, pada awal Februari, dia merestui pencalonan Risma. Dalam pandangan dia, meskipun bukan kader PDIP, Risma dipandang memiliki kemampuan dan prestasi, serta populer di kalangan warga Surabaya. Meskipun demikian, keputusan ini juga tidak lepas dari persaingan antara Wisnu Sakti dan Saleh Mukadar. Wisnu merupakan anak dari Sucipto. Dalam pendeklarasian 'SBY' (Saleh Mukadar-Bambang Yes), Wisnu merasa diteliking. Beberapa saat setelah pendeklarasian pasangan 'SBY', Safrudin Budiman membuat analisis sebagai berikut:

"Namun dalam perjalannya deklarasi ini tidak mulus, pasalnya Sekretaris DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana merasa ditelikung dengan adanya deklarasi pencalonan pasangan Saleh Mukadar-Bambang DH. Berdasar keterangan sumber dari internal PDIP, Wisnu Sakti merasa ditinggal dengan deklarasi pasangan yang berslogan Saleh Mukadar-Bambang Yes (SBY) tersebut. Pasalnya, tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan Wisnu terkait deklarasi tersebut".

(Safrudin Budiman, 21 Desember 2009)

Upaya untuk mewacanakan Risma sebagai calon Wali Kota dari PDIP pada Januari 2010, dengan demikian, juga tidak lepas dari ketidaksetujuan dirinya terhadap pencalonan Saleh Ismail Mukadar. Aroma persaingan antara Saleh Ismail Mukadar dengan Wisnu Sakti Buana memang cukup kencang menjelang pencalonan walikota. Puncaknya adalah ketika diadakan pemilihan Ketua DPC yang baru. Saleh Mukadar tersingkir dan Wisnu terpilih sebagai Ketua DPC yang baru.

Faktor Sucipto memegang peran yang penting di dalam pencalonan Risma karena kedekatannya dengan Megawati. Karena itu, meskipun Risma tidak secara resmi diusulkan oleh PDIP Surabaya, pada 12 Maret 2010 Risma secara resmi memperoleh surat rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Megawati untuk menjadi calon wali kota Surabaya, berpasangan dengan Bambang D.H.

Melihat fenomena konflik politik yang berlangsung di internal kubu PDIP antara kubu Saleh Mukadar dan Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Shakti Buana, maka dapat dikatakan di sini bahwa tampilnya Risma sebagai perempuan kandidat tidak dapat dilepaskan dari hadirnya struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) yang terbentuk ditengah konflik antara elite politik laki-laki di internal kubu PDI-P. Dari sini konteks politik pertarungan elite yang berlangsung memunculkan wacana alternatif

di internal partai yang orang yang dianggap memiliki kompetensi yang handal meskipun bukan berasal dari partai politik.

Kekecewaan terhadap surat rekomendasi tersebut diatas muncul dikalangan kader PDIP Surabaya, khususnya para pendukung setia Saleh Mukadar tetapi, mengingat yang memberirekomendasi adalah Megawati sendiri, kekecewaan itu tidak sampai pada gerakan pembangkangan. Bahkan Saleh Mukadar sendiri pada akhirnya juga memberikan dukungan terhadap surat rekomendasi itu. Dukungan yang lebih solid ini juga tidak lepas dari pergantian kepengurusan baru di jajaran DPC PDIP Surabaya di bawah pimpinan Wisnu Sakti.

Setelah proses komunikasi berjalan dengan baik, maka Ketua Umum PDIP segera menginstruksikan untuk melakukan pengamanan terhadap suara partai. Hal tersebut seperti diutarakan oleh Jagad Hariseno, salah seorang tim sukses Risma:

"...Dan di internal PDI Perjuangan pada waktu itu sebelumnya sudah ada beberapa kandidat yang malah sudah direkrut lewat mekanisme partai dari bawah. Tetapi memang peraturan di partai PDI Perjuangan adalah keputusan terakhir adalah keputusan dari ketua umum yang mempunyai hak prerogatif sebagai ketua umum partai. Nah dari situ, seketika bu Risma bersedia menjadi calon walikota, ya saya langsung mencoba berkomunikasi dengan dewan pimpinan pusat, langsung bertemu dengan ketua umumnya. Dan pada waktu itu ketua umumnya juga langsung memberikan instruksi untuk mengamankan bu Risma karena juga harus ada penilaian di internal partai yaitu semacam kompetisi. Siapakah yang nantinya punya suara di konstituen partai yang paling besar, atau paling nggak yang seberapa bagus suara bu Risma dilihat dari warga kota dan sebagian calon-calon pemilik karena nanti akan didasarkan pada elektabilitas survei. Nah pada saat itu, saya langsung melakukan gerakan untuk mengamankan bu Risma bersama kawan-kawan. Jadi kalau dilihat dari peranan sebetulnya, saya terlibat sejak awal ya, [di]mulai [sejak] belum turunnya rekomendasi sampai kemudian munculnya rekomendasi dan setelah itu otomatis saya aktif kebetulan sebagai ketua tim untuk bidang eksternal..."

(wawancara dengan Jagad Hariseno, 11 Juni 2010)

Dukungan dari ketua umum tersebut tidak membuat Tri Rismaharini dapat begitu saja diusung oleh PDIP mengingat dukungan tersebut mensyaratkan survei elektabilitas berpihak pada kandidat yang akan diusung. Tim pemenangan pasangan Risma-Bambang kemudian melakukan proses sosialisasi untuk menampilkan figur Risma di simpul-simpul massa, salah satunya dengan menggerakkan kader lingkungan hidup yang telah lama berinteraksi dengan Tri Rismaharini ketika ia menjadi pejabat birokrasi pemkot Surabaya. Upaya tersebut membawa hasil dengan menguatnya elektabilitas dari figur Risma, seperti diutarakan bahwa apabila sebelumnya popularitas dari beliau hanya 1% dalam jangka waktu 2 minggu popularitas dia naik menjadi 23%. Hal ini seperti diutarakan oleh Jagad Hariseno:

"...Sebetulnya yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang di gariskan oleh partai, akan di penilaian berdasarkan survei elektabilitas. Otomatis ya kita langsung mendaratkan bu Risma untuk kita sosialisasikan di simpul-simpul massa, dimana di simpul-simpul massa itu adalah wilayah-wilayah dimana warga kota yang selama ini sudah berkomunikasi oleh bu Risma secara langsung maupun tidak langsung lewat jaringan kader lingkungan yang selama ini sangat dekat dan selalu di-support oleh kebijakan-kebijakan bu Risma itu dalam lima tahun terakhir. Nah dari situlah sebenarnya kita mencoba memunculkan, mengkonkritkan apa yang menjadi semacam deposit sosial itu riil menjadi dukungan sosial dari warga dan itu berhasil karena dalam dua minggu elektabilitas bu Risma yang dari 1% kemudian naik menjadi 23%. Sebetulnya ini bukan kenaikan elektabilitas karena kita kampanye langsung ke warga, tidak. Tetapi begitu warga itu tau bahwa bu Risma itu maju menjadi calon walikota, otomatis mereka sudah mendukung sekarang mengkonkritkan dukungannya dengan lebih jelas. Sehingga kalau dilihat dari elektabilitas survei, ada kenaikan dalam waktu dua minggu dari 1% menjadi 23%...."

(wawancara dengan Tririsaharini, tanggal 17 Juli 2010)

Tim pemenangan dan partai politik mencatat ada beberapa hal yang menjadi kekuatan dari pasangan Tri Rismaharini dan Bambang DH untuk maju dalam bursa kontestasi pilwali Surabaya. Faktor-faktor tersebut adalah; pertama, begitu kuatnya apa yang disebut sebagai *social deposit* dari

figur Tri Rismaharini maupun Bambang DH. Yang dimaksud sebagai *social deposit* adalah hasil kerja dan reputasi yang telah dibangun oleh figur Risma dan Bambang selama ini dipandang menjadi modal besar bagi mereka untuk maju. Kedua adalah terkait dengan soliditas dari partai pengusung PDIP Surabaya dalam memperjuangkan pasangan Risma-Bambang. Seperti diutarakan oleh Jagad Hariseno bahwa dalam skala soliditas partai dan soliditas konstituen partai politik, maka PDIP Kota Surabaya memiliki skala indeks soliditas tertinggi seluruh Indonesia dengan skala 86 % dibanding dengan soliditas ditempat lainnya. Kedua faktor itulah yang menjadi modal awal bagi pemenangan pasangan Risma-Bambang. Lebih lanjut Jagad Hariseno mengungkapkan,

".....Sebetulnya modal awal terbesar dari bu Risma itu dan pak Bambang DH, karena kalau kita lihat dari kandidat ini, adanya modal awal itu tidak bisa dipisahkan kedua orang ini. Yang pertama yaitu modal dari hasil kerja dia berdua yang itu tadi saya katakan sebagai deposit sosial, hingga kemudian berubah menjadi dukungan konkrit itu modal yang pertama. Modal kedua, yang paling penting adalah soliditas partai pendukung. Karena dari asumsi awal kita, soliditas partai PDI Perjuangan itu adalah partai yang paling solid di banding partai-partai yang lain yang belakangan demikian terbukti secara struktur bahwa dari skala seratus, partai PDI Perjuangan kota Surabaya ini satu-satunya partai yang mendapatkan skala 86 koma sekian soliditas partainya. Nah dari modal itu, juga kita mengaca dari beberapa kemenangan-kemenangan PDI Perjuangan di beberapa wilayah-wilayah yang telak meskipun melawan koalisi yang besar. Itu, wilayah tersebut menang dengan telak ataupun juga memenangkan pemilukada karena memang wilayah-wilayah tersebut keseluruhan itu mempunyai soliditas partai di wilayah tersebut yang sangat tinggi. Jadi itu modal utamanya, jadi dua modal utama deposit sosial dari hasil kerja calon dan yang kedua adalah soliditas partai pendukung...."

(wawancara dengan Trirismaharani, tanggal 17 Juli 2010)

G.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Pasangan Risma-Bambang didukung oleh PDIP. Di Surabaya, PDIP merupakan salah satu partai besar. Pada pemilu 1999, PDIP memenangkan pemilu di Surabaya secara mayoritas atau 52,84%. Dari 40 anggota DPRD yang dipilih berdasarkan hasil pemilu, PDIP memperoleh 22 kursi. Tetapi, perolehan suara itu menyusut drastis pada pemilu 2004.

Perolehan kursi PDIP tinggal 13. Padahal, kursi hasil pemilu yang diperebutkan bertambah menjadi 45. Perolehan PDIP terus mengalami penurunan pada pemilu 2009. Dari total 995.513 suara yang sah, PDIP hanya mampu memperoleh 189.010 suara atau 18,99%. Konsekuensinya, perolehan kursi PDIP di DPRD Surabaya juga mengalami penurunan. Dari 50 kursi yang diperebutkan, PDIP hanya mampu memperoleh 8 kursi.

Penurunan perolehan suara PDIP pada pemilu 2004 lebih disebabkan oleh citra buruk anggota DPRD dari PDIP periode 1999-2004 dan pemerintahan Megawati yang dianggap kurang meyakinkan. Ketua DPRD dari PDIP, ketika itu, misalnya, dihukum karena kasus korupsi. Isu tidak sedap tentang perilaku buruk politisi PDIP menyebar ke masyarakat. Konsekuensinya, banyak pemilih PDIP meninggalkannya. Sementara itu, penurunan perolehan suara pada Pemilu 2009 lebih banyak disebabkan oleh penguatan Partai Demokrat dan sejumlah partai lainnya seperti PKS dan Gerindra. Partai Demokrat, misalnya, memperoleh suara yang cukup signifikan, yaitu 311.792 suara atau 31,32%.

Meskipun secara formal pasangan Risma-Bambang hanya didukung oleh PDIP, secara *real* pasangan ini didukung oleh pendukung dari partai-partai lain. Meskipun DPC PAN secara resmi mendukung pasangan Arief Afandi dan Adies Kadir, 24 PAC PAN pernah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Risma dan Bambang. Itulah sebabnya, PDC PAN Surabaya pernah mengancam untuk memberi sanksi kepada 24 PAC itu.

Potensi dukungan dari partai-partai lain, sangat penting bagi pasangan Risma-Bambang karena perolehan suara PDIP sendiri pada pemilu 2009 hanya 18,99%. Secara teoritik, kalau hanya mengandalkan dukungan dari partai, sulit memenangkan pemilukada. Para calon di dalam pemilukada justru ditantang untuk memperoleh dukungan dari para pendukung lintas partai, meskipun tidak harus dilakukan secara formal.

BAB V

PROFIL DAN PROSES KANDIDASI PEREMPUAN KANDIDAT DI SULAWESI UTARA

Pemilukada 2010 di Provinsi Sulut menghadirkan nuansa politik yang berbeda dengan wilayah lainnya. Setidaknya tercatat hampir 16 perempuan yang maju dalam pemilukada 2010 yang diselenggarakan di 7 kabupaten. Ini menjadi menarik karena politik dan perilaku politik selalu dipandang sebagai suatu aktivitas maskulin. Perilaku politik mencakup kemandirian dan tindakan agresif seseorang untuk bersikap asertif terhadap kekuasaan. Secara kultural masyarakat senantiasa menganggap bahwa perempuan tidak pantas memiliki sifat yang agresif atau memiliki ambisi.

Karena anggapan diatas umumnya masih kuat tertanam di masyarakat, fenomena peningkatan jumlah perempuan yang maju dalam kandidasi di Sulut cukup mengejutkan karena menentang stereotipe yang ada. Pada satu sisi perempuan harus berhadapan dengan stereotipe tersebut sementara pada sisi lain harus berjuang untuk memenangkan kompetisi. Apa latar belakang dan bagaimana proses perempuan dalam berpikir, berkeinginan, berambisi dan akhirnya maju dalam kandidasi melalui serangkaian tahapan yang sulit, serta bagaimana gender menjadi faktor dukungan atau hambatan, memang menarik untuk dikaji.

Seperti pada bab sebelumnya, bab ini juga akan menggambarkan profil dan biografi, motivasinya, modal sosial dan modal politiknya untuk maju dalam pemilukada 2010 dan proses kandidasinya yang mencakup dinamika interaksi kandidat dengan partai, dengan lembaga penyelenggara pemilu dan dengan tim sukses/pemenangan dan organisasi kemasyarakatan.

Ada 13 kandidat bupati dan wakil bupati di Wilayah Sulawesi Utara yang masuk dalam penelitian ini yaitu: 1 kandidat Walikota Tomohon; 2 kandidat bupati dan 3 kandidat wakil bupati di Kabupaten Minahasa Utara; 1 kandidat bdn 3 kandidat wakil bupati di Kabupaten Minahasa Selatan; serta 3 kandidat wakil bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Kandidat di Minahasa Utara diantaranya Netty Agnes Pantow, Inggried Sondakh, Sintya Panambunan, Francisca Magdalena Tuwaidan, Yulisa Baramuli. Kandidat di Tomohon adalah Syennie Watoelangkow, kandidat di Minahasa Selatan adalah Tetty Paruntu, Kartini Simbar, Soeltje Rambli, dan Felly Runtuwene. Sedangkan di Bolaang Mongondow Timur diantaranya Meity Ochotan, Dyane Merukh, Merly Budiman.

A. NETTY AGNES PANTOW

A.1. Profil Kandidat

A.1.1. Biografi

Novry Netty Agnes Pantow, perempuan kandidat Bupati (papan satu) Minahasa Utara 2010 ini lahir pada tanggal 7 Agustus 1971 di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan (d/h Kecamatan Tatelu dan kemudian menjadi Kecamatan Dimembe, sebelum dimekarkan) Kabupaten Minahasa Utara. Terlahir dari pasangan Jantje Pantow dan Agustien Najoan, yang kondisi perekonomian keluarganya relatif pas-pasan. Ini tercermin dari kondisi rumah orang tuanya saat itu yang berinding bambu dan beratap batu/jerami. Netty adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Saudaranya adalah Handry, James, dan Marici.

Pada tahun 1976, saat usianya belum mencapai 5 tahun, Netty mulai menapaki pendidikan dasar di SD Inpres Mapanget, yang berjarak 300 m dari rumahnya. Prestasi pendidikannya di SD amat bagus, karena selalu menjadi juara kelas. Setamat SD pada tahun 1982, Netty melanjutkan pendidikannya ke SMP Talawaan yang berjarak 2 km dari rumahnya. Setamat SMP, Netty melanjutkan pendidikan ke STM Manado, dan berpindah serta menamatkan pendidikannya di SMA Kristen El-Fatah Manado.

Tubuhnya yang tinggi semampai serta kegemaran dan prestasinya pada olahraga bola volley, telah membawanya menjadi pegawai di Kantor Bank Dagang Negara (BDN) cabang Manado pada tahun 1988. Setelah itu reputasinya sebagai atlet bola volley makin berkembang. Berbagai *event* bola volley regional, nasional, dan internasional diikutinya. Pada tahun 1990, Netty berpindah kerja menjadi pegawai harian di kantor PLN wilayah Sulutteng.

Pada tanggal 23 Agustus 1993 Netty disunting menjadi istri Ruddy Stefanus Kululu, seorang atlet bulutangkis yang menjadi pegawai Bank BCA Manado, dan dikaruniai 4 anak, yaitu Christian Gaja Soetrisno, Billy Yosua Christofer, Angel Patricia Isabel, dan Tirsa Indah Tesalonika Gold.

Pasangan istri-suami yang atlet dan pegawai PLN dan Bank BCA ini mencoba peruntungan dengan merambah dunia usaha, diawali dengan berdagang hasil pertanian dan perkebunan hingga ke usaha *property*. Di tengah kesibukan itu, Netty melanjutkan pendidikannya di STIE Pioneer Manado, dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi pada tahun 2003. Seusai itu, Netty dan suaminya berhenti bekerja

sebagai pegawai, dan fokus mengembangkan usahanya dan mendirikan PT. Rentby Tunas Jaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan *general supplier*.

Netty juga aktif berkegiatan dalam beragam organisasi. Pernah menjadi Ketua Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu Sinode GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) Rayon II Minahasa utara 2005-2009. Lalu berlanjut 2010-2013 sebagai Ketua Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu di jemaat Baitel Kolongan dan wilayah Mapanget II. Di luar itu, Netty saat ini menjadi ketua DPC IWAPI Minahasa Utara. Pula, sebagai Sekretaris DPD IWAPI Sulawesi utara. Di cabang olahraga, Netty saat ini menjadi Ketua Persatuan Bola Volley Indonesia (PBVSI) Kabupaten Minahasa Utara.

Suaminya, Ruddy Stefanus Kululu, diluar karir usahanya, juga berkarir sebagai politisi. Pada tahun 2004, suami Netty ini pernah mencoba maju sebagai calon Wakil Bupati Minahasa Utara, tapi gagal memasuki tahapan pemilukada. Ruddy juga pernah menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Utara 2007-2010. Selama mendampingi aktivitas politik kepartaian suaminya, Netty menjadi terpicat ikut terjun dalam dunia politik. Sehingga, pada tahun 2008 Netty turut aktif menjadi Wakil Ketua DPD Perempuan Demokrat Sulut, dan Wakil Bendahara Partai Demokrat Sulut. Aktivitas politik Netty berlanjut pada keikutsertaannya dalam pemilu legislatif 2009 sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Demokrat, dan terpilih. Saat maju dalam proses kandidasi dalam pemilukada di Minut (Minahasa Utara), Netty sedang dalam kedudukan sebagai anggota Komisi I bidang pemerintahan DPRD provinsi Sulawesi Utara.

Penghargaan mutakhir didapat Netty pada Oktober 2009 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu sebagai “10 wanita pengusaha berprestasi” tingkat nasional. Karena pengalaman karir dan reputasi yang pernah diraihinya, sebagian publik di Sulawesi Utara menjuluki Netty sebagai “*the new Maria Walanda Maramis*” (catatan: Maria Walanda Maramis adalah mantan Walikota Manado yang merupakan perempuan pertama di Manado dan di Indonesia yang menjabat sebagai walikota).

A.1.2. Motivasi Kandidat

Netty maju dalam proses kandidasi dalam pemilukada Minahasa Utara 2010 karena adanya dorongan pribadi yang begitu kuat, merasa tertantang melihat politisi lain yang berhasil. Lebih dari itu, Netty juga merasa terpanggil untuk mencalonkan diri karena disukai orang banyak.

Argumen motivasi itu berkembang sebagai proses belajar politik lewat pendampingan aktivitas politik suami yang telah memberi pengalaman dan menumbuhkan keyakinan dalam diri Netty, bahwa kunci keberhasilan karir politisi adalah pada pemilikan basis konstituen yang jelas dan dukungan yang tinggi dari masyarakatnya. Keyakinan itu makin kukuh berkat pengalaman politiknya ketika mengikuti pemilu legislatif 2009 dan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Lagipula hasil survey yang dilakukan LSI-Saiful Mudjani yang dipublikasikan pada 15 Desember 2009, Netty merupakan figur calon Bupati Minahasa Utara yang paling dikehendaki oleh masyarakat pemilih, yaitu dengan elektabilitas 40,01% (*margin of error* 3%).

Selanjutnya, jabatan Bupati yang hendak diraihnya itu dimaknai sebagai instrumen memenuhi semangat diri dan panggilan perhatian masyarakat untuk mengabdikan pada daerah.

A.1.3. Modal Sosial

Dalam *self evaluation* Netty, maka letak kekuatan dirinya bukan karena ia perempuan. Lebih lagi bukan karena kecantikan diri, betapa pun diungkapkan oleh Netty bahwa,

“...kesukaan masyarakat terhadap perempuan cantik itu hal yang biasa, tetapi kecantikan bukan modal yang utama. Ada hal-hal lain yang tentunya dianggap oleh masyarakat setempat dapat menggugah hati mereka, menarik perhatian mereka”

(wawancara dengan Netty Agnes Pantow)

Baginya, kapabilitas diri lebih utama dan orang bisa menilai itu. Jika dibanding kandidat lain, setidaknya Netty merasa memiliki kelebihan dalam hal kayanya pengalamanyaitu pernah jadi penjual kue, mantan atlet bola volley, mantan pegawai PLN, pengusaha sukses, pengurus Partai Demokrat Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi utara.

Sementara jejaring sosialnya juga cukup luas. Mulai dari jejaring Gereja, dimana Netty duduk dalam kepengurusan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Kemudian jejaring jalur olah raga sebagai Ketua PBVSI. Lalu jejaring dunia usaha sebagai pengurus IWAPI. Dukungan keluarga dalam hal ini suaminya yang pengusaha dan mantan ketua DPC Partai Demokrat Minahasa Utara juga merupakan dukungan yang penting. Yang tak kalah penting tentu adalah kekuatan finansial atau setidaknya kemampuan memobilisasi finansial.

A.1.4. Modal Politik

Netty tidak asing dengan dunia politik yang dikenalnya melalui suaminya yang telah lebih dahulu menggeluti dunia politik, khususnya ketika suaminya maju sebagai kandidat Wakil Bupati Minahasa Utara, Netty semakin masuk dan menikmati tantangan yang ada dalam dunia politik. Pengalaman inilah hal yang membuat Netty memutuskan untuk terlibat langsung dalam aktivitas kepengurusan Partai Demokrat. Pada pemilu legislatif 2009, Netty terpilih sebagai anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara.

Ketika menjadi bagian dari Partai Demokrat itulah ia berkesempatan untuk menjalin komunikasi dengan politisi dari partai-partai lain. Diantaranya yang kemudian menjadi pasangan papan duanya (cawabup) yang berasal dari Partai Golkar.

A.2. Proses Kandidasi

A.2.1. Persiapan Kandidasi

Visi yang dicanangkan Netty untuk maju sebagai calon Bupati Minahasa Utara adalah "Dalam Kepelbagaian Menuju Masyarakat Minahasa Utara yang Maju dan Sejahtera". Adapun misinya adalah "Bersama-sama Membangun Minahasa Utara".

Isu spesifik yang menjadi fokus perhatian dan diangkat dalam kampanye dan menjadi programnya adalah perihal kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan, yang dikemas sebagai satu kesatuan dalam isu sumberdaya perempuan.

Dana yang dikeluarkan untuk maju dalam pemilukada dikatakan cukup besar. Dan ini berasal dari sumber pribadi dan keluarga serta memobilisasi dana dari pihak lain yang mendukung.

Keputusan untuk memilih dan menentukan pasangan ada pada Netty sendiri, sekalipun masukan-masukan dari luar menjadi bahan pertimbangan. Secara spesifik alasan memilih pasangan papan duanya, Inggrid Sondakh, adalah karena kapabilitas personalnya sebagai ketua DPD Partai Golkar Kab. Minahasa Utara, kapasitas intelektual sebagai mantan dosen Universitas Sam Ratulangi (UnSrat), dan punya nama baik sebagai anak mantan Gubernur Sulawesi Utara. Bahwa Inggrid seorang perempuan dan menjadikan mereka berdua pasangan perempuan pertama dalam pemilukada di Indonesia, tidak menjadi dasar pertimbangan. Bahkan Netty menolak diskursus perempuan pilih perempuan. Karena baginya diskursus semacam ini justru mendiskriminasi pilihan perempuan. Diskursus yang dibangunnya justru “perempuan untuk semua”, yang mengandung makna keberadaan perempuan yang setara dengan lelaki.

Keputusan untuk menentukan pasangan itu merupakan proses yang sulit bagi Netty. Karena, pertama-tama ia harus menghadapi proses politik di internal partainya sendiri. Awalnya rekomendasi DPP Partai Demokrat yang ditandatangani oleh ketua lama, Hadi Utomo, diberikan kepada pasangan Sompie dan Yulisa (Sompie adalah *incumbent*). Namun Anas Urbaningrum, yang kemudian terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat menggantikan Hadi Oetomo, membatalkan

surat rekomendasi terdahulu dan mengalihkan dukungan kepada pasangan Netty Pantow dan Ingrid Sondakh berdasar surat rekomendasi DPP-PD No. 39/2010. Menyikapi hal ini, John Dumais selaku Wakil Ketua Partai Demokrat Sulawesi Utara, meminta kader Partai Demokrat mengamankan surat rekomendasi yang ditandatangani Anas Urbaningrum tersebut. Namun, KPU Kabupaten Minahasa Utara secara formal mengakui surat rekomendasi awal yang memajukan pasangan Sompie-Yulisa karena alasan prosedur. Fragmentasi dukungan di antara pengurus dan kader Partai Demokrat Minahasa Utara pun jadi terbelah.

Oleh sebab itu, secara formal partai pengusung pasangan Netty-Ingrid yang diakui oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara adalah hanya Partai Golkar. Dalam hal ini, sekalipun dalam internal Partai Golkar awalnya ada kompetisi, namun mekanisme kelembagaan Partai Golkar tegas menetapkan bahwa yang didukung oleh partai adalah yang berdasarkan hasil survei paling *electable*. Lewat survey internal yang dijalankan oleh LSI-Saiful Mudjani itu, nama Ingrid Sondakh menempati ranking tertinggi diantara kader-kader Partai Golkar yang berkompetisi. Karena itu, Partai Golkar mendorong hanya satu nama untuk dimajukan. Mekanisme kelembagaan semacam ini menjadikan dukungan formal Partai Golkar relatif solid terhadap pasangan Netty-Ingrid.

A.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Secara formal partai pengusung hanya Golkar. Sekalipun pengajuan dalam pendaftaran pasangan calon ke KPU adalah Partai Demokrat dan Partai Golkar. Namun diyakini sebagian besar pengurus Partai Demokrat memihak Netty.

Karena itu, Netty tetap merasa didukung Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Selama masa kampanye, ada pembagian tugas antara Netty dengan Ingrid. Masing-masing mengoptimalkan pemanfaatan jejaring dan basis dukungannya. Itu sebabnya, mereka tak harus tampil bersama dalam suatu pertemuan dengan masyarakat.

A.2.3. Kandidat dan Penyelenggara Pemilu

Pada dasarnya lembaga penyelenggara pemilu ada dua yaitu KPU dan Panwas. Data yang terhimpun dalam penelitian di Minahasa Utara (MinUt) hanya menjangkau KPU Kabupaten Minahasa Utara.

Hubungan antara Netty dengan institusi KPU Kabupaten Minahasa Utara kurang harmonis karena ada silang persepsi perihal penetapan partai pengusung pasangan Netty dan Ingrid oleh KPU. Silang persepsi ini terkait dengan fragmentasi di internal elit Partai Demokrat Minahasa Utara sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Betapa pun demikian, dengan pengusung formal hanya Partai Golkar, sudah cukup syarat bagi pasangan Netty dan Ingrid lolos verifikasi KPU Minahasa Utara untuk mengikuti tahapan proses pemilu.

A.2.4. Kandidat dan Institusi Sosial

Sejauh yang dapat diketahui, Netty mempunyai hubungan dekat dengan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), utamanya dengan jemaat Baitel, sekalipun tak ada kaitan organisatoris langsung dengan langkah politik pencalonannya.

Begitu pula dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Real Estat Indonesia (REI), serta Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia (PBVSI); pada kesemua organisasi ini tak ada hubungan organisatoris dalam bentuk kontrak politik yang mengikat dengan Netty. Tapi secara personal, Netty dekat dengan lembaga-lembaga tersebut.

B. INGRID SONDAKH

B.1. Profil Kandidat

B.1.1. Biografi

Ingrid Sondakh terlahir sebagai anak sulung dari dua bersaudara dari pasangan politisi terpandang di Sulut. Ayahnya, Adolf Jouke Sondakh yang meninggal pada 8 Maret 2007, pernah menjabat ketua DPD Partai Golkar Sulut, dan anggota DPR tiga periode, serta mantan Gubernur Sulut 2000-2005. Ibunya, Sientje Mandey, juga seorang politisi yang menjadi anggota DPD Partai Golkar Sulut. Sedangkan adiknya, Deny Sondakh, adalah anggota DPRD kota Manado. Dengan demikian, bisa dikatakan Ingrid Sondakh terlahir dalam lingkungan keluarga yang berkecimpung di dunia politik. Ingrid Sondakh sendiri nyaris mengikuti jejak ayahnya di kala muda, yaitu berperan sebagai dosen dan sekaligus politisi. Ingrid pernah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Perguruan tinggi negeri ternama di Sulut). Dan, saat maju dalam proses kandidasi sebagai calon papan dua berpasangan dengan Netty Agnes Pantow, Ingrid tengah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Minahasa Utara. Sebelum itu, Ingrid pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulut.

B.1.2. Motivasi Kandidat

Motif utama Ingrid Sondakh maju dalam proses kandidasi di MinUt sedikit banyak didorong oleh alasan politik dan religius. Alasan politik itu terkait dengan naluri politisi yang beranggapan bahwa karir politik tertinggi adalah ketika seseorang dapat merengkuh jabatan eksekutif sebagai kepala daerah. Alasan politik ini makin kuat dalam diri Ingrid karena secara struktural ia tengah menjalani masa jabatan kedua sebagai Ketua DPD Partai Golkar MinUt. Sebagaimana dikatakannya dalam hasil wawancara:

“... Sebagai ketua DPD Golkar Minahasa Utara yang sudah dua kali, tentunya untuk seorang politisi rasanya bukan sesuatu hal yang tak terpikirkan lah. Tujuannya tentu untuk bisa menjadi pemimpin eksekutif... terus terang yang pasti sebagai insan politik itu menjadi sasaran, bagaimana untuk nantinya mencapai kekuasaan yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat.”

(Wawancara dengan Ingrid Sondakh tanggal 28 Juli 2010)

Alasan religius juga menjadi pendorong bagi Ingrid Sondakh. Setidaknya dimensi religiusitas itu kerap terucapkan dalam wawancara peneliti dengannya. Mungkin saja religiusitas itu merupakan semangat yang diperolehnya dari kakeknya, Markus Lolombulan Sondakh, yang adalah seorang pendeta Kristen. Khusus terkait proses kandidasi ini pun, Ingrid secara spesifik berujar,

“Tentunya jika Tuhan berkenan, saya berkerinduan bukan saja di legislatif, tetapi di eksekutif yang nanti penjabarannya langsung.... Saya selalu berpatokan memang kalau Tuhan ijin kan tidak ada yang mustahil.”

Bahkan saat mengidentifikasi diri sebagai perempuan kandidat yang berpasangan dengan perempuan pula, Ingrid berujar,

“...kepada kaum laki-laki untuk tentunya menyadari bahwa kaum perempuan juga diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi kaum laki-laki, yang kiranya diperlakukan pula sebagai mitra., karena segala sesuatu bagi saya toh Tuhan buka jalan saya, prosesnya berjalan dengan baik...Bagi saya pribadi, suami, dan keluarga rindu memberi diri, jika Tuhan berkenan, Tuhan pakai kami di sana untuk pelayanan.”

Secara jujur Ingrid mengemukakan, bahwa sesungguhnya yang diinginkan dalam proses kandidasi ini adalah posisi papan satu (calon bupati, bukan wakil bupati), apalagi ia menjabat sebagai ketua salah satu partai besar di MinUt. Namun Ingrid bersikap realistis dalam berpolitik, karena sebagaimana disebut diatas, hasil survei menunjukkan posisi papan satu belum mungkin dijangkaunya. Untuk itu Ingrid dan partainya memutuskan untuk berpasangan sebagai papan dua dari Netty Pantow.

B.1.3. Modal Sosial

Modal sosial pertama Ingrid Sondakh adalah menjadi salah satu anggota klan keluarga yang terhormat di Sulut. Ayahnya, yang mantan Gubernur Sulut 2000-2005, telah dikenal luas oleh masyarakat Sulut. Ibunya yang hingga kini menjadi anggota DPD Golkar Sulut, sedikit banyak memiliki jejaring sosial yang luas. Dukungan penuh dari keluarga besarnya itu menjadi modal yang berarti dalam menumbuhkan percaya dirinya. Ingrid mengatakan bahwa keluarganya betul-betul mendukung 100%.

Di luar jejaring keluarga, secara pribadi Ingrid Sondakh yang mantan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi itu pastilah memiliki jejaring rekan dosen. Di samping itu, kedudukannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar MinUt dua periode, membuatnya memiliki jejaring sosial yang luas.

B.1.4. Modal Politik

Walaupun dari internal Partai Golkar ada pesaing dalam proses kandidasi, dan ada pro-kontra dalam penetapannya sebagai kandidat, tapi baginya itu merupakan dinamika

politik yang biasa. Bahkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar MinUt, Ingrid berupaya bersikap bijak. Seperti dikatakannya,

“...banyak kader yang kepingin, dan mereka tentu punya hak. Berbagai upaya juga mereka coba lakukan untuk mengganjal. Tetapi saya *enjoy* saja. Menyerahkan keputusan di atas, tetapi tetap berjuang”.

B.2. Proses Kandidasi

B.2.1. Persiapan Kandidasi

Suami dan ibundanya, merupakan pihak pertama yang diajak bicara perihal keinginannya untuk maju dalam proses kandidasi. Secara khusus, suaminya merupakan pihak yang mendorongnya untuk maju dalam proses kandidasi, Ingrid mengaku bahwa justru suaminya yang mendorongnya untuk maju. Mereka percaya secara religius bahwa tujuan kekuasaan itu adalah pelayanan untuk masyarakat. ia.

Komunikasi politik pun dilakukan sebagai persiapan dengan mengikuti prosedur internal Partai Golkar. Karena rekomendasi kandidasi ditentukan oleh DPP Partai Golkar dengan mengacu hasil survei, maka Ingrid pun rela menempati posisi papan dua, serta berpasangan dengan Netty Pantow. Tentu ada pergumulan panjang, namun:

“Ibu Netty salah satu kandidat terbaik...memang DPP yang mengeluarkan rekomendasi dan memutuskan Ibu Netty dan saya yang maju”.

Bagi Ingrid, berpasangan sesama perempuan dalam kandidasi ini merupakan hal yang biasa. Secara kultural kehadiran pemimpin perempuan di Minahasa sudah lazim. Dalam ungkapannya dikatakan,

“...manakala memang pada akhirnya kami dua perempuan, bukan suatu hal yang tabu dan baru lagi di Minahasa Utara”.

Tampaknya memang dari segi sejarah masyarakat Minahasa sudah terbiasa menerima kehadiran pemimpin perempuan. Setidaknya Bupati MinUt terdahulu adalah perempuan (Vonny). Juga pernah ketua DPRD dipimpin perempuan. Kepala kejaksaan negeri pun adalah perempuan. Serta tak sedikit ketua partai adalah perempuan.

Betapa pun demikian, kenyataan obyektif sebagai satu-satunya pasangan perempuan dalam kandidasi di MinUt, dijadikan dasar kekuatan yang coba dioptimalkan secara simbolik. Sebagaimana dituturkannya,

“Justru hal ini coba kami olah menjadi kekuatan kami...karena ternyata dengan berpasangan perempuan dengan perempuan lebih mudah sebenarnya...banyak hal komunikasi berjalan lancar.”

Singkat kata, sinergi antara perempuan dengan perempuan lebih mudah terbentuk.

Lebih lanjut, meskipun pembagian peran antara bupati dan wakil bupati telah diatur dalam UU, tapi dalam proses kandidasi ini secara khusus dibicarakan pembagian peran di antara mereka berdua. Antara lain menyangkut perihal sosialisasi dan strategi kampanye.

B.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Pengusung formal kandidasi Ingggrid sebagai papan dua yang berpasangan dengan Netty Pantow adalah Partai Golkar sendirian. Sekalipun demikian, pendukung riil mereka berasal dari fragmentasi anggota atau pengurus Partai Demokrat. Walau Ingggrid menjabat sebagai ketua

DPD Partai Golkar MinUt, namun negosiasi internal Golkar tak sepenuhnya tuntas. Fragmentasi, walau kecil, tetap ada.

B.2.3. Kandidat dan Institusi Sosial

Lazim seperti dilakukan kandidat lain, berjejaring gereja menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh Ingrid. Hal ini menjadi lebih mungkin dilakukan karena kakeknya almarhum adalah seorang pendeta Kristen.

B.2.3. Kandidat Dan Penyelenggara Pemilu

Pasangan Netty-Ingrid dalam pencalonannya dipenuhi dengan konflik di internal Partai Demokrat yang memunculkan dua rekomendasi yang berbeda ketika terjadi transisi kepemimpinan di PD. Akhirnya pasangan ini diusung oleh Partai Golkar, namun pihak Netty pun tetap menggugat ke KPUD karena menganggap pengesahan dari KPUD tersebut sebagai pelanggaran hukum. Pada sisi lain KPUD menganggap bahwa konflik internal di tubuh partai bukan menjadi tanggungjawab KPUD. Akhirnya pasangan ini tetap melaju dengan kendaraan Partai Golkar.

C. SHINTIA PANAMBUNAN

C.1. Profil Kandidat

C.1.1. Biografi

Shintia Panambunan adalah sosok yang masih muda belia, baru berusia 27 tahun. Ia merupakan anak pertama dari Vonny Panambunan mantan Bupati MinUt Periode 2004-2009. Vonny merupakan bupati pertama Minahasa Utara

yang dipilih secara langsung, yang karena kasus korupsi harus diberhentikan di tengah jalan. Shintia sendiri memiliki satu orang adik yang bernama Daniel Matteuw Rumumpe yang berusia 25 tahun. Selama ini ia lebih banyak tinggal di Singapura bersama suami dan anaknya.

C.1.2. Motivasi Kandidat

Faktor terbesar yang menggerakkan Shintia untuk maju ke pemilukada adalah dorongan dari ibunya tercinta, pada awalnya Shintia sendiri menolak untuk maju sebagai kandidat, dan sama sekali tidak memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin politik. Karena persuasi dari ibunyalah pada akhirnya ia memutuskan untuk maju. Selain itu ada keinginan untuk meneruskan cita-cita Ibu Vonny untuk membangun masyarakat Minahasa Utara. Karena ketika menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, Vonny terpaksa dicopot dari jabatannya karena terlibat kasus hukum terkait dengan korupsi Bupati Kutai Timur. Vonny terjerat kasus korupsi yang terjadi ketika ia belum menjabat bupati, melainkan ketika menjadi pengusaha dan menjadi rekanan Syaukani, Bupati Kutai. Kasus korupsi yang menjerat Syaukani ini pada akhirnya ikut menyeret Vonny selaku rekanan ke belakang teralis besi. Sehingga menurut Shintia sebenarnya banyak cita-cita Ibu Vonny yang belum terealisasi, dan banyak masyarakat yang masih mencintai Ibu Vonny. Seperti yang diutarakan Shintia:

"...Tentunya motivasi saya untuk memberanikan diri adalah yang pertama-tama untuk mensejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan yang ada di Minahasa Utara dan menjadi berkat. Karena bagi saya melayani masyarakat sama dengan beribadah dan tentunya merasa terpanggil karena melihat perjuangan dan harapan dari ibu kita tercinta Vonny Panambunan, yang pernah menjadi bupati pilihan rakyat yang pertama di Minahasa Utara.

(Wawancara dengan Shintia Panambunan, tanggal 28 Juli 2010)



Dari pernyataan Shintia diatas secara implisit bisa ditangkap, orang terbesar yang menjadi alasan dan yang memberikan motivasi adalah Vonny Panambunan. Sehingga pada akhirnya Shintia berani dan memutuskan untuk maju dalam dunia politik. Bisa dikatakan saat itu Shintia belum memiliki ambisi personal yang seharusnya dimiliki seorang kandidat pemimpin.

Pernyataan diatas dikuatkan juga dengan data wawancara dengan Nana yang merupakan teman akrab Shintia. Nana meminta peneliti untuk tidak mempublikasikan namanya, maka penulis hanya mencantumkan nama depannya.

“...Intinya ia ikut ini mengikuti suruhan ibunya... sebenarnya ide awalnya dari ibunya, yang boleh dikatakan ibunya kurang puas ketika menjabat sebagai bupati, karena tidak sampai selesai kan!. Awal muasalnya ibunya tanya sama Dede, Shintia sih namanya tapi panggilannya Dede. Awalnya Dede ditanya, belum ngasih jawaban iya... baru dua bulan ini ia baru eksis dan mau. Sebenarnya sejak tahun kemarin ia ditanya ia belum mau. Baru tahun ini kira-kira bulan Mei baru mau. Makanya ia terlambat banget kampanyenya...”

(Wawancara dengan Shintia Panambunan, tanggal 28 Juli 2010)

Bagi Shintia jabatan wakil bupati yang hendak diraihnya dimaknai sebagai instrumen untuk memberikan “pelayanan” kepada masyarakat dan pelayanan (ibadah) kepada Tuhan. Meskipun terkesan sangat normatif, boleh jadi memang begitu motivasinya. Penting bagi peneliti untuk tidak memberikan prasangka atau stigma kepada informan. Jika pada umumnya analisis politik di Indonesia yang berkaitan dengan motivasi kandidat, seringkali menggunakan analisis ekonomi politik. Analisis yang mendudukkan agenda-agenda besar yang menyangkut urusan komunal, masyarakat, bahkan negara, itu merupakan manifestasi dari kepentingan-kepentingan personal. Kata lainnya adalah politik adalah personal, politik bukan komunal. Sehingga segala preferensi individu untuk berkecimpung

di dunia politik atau publik itu selalu tendensinya karena pertimbangan rasional yang cenderung pada upaya pencapaian dan pemenuhan kesejahteraan individual. Tentu saja peneliti akan cukup berhati-hati untuk tidak melakukan justifikasi maupun pembelaan terhadap informan, pengambilan jarak terhadap informan hanya dimaksudkan peneliti untuk menjaga obyektifitas dan meminimalkan atau bahkan mengeliminir bias. Berikutnya penulis akan mengutip dari Koran Posko, pernyataan Shintia berkaitan dengan cara pandang nya tentang jabatan.

"Saat berorasi, Dede [panggilan Shintia] sekali lagi menekankan bahwa dirinya bersama Piet tak akan menyalahgunakan jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri. 'Kami mencalonkan diri bukan atas dasar untuk mendapatkan kekuasaan, biaya atau gaji yang besar. Tetapi saya terpanggil untuk membawa perubahan bagi MinUt yang saya cintai ini. Sekaligus saya akan melanjutkan pemerintahan yang tertunda dari ibu saya, Vonnie Aneke Panambunan. Dan kalau saya terpilih nanti gaji yang saya akan dapatkan itu akan saya berikan untuk rakyatku yang tercinta,' tutup Dede yang langsung disambut sorak-sorai pendukung PD yang memadati arena kampanye".

Berkaitan dengan motivasi kandidat, peneliti mencoba menarasikan fakta yang ditemukan di lapangan. Ketika peneliti membuat janji untuk melakukan wawancara dengan Sompie Singal, *incumbent* yang berdampingan dengan Yulisa Baramuli di Kantor Bupati Minahasa Utara, peneliti melihat kantor Bupati Minahasa Utara merupakan kantor bupati yang indah dengan *landscape* tanah yang sangat luas, indah dan berbukit-bukit. Pendopo dibuat terbuka dan menghadap langsung ke arah pemandangan perbukitan. Setelah ditelisik lebih jauh oleh peneliti, bangunan Kantor Bupati Minahasa Utara merupakan bangunan baru yang dibangun ketika Vonnie masih menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, dan tanah luas tempat kantor bupati beserta kompleks perkantoran dinas yang ada, merupakan tanah yang dihibahkan Vonnie kepada pemerintah Minahasa Utara.

C.1.3. Modal Sosial

Modal sosial utama Shintia adalah ia sudah dikenal sebagai anak dari Vonnie Panambunan yang dikenal memiliki pengikut yang loyal. Selain itu nama besar keluarga juga menjadi modal sosial Shintia. Terlebih lagi keluarga Panambunan merupakan keluarga yang besar di Minahasa. Sebelum mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati MinUt, tidak banyak masyarakat MinUt yang mengenal Shintia. Oleh sebab itu, ketika Shintia maju sebagai kandidat hal yang ia lakukan adalah mengidentifikasi dirinya dengan orang yang sudah populer, dalam hal ini kepada ibunya sendiri yang lebih dikenal masyarakat MinUt sebagai mantan Bupati.

Selain itu, tentu kekuatan finansial Shintia yang didukung oleh ibunya juga menjadi modal sosial. Harta kekayaan pasangan Piet dan Dede menurut hasil laporan ke KPU, adalah sebesar Rp 64 Milyar, yang menjadikan mereka pasangan yang paling kaya diantara para kandidat.

Pasangan **Piet Luntungan – Shintia Rumumpe Panambunan** (*Piet-Dede*) tercatat sebagai pasangan calon Bupati-Wakil Bupati terkaya di Minahasa Utara. Total kekayaan pasangan ini berjumlah **Rp 64.437.067.500**. Jumlah ini berasal dari kekayaan Piet Luntungan sebesar Rp 42.007.067.500 sementara kekayaan Shintia Panambunan berjumlah Rp 22.430.000.000. (sumber data: KPU)

Deklarasi pasangan **Piet Luntungan** dan **Shintia Rumumpe Panambunan** diadakan dengan cukup megah, mereka mengundang artis-artis dari ibukota seperti Nafa Urbach, Once Mekel dan Ello (Menado Post, akses 28 Agustus 2010).

C.1.4. Modal Politik

Meskipun Shintia adalah anak dari mantan Bupati Minahasa Utara, Shintia cenderung terlalu 'hijau' dalam dunia politik. Pada waktu peneliti melakukan observasi dalam debat kandidat, disitu sangat terlihat kesenjangan kemampuan argumentasi Shintia dibandingkan dengan perempuan kandidat yang lain. Fakta ini menghantarkan peneliti pada dugaan awal kurang matangnya kaderisasi politik terhadap Shintia. Dugaan awal peneliti tersebut, dikuatkan dengan fakta latarbelakang politik dari Shintia. Bisa dikatakan, Shintia benar-benar baru (untuk tidak mengatakan awam) dengan aktivitas politik praksis. Shintia sama sekali tidak memiliki pengalaman berpolitik dalam partai, maupun pengalaman untuk maju dalam Pemilu. Tentu ini sangat kontras dengan lawan politiknya yang sesama perempuan. Seperti halnya Netty Pantaouw yang menjadi anggota DPRD, maupun Ingrid Sondakh yang juga menjadi pasangan Netty dalam Pemilukada MinUt adalah seorang anggota DPRD sekaligus ketua Partai Golkar Minahasa Utara. Ketidakmatangan kaderisasi politik Shintia tidak terlepas dari kasus korupsi yang dialami ibunya Vonny Panambunan. Tentu sangat disayangkan, ketika baru menjabat lebih kurang dua tahun Vonny harus rela melepaskan jabatan bupati dan harus menjalani hukuman selama dua tahun. Absennya Vonny dalam panggung politik membuat Shintia tidak cukup bekal dalam menghadapi pemilukada. Bahkan, kondisi ini memberikan semacam ketakutan Shintia terhadap politik. Seperti yang diungkapkan kepada peneliti ketika wawancara:

".....dalam pikiran saya politik itu jahat. Karena kita mama kemarin yang tidak salah, dorang bikin begitu, jadi yang ada dipikiran itu jahat."

Ketika Vonny bebas dari penjara Pemilu pada Minahasa Utara sudah dekat, sehingga waktu yang dimiliki Vonny untuk mempersiapkan Shintia sangat terbatas.

C.2. Proses Kandidasi

C.2.1. Persiapan Kandidasi

Bersedianya Shintia untuk maju dalam Pemilu pada Minahasa Utara sebenarnya tidak hanya mengejutkan masyarakat Minahasa Utara, bahkan Vonny sendiri yang sejak awal mendorong Shintia untuk ikut pemilu sempat terkejut jika pada akhirnya Shintia akan menerima tawarannya. Seperti yang diungkapkan oleh Nana, sahabat Shintia,

“.....la awalnya gak mau waktu ibunya nanya, ada jawabanpun belum. Setelah beberapa bulan dari pertanyaan awal ibunya, ketika ia memberikan jawaban ibunya pun kaget gak percaya kalau ia bener-bener bakalan mau..”

Mengetahui Shintia bersedia, Vonnie Panambunan segera membuat langkah politik dengan membentuk tim kemenangan dan mencari pasangan kandidat. Memanfaatkan kekayaan pribadinya demi mendukung pencalonan dirinya dan putrinya Vonnie merogoh koceknya untuk membeli puluhan sepeda motor dan mobil. Tim sukses di level desa akan diberi fasilitas sepeda motor, sedangkan koordinator di tingkat kecamatan akan mendapatkan mobil. Hampir semua keputusan politik Shintia ditentukan oleh ibunya, begitu pula ketika memilih pasangan. Shintia berpasangan dengan Piet Luntungan sebagai cabup, karena pertimbangan pengalaman Piet di dunia politik yang cukup matang ia pernah menjabat sebagai Hukum Tua Tumulung. Nilai tambah dari Piet adalah ia juga berperan sebagai Kepala Adat Suku Tonsea, suku terbesar di Minahasa. Lebih jauh Shintia menjelaskan,

"... memilih om piet, biar orang bilang dede terlalu muda dan om piet so lebih tua jauh tapi dalam hati kita mempunyai perasaan om piet memiliki niat tulus, yang akan membikin bodoh Pa kita. Bukan membuat tuduh yang lain-lain, tetapi sebagai orang tua akan menjadi pemimpin yang bagus buat kita untuk mengantar terjun ke dunia politik dan... mengendalikan pemerintahan dengan baik. ...lagi kita cari-cari pasangan, tadi hasil diskusi kita mau cari yang muda. Tiba-tiba, mantan Bupati Vonnie Panambunan itu menelpon saya nawarin anaknya. Untuk pasangan calon saya. Saya diskusi sama teman-teman, juga sama keluarga, apa mereka rekomendasi setuju atau tidak, dari diskusi ini, semua rekomendasi setuju, ok. Dan saya juga waktu ketemu Ibu Vonny. Bilang sama ibu, bu, kasih saya waktu satu hari untuk berbicara dengan ini, ya toh, supaya saya bisa lihat kemampuannya bagaimana. Kemampuan intelektualitasnya sampai mana, kepribadiannya seperti apa, penting saya lihat ia punya kemampuan..."

(Wawancara dengan Piet Luntungan, tanggal 28 Juli 2010)

Sedangkan menurut Piet Luntungan, pertimbangan politik memilih Shintia sebagai calon wakil bupati adalah karena Shintia masih muda. Usia yang muda untuk papan dua bagi Piet menjadi penting dikarenakan realitas politik di Minahasa Utara terjadi preseden ketidakakuran antara papan satu dan papan dua. Usia muda bagi Piet, merupakan usia yang perlu banyak belajar, sehingga menurut Piet pasangan yang muda tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan manuver politik yang membahayakan posisinya ketika terpilih kelak. Seperti yang diungkapkan Piet,

"...Keputusan utama adalah muda usia, karena ia masih polos iya toh. Lebih baik muda usia daripada muda pengalaman, kalau muda usia dan muda pengalaman itu menunjukkan intelektual ia kurang iya toh. Tapi kalo ia muda usia, terus kita hanya test saja, ya toh, kalau IQ-nya diatas rata-rata, tapi tidak punya pengalaman, itu kewajiban kita untuk kedepannya mengajarkan ia hal-hal positif. Sepeti visi misi kita. Dan kita bisa antar ia. Penerus tongkat estafet, tetapi pada hal-hal yang positif, dalam menjalankan tugas politik...."

(Wawancara dengan Piet Luntungan, tanggal 23 Juli 2010)

Pertimbangan perempuan atau laki-laki bagi Piet menyusul setelah pertimbangan usia muda. Karena menurut Piet berdasarkan konteks budaya Minahasa, perempuan memimpin bukanlah hal yang aneh. Piet mencontohkan ini dengan sejarah Minahasa;

"... Pada jaman dahulu kala, masih jaman Belanda, ada suku adat, terjadi perang antara suku Minahasa dan Suku Bolmo, Minahasa kalah, nanti dipimpin oleh seorang perempuan, yang bernama Pingkan, ia pemimpin suku Minahasa, panglima perang, ia kalahkan Raja Bolang Mongondow. Dan sebagai seorang perempuan, ia bilang supaya masyarakat Bolang Mongondow jangan berantem lagi dengan masyarakat Minahasa. Karena perempuan ini belum kawin, Pingkan ini masih perawan, ia bikin, ia bilang sama Raja Bolang Mongondow, anak kamu itu Makindas, anak Raja Bolang Mongondow itu jadi pampasan perang untuk kawin dengan ia, demi untuk perdamaian..."

(Wawancara dengan Piet Luntungan, tanggal 23 Juli 2010)

Piet memiliki nilai tawar yang kuat sehingga dilamar oleh Vonnie untuk menjadi pendamping anaknya, adalah Piet sudah memiliki kendaraan untuk melaju Pemilukada MinUt. Kendaraan politik Piet tidak berasal dari partai politik, melainkan dengan memobilisasi dukungan masyarakat MinUt berupa tandatangan dan KTP. Dukungan ini didapat oleh Piet karena sejak Januari Piet telah menggerakkan mesin politiknya. Mesin politik ini juga melakukan survei dan bertugas menyebar kuesioner sekaligus juga menggalang dukungan, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal tim pemenangan. Tim survey ini dibentuk sampai level desa, satu desa terdiri dari 2-3 orang. Menurut Piet,

"... Kalau diceritakan, jadi, kita rintis calon independen ini sejak bulan Januari. Asal mulanya itu adalah, begitu kita berdialog dengan masyarakat, kita melihat bahwa ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Ada asumsi seperti itu kan. Jadi bagaimana menyikapi kondisi ini, kebetulan era sekarang ini sudah ada calon independen, ya, kita bikin survei, dikaitkan dengan calon independen ya, yang menggunakan strategi partai itu, sekali mendayung, empat pulau lewat, jadi blanko surveinya, kita gunakan formulir KPU, survei, sekaligus mendapatkan dukungan. Begitu dukungannya banyak, berarti menandakan asumsi kita itu benar. Dan sekaligus saya bisa mendapatkan kendaraan untuk maju. Sekaligus kita bisa lihat peta politiknya seperti apa dan bisa lihat keadaan masyarakat juga seperti apa..."

(Wawancara dengan Piet Luntungan, tanggal 23 Juli 2010)

Bahkan Piet tidak hanya menyasar warga yang memiliki KTP saja, ia rela untuk membuatkan KTP bagi warga yang belum memiliki KTP. Usaha Piet pun berbuah manis dengan mendapatkan angka dukungan yang tinggi. Dari angka 14.000 dukungan KTP yang disyaratkan KPU untuk calon independen (calon non partai), Piet mampu mengantongi

30.000 dukungan. Tentu sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pemilih MinUt yang sekitar lebih kurang 143.000 pemilih.

Data yang dihimpun dari penyebaran kuesioner ini digunakan juga sebagai penggalangan isu-isu populer yang digunakan sebagai visi-misi. Piet-Dede mengemban tiga misi, yaitu ketersediaan air bersih, pelayanan publik yang prima dan kesehatan. Pengadaan air bersih menjadi isu pertama yang ditawarkan karena dianggap sebagai keluhan masyarakat yang paling populer. Terlebih lagi karena air merupakan bagian dari kehidupan dan sumber kehidupan. Yang kedua, pelayanan publik yang prima dibangun berangkat dari desa, karena dianggap desalah yang mempunyai rakyat bukan kabupaten. Kemudian yang ketiga adalah masalah kesehatan, dengan tetap mengadakan Jamkesmas dan memasukkannya pada anggaran belanja tetap. Sedangkan untuk visi Piet-Dede ingin mencapai kesejahteraan dengan menyatukan hati-tulus, menjadikan masyarakat MinUt bermartabat, berintelektual, punya SDM yang handal. Dan ini diusahakan melalui pendidikan gratis.

Pembagian kerja yang dilakukan dalam rangka strategi pemenangan, pasangan Piet-Dede membagi konsentrasi 'wilayah' dukungan. Piet memaksimalkan dukungan dari masyarakat adat, karena Piet menjadi kepala adat suku/etnis Tonsea, sedangkan Shintia memanfaatkan nama besar ibu Vonnie dan berkonsentrasi untuk menghidupkan kembali pendukung Ibu Vonnie pada waktu terpilih sebagai Bupati MinUt.

C.2.2. Kandidat Dan Jalur Perseorangan

Kandidat pasangan Piet-Dede ini memutuskan ikut serta dalam pemilukada dengan melalui jalur independen. Meskipun secara terpisah, baik Piet maupun Shintia dilamar oleh partai politik. Piet mengutarakan, indeks kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun secara konsisten. Data ini didapat Piet ketika melakukan survei langsung sekaligus mencari dukungan ke masyarakat. Berdasarkan survei dan banyaknya dukungan, Piet akhirnya memutuskan untuk maju melalui jalur independen.

"....Kita banyak, semua partai masuk sama saya. Termasuk partai saya. Saya bilang kepada partai saya, karena kita cuma punya satu kursi, saya bilang, kalau anda mau saya calon, siapkanlah saya kendaraan. Ya kan. Tapi kalau anda tidak mampu siapkan kendaraan, saya akan cari kendaraan sendiri. Ya. PDI hendak lamar saya. Golkar hendak lamar saya. Tapi, seperti kemarin saya katakan, saya bikin analisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai-partai. Saya akan jalan untuk 100% berbakti kepada rakyat. Kalau saya ikut partai politik, saya akan diintervensi lebih banyak untuk kepentingan partai, bukan rakyat. Tapi kalau saya ikut kendaraan rakyat, saya bisa berbakti untuk rakyat, karena rakyat yang intervensi cuma saya..."

(Wawancara dengan Piet Luntungan, tanggal 23 Juli 2010)

Selain alasan menurunnya indeks kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, Piet juga memiliki alasan yang lebih spesifik untuk tidak memakai partai politik dalam Pemilukada MinUt. Alasan ini berdasarkan pengalamannya ketika Piet pernah berniat untuk menjadi kandidat pemilihan gubernur di tingkat provinsi, ia menjadi korban bujuk rayu partai politik untuk maju melalui kendaraan partai politik, tapi akhirnya tidak lolos dalam konvensi internal partai, meskipun sudah mengeluarkan banyak uang.

C.2.3. Kandidat dan Institusi Sosial

Pasangan Piet dan Dede lebih mengandalkan jaringan adat yang dimiliki oleh Piet. Piet adalah seorang kepala adat dari etnis Tonsea, dan etnis Tonsea ini merupakan sub-etnis yang

terbesar di Minahasa. Meskipun wewenang kepala adat dalam hal pemerintahan sudah dihapus ketika terbitnya Undang-Undang Bentuk Desa ketika jaman Orde Baru, tetapi peran adat dalam menjaga nilai-nilai budaya tidak bisa serta merta ikut hilang. Karenanya, peran adat lebih luas daripada peran desa administrasi yang dirumuskan oleh undang-undang. Luasnya fungsi dan peran adat inilah, yang secara langsung maupun tidak langsung sampai sekarang eksistensinya masih terjaga dan berevolusi menjadi insitusi sosial yang baru.

Sebagai institusi sosial, maka adat tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Selama ada komunitas etnis Tonsea dalam suatu wilayah tertentu, maka bisa dikatakan wewenang adat bisa menjangkaunya. Meskipun wewenang adat berbeda dengan wewenang negara (legal-formal), tetapi adat sering dihadirkan untuk menyelesaikan masalah maupun konflik-konflik antar warga dalam etnis yang sama. Seperti halnya sengketa tanah, konflik harta warisan, bahkan sampai permasalahan rumah tangga. Sehingga penyelesaian persoalan melalui adat menjadi rujukan pertama, sebelum nantinya ketika memang tidak bisa diselesaikan secara adat maka akan melalui lembaga yuridis formal.

Adat sebagai institusi sosial menjadi sangat strategis dikarenakan kepemimpinannya itu dipilih langsung oleh masyarakat adatnya, sehingga siapa yang menjadi kepala adat, itu merupakan orang yang populer dalam masyarakat adat. Seperti yang disampaikan oleh Piet Luntungan,

"...Kepala adat dipilih... dipilih oleh masyarakat... tergantung daripada kefiguran... Artinya kalau kita punya kefiguran, bagaimana kita melayani masyarakat, begitu, dan bagaimana kita menciptakan suatu kehidupan yang kondusif, antara suku yang lain dengan suku yang lain, hubungan relasinya yang baik seperti apa..."

(Wawancara dengan Piet Luntungan, tanggal 23 Juli 2010)

D. FRANSISCA MAGDALENA TUWAIDAN

D.1. Profil Kandidat

D.1.1. Biografi

Perempuan yang akrab disapa dengan sebutan populer Etha ini lahir pada 22 Desember 1969. Fransisca Magdalena Tuwaidan (selanjutnya disebut FMT) adalah putri asli daerah Minahasa Utara, anak dari Bernhard W.J. Tuwaidan, *Hukum Tua* (Kepala Desa) Desa Treman, Kecamatan Kauditan. Beragama Kristen Protestan. Lulus dari SMA Don Bosco Lembean, kemudian hijrah ke Jakarta dan dikenal kiprahnya sebagai pengusaha sukses yang, antara lain, memimpin PT Egatra Tour and Travel yang berkantor di kawasan Bintaro, Jakarta. Para pendukungnya melukiskan FMT sebagai tokoh yang bukan saja peduli, konsekuen dan konsisten, melainkan juga mau mendengar, mau belajar, dandidampingi oleh mereka yang dianggap ahli, serta luwes dan terampil dalam merangkul berbagai kalangan. Pasangannya, Ir. Willy Kumentas, melukiskannya sebagai sosok yang tulus dan bermodal. Setelah sukses sebagai pengusaha di Jakarta sejak 1980-an, FMT belakangan tertarik – atau menurut istilahnya sendiri “terpanggil” – untuk pulang kampung mengejar ambisi baru di bidang politik. FMT mulai aktif di Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang pada Pemilu 2009 lalu telah berhasil mengantar FMT ke gedung DPRD Minahasa Utara untuk menduduki satu-satunya kursi perwakilan PKPB, dimana ia terpilih mewakili Daerah Pemilihan III di sekitar tempat tinggalnya. Sekarang FMT bahkan memimpin Fraksi Tumatenden, yang merupakan fraksi gabungan sejumlah partai politik.

D.1.2. Motivasi Kandidat

Minat FMT untuk maju sebagai calon Bupati Minahasa Utara, selain yang diakuinya sebagai “panggilan Tuhan”, tampaknya juga merupakan cerminan “ambisi politik progresifnya” sebagai kelanjutan dari kesuksesannya di bidang usaha dan politik. FMT mengungkapkan alasannya berkiprah di bidang politik – yang notabene merupakan bidang baru baginya – dengan mengatakan,

“Keberhasilan saya dalam pekerjaan saya, dan terdorong dari kepedulian untuk membangun Minahasa Utara membawa saya ingin berkarya di daerah tercinta ini.”

Mengapa politik? Karena dalam pandangannya, dengan berkarya melalui jalur politik yang bersifat strategis, memungkinkannya melakukan hal-hal besar dengan lebih efektif. FMT mengaku keputusannya untuk berkiprah dalam politik, khususnya untuk maju sebagai calon Bupati Minahasa Utara periode 2010-2015, bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba saja, melainkan telah dipersiapkannya secara matang sejak lama, sekurangnya sejak setahun lalu. FMT berprinsip, kalau orang lain bisa, maka ia juga harus bisa. Menurutnya, asal punya tekad yang kuat, setiap orang pasti bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Ia Ungkapan “Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa!” patut diduga mengacu pada sosok dan pengalaman Anneke Vonny Panambunan, perempuan Minahasa Utara yang terpilih sebagai Bupati Minahasa Utara pada 2005 lalu. Mirip dengan FMT, Vonny Panambunan adalah perempuan pengusaha yang sukses dan tinggal di Jakarta. Dan lagi, Vonny Panambunan juga tidak berbekal pengalaman politik yang memadai, namun pada Pemilu 2005 berhasil terpilih sebagai Bupati Minahasa Utara berpasangan dengan Sompie Singal. Fenomena Vonny Panambunan rupanya sedikit banyak memberi pembelajaran politik di Minahasa Utara.

Karir politik FMT dimulai ketika ikut berkompetisi untuk meraih kursi keanggotaan DPRD Minahasa Utara pada Pemilu 2009. Jika dilacak lebih awal lagi, pengalaman politiknya berawal dari keberhasilan FMT mempromosikan ayah kandungnya memenangi pemilihan kepala desa (hukum tua) Desa Treman, sebuah keberhasilan yang memberikan kepercayaan diri pada FMT maupun orang-orang di sekitarnya tentang kemampuan FMT untuk menggerakkan dukungan orang dalam kancah pemilihan memperebutkan sebuah jabatan. Pada Pemilu Legislatif 2009 lalu itu FMT terdaftar sebagai calon anggota legislatif dari PKPB nomor urut 1 untuk daerah pemilihan (Dapil) III – yang mencakup kecamatan-kecamatan Airmadidi, Kauditan, dan Kema; yang akhirnya benar-benar mengantarnya terpilih sebagai anggota DPRD Minahasa Utara. Bahkan, seperti disebutkan diatas, FMT kemudian terpilih sebagai ketua fraksi gabungan yang dinamai Fraksi *Tumatenden* (sebutan untuk bidadari yang turun mandi ke Airmadidi, Minahasa Utara dalam cerita rakyat Minahasa). Dalam persaingan memperebutkan posisi ketua fraksi ini FMT berhasil mengalahkan politisi senior yang cukup populer, Piet Luntungan (kini Ketua Badan Anggaran DPRD Minahasa Utara yang juga calon bupati dari jalur independen), dan Yulisa Baramuli (kini calon wakil bupati berpasangan dengan Sompie Singal). Mengaku menjunjung tinggi keinginan untuk membangun dan berkarya di Minahasa Utara, FMT merasa benar-benar terpanggil untuk maju bersaing dalam Pemilu pada 2010 menantang bupati *incumbent* Sompie Singal.

D.1.3. Modal Sosial

Oleh para pendukungnya, sebagian elemen masyarakat, maupun pers, FMT dilukiskan sebagai tokoh masyarakat

yang sangat peduli terhadap penderitaan dan upaya untuk memajukan masyarakat, serta ringan langkah dan bermurah hati untuk memberikan bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ada pemberitaan yang melukiskan FMT sebagai “sosok ketulusan dan penuh kasih.” FMT dikatakan tidak segan-segan untuk mengulurkan tangan mengeluarkan dana atau bantuan untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk melunasi PBB (pajak bumi dan bangunan) warga Desa Treman, mensponsori kegiatan olah-raga dan budaya, seperti pertandingan bola voli, lomba otomotif, juga kegiatan kesenian, kepemudaan, keagamaan, perbaikan infrastruktur, dan lain-lain. Awal tahun ini FMT diberitakan melakukan pelayaran berisiko ke Pulau Gangga, menemui masyarakat Kecamatan Likupang, untuk menyelenggarakan pergelaran adat *tulede* – budaya warga Nusa Utara – yang sudah jarang diselenggarakan. FMT juga merangkul dukungan warga gereja GMIM. Pdt Dr. Piet Tampi, M.Si. yang menyebut FMT sebagai warga GMIM Minahasa Utara mengatakan dalam suatu pertemuan Majelis Sinode GMIM,

“Kita hadir untuk bersama-sama mendoakan dan mengutus pasangan TUNTAS agar menjadi garam dan terang di Kabupaten Minahasa Utara ke depan.”

Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan jejaring sosial yang cukup luas, bahkan FMT kerap menjadi magnetnya.

Jejaring yang luas juga tampak ketika FMT membuat pesta untuk merayakan ulang tahun ke-63 bapaknya, Bernhard W.J. Tuwaidan (Hukum Tua atau Kepala Desa Treman) yang konon dihadiri lebih dari 2000 tamu dari berbagai kalangan, termasuk sebagian besar Hukum Tua se-Minahasa Utara. Pada acara ulang tahun yang berlangsung meriah itu, selain diisi

dengan kegiatan ibadah dan jamuan, FMT juga membagikan hadiah "door prize" kepada para undangan yang hadir berupa alat-alat rumah tangga dan elektronik, seperti seterika, kipas angin, dispenser, televisi, voucher belanja, tiket pesawat, dan hadiah-hadiah lainnya. Salah satu anggota tim sukses FMT menjelaskan bahwa pesta – yang dikembangkan dari tradisi "malam bakupas" yang lazim diselenggarakan menjelang pesta perkawinan – memang merupakan media politik, untuk menarik perhatian dan menggalang dukungan, yang sering diselenggarakan para kandidat. Bahkan jika seorang tokoh menghadiri undangan ke sebuah pesta hajatan, si tokoh tidak sekadar memberi sumbangan kepada tuan rumah yang menyelenggarakan hajatan, melainkan juga membagikan hadiah kepada tamu-tamu yang datang.

Tidak bisa diabaikan bahwa jejaring dan berbagai kegiatan tersebut bisa dilakukan karena FMT adalah pengusaha sukses yang kaya. Kekayaan FMT yang dilaporkan secara resmi sebagai persyaratan pendaftaran calon bupati ke KPUD Minahasa Utara sebesar Rp. 10.715.907.416 plus USD 30.785. Sebagian kalangan menduga kekayaan yang dikuasai FMT lebih besar dibanding yang sudah dilaporkan. Walaupun demikian, ternyata FMT-Willy Kumentas (TUNTAS adalah sebutan populer untuk mereka) bukanlah pasangan calon yang terkaya dalam pemilukada Minahasa Utara, karena pasangan Piet Luntungan dan Shintia Panambunan melaporkan kekayaan sebesar Rp. 64.437.067.500, sementara pasangan Sompie Singal-Yulisa Baramuli melaporkan Rp. 22.967.222.976, dan pasangan Netty Agnes Pantow-Ingried Sondakh melaporkan Rp. 17.083.697.985. Menurut pengakuan sejumlah kalangan, termasuk pers, LSM, KPUD, bahkan tim sukses FMT sendiri, *political cost*

dalam pemilukada Minahasa Utara merupakan yang tertinggi dibanding daerah-daerah lain. Willy Kumentas yang menjadi pasangan FMT pun mengakui pentingnya uang untuk pembiayaan sosial dan politik. Untuk maju dalam pemilukada Willy menaksir minimal dibutuhkan uang 10 milyar. Dan, setiap orang yang ditokohkan, menurut Willy, harus punya anggaran untuk membiayai kegiatan sosial (*social cost*). Dalam pengalamannya sendiri sebagai tokoh masyarakat (birokrat) sekitar 30% anggaran dinas digunakan untuk belanja sosial.

Status FMT sebagai perempuan tampaknya juga memberi keberuntungan. Pendukungnya berpendapat bahwa perempuan memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki politisi laki-laki. Kepemimpinan perempuan tidaklah asing dalam sejarah, legenda dan mitos yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat Minahasa, khususnya Minahasa Utara, lebih khusus lagi sub-etnis Tonsea. Perempuan dianggap punya energi positif yang bersumber dari karakter keibuan, peduli pada penderitaan rakyat, punya kepekaan sosial, tulus, dan sanggup merangkul dan melayani semua kalangan, tidak suka konflik, serta tidak arogan dan tidak korup. Dalam sejarah, tercatat ada kisah tentang kepahlawanan perempuan Manado, Maria Walanda Maramis, juga kisah seorang perempuan Walikota Manado pertama, Woworuntu, serta legenda *Tumatenden* – sembilan bidadari yang turun mandi di Airmadidi, Minahasa Utara – dan *Toar Lumuut* – orang pertama Minahasa sub-etnis Tonsea yang ternyata seorang perempuan. Ada juga legenda tentang panglima perang perempuan yang memimpin Minahasa dalam peperangan melawan kerajaan Bolaang Mongondow.

Pendek kata, FMT yang banyak dikenal sebagai pengusaha Jakarta yang pulang kampung memang harus membangun “kembali” jejaring sosialnya. Para perantau Minahasa yang sukses – konon sudah terjadi sejak jaman Belanda – memang cenderung untuk pulang kampung, menunjukkan keberhasilan dan kemampuannya, antara lain, untuk membantu orang lain, termasuk untuk membiayai acara-acara adat. Menurut pengakuan Ketua Adat Tonsea, kegiatan-kegiatan adat di kalangan mereka justru dihidupkan dan dibiayai para perantau. Dan, dengan cara begitu para perantau itu sesungguhnya hendak memulihkan dan atau memperoleh pengakuan atas status sosialnya dalam masyarakat.

D.1.4. Modal Politik

Modal politik yang dimiliki FMT mulai tampak ketika ia berhasil mempromosikan ayah kandungnya, Bernhard W.J. Tuwaidan, dalam persaingan pemilihan Hukum Tua (Kepala Desa) Desa Treman, tempat domisilinya. Keberhasilan dalam memenangi pemilihan kepala desa untuk ayahnya itu rupanya memberikan kepercayaan diri pada FMT, keluarga dekat, juga pengakuan masyarakat di sekitarnya akan kemampuan FMT dalam menggerakkan dukungan politik. Ini cukup memberi keyakinan pada diri FMT dan orang-orang dekatnya untuk mendorong FMT menjajal karir di bidang politik dengan ikut berkompetisi dalam pemilihan anggota DPRD Minahasa Utara. Akhirnya, pada Pemilu 2009 FMT dipinang oleh PKPB dan ditetapkan sebagai calon dengan nomor urut pertama pada daerah pemilihan di sekitar tempat tinggalnya, yaitu Dapil III yang meliputi Kecamatan Kauditan, Airmadidi, dan Kema. Hasilnya, Pemilu 2009 menetapkan FMT sebagai anggota

DPRD Minahasa Utara terpilih, bahkan satu-satunya wakil yang lolos melalui PKPB. Hebatnya lagi, FMT kemudian berhasil memenangi persaingan untuk memperebutkan jabatan ketua fraksi, yaitu fraksi gabungan yang merupakan himpunan Wakil-Wakil dari sejumlah partai politik yang disebut Fraksi Tumatenden. Posisi sebagai ketua fraksi gabungan lintas partai politik memungkinkan FMT banyak melakukan komunikasi politik lintas partai politik.

Sukses-sukses politik yang dialami FMT seakan terus bergulir bak bola salju, dari sukses politik kecil pada tingkat desa, kemudian sukses memenangi pemilu di daerah pemilihan yang meliputi tiga kecamatan, dan berlanjut lagi memenangi pertarungan memperebutkan jabatan ketua fraksi. Sukses-sukses ini mengesankan kemampuan dan keberhasilan FMT dalam menggalang dukungan, baik pada aras massa yang awam politik maupun pada aras elite politik, yang bisa diasumsikan memiliki kesadaran politik, ambisi politik, kekuatan, dan keterampilan bermanuver dalam politik. Berbagai keberhasilan beruntun dalam waktu yang relatif singkat inilah yang tampaknya makin memupuk kepercayaan diri, keterampilan, dan keberanian FMT untuk maju dalam kontestasi memperebutkan jabatan yang lebih tinggi dan barangkali juga dengan pertarungan yang lebih besar. Dan, hasilnya cukup mencengangkan. Bermodalkan satu kursi perwakilan PKPB, FMT berhasil maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Willy Kumentas, seorang birokrat yang dinilai berkarir baik sekaligus seorang tokoh gereja. Kesembilan partai politik pengusung dan pendukung pasangan FMT dan Willy Kumentas adalah PDI-Perjuangan, PKPB, PPRN (Partai Persatuan Rakyat Nasional), PAN (Partai Amanat Nasional), PKB (Partai

Kebangkitan Bangsa), PDS (Partai Damai Sejahtera), PDP (Partai Demokrasi Pembaharuan), PKPI (Partai Kebangsaan Persatuan Indonesia), dan PKD (Partai Kasih Demokrasi Indonesia).

D.2. Proses Kandidasi

D.2.1. Persiapan Kandidasi

FMT mengaku mempersiapkan pencalonannya secara matang dan serius. Bukan saja kesiapan pribadinya dan keluarganya, melainkan juga dalam menentukan pasangan, merumuskan visi, misi, dan program yang akan diperjuangkan, melobi partai-partai pengusung dan pendukung, serta dalam mengorganisasikan tim-tim sukses, termasuk menyiapkan pembiayaannya. Menyadari bahwa dirinya adalah pengusaha yang kurang berpengalaman di bidang pemerintahan, maka FMT mencari pasangan yang kompetensi dan reputasinya di bidang pemerintahan tidak bisa diragukan. Maka, setelah mempertimbangkan banyak nama, akhirnya pilihan jatuh kepada Ir. Willy Kumentas, kari yang dinilai cakap dan profesional, serta pernah menduduki berbagai jabatan: Ketua Bappeda, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pertanian, dan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan. Pasangan Fransisca Magdalena Tuwaidan dan Willy Kumentas ini kemudian diperkenalkan dengan sebutan TUNTAS. Pilihan pada Willy Kumentas tidak ditentukan atas kemauan pribadi FMT semata, melainkan dibicarakan bersama-sama, termasuk dengan pimpinan partai politik pengusung dan anggota inti tim suksesnya. Mereka menganggap pasangan yang merupakan gabungan antara pengusaha sukses dan birokrat profesional adalah pasangan yang ideal.

Pilihan berpasangan dengan Willy Kumentas rupanya bukan sekadar memberikan kepercayaan diri dan meyakinkan pendukung, tetapi juga mengesankan bisa diterima di kalangan luas dalam masyarakat. Ini dibuktikan dengan hasil-hasil survei pendahuluan yang selalu mengunggulkan pasangan ini. Walaupun demikian, persiapan tidak sekadar dilakukan dengan memperkuat pencitraan sosok kandidat belaka, melainkan juga merumuskan visi-misi yang jelas, kuat, layak dikerjakan, diterima dan diyakini masyarakat akan meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa faktor dipertimbangkan dalam merumuskan visi, misi, dan program percepatan kesejahteraan rakyat, antara lain:

Pertama, letak Kabupaten Minahasa Utara yang berada di antara dua kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi pesat, yaitu Kota Manado dan Kota Bitung. Aktivitas dua kota tersebut harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Minahasa Utara; Kedua, sumber daya alam, seperti kesuburan tanah, topografis, curah hujan, mata air, luas lahan, dan laut, serta keindahannya sangat potensial untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, perikanan darat dan laut, serta pariwisata;

Ketiga, sumber daya manusia yang terdistribusi secara proporsional dan merata pada semua sektor kegiatan, seperti pertanian dan perkebunan, perikanan darat dan laut, bisnis, pemerintahan dan swasta, serta sektor lainnya. Dinamisasi dari kondisi objektif tersebut di atas, harus digerakkan dan diarahkan pada satu titik pembangunan, yaitu: mewujudkan kesejahteraan rakyat Minahasa Utara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut visi, misi dan program kerjasapan TUNTAS (dikutip dari dokumen kampanye mereka):

Visi: Terwujudnya Kabupaten Minahasa Utara sebagai Kabupaten terdepan di Provinsi Sulawesi Utara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Misi:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kebudayaan;
3. Menciptakan modernisasi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan darat maupun laut;
4. Memajukan dan mengembangkan potensi pariwisata daerah;
5. Meningkatkan fungsi dan peran koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah);
6. Membangun infrastruktur, terutama: jalan kabupaten, jalan desa, jalan produksi, irigasi, drainase, dan talud, serta memprioritaskan tersedianya air bersih sampai ke rumah-rumah penduduk;
7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda serta memajukan olah raga dan kesenian;
8. Meningkatkan kesejahteraan lansia;
9. Mempercepat pembangunan di Airmadidi sebagai ibukota kabupaten, dan Pulau Gangga, Pulau Bangka, Pulau Talise, Pulau Kinabuhutan, Pulau Nain, Pulau Mantehage serta pulau-pulau kecil lainnya;
10. Meningkatkan fungsi dan peran swasta/investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, terutama lokal;
11. Membangun jaringan kerja sama antar-daerah dan kerjasama dengan luar negeri.

Tujuan dan program kerja:

1. Terciptanya pemerintahan yang bersih transparan dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.
 - a. Peningkatan rutinitas pembinaan mentalitas aparaturnya dalam pekerjaan;
 - b. Perekrutan aparaturnya baru maupun dalam jabatan didasarkan pada hasil analisis pekerjaan atau jabatan dengan menggunakan pendekatan *link and match*, dan *the right man on the right place*.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kebudayaan.
 - a. Pengadaan dan perbaikan fasilitas pendidikan.
 - b. Pengadaan dan perbaikan fasilitas kesehatan.
 - c. Bantuan perbaikan fasilitas keagamaan secara proporsional dan merata.
 - d. Pengadaan dan perbaikan fasilitas kebudayaan.
 - e. Pengadaan guru sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.
 - g. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.
 - h. Pemberantasan buta huruf.
 - i. Peningkatan kegiatan berobat gratis.
 - j. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sesuai dengan profesi masing-masing.
 - k. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan berdasarkan asas keterjangkauan.
 - l. Peningkatan intensitas kegiatan kebudayaan di masyarakat.

<p>3. Terwujudnya modernisasi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan baik darat maupun laut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan teknologi yang sesuai di bidang pertanian, peternakan dan perikanan darat maupun laut. Membantu dalam memasarkan hasil-hasil produksi <p>4. Terwujudnya pariwisata daerah yang potensial</p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun dan memperbaiki semua objek wisata yang potensial Peningkatan sosialisasi dan promosi objek wisata baik lokal, nasional, maupun secara internasional. <p>5. Meningkatnya fungsi dan peran koperasi dan UMKM</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan keterlibatan koperasi dan UMKM dalam kegiatan-kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan seperti pengadaan bibit dan pemasaran. Pemberian peluang semakin besar kepada masyarakat dalam mendirikan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. <p>5. Meningkatnya fungsi dan peran koperasi dan UMKM</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan keterlibatan koperasi dan UMKM dalam kegiatan-kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan seperti pengadaan bibit dan pemasaran. Pemberian peluang semakin besar kepada masyarakat dalam mendirikan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. <p>6. Terwujudnya infrastruktur yang representatif, seperti: jalan kabupaten, jalan desa, jalan produksi (foam road), irigasi, drainase, dan talud, serta memprioritaskan tersedianya air bersih sampai ke rumah-rumah penduduk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan dan pengadaan infrastuktur Mengedepankan kontraktor lokal dalam kegiatan perbaikan dan pengadaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<p>7. Memiliki pemuda handal serta meningkatnya aktivitas olah raga dan kesenian</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan kesempatan kepada pemuda dalam melaksanakan pembangunan Peningkatan aktivitas perlombaan di bidang olah raga dan kesenian
<p>8. Kesejahteraan Lansia mengalami peningkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kegiatan lansia di bidang olah raga dan kesenian Memberikan prioritas dalam pelayanan publik
<p>9. Terwujudnya Airmadidi sebagai ibukota kabupaten yang representatif, dan kehidupan masyarakat di Pulau Gangga, Pulau Bangka, Pulau Talise, Pulau Kinabuhutan, Pulau Nain, Pulau Mantehage serta pulau-pulau kecil lainnya mengalami peningkatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penataan Airmadidi sebagai Ibukota Kabupaten MINUT Penataan Airmadidi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten MINUT Penetapan program khusus untuk pembangunan di daerah kepulauan
<p>10. Fungsi dan peran swasta/investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, terutama lokal, semakin nampak dalam pembangunan Minahasa Utara</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelibatan melalui pemberian kesempatan yang lebih besar kepada pihak swasta/ investor dalam pembangunan. Peningkatan kualitas dalam penentuan pelaku proyek pembangunan melalui pendekatan seleksi dan kompetisi.
<p>11. Terciptanya jaringan kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan luar negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi daerah atau negara mana yang layak diajak untuk bekerja sama (lokal dan luar negeri) Pengembangan produk terutama yang berorientasi ekspor (lokal dan luar negeri)

Untuk keperluan kampanye, rumusan visi, misi, tujuan dan program pembangunan yang rinci dan terlalu panjang tersebut dikemas ulang agar mudah dimengerti oleh pemilih, khususnya yang tinggal di desa-desa. Rumusan kemansan sederhana itu dipopulerkan dengan sebutan *Empat Tuntas*, yang meliputi:

1. Tuntas infrastruktur desa (jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih);
2. Tuntas pengangguran (lapangan kerja untuk 11.000 pemuda);
3. Tuntas ekonomi desa (pupuk untuk petani, BBM, modal usaha kecil), dan
4. Tuntas kemiskinan (revolusi putih = susu, telur, vitamin untuk anak SD, pendidikan dan obat murah).

Untuk memantapkan dan menyukseskan persiapan pencalonannya FMT juga membentuk tim-tim sukses (sering disebut TS), yang terutama dihimpun dan dipimpin oleh anggota keluarganya. Anggota TS pada umumnya datang sendiri melamar, bukan FMT yang mencari, dan prinsipnya semua yang datang akan diakomodasi, walaupun tidak semua diberi peran yang sama, tergantung ketokohan dan potensi kontribusinya bagi keberhasilan calon. Selain TS independen yang dikoordinasikan langsung oleh keluarganya, ada juga sejumlah anggota TS yang dipasok dari partai-partai pengusung dan pendukung.

D.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Modal politik berupa PKPB yang hanya menguasai satu kursi DPRD Minahasa Utara, FMT dihadapkan pada tantangan untuk mencari dukungan partai politik lain, baik yang memiliki wakil di DPRD maupun tidak. Partai politik pertama yang didekati FMT adalah PDIP, yang

sangat disadarinya bahwa PDIP pasti punya kader sendiri yang layak dipromosikan dan mungkin juga diingini dan/atau mengincar calon-calon lain. Bagi FMT mendapatkan rekomendasi dan dukungan PDIP merupakan langkah yang sangat strategis yang diharapkan dapat memancing minat partai politik lain untuk bergabung. Seperti diketahui PDIP, menguasai empat kursi DPRD, merupakan salah satu di antara tiga partai politik besar di Minahasa Utara, selain Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya – yang masing-masing dapat mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain.

Menghadapi pemilukada kali ini PDIP Minahasa Utara sempat mempertimbangkan empat nama untuk diusung sebagai calon papan satu. Nama-nama tersebut, menurut Freddy Sualang, Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara, adalah Ir. Herry Rotinsulu (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Sulawesi Utara), Fransisca Magdalena Tuwaidan, Sompie Singal (Bupati Minahasa Utara saat ini), dan Jerry Beria Rampen, SH., M.H.(www.beritamanado.com, 02 Maret 2010). Sementara itu, informasi Tribun Manado yang juga mengutip keterangan Freddy Sualang menyebutkan keempat nama yang diseleksi DPP PDIP adalah Herry Rotinsulu, Fransisca Tuwaidan, Willy Kumentas dan Johan Mandagi (Tribun Manado, 03 Maret 2010). Keempat nama tersebut sempat diundang ke Jakarta untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh PDIP pada tanggal 03 Maret 2010. Akhirnya FMT-lah yang berhasil meyakinkan petinggi partai dan memenangi perebutan rekomendasi PDIP, menyisihkan calon-calon yang dinilai berpengalaman, beken, dan kuat. Pulang dari Jakarta membawa rekomendasi PDIP, FMT disambut dengan sangat meriah di Bandara

Sam Ratulangi. Para pesaing FMT pada akhirnya juga tetap berhasil lolos maju sebagai kandidat dalam pemilukada kali ini. Herry Rotinsulu maju berpasangan dengan Immanuel Pasulatan (Hero-Beriman) yang diusung gabungan partai-partai yang mencakup: Partai Pelopor, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan), PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PBR (Partai Bintang Reformasi), PNI Marhaenisme, PMB (Partai Matahari Bangsa), PPI (Partai Pemuda Indonesia), PIS (Partai Indonesia Sejahtera), PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia), dan PBB (Partai Bulan Bintang). Sementara itu, Sompie Singal maju berpasangan dengan Yulisa Baramuli yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Barisan Nasional (Barnas), dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB).

Setelah PDIP, partai politik berikutnya yang ditarik adalah PKB, kemudian PDS, PAN, dan PPRN. Selanjutnya nama FMT dan Willy Kumentas makin berkibar dan mengundang daya tarik partai-partai politik lain untuk bergabung. Akhirnya terdapat sembilan partai politik yang bergabung dalam barisan yang dimotori FMT. Partai-partai pendukung mengaku tertarik untuk bergabung karena menilai FMT memang sosok yang bersungguh-sungguh membuktikan komitmennya dengan karya-karya nyata, tidak banyak berbicara dan berjanji muluk-muluk yang belum tentu dapat dilaksanakan, melainkan langsung menjalankan program-program nyata yang dibuat sendiri dan program-program yang tidak dijalankan pemerintah.

"Belum menjadi Bupati saja, programnya langsung dilaksanakan, itu kan cukup meyakinkan," (Ketua DPC PAN Minahasa Utara).

Mengkoordinasikan dan menjaga soliditas dukungan banyak partai politik barangkali bukan perkara mudah. Tetapi partai-partai politik pengusung pasangan TUNTAS mengklaim soliditas dan konsistensi dukungan mereka terhadap pasangan TUNTAS. PDIP, PKPB, PDS, PPRN, PDP, PKB dan PAN diakui tetap bersinergi dan solid dalam memenangkan FMT ke kursi Bupati Minahasa Utara. Menurut pengakuan Ketua PAN, di antara partai pengusung pasangan FMT-Willy Kumentas telah dibuat perjanjian/ MoU yang mengikat pertanggungjawaban politis maupun administratif. Konsolidasi pasangan calon dengan partai pendukung dan tim sukses juga selalu diusahakan, termasuk dalam memberikan pembekalan kepada para saksi. Tokoh-tokoh PDIP turun langsung, bukan saja berkampanye tetapi juga memberikan pengarahan dan pembekalan kepada tim sukses dan saksi-saksi.

"Kami partai politik pengusung siap memenangkan Tuwaidan," (Selfran Wungow, politisi PDS) "Kolaborasi dan koalisi kami sudah bulat. Tuntas harus dimenangkan dan dukungannya merata dan meluas di Minahasa Utara," (Sarhan Antili dari PKB).

PKB juga menegaskan telah mengaktifkan 1000 anggota Laskar PKB untuk bekerja memenangkan pasangan TUNTAS.

FMT sendiri menegaskan, pihaknya akan berjuang sekuat tenaga membawa kemenangan rakyat Minahasa Utara. "Rakyat Minahasa Utara harus maju, dan ini tidak hanya janji," tegasnya. Dan Willy Kumentas pun menambahkan, "Kemenangan harus diraih secara bersama demi kesejahteraan rakyat."

D.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pasangan TUNTAS yang diusung dan didukung banyak partai politik tentu memiliki hubungan yang kompleks dengan partai-partai dan sedikit banyak akan terimbas manakala muncul permasalahan menyangkut partai politik pengusung. Pasangan ini mendaftarkan ke KPU pada 25 Mei 2010 dengan didukung enam partai politik, yaitu: PDI-Perjuangan, PKPB, PDP, PDS, PAN, dan PKB. Ternyata PAN Minahasa Utara terpecah, sehingga dukungan PAN dalam Pemilu Pilkada Minahasa Utara sempat dipersoalkan, apakah tertuju ke pasangan TUNTAS ataukah ke pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli (SBY). Namun demikian, persoalan PAN tidak mengurangi keabsahan pasangan TUNTAS sebagai calon bupati-wakil bupati yang ditetapkan KPU Minahasa Utara.

D.2.4. Kandidat dan Institusi Sosial

Institusi sosial yang ikut memberikan dukungan kepada FMT adalah Gereja dan Legiun Veteran.

E. YULISA BARAMULI

E.1. Profil Kandidat

E.1.1. Biografi

Yulisa dikenal sebagai perempuan cerdas dan religius, pengusaha sukses dan mandiri. Ia penganut agama Protestan dan ia lahir dari darah campuran Sangihe dan Minahasa Utara. Yulisa adalah seorang pengusaha sukses dan pernah mendapatkan penghargaan Kartini, ia memiliki

nama besar di dalam klan Baramuli. Ayahnya seorang politisi nasional, Hengky Baramuli, anggota DPR 2004 dari Partai Golkar. Yulisa juga berprofesi sebagai pengusaha, iapemilik PT Dipa Pramana Prima.

Yulisa mengawali karir politiknya sebagai seorang politisi perempuan ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sulut pada tahun 2004 dan berhasil. Dalam surat suara, Yulisa Baramuli menjadi calon nomor 2. Dari total suara sah pada pemilihan umum untuk DPD dari Sulut adalah sebanyak 1.234.178 dan Yulisa Baramuli menerima 50.076 suara. Ini menjadikan Yulisa Baramuli sebagai calon dengan perolehan suara kedua terbanyak. Ketika itu anggota DPD dipilih dari empat perolehan suara terbanyak.

Kesuksesannya sebagai anggota DPD menantang ia untuk mengembangkan karir politiknya menjadi anggota DPRD. Pada pemilu 2009 Yulisa akhirnya menjadi anggota DPRD MinUt dari Fraksi Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). Di DPRD ini ia semakin mengembangkan ambisinya dengan mencari peluang sebagai calon ketua fraksi Tumatenden. Namun ambisinya ini harus kandas karena akhirnya ia dikalahkan oleh Francisca Tuwaidan dari PKPB. Tidak berhenti disitu, ia menjadi Ketua Fraksi Esa Genang di DPRD MinUt, dan kini duduk di Komisi Anggaran DPRD MinUt.

E.1.2. Motivasi Kandidat

Ketika Yulisa menjadi anggota DPD ia berkeinginan merevitalisasi potensi wisata Minahasa Utara yang sumber daya alamnya begitu melimpah. Potensi wisata alamnya yang begitu indah dan tersebar di seluruh wilayah pesisir

dan pegunungan di Bumi Tonsea. Namun sayang, sejumlah potensi wisata alam nan indah itu, kini mulai terlupakan dan kurang menarik perhatian wisatawan.

Ia merasa bahwa keinginan merevitalisasi potensi wisata ini hanya bisa direalisasi manakala ia berada di pemerintahan,

"...kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, sebagai pengusaha saya sudah berkecukupan, tetapi bukan itu tujuan saya, karena saya ingin mengembangkan dan membangun Bumi Tonsea ini."

(Wawancara dengan Yulisa)

Bermodalkan tekad untuk membangun MinUt inilah kemudian ia berpasangan dengan Sompie Singal, seorang *incumbent* di MinUt untuk maju sebagai calon wakil bupati. Ada kecocokan dalam visi Sompie Singal dengan visi Yulisa untuk merevitalisasi kembali potensi wisata yang kini mulai terlupakan namun masih menyimpan pesona yang dimiliki Kabupaten Minahasa Utara. Salah satunya adalah Pantai Batu Nona di Desa Kema, pantai yang pada era 1990-an ini merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang menjadi primadona bagi masyarakat Sulawesi Utara, bahkan cukup dikenal wisatawan domestik tingkat nasional. Tidak hanya soal keindahan pantai dengan pasir putihnya, objek wisata pantai Batu Nona juga menyimpan kisah misteri yang menjadi mitos masyarakat setempat tentang asal muasal pantai ini sehingga menarik minat wisatawan berkunjung ke pantai ini.

Yulisa Baramuli adalah sosok yang memiliki naluri *entrepreneurship*, perempuan yang juga sukses mengangkat potensi wisata di daerah Likupang ini terpanggil untuk merevitalisasi kembali objek wisata pantai primadona ini dan bertekad akan mengembalikan keindahan Pantai Batu

Nona agar kembali ramai dikunjungi. Menurutnya, dengan merevitalisasi kembali potensi wisata alam ini akan banyak memberi kontribusi bagi daerah dan bagi masyarakat setempat. Di antaranya, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), merangsang tumbuhnya usaha kecil dan pengurangan angka pengangguran karena menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

“Meski Minahasa Utara kaya dengan sumber daya alam berupa komoditas pertanian, kelautan, perkebunan dan pertambangan, namun kekayaan wisata alamnya juga harus kita kembangkan dan tingkatkan untuk kemaslahatan masyarakat Minahasa Utara.”

Naluri *entrepreneurshipnya* ini juga nampak iadalam salah satu orasi politiknya ketika kampanye:

“...baha figur pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Minahasa Utara adalah figur yang cerdas dan memiliki jaringan investor yang luas untuk membangun Manahasa Utara. Pemimpin juga harus mampu melakukan lobi-lobi dan berkomunikasi dengan investor asing maupun dalam negeri untuk meyakinkan mereka mengenai potensi yang dimiliki Tanah Tonsea. Untuk melakukan percepatan pembangunan Minahasa Utara membutuhkan pemimpin yang cerdas supaya tidak dibodohi oleh pihak luar yang datang berinvestasi dan hanya mengambil keuntungan namun tidak memberi manfaat bagi rakyat. Pemimpin yang diperlukan adalah pemimpin yang betul-betul murni bertekad menyejahterakan rakyat, bukan yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau mensejahterakan keluarga dan kroni-kroninya...”

(Materi kampanye Yulisa, tanggal 28 Juli 2010)

Kepedulian Yulisa Baramuli tidak berhenti pada revitalisasi pariwisata. Ia juga peduli kemajuan pendidikan. Ia bertekad untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas demi membentuk insan yang cerdas di Minahasa Utara, seperti yang tertuang dalam visi dan misinya. Kepedulian yang besar terhadap kemajuan dunia pendidikan telah ditunjukkan dan dibuktikannya dengan membantu sejumlah siswa di Minahasa Utara yang mengikuti Olimpiade Sains di Jakarta dan membantu membiayai pembangunan sekolah dasar dan pengadaan buku-buku pelajaran di Desa Wori, serta membangun fasilitas perumahan untuk kepala sekolah yang kesemuanya

dibiayai secara pribadi oleh perempuan pengusaha berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum ini.

iala Yulisa menampik bila dikatakan pencalonannya karena kepentingan pribadi. Berkali-kali Yulisa selalu menuturkan:

“... kalau sekedar berpikir untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga, buat apa harus repot-repot mencalonkan diri sebagai wakil bupati sebab dengan penghasilannya sebagai pengusaha saya sudah bisa hidup berkecukupan. Tetapi karena ini panggilan nurani untuk ikut serta membangun negeri, khususnya membangun dan memajukan MinUt maka saya bersedia mencalonkan diri...!”

(Wawancara dengan Yulisa Baramuli, tanggal 28 Juli 2010)

E.1.3. Modal Sosial

Nama klan Baramuli menjadi modal sosial yang dimiliki oleh Yulisa. Orang sangat mengenal klan Baramuli sebagai klan politisi di percaturan politik nasional dan lokal, dengan nama-nama yang cukup dikenal seperti Arnold Baramuli, Arianti Baramuli dan Hengky Baramuli. Selain bermodalkan nama klan tersebut, Yulisa juga cukup kuat secara finansial untuk mendanai dirinya maju pemilukada.

Modal lainnya adalah dukungan dari LSM Semangat Perempuan, kabarnya ia Yulisa juga sangat dikenal di kalangan kaum perempuan, juga kalangan lansia, petani dan nelayan di wilayah Likupang dan Wori.

E.1.4. Modal Politik

Bekal pengalaman politiknya sebagai anggota DPD dan anggota DPRD Minahasa Utara, duduk di Komisi Anggaran dan Ketua Fraksi Esa Genang DPRD MinUt, serta pengasuhan politik dari keluarga besar Baramuli, telah membantu Yulisa untuk membulatkan tekad maju dalam pemilukada.

Nampaknya Yulisa cukup menyadari segala modal politik serta kualitas, kapabilitas serta elektabilitas di masyarakat, sehingga ia melangkah cukup percaya diri memasuki pencalonan. Bahkan pasangan Sompie-Yulisa Baramuli (Sebutan populer untuk pasangan ini adalah SBY) merupakan pendaftar pertama ke KPU MinUt.

Modal politik diatas membuka ruang bagi Yulisa untuk membangun jejaring antar partai, diantaranya dengan DPD Partai Demokrat Sulut. Salah satu dukungan datang dari Syennie Watoelangkow sebagai Ketua DPD PD Sulut yang telah membuka akses Yulisa untuk maju melalui kendaraan Partai Demokrat di MinUt.

E.2. Proses Kandidasi

E.2.1. Persiapan Kandidasi

Untuk merealisasikan ambisinya, Yulisa mendekati ke kubu Sompie Singal, seorang *incumbent* Bupati Minahasa Utara. Bagi Yulisa pertimbangan untuk memilih Sompie sebagai pasangannya dalam pemilukada Minut lebih didasarkan pada faktor keterujian Sompie dalam memimpin MinUt selama ini. Kompetitor Yulisa sebanyak 7 orang dan akhirnya Sompie menjatuhkan pilihan ke Yulisa.

"...memilih berpasangan dengan Yulisa dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Yulisa adalah perempuan yang cerdas dan religus; kedua, ia orang tanah Kepulauan Nusa Utara (suku Sangihe), sedangkan Sompie adalah suku Tonsea; ketiga memiliki pengalaman politik yang cukup lumayan; keempat ia sangat peduli dengan pariwisata sehingga nantinya akan bisa mengembangkan pariwisata di MinUt..."

(Wawancara dengan Sompie Singal, tanggal 29 Juli 2010)

E.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Proses pencalonan Sompie dan Yulisa Baramuli disertai dengan konflik internal di Partai Demokrat (PD) di MinUt karena PD yang pada awalnya merekomendasi pasangan SBY ini mengalihkan dukungan terhadap pasangan lain dengan mencabut SK terhadap pasangan cabup dan cawabup Sompie Singal dan Yulisa Baramuli, dan menerbitkan SK untuk pasangan Netty Agnes Pantouw.

Pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli diusulkan oleh Plt. Ketua DPC PD MinUt Brahmana dan Plt. Sekretaris Vernis Mailoor. Sedangkan menurut surat nomor 39/EXT/DPPPD/VI/2010 tanggal 12 juni 2010 yang ditandatangani Ketua Umum PD Anas Urbaningrum, ditetapkan Rudi Kolulu dan Reza Pomantouw sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PD MinUt yang sah. Wakil Ketua DPC MinUt Novry Dotulong, menegaskan pasangan yang benar-benar diusung adalah **Netty Agnes Pantouw** dan **Inggried JNN Sondakh (PASTI)**, bukan pasangan Sompie – Yulissa Baramuli (SBY), “sudah ada keputusan dari Ketum DPP PD Pak Anas Urbaningrum, untuk pasangan yang diusung adalah Netty Agnes Pantouw dan Inggried Sondakh, bukan SBY (Sompie Bersama Yulisa),” tegas Dotulong.

Memang tampak perpecahan di tubuh Partai Demokrat dalam soal penetapan pasangan calon. Bahkan Novry Dotulong, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat MinUt mengaku kecewa dengan pendapat seorang Tim Sukses Sompie-Yulisa yang meragukan keabsahan SK Ketua DPC PD Rudy Kululu tentang penetapan Netty Agnes Pantouw oleh DPP Partai Demokrat.

Sedangkan dari kubu Yulisa, William Luntungan, sebagai Ketua Media Center Sompie-Yulisa secara tegas menyatakan bahwa tanpa PD pun, pasangan Sompie-Yulisa masih bisa maju karena kuota dukungan dari Parpol lainnya mencukupi, tanpa Demokrat, SBY tetap dicintai rakyat.. Pencalonan SBY diusung oleh Partai Demokrat, PIB, PAN, HANURA dengan jumlah kursi 7 buah atau 28%.

Ditetapkannya **Netty Agnes Pantow (NAP)** dan **Inggried JIN Sondakh** sebagai calon bupati dan wakil bupati dari Partai Golkar membuat **Ruddy Kululu** yang merupakan suami dari NAP harus menerima resiko dicopot dari jabatannya selaku Ketua DPC Partai Demokrat Minahasa Utara. Kululu adalah anggota DPRD MinUt dan memegang jabatan sebagai wakil ketua, sementara istrinya, NAP, merupakan anggota DPRD Sulut, anggota Komisi I Bidang Pemerintahan, kedua suami istri ini menjadi wakil rakyat melalui Partai Demokrat. NAP sendiri juga memegang jabatan sebagai Wakil Ketua DPD Perempuan Demokrat Sulut dan Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Provinsi Sulut Kululu. Pencopotan jabatan Kululu sebagai Ketua DPC Partai Demokrat MinUt dibenarkan **Venice Mailoor** yang telah ditunjuk sebagai Sekretaris DPC, Mailoor mengatakan bahwa SK Plt Ketua DPC Partai Demokrat MinUt sudah ada dan yang menjadi pelaksana tugas (Plt) adalah A. Brahmana. (sumber **Berita Manado**). Brahmana sendiri diketahui sebagai Direktur Eksekutif Media Center dan juga anggota Koordinatoriat Media Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono.

Akhirnya **Ketua DPC Partai Demokrat MinUt** Rudi Kolulu menggugat KPUD MinUt. Materi gugatan ke KPUD MinUt yang disampaikan ke PTUN Manado adalah agar KPUD MinUt mencabut surat keputusan nomor 14/KPTS/KPU-MU/MI/2010 yang menetapkan pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli serta menetapkan pasangan Netty Pantouw-Inggrid Sondakh sebagai calon yang sah dari Partai Demokrat. Akan tetapi gugatan DPC Partai Demokrat MinUt yang dilayangkan Ruddy Kululu terhadap KPUD akhirnya ditolak oleh Majelis Hakim PTUN Manado pada tanggal 21 Juli 2010.

Untuk meraih dukungan pemilih, pasangan SBY ini melakukan kampanye terbuka dan tertutup, melakukan kampanye jalanan dengan gaya non-formal. Misalnya makan siang dengan tukang ojek. Dalam kampanyenya terakhir pasangan SBY ini menyampaikan isu bahwa MinUt membutuhkan pemimpin cerdas dan bersih dari KKN. Massa pendukung datang dari Kecamatan Dimembe, Kalawat, Airmadidi, Kauditan dan Kerna. Dukungan lain datang juga dari Solidaritas Penambang Tatelu (SOBAT-SBY). Dalam orasinya Yulisa menyebutkan akan melakukan pengembangan jalan utama penghubung kota Bitung dan jalan-jalan

Dalam pemilukada 2010 dari hasil Rapat Pleno rekapitulasi suara KPU Minahasa Utara menetapkan pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli (SBY) meraih suara terbanyak dengan perolehan 35.572 *suara* atau 31,76 %.

E.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Polemik yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Minahasa Utara (MinUt) tersebut memaksa pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) MinUt kerja ekstra keras dalam menyelesaikan permasalahan itu. Perpecahan di tubuh Partai Demokrat dianggap sebagai pertentangan internal di tubuh PD dan itu bukan jadi urusan dari KPUD.

Akhirnya KPUD harus menghadapi langkah hukum yang diambil oleh kubu PASTI yakni berupa gugatan melalui pengadilan tinggi hingga ke Mahkamah Konstitusi, "...Jika keputusan tidak sesuai dengan amanat penegasan DPP PD, maka KPUD MinUt siap-siap mendapat gugatan hukum," ujar Dotulong (Menado Pos). Menurut anggota KPU MinUt, Julius Randang, proses penetapan calon itu sudah sesuai aturan, dan kuota kursi masing-masing kandidat semuanya memenuhi syarat, "...setelah melakukan proses verifikasi, semua kandidat memenuhi syarat," ungkap Randang.

Namun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa Utara tetap berpegang pada aspek prosedural yang akhirnya memutuskan pasangan yang diusung dari Partai Demokrat adalah Sompie Singal-Yulisa Baramuli dan bukan Netty Agnes Pantow-Inggried Sondakh. Proses memutuskan calon ini melalui pertemuan antara Frederik Sirap, Humas KPUD MinUt, dengan para petinggi partai politik (Parpol) melalui sebuah rapat pleno. Frederik telah menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

KPUD pada akhirnya menetapkan enam pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara pada Kamis, 24 Juni 2010. Enam pasang kandidat tersebut yakni:

1. Drs Sompie Singal dan Yulisa Baramuli yang diusung oleh Partai Demokrat, PPIB, PAN, HANURA dengan jumlah kursi 7 buah atau 28%.
2. Fransisca Tuwaidan dan Willy Kumentas yang disung oleh PDIP, PKPB, PDS, PKB, PDP, PPRN dengan jumlah kursi 9 buah atau 36%.
3. Paul Nelwan Arnold Lumentut dari Gerindra, PKPI, Barnas, PKDI dengan jumlah kursi 4 buah atau 15%.
4. Netty Agnes Pantouw dan Ingrid Sondakh akhirnya ditetapkan diusung oleh Partai Golkar dengan jumlah 4 kursi buah atau 15%.
5. Herry Rotinsulu dan Immanuel Pasulatan yang diusung Partai Pelopor, PPP, PDK, PPD, PKS, PBR, PNI, PPI, PIS, PNBK, PKP, Buruh dengan jumlah suara sah 17705 atau 17%.
6. Yang menggunakan jalur independen Piet Luntungan dan Shintia Rumumpe yang didukung 14328 suara atau 7,7%.

Sementara Divisi Hukum KPUD MinUt, Darul Halim menambahkan, hasil putusan pleno yang dilakukan KPU tidak asal-asalan namun melalui kajian yang matang sesuai dengan kaidah hukum normatif dan aturan yang berlaku,

“Mengenai gugatan yang dilakukan Partai, KPUD tidak gentar dan akan tunduk terhadap putusan pengadilan namun apapun yang menjadi keputusan pengadilan nanti dari gugatan partai itu tidak akan mempengaruhi tahapan pelaksanaan Pilkada, ... siapa suruh ada dualisme kepengurusan, kalau mau digugat harusnya gugat Partai karena ada dua kepengurusan bukan KPUD,”

Bagi KPUD pertikaian di internal partai bukanlah problem penyelenggara pemilu, sehingga gugatan tersebut sebenarnya salah alamat.

F. LINEKE SYENNIE WATOELANGKOW

F.1. Profil Kandidat

F.1.1. Biografi

Lineke Syennie Watoelangkow (populer dengan singkatan LSW) adalah sosok politisi perempuan yang cukup cerdas dan *capable*. Syennie, sebelumnya pernah menduduki kursi legislatif di Sulut dan pada periode 2005-2010 ia menjadi Wakil Walikota Tomohon mendampingi Jefferson Rumajar yang berasal dari Golkar. Pada saat mencalonkan diri sebagai wawali, sebenarnya ia masih aktif di PKPB. Baru kemudian ia pindah ke Partai Demokrat dan menduduki posisi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulut sejak tahun 2009.

Keterpilihan Syennie Watoelangkouw sebagai Ketua Partai Demokrat Sulut dikarenakan ia dinilai berhasil meningkatkan suara PD di Sulut pada Pemilu Legislatif 2009, yang kemudian membawa kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden.

Syennie adalah sosok perempuan yang cukup dikenal di Sulut karena kiprah politiknya. Ia bersuamikan Willy Smith, seorang Belanda yang bekerja sebagai peneliti flora dan fauna. Suami Syennie adalah sosok yang bergelut dengan pelestarian lingkungan. Bahkan Syennie dianggap seorang populis:

"Masyarakat bisa merasakan bantuan keluarga Smith-Watoelangkow lewat peran aktifnya dalam pelestarian lingkungan hidup di Sulawesi Utara secara nyata, dan semuanya demi keselamatan dan kesejahteraan anak cucu dan cicit kita nanti ...Ini bukti bahwa ketokohan seorang LSW yang dikenal arif, bijaksana, punya kapabilitas, integritas tinggi, jujur dan penuh kasih, bisa membawa pembangunan di Sulut lebih maju lewat pendidikan gratis," ujar Venny Rintjap, salah satu kader Partai Demokrat Minahasa Selatan.

Kemampuan LSW dalam menakhodai dan *me-manage* Partai Demokrat sehingga bisa sebesar sekarang ini, juga menjadi bukti betapa tangan dinginnya itu bisa mengorbitkan banyak legislator di dewan kabupaten/kota maupun provinsi. Dan paling penting adalah bagaimana LSW bisa memenangkan pasangan presiden SBY-Boediono pada Pilpres lalu. "(dikutip dari http://poskomanado.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=5609&Itemid=1).

Disamping itu suami Syennie juga dikenal aktif mendorong masyarakat Tomohon untuk menjadikan kota mereka sebagai penghasil gula merah di tingkat global.

F.1.2. Motivasi Kandidat

Pada awalnya ambisi Syennie adalah menjadi calon gubernur di Sulut periode 2010-2015. Tetapi pencalonan Syennie ini menjadi hiruk pikuk karena muncul kubu yang kontra terhadapnya. Awalnya Syennie menjadi satu-satunya calon gubernur yang diusung oleh Partai Demokrat Minahasa Utara. Rudy Kalulu, pendukung Partai Demokrat asal Minahasa Utara selalu memberikan dukungan kepada Syennie. Menurut Wakil Ketua I bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Demokrat Sulut John Dumais, Syennie telah berhasil membesarkan partai ini di Sulut dan sepantasnya untuk dicalonkan sebagai gubernur Sulut dari Demokrat. Syennie dianggap oleh pendukungnya sebagai figur yang sudah terbukti kredibilitas dan popularitasnya.

Dukungan juga datang dari 12 PAC (Pimpinan Anak Cabang) Partai Demokrat, Minahasa Selatan. Mereka meyakini, hanya LSW yang bisa mensejahterakan rakyat

Sulawesi Utara, karena terbebas dari berbagai kasus korupsi. Menurut Venny Rintjap, LSW adalah satu-satunya calon gubernur perempuan yang mampu memimpin tanpa korupsi apalagi segala sesuatu yang diperbuat oleh LSW untuk daerah tidak sekali pun menggunakan uang negara.

Namun akhirnya DPP PD memutuskan bahwa calon Demokrat dalam pemilukada gubernur di Sulut adalah Sarundayang, sehingga terpaksa Syennie harus mengurungkan niatnya untuk maju kandidasi sebagai gubernur. Belakangan DPP PD meminta Syennie untuk tetap maju dalam pemilukada di Tomohon.

Secara normatif, Syennie mengatakan bahwa tujuan mencalonkan diri adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, penguatan ekonomi, pemberdayaan perempuan. Namun yang jelas adalah bagaimana ia tetap bisa mempertahankan bahkan memperluas kekuasaan yang semula sebagai wakil walikota, lalu maju sebagai walikota.

Sementara keinginan untuk maju dalam kandidasi, bagi Keluarga Syennie mendukung keinginannya untuk maju karena selama ini ia memang telah menekuni area politik. Namun ia tetap meminta ijin dari suami dan juga anaknya. iaia

F.1.3. Modal Sosial

Berbagai aktivitas sosial yang dilakukan oleh Syennie mulai dari jabatannya sebagai Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Tomohon, penggiat lingkungan, dan juga kepedulian suaminya terhadap penyelamatan lingkungan adalah

modal sosial yang ia miliki. Bahkan usaha suaminya, telah membawa Tomohon sebagai 10 Kota penghasil gula aren yang ramah lingkungan. Dukungan dari keluarga juga merupakan modal sosialnya. ia

Selain itu posisinya sebagai wakil walikota juga modal yang cukup penting, ia ia yakin bahwa masyarakat akan melihat karyanya selama menjabat wakil walikota. Syennie juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kepulauan Nusa Utara, bahkan ia dijuluki Srikandi Kawanua yang peduli pada lingkungan, peduli pada rakyat dan berbaur dengan masyarakat.

F.1.4. Modal Politik

Syennie adalah Ketua DPD Partai Demokrat di Sulut, sehingga ia punya modal politik berupa pengaruh di DPC Partai Demokrat. Walau begitu ia sempat gagal untuk maju di pemilihan gubernur karena proses politik yang terjadi di internal Demokrat. Akhirnya ia disarankan oleh DPP Partai Demokrat untuk maju pemilihan walikota di Kota Tomohon. Menurut Marten M Manoppo, Ketua DPC Partai Demokrat di kota Tomohon,

"....Bu Syennie juga kan di Tomohon sebagai wakil walikota, kemudian dari *track record*-nya Bu Syennie, beliau memang cukup memperhatikan tentang lingkungan hidup, ya. Pernah dapat Kalpataru. Kemudian juga ada beberapa [penghargaan] dari beberapa organisasi kemasyarakatan, sosial juga ia sebagai ketuanya kemudian ia di yayasan-yayasan yang peduli lingkungan juga iasebagai ketua walaupun nanti setelah ia jadi [menang pemilukada] ia harus mundur karena aturan. Jadi keberadaan Bu Syennie, di Tomohon ini sudah sangat berperan, justru banyak masyarakat yang susah itu dibantu dengan beasiswa. Oleh karena itu, saya yang sebenarnya pemegang hak untuk mencalonkan, sebagai ketua DPC, walaupun sebenarnya saya berkeinginan, saya punya hak untuk diri saya sendiri saya calonkan tetapi yang saya berpikir bahwa karena Walikota, Pak Jefferson teman baik saya juga, satu daerah, satu jemaat kalau kita di sini istilahnya kalau Kristiani, saya tidak mau lagi bersaing dengan ia karena sangat sadis. Ia pernah gusur tempat saya cuma karena bersaing, itu tempat saya kena gusur oleh karena itu saya berpikir, ah, ibu aja deh arena ibu sudah wakil, wakil walikota. Jadi jatuh ke ibunya karena pertama ia itu pengurus partai yang kedua memang figur beliau di Tomohon ini ia sangat bisa dijual, justru saat ini dengan kasus, walikota dan ia berpeluang besar untuk menang, menjadi Walikota Tomohon..."

(Wawancara dengan Marten, tanggal 23 Juli 2010)

Adalah hal yang mudah bagi Syennie untuk membangun jejaring di internal parpol karena kedudukannya sebagai ketua partai. Modal politik lainnya yang dimilikinya adalah posisinya sebagai wakil walikota periode 2004-2009. Kedua posisi strategis ini memberi keuntungan untuk mendapat dukungan dari mesin partai dan simpati dari para pemilih. Pengalaman politiknya tersebut merupakan modal politik penting yang ia miliki.

Modal politik lainnya ialah dukungan dari Partai PDIP sehingga ia bisa mendapatkan Jemmy Wawengkang sebagai pasangan wakilnya, setidaknya hal ini telah memberikan kontribusi suara bagi Syennie,

"...jadi PDI Perjuangan sama Partai Demokrat kalau kita hitung di atas kertas sudah ada sekitar 20 ribu berarti 30% sudah ada...%, ungkap Marten.

Bermodalkan suara 30% secara undang-undang pasangan ini sudah bisa memenangkan kontestasi.

F.2. Proses Kandidasi

F.2.1. Persiapan Kandidasi

Kendati Syennie pernah menjadi Wakil Walikota Tomohon, dalam pencalonan di pemilukada inipun ia tetap meminta ijin kepada suami,

“Ya meskipun saya sebelumnya menjabat sebagai walikota, namun saya tetap meminta ijin kepada suami dan tidak masalah..”

Motivasi personalnya untuk mengikuti kandidasi ialah ingin meneruskan apa yang telah dirintis Walikota Tomohon sebelumnya,

“...pemberdayaan ekonomi masyarakat Tomohon yang menjadi prioritas saya dalam pemilukada. demikian halnya saya ingin menimplementasikan *gender mainstreaming* diwilayah ini. Memberdayakan perempuan tentunya akan menjadi titik perhatian saya ketikananti saya terpilih..”

Sebagaimana yang kita ketahui pada awalnya keinginan Syennie adalah menjadi kandidat gubernur di Sulut, namun karena perintah DPP Partai Demokrat bahwa di Sulut hanya mengusung Sarundayang, pada akhirnya ia harus merelakan untuk mencalonkan diri di Tomohon,

“Saya awalnya kan mau maju jadi Gubernur, tetapi karena DPD Sulut mengajukan Sarundayang dan atas permintaan DPP, maka saya disuruh oleh DPP untuk maju di Kota Tomohon...”

(Wawancara dengan Syennie tanggal 23 Juli 2010).

F.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

iaPencalonan Syennie ternyata menimbulkan konflik di tubuh DPC Partai Demokrat. Bahkan salah satu Ketua DPC Partai Demokrat di Tomohon menyatakan bahwa,

"...Jadi gini, yang pasti waktu proses penetapan rekomendasi, ya jadi masih rekomendasi, kita kan harus mendapat rekomendasi DPP, kebetulan yang ketua DPP lama, Pak Hadi Utomo sangat dekat dengan Ibu Syennie. Jadi cuma Tomohon yang mungkin tidak melalui proses tim 9. Yang sebenarnya harus komplain kan saya... Karena Bu Syennie pada saat itu ia Ketua DPD yang haknya sebenarnya itu kan gubernur atau wakil gubernur kan karena ia provinsi. Nah, cuma karena, Pak Sby sama pak Hadi Utomo sudah mengeplot pak Sarundayang untuk provinsi sehingga mungkin ia ada keistimewaan, ada kekhususan untuk di Tomohon *ndak* ikut prosedur tim 9..."

(wawancara dengan Marten M Manoppo, tanggal 23 Juli 2010)

Keinginan Syennie menimbulkan ketidaksukaan di jajaran di DPC Partai Demokrat Kota Tomohon, yang kebetulan ketuanya dipegang oleh Marten. Syennie adalah sosok yang dekat dengan Hadi Utomo. Pada saat penetapan rekomendasi sebenarnya di jajaran Partai Demokrat sedang dalam kondisi transisi. Sebelum akhir pendaftaran di KPU terjadi pergantian ketua umum di tubuh DPP Partai Demokrat. Marten yang menjabat sebagai koordinator pemenangan Anas sebenarnya memiliki peluang untuk maju sebagai kandidat;

"... ibu sebagai ketua DPD tidak sejalan dengan saya pada saat itu, ibu berpihak kepada Marzuki Ali..."

Menjelang pergantian Ketua Umum di Partai Demokrat, di Sulawesi Utara telah terjadi gesekan antar faksi, sebagaimana yang dituturkan Martin,

"... itu sudah terjadi perang dingin sebenarnya pada saat itu, karena saya berhasil untuk menggaet teman-teman di seluruh Sulawesi itu ada 11 dari 15 cabang, 11 ada di saya, ibu tinggal 4, plus ia jadi 5. Sebelas di saya, jadi 16 semua. Kalau saya mau menghambat bisa saja, tetapidemi kebesaran partai yah saya tidak komplain..."

(Wawancara dengan Marten, tanggal 23 Juli 2010)

Marten menyadari bahwa membesarkan partai jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi maka lebih baik ia mengurungkan niatnya untuk maju ke pemilukada. Baginya ia masih memiliki peluang politik dalam pemilukada mendatang,

"...saya lebih berpikir partai saya masih muda juga untuk ukuran politik ya, bukan muda ukuran usia, muda dalam politik, dalam pemahaman umur 40-49 itu matang-matangnya dalam politik belum tua ya. Nah, itu lah saya berpikir *the next time* lah..."

Sikapnya ini ia tunjukkan dengan kesungguhannya untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Syennie. Meskipun dari kuantitas, suara dari Partai Demokrat sudah cukup untuk mengajukan calon, tetapi untuk kepentingan kemenangan Syennie, Partai Demokrat mendekati ke PDIP untuk membangun koalisi karena mereka harus menghadapi calon dari Golkar yang cukup diunggulkan dalam setiap survei. Partai Demokrat menempati nomor dua dalam Pileg Tomohon 2009, baru diikuti oleh PDIP. Karena posisi PDIP yang berada di bawah Partai Demokrat ini, maka PDIP menyadari hanya mungkin menempatkan jagonya di posisi wakil walikota. PDIP sendiri secara jumlah sebenarnya sangat cukup untuk mencalonkan sendiri, sebagaimana Partai Demokrat. Akan tetapi menyaksikan kekuatan Golkar yang dominan di Tomohon memaksa PDIP dan Demokrat untuk berkoalisi, karena kalau mengajukan calon sendiri-sendiri semua bisa kalah. Rumor yang berkembang saat itu bahwa Golkar hanya tinggal menunggu pelantikan saja. Namun dengan bergabungnya dua kekuatan PDIP dan Demokrat rivalitas antar kandidat semakin kuat.

".....Jadi dari awal kami, baik PDIP maupun Demokrat, kalo di aturan undang-undang kami dapat empat kursi. Jadi bisa mengusung sendiri, baik Demokrat sendiri maupun PDIP. Kami sudah membangun komunikasi politik dengan beberapa calon waktu yang lalu tapi tidak terbangun komunikasi politiknya. ...[juga] dengan calon independen. Kami sudah pernah membangun komunikasi dengan Pak Jonny Lutuweneke, ia kepala diklat guru di Provinsi Sulawesi Utara, insan *civil* vertikal dibawah kementerian pendidikan tapi akhirnya ia tidak diberi ijin oleh menteri. Sementara pentahapan kan sudah diberikan jadi kami juga membangun komunikasi dengan Golkar dalam pentahapan sekarang tidak terbangun. Akhirnya kami memilih Ibu Syennie, karena kami berfikir bahwa, namanya kami bertarung di dalam politik tentu harus memenangkan pertarungan politik.."

(Wawancara dengan Paulus Sombel, pengurus DPC PDIP Tomohon, tanggal 25 Juli 2010)

Dalam menentukan calon di papan dua, gesekan politik di PDIP pun terjadi. Pilihan antar kader partai atau di luar kader partai merupakan pilihan yang sulit. Namun bagaimanapun

pemilukada tetap membutuhkan elektabilitas kandidat. Ini sebagaimana dikatakan Paulus Sombel,

"...Jadi waktu itu kita calon dari independen sudah gugur, calon dari Golkar tidak terbangun. Calon dari Golkar dua pak, selain *incumbent* ini. *Incumbent* ini sudah jauh, tapi tidak terbangun. Dan kemudian yang kedua mantan Ketua Golkar Tomohon yang menjadi Ketua DPR Provinsi, Toni Kaunang. Tapi pasangannya tidak *tune* dengan kita. Jadi tidak terbangun [koalisi]. Karena sudah mepet untuk pendaftaran waktu itu kita memilih maju dengan kader partai, kita kalah. Karena kita harus ada estimasi, harus ada strategi. Kalo kita... ya bolehlah calon, kita juga kan kandidat waktu itu. Kandidat dari partai..."

(Wawancara dengan Paulus Sombel, pengurus DPC PDIP Tomohon, tanggal 25 Juli 2010)

Namun akhirnya partai sendiri menyadari bahwasanya bila PDIP mengajukan kadernya, belum tentu bisa memenangkan kompetisi,

"...waktu itu lima orang, itu dijaring dari pemilihan tingkat kelurahan, dijaring sampai tingkat kecamatan sampai di tingkat kota. Saya masuk [pencalonan], tapi saya pikir kemungkinan menang kecil. Karena kita ada hitung-hitungan secara politik. Buat apa kita bertarung tapi harus kalah..."

(Wawancara dengan Paulus Sombel, pengurus DPC PDIP Tomohon, tanggal 25 Juli 2010)

Akhirnya ada kesepakatan koalisi di internal partai bahwa PDIP menunjuk Jimmy Stefanus Wewengkang sebagai pasangan Syennie, yang kemudian pasangan ini disebut dengan panggilan LSW-JSW. Jadi yang memutuskan wakil dari Syennie adalah kebijakan PDIP. Dalam kesepakatan tersebut diatur mengenai *sharing* pendanaan, dimana walikota 60% dan wakil walikota 40%.

Pembangunan koalisi antara PDIP dengan Partai Demokrat sesungguhnya merupakan fenomena yang langka terjadi di perpolitikan Indonesia. Partai Demokrat dengan PDIP di Indonesia itu ibarat air dengan minyak. Persuasi dari pihak Partai Demokrat terus menerus akhirnya meluruhkan PDIP untuk menerima pinangan dari Demokrat,

“...di Tomohon saya panggil ketuanya. Saya ngomong ama ia, Ibu Voni, demi untuk berubah Kota Tomohon, kemajuan Kota Tomohon demi juga untuk Bu Syennie sebagai perempuan bisa memimpin Kota Tomohon ini lupakan dan tanggalkan dulu perbedaan antara merah dan biru. Oke, urusan-urusan [ketidakcocokan antara PDIP dan Partai Demokrat] itu pusat, [sedangkan] kita daerah, mari kita bergandengan tangan. Dan ia mau. Itu baik sekali...”

(Wawancara dengan Martin, tanggal 23 Juli 2010)

Untuk kepentingan kemenangan maka dibentuk TS (tim sukses) dari Partai Demokrat dan PDIP. Masing-masing mengirimkan tim pemenangannya, tetapi di bawah koordinasi Partai Demokrat. Upaya konsolidasi tampak ketika peneliti menghadiri rapat konsolidasi TS dan para petinggi partai di villa milik Jimmy Stefanus Wewengkang. Pada saat itu sedang dilakukan survei pemilih sampai ke setiap ranting.

Dalam rangka koordinasi antar tim dilakukan pembagian kerja wilayah berdasarkan kemenangan yang diperoleh pada pemilu legislatif. Artinya wilayah yang dimenangi PDIP (seperti di di Tomohon Tengah) dalam pileg harus digarap oleh PDIP, sebaliknya wilayah dimana Partai Demokrat menang (Tomohon Utara) maka wilayah tersebut menjadi garapan dari Partai Demokrat.

Upaya konsolidasi ketika kampanye putaran terakhir calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Linneke Syennie Watoelangkow dan Jemy Stefanus Wewengkang, yang dilaksanakan di stadion Parasamya Walian Tomohon Kamis 29 Juli 2010 sangat menghebohkan karena tidak disangka para pendukung kedua calon tersebut dapat menguasai kota Tomohon selama beberapa jam sehingga membuat arus lalu lintas macet total. Menurut salah satu aparat keamanan yang di tugaskan di lokasi kampanye tersebut, masa pendukung yang hadir pada kampanye JSW-LSW

sekitar 12.000 orang. Kampanye tersebut menghadirkan juru kampanye dari pusat yang adalah anggota DPR RI Oly Dondokambey, serta beberapa jurkam provinsi yakni Djendri Keintjem dan Zuz Sualang Pangemanan.

Cara lain untuk pemenangan adalah dengan merombak dan mengecat mobil angkutan umum, yang berkeliling ke desa-desa, dalam rangka *branding awareness* kepada para pemilih. Di setiap kecamatan ditaruh satu mobil yang dibungkus dengan iklan LSW-JSW dimana mobil tersebut tidak digunakan untuk mengangkut penumpang tetapi sekedar bertugas untuk berkeliling. Dikatakan bahwa hal itu sudah sangat mempengaruhi masyarakat, dimana mereka menjadi tahu dan hapal wajah dari LSW-JSW, bentuk iklannya dan lainnya.

Setidaknya ada 4 pasangan yang maju dalam pemilukada di Tomohon: pertama, Jefferson Rumajar-Jimmy Eman; kedua, Linneke Syennie Watoelangkow-Jimmy Wewengkang; ketiga, Caroll Senduk-Agust El Paat; keempat, Jeffry Motoh-Johny Mambu. Dari keempat pasangan, sebagai kompetitor yang paling potensial bagi pasangan LSW-JSW adalah Jefferson Rumajar-Jimmy Eman. Pasangan ini diusung oleh Golkar yang sekaligus saat itu menjadi *incumbent* di Tomohon.

F.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pencalonan Syennie-Jimmy relatif tidak bermasalah di KPU, sehingga dalam pendaftaran tidak ada friksi di internal Demokrat. Namun relasi antara kandidat dengan KPU menegang ketika proses penghitungan suara, bahkan diikuti gugatan ke MK. Dari hasil rapat pleno KPU diperoleh

rekapitulasi perhitungan suara, pasangan calon Jefferson Rumajar dan Jimmy Eman meraup 21.201 suara atau 37,77% dari 58.025 pemilih yang menggunakan haknya. Pasangan nomor tiga ini menang tipis atas saingan terdekatnya, Linneke Syennie Watoelangkow dan Jimmy Wewengkang. Perbedaannya hanya 2,53% saja. Dengan raihan suara sebanyak 19.875, Syennie-Wewengkang hanya memperoleh 35.24%. Di tempat ketiga ada pasangan dari jalur perseorangan, Caroll Senduk dan Agust El Paat dengan raihan 10.964 suara atau 19.53%. Perolehan suara paling sedikit didapat pasangan Jeffry Motos dan Johny Mambu. Pasangan nomor urut empat ini memperoleh 4.187 suara atau hanya 7,45%. Namun pada akhirnya keputusan MK, memerintahkan adanya pemungutan suara ulang di Tomohon.

G. MEITY OCHOTAN

G.1. Profil Kandidat

G.1.1. Biografi

Meity Ochotan adalah seorang perempuan berdarah campuran etnis Cina dan Minahasa, tinggal di Desa Purworejo, Kecamatan Modayag (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur / Boltim), yang penduduknya banyak orang Jawa. Kampung ini adalah kampung para buruh migran pada jaman Jepang duu yang dipekerjakan sebagai pemetik cengkeh, kopi atau sebagai buruh perkebunan, yang diangkut oleh pemerintahan Jepang dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selain penduduknya dominan orang keturunan Jawa, di kecamatan ini juga banyak

tinggal orang Gorontalo, karena memang kecamatan ini berbatasan dengan Provinsi Gorontalo.

Meity adalah sosok perempuan yang berkarir di bidang publik. Ia bekerja sebagai aparatur pemerintah di Provinsi Gorontalo. Berbagai tingkatan dan jenjang untuk mencapai jabatan tertentu telah ia lalui, mulai dari kepala seksi sampai kepala bidang. Ia pernah memegang berbagai jabatan dari mulai dinas teknis sampai ke Bappeda Provinsi Gorontalo. Di Bappeda ia sudah empat kali dilantik, mulai dari Kepala Sub Bidang Laporan, Kepala Sub Bagian Anggaran, Kepala Bagian Kerjasama dan Pembangunan, Kepala Bagian Perencanaan dan Pembangunan.

Berdasarkan pada pengalamannya di Bappeda tersebut, ia meminta untuk dipindahkan ke Inspektorat Provinsi Gorontalo. Mengingat dirinya memiliki pengalaman di pelaporan, evaluasi serta perencanaan, maka permintaannya untuk ditempatkan di Inspektorat dikabulkan,

"...dari atasan mungkin melihat kinerja saya, permintaan tersebut dipenuhi dan dipindahkan ke Inspektorat Provinsi Gorontalo. Karena lewat inspektorat ini saya bisa mengevaluasi akan bisa menerapkan pengalaman."

(Wawancara dengan Meity Ochotan, tanggal 24 Juli 2010)

Setelah bekerja di inspektorat Meity ditempatkan di Setwan Dewan DPRD Provinsi Gorontalo.

Suami Meity sangat mendukung pencalonan ini meskipun ia tahu bahwa isterinya harus mengorbankan jabatannya dengan pensiun dini. Anak-anaknya juga memberikan dukungan. Meity memiliki tiga anak yang telah duduk di bangku kuliah. Anak pertama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), sedangkan anak ke

dua kuliah di Fakultas Kedokteran universitas yang sama. Anak yang terakhir kuliah di UNDIP. Suaminya berasal dari Sumatera Utara yang beretnis Batak yang bekerja sebagai pejabat di Provinsi Gorontalo.

G.1.2. Motivasi Kandidat

Pengalaman sebagai pejabat publik di Provinsi Gorontalo mendorong Meity iauntuk maju dalam pemilukada. Pada awalnya Meity belum menentukan sikap apakah mau maju ke “papan satu” atau “papan dua”, sebagaimana yang ia katakan:

“...awalnya saya belum punya wacana apakah papan satu atau papan dua. Tetapi kemudian saya punya niat karena saya punya modal pengalaman kerja. Saya niat maju belum memutuskan lewat partai mana, kemudian saya kumpulkan orang kampung dan tokoh-tokoh masyarakat kampung untuk menyatakan niat saya. Setelah mereka putuskan untuk mendukung saya, kemudian saya pasang baliho. Saya tidak mencari siapa yang melamar saya apakah saya papan satu atau papan 2...”

(Wawancara dengan Meity Ochotan, tanggal 24 Juli 2010)

Ambisinya untuk maju selain dikomunikasikan dengan keluarga juga telah disampaikan kepada beberapa tokoh serta tetua di kampungnya (Modayag). Setelah memperoleh dukungan secara moril, akhirnya ia mengekspresikan keinginannya melalui pemasangan baliho tanpa menyebutkan keinginannya sebagai orang yang maju pada papan satu atau papan dua. Keputusannya ialebih didasarkan pada ambisinya untuk bisa masuk ke dalam arena kontestasi politik di pemilukada.

G.1.3. Modal Sosial

Pengalaman bekerja nampaknya menjadi pijakan awal kandidat untuk masuk ke arena kontestasi. Awal Meity bersentuhan dengan politik adalah ketika ia bekerja di Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo, sebagaimana yang ia nyatakan:

"...pengalaman di dewan saya ikuti, saya pelajari saya ikuti perkembangan, dan dari situlah saya berpikir saya mau maju dengan bermodalkan pengalaman itulah..."

Artinya pergaulannya dengan para politisi di dewan itulah yang mengawali Meity bisa memahami masyarakat terutama masyarakat miskin.

Meity memiliki modal sosial yakni memiliki basis massa dari masyarakat Kristen dan keunggulan sebagai orang yang berdarah Minahasa dan Cina, sehingga ketika membangun jejaring dengan masyarakat beragama Kristen dan etnis Cina-Minahasa jauh lebih mudah. Apalagi pemilih di Boltim kebanyakan adalah perempuan.

G.1.4. Modal Politik

Meity bukan dibesarkan dalam keluarga politisi, sehingga untuk mencapai ambisinya ia harus belajar secara otodidak ketika ia bekerja di sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Keluarganya kebanyakan adalah petani. Oleh karena Meity bukan datang dari politisi tetapi adalah seorang pejabat publik sehingga dukungan politik dari partai tidak ia miliki sama sekali apalagi pengalaman politik tidak pernah diperoleh seorang Meity. Justru modal politik yang tidak dimiliki oleh Meity ini menjadi sebuah kelemahan ia untuk mendapatkan dukungan suara pemilih. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sumardiyah, Wakil Ketua DPD Golkar Boltim dan Ketua DPRD dari Golkar di Boltim,

".. Bu Meity ini tidak dikenal, bukan politisi, bukan LSM dan belum pegang SKPD [satuan kerja perangkat daerah], sehingga kurang memiliki nilai jual di pemilih.."

Inilah yang menjadi kelemahan dari pasangan Sehati (Sehan Mokoapa Mokoagow dan Meity Ochotan Mamonto)

G.2. Proses Kandidasi

G.2.1. Persiapan Kandidasi

Berebak dorongan dari keluarga, tokoh masyarakat dan hampir satu bulan didesak masyarakat untuk memasang baliho, akhirnya Meity memasang baliho sambil mencari kendaraan untuk maju dalam pemilukada. Meity Ochotan tidak pernah menyatakan diri sebagai kandidat di papan satu atau dua, artinya bahwa pemasangan baliho hanyalah sebagai cara untuk memasarkan dirinya supaya dilamar atau dipinang oleh kandidat lain atau partai tertentu. Nyatanya memang cara ini sangat efektif untuk mencari pasangan calon. Salah satunya adalah Sehan Mokoagow yang maju melalui Golkar sebagai kandidat bupati kebetulan sedang mencoba untuk mencari calon wakil bupati melalui timnya. Dan salah satu yang menjadi calon yang diinginkan oleh Sehan adalah Meity Ochotan.

Waktu itu, ketika Meity sedang berpikir untuk mencari kendaraan politik, tiba-tiba tim dari Sehan datang menghubungi Meity untuk menjadi pasangan Sehan. Setelah melampaui proses negosiasi akhirnya disepakati oleh kedua pihak untuk berpasangan dengan panggilan populer Sehati (Sehan-Meity). Kesepakatan yang diambil diantaranya tidak akan ada seleksi lagi sebagaimana semestinya tahapan yang harus dipenuhi di Golkar. Komitmen yang dibangun di antaranya: kontribusi masing-masing calon perbandingannya 60% calon bupati, dan 40% wakil bupati. Dengan latar belakangnya yang birokrat Meity menyadari bahwa untuk memenuhi komitmen 40% terlalu berat. Akhirnya disepakati Meity memberikan kontribusi sebesar 30%.

Lazimnya pemilihan pasangan calon wakil bupati diserahkan kepada calon papan satu, artinya bukan partai yang memilih. Menurut Sumardiah Modeong, Wakil Ketua Golkar Boltim,

"...yang pilih papan dua adalah dari calonnya. Ibu Meity kan birokrat. Tidak ada rapat pleno di Golkar untuk menentukan pasangan nomor dua. Tahu-tahu ketua ambil ibu Meity. Mungkin ia sudah tahu elektabilitasnya Bu Meity, seorang birokrat di Gorontalo. Paketnya sudah ia pilih baru kemudian dihadirkan di pleno Golkar. Sebelumnya ia sudah melirik beberapa calon diantaranya Pak Sunardi, tetapi karena Pak Sunardi tidak bersedia di papan dua maka kemudian diputuskan Pak Sehan menjanging bakal kandidat wakil bupati..."

(Wawancara dengan Sumardiyah Madeong, 25 Juli 2010)

Setidaknya sebelum menentukan calon wakil bupati, Sehan memang sejak awal telah berketetapan untuk memilih pasangan perempuan. Setidaknya ada 7 nama pelamar sebagai kandidat wakil bupati, dua diantaranya perempuan. Sebetulnya perempuan yang diinginkan pertamakali untuk mendampinginya adalah Suherni Suarno, salah satu Ketua Fraksi Golkar di DPRD Boltim. Namun Suherni tidak bersedia karena ia merasa memiliki komitmen dengan konstituennya yaitu ia baru bekerja kurang dari satu tahun sebagai anggota dewan dan belum berbuat apapun untuk konstituennya. Akhirnya ia hanya bersedia membantu sebagai tim sukses Sehan Mokoagow. Kemudian Sehan memilih Meity sebagai alternatifnya.

Namun Sehan menginginkan berpasangan dengan Meity dengan cara yang lebih elegan, bukan ia yang membutuhkan, karena dalam pandangannya berpasangan dengan rumput, dengan tiang listrikpun ia pasti menang, demikian kata Sehan. Keyakinan berlebih Sehan inipun diamini oleh Ibu Sumardiah yang menyatakan bahwa: Sehan selalu menyatakan bahwa ia sudah menang, bahwa kemenangan sudah di depan mata. Bahkan dalam

observasi di kampanye tertutup di Desa Purworejo, ketika ada kader calon lain “mbalelo” ke kubunya dengan arogan Sehan menyatakan bahwa, “*lebih baik ikut calon yang pasti menang..*”.

Sedangkan keputusan Sehan untuk mengambil Meity sebagai pasangannya dilandasi oleh beberapa pertimbangan: pertama, Meity sebagai representasi perempuan; kedua, Meity adalah “orang gunung” sehingga bisa menjadi komplemen Sehan yang notabene “orang pesisir”. Menurut pandangan Sehan Meity adalah calon yang “sangat bahkan terlalu optimis memenangi kontestasi”; ketiga, calon dari Golkar ternyata elektabilitasnya rendah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Ibu Sumardiah, Ketua DPRD Bolmong Raya:

“...aturan di Golkar adalah melakukan survei dulu untuk melihat kandidat. Pada saat itu ada 5 orang yang punya kans untuk jadi calon bupati. Tetapi dari hasil survei ketika orang luar Golkar tingkat elektabilitasnya lebih dari 20%, maka dipakai, tetapi kalau kurang dari 20% baru orang dalam Golkar sendiri...”

(Wawancara dengan Sumardiah Modeong, 25 Juli 2010)

Jadi pertimbangan memilih pasangan bukan sekedar persoalan kecocokan tetapi juga pertimbangan elektabilitas, sejauhmana pasangan akan memberikan suplemen bagi pendulangan suara pemilih. Oleh sebab itu kriteria memiliki massa juga menjadi bahan pertimbangan Sehan untuk memilih Meity.

Pertimbangan lainnya dalam pemilihan pasangan adalah kesediaan untuk *sharing* dana. Meity sebagai pasangan Sehan harus memberikan kontribusi dana sebesar 30% dari dana keseluruhan untuk pencalonan dan kebutuhan kampanye.

Pengalamannya sebagai birokrat setidaknya telah membawanya pada pemahaman gender yang cukup kuat bagi Meity. Keterlibatan perempuan dalam pemilukada dimaknai oleh Meity sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif perempuan. Hal ini dikatakan oleh Meity bahwa,

"....punya peranan penting dalam pembangunan. Dari dulu sudah ada peran gender tetapi belum begitu disosialisasikan kepada perempuan sehingga disebutkan di UUD 45 disebutkan partisipasi perempuan. Jadi sudah ada penguatan-penguatan gender. Bahwa partisipasi dan penguatan perempuan itu penting, wanita punya hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Pada era ini wanita dinomorduakan, yang penting bagaimana perempuan punya karya dalam pembangunan. Penguatan-penguatan perempuan sudah ada di dewan, dan eksekutif.."

(Wawancara dengan Meity Ochotan, tanggal 24 Juli 2010)

Namun motif gender ternyata tidak melatarbelakangi keinginan Meity untuk maju sebagai kandidat,

"..tidak ada pemikiran bahwa saya perempuan maka saya maju, modal saya adalah pengalaman,...."

la berpikir bahwa budaya patriarki sama sekali tidak menjadi halangan bagi perempuan untuk mengikuti kontestasi politik di pemilukada ini. Namun pemahamannya akan gender ketika sebagai birokrat itulah yang menjadi salah satu isu yang ditawarkan kepada pemilih perempuan. Menurut Meity:

"....Saya tidak mengesampingkan adat tetapi mengikuti perkembangan sekarang perempuan sudah maju, tetapi di Boltim harus kerjakeras mengurangi hambatan adat bukan saya mengesampingkan adat, tetapi berdasarkan perkembangan sekarang perempuan banyak yang telah menyelesaikan pendidikan lebih cepat daripada laki-laki sehingga perempuan harus memiliki partisipasi aktif. Kelebihan perempuan ialah memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga dan karir. Dalam segala hal perempuan punya peran penting dalam pembangunan. Saya sebagai wanita karir yang insya Allah nomor dua di Boltim saya akan tetap mengedepankan peran gender di pembangunan...."

(Wawancara dengan Meity Ochotan, tanggal 24 Juli 2010)

Untuk itu pada setiap kampanye tertutup dan menghadiri pertemuan dari kaum perempuan Meity selalu memberikan penyadaran kepada kelompok perempuan akan peran

serta dalam pembangunan dan bagaimana perempuan memaknai dirinya sebagai warga daerah memiliki tanggung jawab pada Boltim.

G.1.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Partai pengusung pasangan Sehan Mokoagow dengan Meity Ochotan secara resmi adalah Golkar. Akan tetapi partai pendukung lainnya seperti PAN, PBB, PKPB, Gerindra, PKS melalui pimpinan partainya menyatakan berkoalisi dengan Partai Golkar.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk memenangkan pasangan Sehati ini ialah dengan pembentukan tim pemenangan oleh calon. Sehan memiliki tim pemenangan sendiri demikian juga Meity juga memiliki tim sukses sendiri. Menurut Suherni Suarno sebagai anggota tim pemenangan menyatakan,

"...kita mencari itu bukan hanya yang dari kalangan atas, ya, kita mencari sampai ke rumput-rumputnya, ya. Biasanya caranya ya kita keliling. *Sharing-sharing* sama masyarakat. Ini makanya kayak tim pemenangan Sehati. Baik itu calonnya bupati itu, kebanyakan kampanyenya secara dialogis. Di luar itu kita tim menyebar ke tiap-tiap pelosok desa. Komdes di Golkar digunakan semua. Komdesnya itu yang paling penting itu ketua-ketua PKK itu kita rangkul semua. Ketua PKK yang di desa itu kan dari Golkar. Karena kita desanya kan nggak terlalu berjauhan. Lalu di setiap desa itu kita ada tim, jadi cara penyebarannya itu kita kondisikan setiap desa, setiap desa sekian, caranya begitu..."

(Wawancara dengan Suherni Suarno, tanggal 24 Juli 2010)

Dukungan dari berbagai partai politik tidak selalu menguntungkan karena semakin banyak dukungan partai akan semakin mempersulit dalam koordinasinya. Hal ini diakui oleh Suherni Suarno,

"..... koordinasinya juga sedikit susah ya, karena calonnya banyak, ada empat, tapi kita sendiri dari tim pemenangan sekarang itu ada trik-trik tersendiri...."

Tim sukses setiap partai pendukung diberi peluang untuk merekrut anggota tim sendiri, tetapi Golkarlah yang menjadi koordinator dari setiap tim sukses partai,

".....artinya bukan kita kuasai, kita Sehati kan, kita satukan persepsi artinya kebersamaan jadi kita berikan peluang kepada partai-partai lain yang mendukung sehati itu merekrut tim-tim...."

Untuk kepentingan memperlancar koordinasi maka tim pemenang Golkar selalu berkoordinasi dengan partai lainnya.

Bagi Golkar, komitmen partai pendukung itulah yang dibutuhkan untuk kemenangan Sehati ini. Pendekatan pada ketua partai sudah dilakukan oleh Sehan, sehingga lima partai politik bersedia memberikan dukungan kepada calon di Golkar. Selain itu semua anggota DPR dan DPRD Provinsi memiliki kewajiban untuk membantu para calon bupati/wakil bupati di dapilnya. Dukungan Aburizal Bakrie diberikan juga kepada para kader Golkar yang maju dalam pemilukada dalam bentuk bantuan dana, Sumardiah mengatakan jika hasil survey dari LSI bagus maka calon akan dibantu oleh DPP Golkar.. Bahkan menurutnya peluang pasangan dari Golkar harusnya besar karena semua cara telah dilakukan, tinggal elektabilitas kandidat yang terpenting, termasuk dalam hal ini apakah dicintai masyarakat atau tidak. Dukungan dana ini sesuai hasil Musyawarah Nasional di Lampung bahwa kandidat Golkar yang maju dalam pemilukada memperoleh bantuan dana dari DPP Golkar.

Sedangkan pasangan yang benar-benar sebagai kompetitor dari Sehati yang potensial adalah Sehan

Salim Lanjar – Meidy Lensun (*Bersemi*) yang maju melalui jalur perseorangan. Sehan Salim Lanjar adalah mantan anggota DPRD dari Golkar, bahkan ia pernah bertindak sebagai jurkam dari Sehan Mokoagow. Dan, pasangan ini memprediksi dan sangat meyakini bahwa Sehati akan mendapatkan kemenangan sebesar 60% karena di Boltim ini dipandang sebagai basis-basis Golkar.

G.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara KPU

Jangka waktu untuk menetapkan pasangan calon yaitu Meity Ochotan sekitar lima bulan penjangagan dan baru didaftarkan ke KPU. Dengan demikian Golkar cukup punya waktu untuk mensosialisasikan pasangan tersebut kepada pemilih.

Proses pendaftaran pasangan ini ke KPU berjalan lancar karena memang telah ada kesepakatan di DPC Golkar untuk mengusung pasangan Sehati.

Setelah sempat tertunda beberapa hari, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2010 dinihari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow memutuskan pasangan Sehan Salim Lanjar dan Meidy Lensun (*Bersemi*), menang satu putaran di Pemilu pada Kabupaten Bolmong Timur dengan perolehan *12.582 suara (33,1%)*. Secara mengejutkan pasangan jalur perseorangan ini mengungguli pasangan Sehan Mokoapa Mokoagow dan Meity Ochotan yang diusung Partai Golkar yang hanya berada diposisi ketiga dengan perolehan *9.866 suara*. Sementara untuk urutan kedua ditempati pasangan Soedibyo Mamonto – Dyane Merukh (*Sodya*) yang diusung PDIP dan Partai HANURA, dengan *9.886 suara*. Posisi terakhir adalah pasangan Soenardy Soemanta – Merly Budiman (*SBY*) dengan *5.659 suara*.

G.2.4. Kandidat Dan Institusi Sosial

Sejak munculnya keinginan maju dalam pemilukada, Meity telah mencari dan menggalang dukungan dikalangan tokoh-tokoh adat di desanya. Oleh karena itu ia menjalin komunikasi dengan kelompok kerukunan-kerukunan, misalnya membangun komunikasi dengan anggota ibu-ibu Badan Kerukunan Majelis Taklim, setiap pengajian, pertemuan dalam acara khusus dengan ibu-ibu Kerukunan Umat Beragama lain. Demikian juga karena keluarga besarnya adalah Cina-Kristen, maka Meity menggunakan mesin keluarga untuk mengembangkan dukungan di Jemaat Gereja karena Meity sendiri beragama Islam.

H. DYANE MERUKH

H.1. Profil Kandidat

H.1.1. Biografi

Dyane Merukh tinggal di Jakarta, bekerja sebagai eksekutif di group perusahaan swasta milik seseorang yang disebut sebagai “papa” yakni Yusuf Merukh seorang politisi terkenal dari Partai Demokrasi Indonesia di Era Orde Baru. Di perusahaan ini Dyane merasa beruntung diberi kesempatan dan peluang yang besar dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya, baik dalam dunia bisnis maupun dunia politik, seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“... ya Dyane beruntung bisa kerja dengan papa di perusahaan sendiri, *torang* (pen: kita orang atau saya) bisa kerja bebas kalau mau *pigi* kerja ya *pigi* kalau lagi ada urusan lain yang *ndak pigi*... termasuk ketika *torang* maju legislatif... *torang* lama *nggak pigi* kerja... waktu *so* habis buat sosialisasi.”

Sudibyo Mamonto, calon bupati yang berpasangan dengan Dyane Merukh menggambarkan sosok Dyane sebagai berikut:

“..Ibu Dyane orangnya hebat...masih muda, sukses dan kaya...tapi lebih dari itu sangat energik dan piawai dalam mengatur berbagai hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi *torang* merasa *so* cocok berpasangan dengan Ibu Dyane yang mampu menutupi kekurangan *kitorang* yang selama ini *so* dibesarkan sebagai birokrat karir yang lurus-lurus saja..”

Sebagai seorang eksekutif dalam perusahaan swasta besar, Dyane merasa mampu menemukan pola kerja yang tidak membuatnya harus selalu *standby* di Jakarta. Justru karena banyak usahanya yang berkaitan dengan pertambangan beroperasi di daerah-daerah maka Dyane telah melakukan banyak kebijakan agar selama dirinya mengurus pekerjaan maupun hal lain berkaitan dengan politik, perusahaan di Jakarta tetap berjalan dengan lancar.

Keberhasilan Dyane di bidang swasta inilah salah satu faktor yang menantanginya untuk membuktikan kemampuannya di bidang lainnya termasuk di dalamnya di bidang politik. Meskipun pertama terjun di bidang politik pada pemilihan legislatif tahun 2009 lalu, Dyane merasa memiliki referensi hidup yang sangat banyak dari sosok Yusuf Merukh. Keberhasilan Yusuf Merukh dalam mengembangkan karir politiknya di era Orde Baru dan di sisi lain keberhasilannya membangun jaringan bisnisnya yang banyak bergerak di bidang pertambangan memberikan inspirasi mendalam pada Dyane.

Di sisi lain ternyata lampu hijau juga datang dari Yusuf Merukh untuk mendorong Dyane agar mengembangkan kemampuan dirinya tidak hanya dalam dunia bisnis sebagaimana yang ditekuninya selama ini, namun juga

berani dan mampu berprestasi di bidang politik baik di jalur legislatif maupun eksekutif. Permasalahan yang dihadapi oleh Dyane dalam membangun karir politiknya ini memang terletak pada faktor waktu dan kehadiran secara fisik ketika harus melakukan sosialisasi di Boltim, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut,

"..memang *torang* tidak *pe* waktu banyak untuk keliling sosialisasi, tapi *torang* *pe* kader-kader yang terus bekerja untuk *torang*. *Dorang* *so* kerja terstruktur dan serius, jadi *torang* tidak tergantung harus terus *standby* di sini...*torang* *so* bisa kerja di Jakarta... Soalnya *torang* kan *so* punya usaha untuk biyai politik di sini!"

Kemampuan manajerial ditambah dengan ambisi pribadi untuk terus berkembang disamping dukungan yang kuat dari Yusuf Merukh inilah yang membuat Dyane memantapkan diri untuk maju di dalam pilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2010.

H.1.2. Motivasi Kandidat

Dyane Merukh tadinya mencalonkan diri dalam pemilu legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2009 dan gagal, namun justru dalam proses pencalonan diri sebagai legislatif tersebut muncul motivasi untuk berjuang dalam proses pemilu kepala daerah pertama di Boltim tahun 2010 ini. Sejujurnya arahan motivasi tersebut lebih berasal dari orang tuanya dibanding dengan dari Dyane sendiri, meskipun ia tidak menampik bahwa memang memiliki ambisi kearah proses pencalonan tersebut sebagaimana yang diungkapkan Dyane sebagai berikut:

“...proses pencalonan Dyane sebenarnya justru berawal dari pengalaman dalam proses perjuangan *kitorang* dalam pemilu legislatif tahun lalu. *Torang so* pikir dalam pemilu legislatif tidak menang tidak apa tapi dalam pemilu kepala daerah *kitorang* mesti menang. Jadi keinginan maju pemilukada ini justru timbul ketika kita *so* mengikuti legislatif. Jadi arahnya memang kesitu...tapi kearah itu, memang dari Dyane sendiri ada keterbatasan...makanya yang mengarahkan papa Yusuf disamping *torang* sendiri juga mau, soalnya papa kan politisi jadi menurun pada anaknya dan akhirnya bisalah kita maju. Kebetulan kan papa ngarahkan anaknya mau, soalnya di tempat lain kan ada yang papanya ngarahkan anaknya tidak mau atau anaknya berambisi papanya tidak mengijinkan”

Pada awalnya Dyane ragu tetapi setelah berfikir lama ia berkesimpulan bahwa setiap orang tadinya juga tidak bisa memimpin tetapi setelah belajar sekian waktu buktinya juga mampu. Secara jujur Dyane mengakui bahwa sebenarnya ia pemalu dan penakut, tetapi arahan dari papanya membuat ia merasa harus belajar keras mengatasi kekurangan tersebut.

Dalam dunia bisnis, Dyane merasa sudah mampu beraktualisasi, bahkan mampu mengelola perusahaan yang ukurannya cukup besar. Namun dalam dunia politik, ia merasa benar-benar sebagai pemula. Beruntung papanya adalah politisi yang berpengalaman dan paham betul tentang karakter Dyane yang memang menyukai tantangan.

Pengalaman dalam mengelola kerajaan bisnis, meskipun menurut Dyane sangat berbeda dengan berkiperah di politik, namun ada beberapa hal yang menurutnya sama dan Dyane merasa tertantang untuk membuktikannya. Setidaknya, persamaan itu terletak pada kemampuan manajerial dalam mengelola permasalahan dan mencari solusi pemecahan yang paling dimungkinkan dari berbagai alternatif pemecahan yang ada. Kelebihan yang dirasakan Dyane, disamping terjun dalam dunia politik itu menantang

dan membuat dirinya bersemangat, yang tak kalah penting adalah dukungan dari papa seperti sudah disebutkan diatas. Jadi sudah klop, selain adanya dukungan yang kuat juga yang bersangkutan memang berminat dan merasa tertantang untuk mewujudkannya.

Meskipun bersifat formalitas, dukungan partai politik ternyata mampu mendorong semangat Dyane dalam bertarung di PemiluKada Boltim ini. Proses memperoleh rekomendasi yang menurutnya mudah dan tidak banyak pembiayaan membuat Dyane optimis bahwa ini adalah awal yang baik untuk memperoleh kemenangan.

Ketika disungguh mengenai besarnya biaya yang harus dikeluarkan, Dyane menyatakan bahwa setiap kandidat harus optimis menang kalau berani maju. Jangan maju jika hanya coba-coba, karena akan kecewa habis-habisan. Persoalannya, berapapun kandidatnya, pemenangnya hanya satu pasang. Dyane menyampaikan, jika seandainya dirinya kalah dalam pemiluKada nanti, setidaknya namanya sudah tercatat dalam tinta emas sejarah perkembangan pemerintahan di Boltim, di mana ia menjadi salah satu kandidat bupati yang melangsungkan sejarah kabupaten Boltim. Tetapi sebenarnya yang ditargetkan dengan mengikuti pemiluKada adalah ingin mengendalikan kebijakan di Boltim dengan sponsor dari Yusuf Merukh.

H.1.3. Modal Sosial

Pengalaman bekerja sebagai eksekutif swasta yang berhasil baik secara karir maupun secara ekonomi nampaknya menjadi pijakan awal kandidat untuk masuk ke arena kontestasi. Awal Dyane tertarik mencalonkan diri sebagai

kandidat dalam Pemilukada Boltim ini justru ketika sebagai eksekutif swasta yang sukses kemudian berjuang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif di tahun 2009 lalu. Dalam proses sosialisasi pemilu legislatif lalu, Dyane berkesempatan untuk turun langsung ke pelosok-pelosok pedesaan di Boltim. Banyak hal yang ditemui di masyarakat ternyata bertentangan dengan pengalaman hidupnya yang serba berkecukupan dan bermewahan di Jakarta selama ini.

Kemiskinan masyarakat, pola hidup yang tidak produktif, ketimpangan sosial dan kesehatan serta pendidikan yang masing jauh dari layak banyak ditemui di masyarakat. Di sisi lain sebagai eksekutif bisnis, Dyane melihat banyak potensi yang masih terpendam di bumi Boltim yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Nalurnya yang tajam dalam dunia bisnis, menuntunnya pada keyakinan bahwa seharusnya berbagai ketimpangan tersebut dapat teratasi jika pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan berbagai potensi lain di Boltim dilakukan dengan tepat, oleh orang yang tepat.

Keyakinan tersebut yang membuat Dyane optimis bahwa kunci semua itu justru pada pemerintahan eksekutif yang profesional. Sehingga ia sampai pada keyakinan bahwa sebenarnya yang strategis bukanlah jabatan legislatif, melainkan eksekutif.

Secara potensi, meskipun lama tinggal di Jakarta, kesadarannya sebagai orang Boltim memang cukup kuat melekat dalam diri Dyane untuk berjuang mewujudkan cita-citanya dalam pemilukada ini. Di sisi lain, dalam kepentingan bisnis, usaha Dyane merebut posisi eksekutif di Boltim

ini juga sangat beralasan, karena hingga sekarang grup perusahaannya yang bergerak dibidang pertambangan di Buyat bagian dari Boltim memang sedang mengalami kendala operasional sehingga perlu diperjuangkan melalui kebijakan yang relevan.

H.1.4. Modal Politik

Dyane sebelumnya adalah kader PDIP di Jakarta. Secara alamiah sebenarnya sudah banyak terlibat secara emosional dalam dunia politik ketika dididik oleh om-nya yang disebut sebagai papanya (Yusuf Merukh). Yusuf Merukh adalah kader senior partai ini sejak masih bernama PDI di era Orde Baru. Modal inilah yang memberikan berbagai kemudahan Dyane dalam memperoleh rekomendasi dari DPP PDIP untuk maju ke Pemilu Pilkada Boltim ini yang menurutnya, tanpa mengeluarkan modal sepeserpun kecuali untuk transport dan akomodasi saja.

Masuknya Dyane dalam bursa pencalonan pemilu sebagai wakil dari PDIP terkesan mulus-mulus saja, meskipun sebenarnya banyak masalah internal yang terpendam. Persaingan tidak terbuka dengan ketua DPC PDIP Boltim meskipun pada akhirnya dimenangkan dengan mudah oleh Dyane akibat *lobby-lobby* kuatnya baik ke DPD maupun DPP PDIP. Namun sebenarnya ini meninggalkan beberapa masalah yang berimplikasi pada proses kemenangan selanjutnya. Salah satunya adalah kegagalan Dyane berkeinginan untuk berpasangan dengan Sehan Lanjar sebagai calon yang memang populer di masyarakat Boltim, kegagalan ini diduga akibat blokade ketua DPC PDIP Boltim agar Dyane tidak mampu berhubungan dengan Sehan Lanjar karena yang bersangkutan ingin diarahkan

menjadi pasangannya sendiri, meskipun hal ini tidak juga berhasil dilakukan.

Dalam kalkulasi politik, modal dukungan dari partai politik bagi pencalonan Dyane setara dengan 4 kursi DPRD Boltim, yakni tiga kursi dari PDIP dan 1 kursi sisanya disumbangkan oleh HANURA dengan komitmen ekonomi politik tertentu.

Pasangan ini diprediksi cukup kuat karena nama keluarga Merukh dan keluarga Mamonto cukup populer di Boltim. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Merukh Group sudah cukup mengakar di wilayah tersebut, meskipun terkait dengan kasus lingkungan (misalnya kasus pencemaran lingkungan laut di Buyat), namun jaringan bisnis ini menghidupi ribuan keluarga di Boltim, sehingga sangat potensial untuk mendulang dukungan suara pada pasangan ini.

Prediksi Dyane pada pemilukada yang akan datang tentu optimis menang, pasangan calon yang dianggap sebagai pesaing beratnya adalah pasangan Sehan Salim Lanjar dan Meidy Lensun (Bersemi), sedangkan pasangan lainnya dianggap tidak terlalu signifikan. Dengan empat pasangan calon yang ada, Dyane memprediksi akan memperoleh dukungan suara sah di atas 40%.

H.2. Proses Kandidasi

H.2.1. Persiapan Kandidasi

Proses pencalonan Dyane dalam pemilukada di Boltim terbilang unik. Melalui PDIP sebagai partai pengusung utama yang didukung oleh Partai HANURA, sebenarnya

lebih merupakan perintah dari ketua DPD PDIP Sulut F. Sualang. Karena tidak seperti di beberapa kabupaten/kota lain, di Boltim PDIP sebenarnya tidak membuka pendaftaran calon kepala daerah secara terbuka. Ternyata hal tersebut tidak hanya terjadi di PDIP beberapa partai lain juga dilakukan secara tertutup berdasar kesepakatan antar elit partai saja. Ketika ditanyakan kepada Dyane, mengapa hal tersebut terjadi, ternyata ada kekhawatiran tentang kredibilitas partai jika ternyata tidak ada yang mendaftar, sebagaimana yang diungkapkan Dyane sebagai berikut:

"... Proses pengajuan *torang* sebagai calon *so* mudah, *torang* ditelepon pak Sualang depe Ketua PDIP, 'Dyane waktu *so* habis, kapan kau mau daftar?' Lewat ketua partai di Bolaang depe instruksi sudah kasih masuk dua pasang ... biar kelihatan *so* bagus *to*? Ternyata ketua parpol Boltim yang harusnya punya hak *to* tidak berani maju. Mungkin depe takut.. bisakah bersaing? Mungkin sama juga dengan pemikiran *torang* di masa dulu... kayaknya mayoritas orang Boltim masih punya pemikiran itu. Jadi *so* gimana bisa dapat dua pasang? Akhirnya ya cuma satu pasang, Pak Sudibyo dan saya. Dan Pak Sudibyo depe papan satu. Tidak masalah... soalnya *torang so* belajar *to*? Jadi papan dua tidak masalah. Jadi ya hanya satu pasang saja, soalnya banyak yang punya macam-macam alasan sehingga tidak mau mendaftar."

Fakta ini ternyata juga terjadi di dua partai besar lain yakni Demokrat dan Golkar, meskipun proses penerimaan kesepakatan internal partai tersebut tidak semulus apa yang terjadi dalam tubuh PDIP. Fakta di PDIP ini menarik karena dibanding yang terjadi di Golkar maupun Demokrat meskipun sama-sama hasil kesepakatan namun konflik internal tidak dapat dihindari. Hal yang berbeda dengan yang terjadi di PDIP dimana sampai hari terakhir pendaftaran hanya Dyane yang siap maju bersama pasangannya dalam pemilukada di Boltim.

Penelusuran lapangan menyimpulkan sebenarnya kasus Dyane sebagai calon tunggal tersebut lebih karena akibat konflik terpendam antara Ketua DPC PDIP Boltim dengan Dyane. Informasinya ketika F. Sualang, ketua DPD PDIP

Sulut meminta ada dua pasang calon yang diajukan ke DPP, Ketua DPC PDIP tidak bisa memenuhi dua pasang tersebut karena awalnya ia merencanakan dua pasang tersebut terdiri yang bersangkutan dengan pasangannya dan kedua Dyane dengan pasangannya. Pada awalnya pasangan yang diharapkan Dyane adalah Sehan Salim Lanjar (calon kuat yang cukup populer di masyarakat Boltim), namun dengan adanya manuver dari Ketua DPC PDIP yang sampai batas akhir tidak bisa mendapatkan pasangan, Sehan Salim Lanjar sengaja tidak dipertemukan dengan Dyane, bahkan pintu masuk ke PDIP bagi Sehan Salim Lanjar yang notabene kader Golkar sengaja ditutup oleh Ketua DPC PDIP.

Proses penentuan pasangan calon bupati dari PDIP ini juga menarik. Sebenarnya proses penentuan calon bupati ini justru dilakukan oleh Dyane bersama PDIP Boltim. Pada awalnya dilakukan survei elektabilitas dan kesesuaian figur dengan karakteristik masyarakat Boltim. Dari survei yang dilakukan akhirnya terpilihlah figur Jansen Mamonto, seorang mantan birokrat yang dianggap sukses ketika menjabat kepala dinas beberapa kali di Makasar yang setelah pensiun kembali ke Boltim dan tahun 2009 lalu berhasil menduduki jabatan legislatif di Provinsi Sulut lewat PKS. Penerimaan jajaran PDIP di daerah terhadap Jansen Mamonto tidak ada masalah, namun justru di tingkat DPP PDIP ternyata ditolak dengan alasan partai tidak mau berkoalisi dengan PKS, sebagaimana yang diungkap Dyane sebagai berikut.

'...proses penentuan calon bupati ini panjang...*kitorang* sudah kerja lama bikin survei cari figur yang paling pas buat calon bupati, dari beberapa tokoh yang disurvei sebenarnya pak Jansen Mamonto yang paling pas. Jajaran partai hingga Pak Sualang tidak masalah, Pak Yusuf juga OK saja karena Pak Jansen sekarang depe posisi legislatif provinsi dari PKS, tapi setelah *kitorang* bawa ke DPP ternyata ditolak karena DPP tidak mau koalisi dengan PKS. Sebenarnya kalau *dorang* mau keluar dari partai sih OK, tapi *dorang* jadi ketua PKS Boltim mana mau ?'

Setelah penolakan DPP tersebut Dyane memang harus realistis, sehingga berupaya mencari yang lain, sementara waktu sudah mendesak dan pada saat itu belum mengenal Sudibyo Mamonto. Akhirnya Dyane berhubungan dengan Herson ketua DPC PDIP Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang sebelumnya adalah kader Golkar Bolaang Mongondow sebelum ada pemekaran wilayah.

Pertemuan Dyane dengan Pak Sudibyo pertama kali atas bantuan Pak Herson dilakukan di sebuah hotel di Jakarta. Dalam pertemuan awal ini hanya basa-basi dan saling menjajaki. Ternyata besok paginya mereka berdua dipertemukan kembali di ruang tunggu Bandara Soekarno Hatta dalam persiapan perjalanan ke Manado dengan pesawat dan jam penerbangan yang sama, dalam obrolan singkat kedua ini diakhiri dengan janji pembicaraan lebih serius nanti se usai tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Setiba di Bandara, Dyane dan Pak Sudibyo menyempatkan diri untuk berdiskusi yang diakhiri dengan kesepakatan untuk maju bersama dalam Pemilu Pilkada Boltim 2010 ini, sebagaimana yang diungkapkan Dyane sebagai berikut:

“...sejujurnya saya bertemu dan mengenal Pak Sudibyo sangat singkat, beberapa saat sebelum pendaftaran ditutup karena jasa baik Pak Herson yang sebelumnya kader Golkar...Tiga kali pertemuan, pertama malam hari di lobby hotel di Jakarta, dilanjutkan secara nggak sengaja besok paginya ketika sama-sama *mo* pulang ke Manado di ruang tunggu Bandara Cengkareng dan janji seesai turun di Bandara Manado... dari proses singkat itu langsung bersepakat Pak Sudibyo sebagai calon bupati berpasangan dengan saya. Jadi Pak Sudibyo ini calon bupati yang paling beruntung, itu menurut saya..”

Sudibyo Mamonto, memberikan kesan yang sangat positif dalam mengintrepretasikan pertemuannya dengan Dyane sebagai berikut:

“...*torang so* berkesan pada Ibu Dyane, orangnya tegas dan berterus terang...gaya bicaranya lugas tapi *so* menghormati saya sebagai orang tua. *Torang* sampaikan kondisi pada *dorang*..dan paham. *Dorang* jamin apa yang *torang* nggak sanggup...dalam waktu singkat *kitorang* bersepakat. Jadi pertemuan *so* efektif dan efisien..langsung ke proses pencalonan..”

Sebetulnya, pemilihan Pak Sudibyo ini bukan tanpa harapan. Tadinya Dyane berharap karena PDIP untuk mengusung pasangan calon masih kurang satu kursi maka Pak Sudibyo diharapkan mampu mengatur agar dapat tambahan satu kursi dari partai lain seperti HANURA tetapi ternyata Pak Sudibyo tidak mau, untungnya sebelum Dyane sendiri yang mencoba mengatur dan me-*lobby* HANURA agar mendukungnya ternyata HANURA sendiri yang mendekati Dyane dan sanggup mendukungnya.

Dalam pandangan Dyane, Sudibyo adalah seorang birokrat lugu yang tidak begitu lincah dalam *lobby* politik. Sehingga segala sesuatunya justru Dyane yang mempersiapkan, sebagaimana dalam untkapannya berikut:

"...yah Bapak ini lugunya minta ampun, *dorang* kita minta *lobby* dan atur HANURA tidak mau... jadi ya semua *kitorang* yang atur...untungnya, Sutami depe sekretaris HANURA yang memang lebih lincah dari ketuanya terus dekat kita. Jadi ya akhirnya PDIP dapat tambahan dari HANURA. Pemilihan Pak Sudibyo ini, boleh dibilang terpaksa... apa ada yang lain? Mau pilih siapa? *Dorang* ketua DPC aja nggak berani maju. Jadi ya sudahlah apa yang ada aja. Mau apa lagi? Buka pendaftaranpun percuma nggak ada yang mendaftar...lain kalau dengan MinSel, MinUt, Menado pada berebut. Di sini ya seperti inilah, cuma dibanding dengan Bolsel yang calonnya cowok semua, Boltim lebih beranilah di sini ada tiga cewek jagoannya..."

Menariknya, Dyane sadar betul bahwa majunya sebagai salah satu kandidat digambarkan sebagai bentuk kesadaran dan majunya partisipasi perempuan dalam politik di Boltim. Ia bandingkan dengan Bolsel yang semua kandidatnya laki-laki, menurutnya kurang representatif dan simbol dari egoismenya kaum laki-laki terhadap perempuan.

Dyane juga merasa berterima kasih pada partai yang telah mempercayainya sebagai kader terbaik yang mendapatkan kepercayaan untuk maju dalam pemilukada Boltim kali ini, sekaligus ia menyayangkan sikap oportunist yang sekarang melanda banyak kader parpol termasuk PDIP seperti yang diungkapkan berikut :

"...*kitorang* sebagai kader partai haruslah loyal..siap ditempatkan di mana saja, sementara banyak *torang* lihat kader parpol di daerah, begitu tidak dapat nomer satu langsung tarik diri..itu kan tanda tanya, kader atau bukan?"

Pemilihan Sudibyo Mamonto yang sebenarnya bukan kader PDIP ternyata juga dilakukan dengan penuh kewaspadaan oleh Dyane. Referensi yang diperoleh dari Sualang Ketua DPD PDIP Sulut yang kebetulan sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulut banyak mewarnai pemikiran Dyane, sebagai berikut :

“..ya saya banyak diberi nasihat Pak Sualang, sebelum bergandengan harus bersepakat dulu tentang bagaimana nantinya..jangan seperti nasib saya di sini. ..kata Bapak Sualang, jadi saya dengan Pak Sudibyo memang telah membuat beberapa kesepakatan agar sebagai papan satu nanti tidak seenaknya sendiri dan ingat saja yang bekerja keras selama ini siapa ?”

Penentuan Dyane sebagai papan dua lebih karena strategi untuk memperoleh dukungan massa di Boltim, di mana keluarga Mamonto merupakan keluarga besar yang harus diperhitungkan disamping ketokohan Pak Sudibyo di wilayah Kecamatan Modayag sebagai kecamatan dengan penduduk paling padat di Boltim sudah dikenal orang. Meskipun demikian karena hampir semua upaya politik dalam proses pencalonan dan pembiayaan selama kampanye banyak didominasi Dyane maka komitmennya memang banyak menguntungkan Dyane meskipun hanya sebagai papan dua. Sebagaimana yang diungkapkan Dyane :

‘...sebagai perempuan saya sebenarnya tersanjung juga dengan bagaimana Bapak Sudibyo memperlakukan saya yang diatas segala-galanya...tapi konsekuensinya ya segala-galanya kita yang harus uruskan. Sebenarnya kita sudah terbuka, *dorang* Bapak sudah cerita kalau tidak punya apa-apa...Okelah *kitorang* sanggupi semua biaya pemilukada kitorang tanggung 100%, tapi biaya yang lain-lain tolong ditanggung sendiri depe urusan. Tapi faktanya *dorang* nggak mau tahu, jadi semua harus *kitorang* yang nanggung...jadi *kitorang* bingung, pakai bahasa yang bagaimana yang agar *dorang* ngerti’

Meskipun dibebani soal pembiayaan, kelihatannya Dyane *enjoy* saja karena Sudibyo tampak mempercayakan banyak hal kepada Dyane. Jadi walaupun posisi Dyane ada di papan dua tapi bisa dibilang secara riil sebenarnya dirinya yang menjadi papan satu. Secara umum komitmen ini tertuang dalam perjanjian antar dua pihak dimana Sudibyo sebagai pihak kesatu dan Dyane sebagai pihak kedua yang secara umum menyepakati bahwa urusan pemerintahan ditangani pihak kesatu sedangkan pihak kedua menangani urusan yang berkaitan dengan pembangunan.

Meskipun demikian Dyane juga merasa terganggu dengan penampilan Pak Sudibyo yang kurang percaya diri tanpa kehadiran Dyane. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut :

"...kalau kita pas kunjungan ke daerah gitu, Bapak ini selalu bilang... harus Ibuku yang turun...padahal maksud saya Bapak ini kan paling tahu depe wilayah dan masyarakatnya...jadi *power* bupatinya di mana ? *Kitorang* kan ada urusan juga di Jakarta jadi nggak bisa terusan di sini...tapi Bapak ini nggak *pede* kalau *kitorang* nggak ada... terus *power* bupatinya di mana?"

Sudibyo Mamonto memiliki penjelasan soal tersebut:

'...wajar saja kalau masyarakat pemilih ingin melihat siapa calonnya...masalahnya memang Ibu Dyane punya kesibukan yang luar biasa di Jakarta, jadi ya terpaksa *torang* terpaksa sendirian ke mana-mana. Jujur saja di lapangan memang ada banyak masalah yang tidak bisa *torang* pecahkan tanpa kehadiran Ibu Dyane...ini yang bikin *torang* agak kurang *pede* memang...'

H.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Partai pengusung pasangan Sudibyo Mamonto dengan Dyane Merukh (populer disingkat Sodya) secara resmi adalah PDIP dan HANURA. Meskipun keduanya secara resmi saling melengkapi dan menjadi pendukung pasangan ini, namun dalam realitanya PDIP berkesan sebagai partai utama dan HANURA terkesan seolah partai pendukung saja. Sebagaimana diungkapkan oleh Sutami, Sekretaris DC HANURA Boltim sekaligus satu-satu anggota legislatif dari HANURA di DPRD Boltim sebagai berikut:

"pada prinsipnya kita mendukung saja... soalnya ini kan *gawe*-nya PDIP, kita tahu diri lah bahwa posisi kita memang sebagai pelengkap saja...tentang kinerja partai HANURA dalam upaya kemenangan ini ya sudah kita siapkan. Namun kalau sampai sekarang belum ada sarana untuk bergerak ya kita tunggu saja.."

Memang dalam proses pencalonan pasangan ini PDIP tidak memiliki suara cukup untuk maju mencalonkan sendiri, dan HANURA memang terlihat aktif mendekati PDIP untuk berkoalisi. Oleh karena itu, dari awal memang sudah terlihat

bahwa “kelas” HANURA memang lebih di bawah PDIP dalam kasus ini.

Alasan klasik yang menjadi kendala dalam proses menggerakkan dukungan terhadap mesin partai politik adalah masalah dana. Kondisi ini ternyata juga dikeluhkan oleh kader PDIP yang sebenarnya mendominasi dukungan terhadap pasangan ini. Kesulitan mengakses dana karena adanya fakta bahwa setiap pasangan calon ternyata memiliki tim sukses sendiri yang biasa disebut sebagai tim sukses independen (TSI).

TSI terdiri atas keluarga dekat, kolega dekat dan beberapa tokoh masyarakat non-parpol yang menawarkan diri ataupun diminta membantu oleh pasangan calon. Hubungan pasangan calon dengan TSI ini jauh lebih erat dibanding dengan tim sukses parpol, meskipun sebenarnya secara formal daftar nama tim sukses yang disetorkan ke KPU Boltim justru didominasi oleh nama-nama dari tim sukses parpol.

Mengomentari keberadaan tim sukses independen ini, Sutami menanggapi dengan datar-datar saja, sebagai berikut:

“...kalau TSI itu kan orang kerja...jadi ya harus tekun, kalau perlu setiap pagi sudah *standby* di depan pintu rumah pasangan calon. Tapi mereka nggak punya beban, walaupun kalah ya sudah dan sebenarnya mereka juga tidak punya jaringan pendukung yang tersebar hingga pelosok-pelosok desa seperti kami dari parpol”.

Hal senada diungkapkan seorang kader PDIP bahwa meskipun membantu, TSI terkadang sering mem-*by-pass* hubungan antara pasangan calon dengan kader pendukung. Susahnya lagi, orang-orang TSI ini selain sudah

kenal lama dengan kandidat, mereka juga lebih aktif datang dan memberikan dukungan kepada kandidat.

Tentang kedekatan tim sukses independen terhadap pasangan calon ini, Sudibyo Mamonto memberikan komentar:

"Mereka TS ini kan sukarela datang ingin membantu jadi ya harus kita terima...mereka mendukung dengan segala kemampuannya, tanpa minta imbalan...mereka paham betul permasalahan yang *kitorang* sedang hadapi...jadi mereka bantu. Memang terkadang antar mereka dengan parpol ada gesekan di lapangan, itu biasa. Tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya".

Namun demikian Dyane Merukh menanggapi agak berbeda:

"...memang *torang* sendiri tidak membentuk TS. TS kita bersama-sama Pak Sudibyo... kebanyakan ya dari keluarga Mamonto. Mereka banyak membantu konsep dan di lapangan...tapi kadang saya keberatan juga karena mereka banyak bikin proposal. Maksud saya..ini kan untuk kepentingan Pak Sudibyo jadi bupati jadi ya jangan segala kegiatan diproposalkan ke saya. Pemilukada ini saya jadi kebanjiran proposal yang nggak masuk akal. Masak bikin acara di kampung gitu saja minta sampai 500 juta?".

Dalam memberikan tanggapan terhadap dukungan parpol di dalam proses pemenangan, Dyane juga mengeluhkan kurangnya *support* parpol baik dalam mobilitas maupun dukungan pendanaan, sebagai berikut:

"TS parpol sama saja...mereka tidak akan gerak jika tak ada dana. Tentang dukungan pendanaan dari parpol, ini bagaimana...kitorang justru harus kasih kontribusi mulai DPP, DPD hingga DPC. Tapi itu nggak menjamin kader parpol bergerak jika tidak ada *oto* [mobil] dan bensinnya. Kalau ditanya habisnya ya banyak...pokoknya mengurus tabungan deh...tapi perusahaan juga bantu kok...".

Tapi Dyane menjelaskan bahwa kontribusinya ke PDIP tidak berarti bahwa ia sebagai kader membeli rekomendasi sebagaimana banyak diceritakan oleh para kandidat lain dalam memperoleh rekomendasi parpol. Justru Dyane merasa tidak mengeluarkan sepeserpun dalam memperoleh rekomendasi tersebut. Namun konsekuensi dari nama Merukh yang disandanginya, maka jika ada kesulitan

parpol baik di pusat maupun daerah, wajib baginya untuk memberikan kontribusi terlepas diminta ataupun tidak. Tentang besarnya, bisa jadi kontribusi itu lebih besar dari “biaya rekomendasi”, namun bedanya, Dyane merasa wajib dan nyaman saja dalam memberikannya.

Namun untuk HANURA, Dyane mengakui bahwa ada biaya yang diminta hingga 200 juta ditambah untuk operasional pengurusan rekomendasi tersebut hingga 50 jutaan. Di PDIP pun Dyane merasa beruntung karena selalu diarahkan oleh Yusuf Merukh sehingga tidak sampai “diperas” oleh oknum-oknum parpol. Buktinya, dengan diam saja akhirnya Dyane mendapatkan rekomendasi DPP PDIP dengan tanpa biaya.

H.2.3. Kandidat dan Lembaga Penyelenggara KPU

KPU sebatas bekerja dalam domain prosedural, sehingga untuk pendaftaran pasangan ini tidak mengalami kendala.

I. MERLY BUDIMAN

I.1. Profil Kandidat

I.1.1. Biografi

Merly Budiman (MB) adalah seorang perempuan pengusaha yang sukses, keturunan etnis Tionghoa, pemeluk agama Kristen Protestan yang taat, dan kini tengah bersemangat untuk berpolitik. MB meraih sukses bisnisnya pada usia yang relatif sangat muda. Kini MB berusia 30 tahun dan mengaku memulai bisnisnya lebih dini, karena terpaksa harus meninggalkan bangku kuliahnya di Jurusan Teknik Industri

Universitas Trisakti akibat kerusuhan politik di Jakarta, 1998. Kerusuhan yang tidak dipahaminya itu nyata-nyata telah mengancam dan menelan banyak korban dari kalangan etnis Tionghoa, sehingga benar-benar membuat MB ketakutan dan mengalami trauma. MB memutuskan untuk meninggalkan Jakarta, pulang ke Manado, tempat di mana ia berkumpul dengan keluarga, serta merasa nyaman dan aman. Di Manado, dan Sulawesi Utara pada umumnya, MB merasa lebih diperlakukan sebagai orang Sangir daripada orang Tionghoa. Lebih-lebih ia bermarga Budiman, sesuatu yang sangat disyukuri. Ketika kembali ke Manado, semula MB bermaksud meneruskan kuliahnya di Universitas Sam Ratulangi, tetapi karena di Universitas Sam Ratulangi tidak terdapat jurusan teknik industri niatnya untuk meneruskan kuliah benar-benar kandas.

MB mulai berbisnis memenuhi ajakan ibunya untuk bergabung dengan usaha ibunya di bidang ekspor produk-produk perikanan dan perkebunan (kopra dan cengkeh) di Sulawesi Utara. Setelah menikah dengan Tommy Sumendap, MB memimpin usaha sendiri dan berkembang pesat. Tempat-tempat usahanya tersebar dari Sangir Talaut hingga Bolaang Mongondow Timur. Dan berkat jejaring usahanya yang luas – yang diasumsikan punya potensi pengaruh di masyarakat, khususnya di kalangan petani dan nelayan – serta kemampuan ekonominya yang memadai, menjadikan keluarga MB Budiman sasaran organisasi politik untuk direkrut. Menurut pengakuan MB beberapa kali ada tawaran untuk mempromosikan suaminya, Tommy Sumendap, sebagai calon anggota legislatif. Tetapi, setiap tawaran, termasuk dari PDIP – partai politik yang berbasis massa cukup besar di lingkungan pemukimannya – selalu

ditolakannya, dengan alasan ingin tetap berkonsentrasi dalam bisnis saja. Politik adalah bidang yang ingin dihindarkannya, sampai akhirnya datang tawaran Partai Demokrat, yang dalam pandangannya mempunyai program bagus, khususnya untuk memberantas korupsi. MB akhirnya mengijinkan, bahkan mendorong suaminya untuk aktif dalam Partai Demokrat. Tahun 2009 Tommy Sumendap dinominasikan oleh Partai Demokrat sebagai calon anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur, bahkan menjabat Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Bolaang Mongondow Timur. Pencalonan pada Pemilu 2009 tersebut kemudian mengantarkan Tommy Sumendap benar-benar terpilih sebagai anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur. Bahkan, lebih dari itu, Tommy Sumendap kemudian berhasil merebut kursi Wakil Ketua DPRD Bolaang Mongondow dan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat sekaligus. Capaian-capaian politik tersebut rupanya tidak terlepas dari berbagai usaha yang dilakukan MB, termasuk melakukan lobi-lobi politik hingga ke Jakarta.

MB yang sebelumnya tidak tertarik politik, tidak mau tahu politik, tidak mau terlibat politik itu, melalui proses yang relatif sangat cepat – bahkan MB sendiri menyebutnya “tiba-tiba saja” – kini berubah menjadi sosok yang membulatkan tekad untuk berpolitik dan menilai politik sebagai sebuah kenikmatan. “Politik itu nikmat,” katanya. Apakah kenikmatan itu karena memenuhi kepentingan dan ambisi pribadi? MB menyangkalnya. Menurut MB, berpolitik itu memberinya kebanggaan. Selain dengan politik MB mengaku bisa melayani dan membantu orang lain, MB merasakan kebanggaan dalam berpolitik, karena

MB berkeyakinan bahwa dalam kehidupan setiap orang ada tiga hal yang harus dikejar sebagai berkat Tuhan: (1) umur panjang, (2) harta kekayaan, dan (3) kehormatan. Dua yang pertama telah dinikmati MB, sedangkan yang ketiga itulah yang sedang diusahakan MB melalui politik, bidang yang dilukiskannya sangat kontras dengan kehidupan MB sebelumnya sebagai pengusaha. Usaha dilukiskannya sebagai pekerjaan yang harus selalu dilakukan dengan kalkulasi, untung-rugi, bahkan harus bertindak cepat-tegas-otoriter – karena sepenuhnya menyangkut perusahaan milik sendiri – dengan pertimbangan mengejar kepentingan. Sementara itu, kerja dalam bidang politik harus dilakukan dengan banyak bernegosiasi, menghadapi penentangan-penentangan karena orang lain bukan bawahan, bahkan harus bersedia mengeluarkan uang, sesuai yang dituturkan MB:

“Jangan berpolitik kalau tidak ada tas (berisi uang) yang sudah tersedia,”

Walau menikmati aktivitas politik, MB mengaku masih perlu belajar banyak tentang politik. Bahkan, MB menyatakan bersedia kuliah lagi di bidang ilmu politik.

MB yang mengaku ikut dalam kontestasi politik Pemilu Pilkada Bolaang Mongondow Timur 2010 atas inisiatif sendiri itu, kini berpasangan dengan Soenardi Soemantha (seorang tokoh Partai Golongan Karya, mantan Ketua Panitia Pemekaran Bolaang Mongondow Timur) sebagai calon wakil bupati. Soenardi Soemantha – yang lazim disapa Om Ding – melukiskan MB yang menjadi pasangannya itu sebagai perempuan: muda, cantik, enerjik, berani, agamis, suka membantu dan kaya.

I.1.2. Motivasi Kandidat

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Bolaang Mongondow Timur yang ditandai oleh kemiskinan yang meluas bagi MB adalah kondisi eksternal yang memotivasinya untuk berbuat sesuatu demi mengubahnya. Muncul pertanyaan apakah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilakukan melalui bidang usahanya sekarang? Meskipun mengaku bidang usahanya sekarang ini melibatkan tidak kurang dari 10.000 orang petani dan nelayan, MB merasa kurang optimal, bahkan tidak bisa berbuat banyak dengan usahanya. Menurut MB, perusahaan yang dipimpinnya tidak dimaksudkan untuk melayani dan membantu orang lain, melainkan untuk mengumpulkan keuntungan. Paling banter untuk bekerja sama untuk masing-masing memperoleh keuntungan.

Selain kondisi eksternal yang diklaim sebagai panggilan itu, secara internal MB termotivasi berkat kesadaran tentang tiga hal yang harus diusahakan untuk diraih dalam hidup: yaitu diberkati Tuhan umur panjang, kekayaan, dan kehormatan sebagaimana disebutkan di atas. Bagi MB, dua hal yang pertama sudah dicapai, sedangkan kehormatanlah yang sedang diperjuangkan mengejanya melalui politik. Jadi, motivasi pencalonannya adalah demi meraih status jabatan, yang dipahami sebagai simbol kehormatan, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Walaupun pada mulanya kalangan keluarga justru terkesan kaget dan mencemaskannya, mengingat belakangan banyak pejabat yang justru terjerumus masuk penjara. MB bercerita tentang pertanyaan yang dilontarkan ibunya:

"Ibu saya tanya, kenapa kamu mau jadi bupati, sekarang banyak bupati yang masuk penjara. Apa yang kamu cari?"

Menurut MB, selama pekerjaan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mengabdikan dengan niatan baik dan tulus, tidak melanggar hukum, maka tidak perlu takut.

Keterkejutan keluarga memang dapat dipahami, karena seperti diakui MB sendiri tekad tersebut muncul relatif tiba-tiba.

"Waktu itu malam-malam, saya sedang berada di Sangir, sementara suaminya berada di Boltim, saya telpon suami supaya siapkan baliho gambar saya dengan tulisan 'for Boltim' begitu saja,"

Ketika suaminya mempertanyakan beberapa hal, seperti akan maju sebagai bupati atau wakil bupati, berpasangan dengan siapa, dan lain-lain, MB menyatakan tidak usah dipikirkan terlebih dahulu. Pokoknya, pasang dulu baliho saya. Akhirnya, dipasanglah baliho bergambar foto diri MB dengan tulisan "*Membangun Boltim, MB FOR BOL-TIM 2010-2015*", tanpa keterangan apakah sebagai calon bupati atau wakil bupati dan akan berpasangan dengan siapa. Itu terjadi ketika calon-calon lain belum ada yang muncul, kecuali Sehan Mokoagow yang notabene merupakan calon *incumbent*.

1.1.3. Modal Sosial

Sebagai pengusaha yang sukses, modal utama yang ada di tangan MB sebagai bekal untuk melangkah ke peran-peran publik, khususnya politik, adalah jejaring usaha dan kekayaan. Jejaring usaha MB tidak semata-mata berada di Bolaang Mongondow Timur, melainkan juga di Sangir Talaud, bahkan luar negeri, khususnya Asia Timur. MB memimpin

sejumlah perusahaan yang diklaim menjadi gantungan hidup bagi tidak kurang dari 10.000 orang, baik petani maupun nelayan, yang hendak memasarkan hasil usaha mereka. MB merasa cukup dikenal masyarakat dan memiliki reputasi yang baik di wilayah Bolaang Mongondow Timur, khususnya di wilayah pesisir. Reputasinya itu tidak diperoleh secara tiba-tiba dan begitu saja, karena sambil berbisnis MB mengaku tidak jarang membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dan mengharapkan bantuannya.

Dengan kemampuan ekonomi, reputasi sosial, dan kepercayaan pada dirinya, MB yakin dapat mengubah jejaring usahanya menjadi jejaring kader untuk memobilisasi dukungan politik. Dan keyakinannya itu terbukti ketika MB mendukung suaminya, Tommy Sumendap, dicalonkan Partai Demokrat untuk ikut berebut kursi anggota DPRD. Pada Pemilu 2009 itu Tommy Sumendap berhasil meraih dukungan dan perolehan suara pemilih terbanyak untuk menduduki jabatan anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur. Berbekal keberhasilan tahun 2009 tersebut, untuk mendukung pencalonan dirinya dalam Pemilu Bolaang Mongondow Timur 2010, MB mengaktifkan kembali 10.000-an jejaring usahanya untuk diperankan sebagai “kader-kader politik”. Langkah ini dimulai dengan “memutihkan semua piutang” yang menjadi tanggungan mereka, yang nilainya mulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan, bahkan konon ada yang mencapai seratus juta.

Selain kemampuannya di bidang ekonomi, secara pribadi MB memang sosok yang menarik. MB mengaku selalu berprestasi ketika bersekolah, pandai berbicara, sanggup melayani diskusi berjam-jam tentang berbagai

persoalan. Tetapi, ia merasa paling tersiksa jika disuruh menyanyi. Padahal, untuk pergaulan sosial di Sulawesi Utara keterampilan menyanyi seakan menjadi persyaratan utama, yang MB-pun terpaksa harus melakukannya. Konon penampilannya yang menarik dan kemampuannya berbicara seakan menjadi magnet yang mengundang orang untuk mendekati, bahkan mengaguminya. MB sendiri menyebut sebagian orang yang mendekatinya itu bukan sebagai pendukung, melainkan “fans” (para pengagum).

I.1.4. Modal politik

Modal politik MB adalah keterkaitannya dengan Partai Demokrat. Tetapi, keterlibatan MB dalam politik sesungguhnya bisa dikatakan sangat baru. MB barangkali merupakan sosok makhluk ekonomi yang tengah mengalami metamorfosa menjadi makhluk politik. Politik merupakan bidang yang dulunya selalu dihindarinya, hingga tahun 2009 Partai Demokrat datang menawarkan kesempatan untuk bergabung. Pada tahun itu, Tommy Sumendap, yang tak lain adalah suami MB, dinominasikan Partai Demokrat sebagai calon anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur sekaligus dipromosikan sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat Bolaang Mongdow Timur. DPC Partai Demokrat Bolaang Mongdow Timur sendiri merupakan cabang bentukan baru sebagai konsekuensi pemekaran daerah. Ketika Musyawarah Cabang Partai Demokrat yang pertama diselenggarakan pada Agustus 2009, muncul sejumlah nama yang diunggulkan untuk menjabat ketua DPC Partai Demokrat. Di antara nama-nama itu, Sehan Mokoagow – tokoh Golkar yang juga wakil bupati yang tengah menjabat – salah satu yang paling diunggulkan. Sedangkan di internal kader Partai

Demokrat sendiri bersaing tiga nama: Argo Sumaiku dari PAC Modayag, Tommy Sumendap dari PAC Tutuyan, dan Jusuf Haji Ali Ketua PAC Kotabunan. Musyawarah akhirnya menetapkan Jusuf Haji Ali sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Bolaang Mongdow Timur. Dalam perkembangan politik kemudian tampaknya hubungan antara Jusuf Haji Ali dan tokoh-tokoh Partai Demokrat tidak berlangsung harmonis. Bahkan, Pemilu 2009 gagal mengantarkan Jusuf Haji Ali ke kursi anggota DPRD. Sementara itu, karir Tommy Sumendap justru tampak berkibar. Selain terpilih sebagai anggota DPRD, konon dengan perolehan suara terbanyak, Tommy Sumendap kemudian juga terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Bolaang Mongdow Timur.

Awal keterlibatan politik yang membawa serangkaian keberhasilan, rupanya memberikan kepercayaan diri dan optimisme MB tentang potensi kemampuan politiknya. Karena itu, MB segera memberanikan diri untuk menawarkan dirinya sebagai salah satu alternatif pemimpin Bolaang Mongdow Timur yang siap dipilih rakyat secara langsung. Ketika itu ada keyakinan bahwa Partai Demokrat bisa menjadi modal politik utama yang akan mengantarkan pencalonannya. Walaupun di kemudian hari diketahui ternyata prosesnya tidak selalu mudah.

I.2. Proses Kandidasi

I.2.1. Persiapan Kandidasi

Baliho dengan pesan “Membangun Boltim, MB FOR BOL-TIM 2010-2015” yang dipasang relatif dini tersebut rupanya segera menarik perhatian banyak pihak.

Menurut MB, sejumlah tokoh telah datang menawarkan kesempatan untuk berpasangan. Yang mula-mula datang menawarkan untuk berpasangan adalah Sehan Salim Lanjar. Sehan Salim Lanjar berlatar belakang politisi, pernah menjabat Ketua DPW Partai Bintang Reformasi dan anggota DPRD Gorontalo. MB rupanya merasa kurang begitu cocok berpasangan dengan Sehan Lanjar. Putra Tutuyan itu akhirnya berhasil mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, berpasangan dengan Medy Lensum, bahkan akhirnya berhasil memenangi pemilukada yang digelar 3 Agustus 2010 lalu. Tawaran berikutnya datang dari seorang tokoh pemerintahan, Ismail Iswanto, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur. Tetapi, juga tidak terjadi pembicaraan yang serius. Tawaran yang sungguh-sungguh dipertimbangkan, dan benar-benar berpasangan, adalah yang datang dari Kandoli Mokodongan, SH, pejabat Bupati Bolaang Mongondow Timur. Kegagalan berpasangan dengan Kandoli Mokodongan, konon sekadar “gara-gara kecelakaan teknis”. Pada saat yang menentukan, ketika Partai Demokrat harus menentukan pasangan calon, ternyata Kandoli Mokodongan gagal dihubungi. “*Handphone*-nya Pak Kandoli saat itu hang,” kata MB.

Proses pencalonan MB kemudian berkembang cukup dramatis, walau memasang baliho paling awal, tetapi tampak kesulitan menemukan pasangan hingga detik-detik terakhir batas waktu pencalonan. Di saat sudah “kritis” diputuskanlah MB berpasangan dengan Soenardi Soemantha. Soenardi berada di papan satu dan MB berada di papan dua (wakil kepala daerah). MB mengaku memang sengaja untuk berada di papan dua, karena menyadari

seungguhnya bahwa dirinya sama sekali tidak berpengalaman di bidang pemerintahan. Soenardi Soemantha dipilih karena berbagai alasan. Pertama, Soenardi adalah tokoh senior yang kaya pengalaman di bidang politik dan pemerintahan. Soenardi adalah birokrat yang berkarir sebagai karyawan sipil di Komanda Distrik Militer (Kodim) Bolaang Mongondow. Aktif di Golongan Karya sejak tahun 1970-an. Kemudian menjadi anggota DPRD sejak 1982. Kini selain menjadi anggota DPRD, Soenardi – yang secara akrab dipanggil Om Ding – itu juga menjabat Sekretaris DPD Golkar Bolaang Mongondow Timur. Soemardi juga Ketua Panitia Pemekaran Bolaang Mongondow Timur. Kedua, latar belakang etnis dan keagamaan yang berbeda dengan MB dinilai cocok untuk dipasangkan dengan MB. Soenardi di Bolaang Mongondow Timur dikenal sebagai orang Jawa (meskipun sesungguhnya lahir dari orang tua Sunda yang menikah dengan orang Madura), beragama Islam, sehingga berbeda dan bisa saling melengkapi dengan MB yang Kristen Protestan dan keturunan Tionghoa. Ketiga, lebih melengkapi lagi, karena Soenardi tinggal di Modayag yang dikenal sebagai kawasan pegunungan dan MB yang tinggal di kawasan pesisir. Perbedaan ini memungkinkan pembagian kerja yang baik, selain baik juga untuk simbol keadilan representasi geografis, etnis, keagamaan, dan kultural dalam pemerintahan.

Sungguhpun begitu, proses memasangkan MB dan Soenardi Soemanta – yang kemudian mempopulerkan diri dengan sebutan pasangan SBY (Soenadi-Budiman-Yes) bukanlah proses yang mudah. Soenardi sendiri baru menyatakan kesediaan di saat-saat akhir masa pendaftaran calon. Menurut Soenardi, di dalam internal Partai Golkar

sesungguhnya telah ada kesepakatan sebelumnya, bahwa Partai Golkar akan mengajukan pasangan Sehan Mokoagow (Ketua DPD Golkar) berpasangan dengan Soenardi (Sekretaris Golkar) sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Dalam perkembangannya, ternyata Sehan Mokoagow maju berpasangan dengan Meity Ochotan, sebuah keputusan yang tentu saja membuat Soenardi kecewa. Dalam kekecewaannya itu, Soenardi sempat berkeinginan untuk maju sebagai calon bupati melalui jalur perseorangan. Karena itu, Soenardi mengaku sempat menolak sejumlah pinangan calon-calon yang dimajukan partai politik lain, termasuk PDIP. Dengan melakukan hal tersebut Soenardi mengaku tetap konsisten, setia dan tidak mengkhianati Partai Golkar. Tetapi, kenyataannya kemudian Soenardi bersedia dicalonkan oleh Partai Demokrat yang memasangkannya dengan MB.

Cerita penerimaan Soenardi untuk dicalonkan Partai Demokrat tidak kurang dramatis. Soenardi mengaku ditelpon oleh seorang temannya, petinggi Partai Golkar yang disegani, yang berpesan agar ia bersiap-siap ditelpon oleh seseorang yang penting, yang akan menanyakan kepastian kesediaannya untuk diusulkan sebagai calon bupati dari Partai Demokrat. Tidak lupa seorang teman tersebut juga berpesan agar Soenardi menerimanya saja. Pesan ternyata benar adanya. Pada malam harinya, Soenardi ditelpon seseorang, yang mengaku dari Jakarta, tanpa memastikan identitas dirinya, yang intinya hanya memastikan: apakah Soenardi sanggup diusulkan sebagai calon bupati. Maka, segera turunlah rekomendasi DPP Partai Demokrat untuk mengusulkan pasangan Soenardi Soematha dan Merly Budiman sebagai pasangan calon Bupati-Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2010-2015. Tetapi, drama pencalonan pasangan ini belum berakhir. Ketika 20 Mei 2010, hari terakhir masa pendaftaran pasangan calon, sekitar pukul 11.00 WITA pasangan SBY datang ke Sekretariat KPU untuk mendaftarkan diri, ternyata berkas pendaftarannya ditolak KPU. Kejadian ini tentu saja membuat malu pasangan SBY di depan pendukungnya sendiri. KPU beralasan, berkas pendaftaran pasangan SBY tidak lengkap, karena Formulir B1 yang menerangkan partai pengusung pasangan calon ternyata tidak ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat. KPU akhirnya memberi waktu kepada pasangan SBY untuk melengkapi berkas hingga pukul 23.39 hari itu juga. MB menyatakan bahwa mereka ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil pada saat-saat *injury time*.

Setelah ditetapkan berpasangan, MB dan Soenardi masing-masing segera bergerak cepat, berbagi tugas, dan memperluas dukungan. Pasangan ini kemudian berhasil memperluas dukungan, antara lain dari Partai Patriot dan Partai Pelopor. Konon PKS juga bersimpati dan mendukung pasangan ini. Menurut Ketua Partai Pelopor, partainya mendukung Soenardi karena sejumlah alasan. Pertama, karena sosok pribadi Soenardi yang sudah dikenal. Sebagai pribadi Soenardi dilukiskan sebagai "politisi dan pemimpin matang, punya pengalaman, relasi dan jejaring yang luas hingga ke Jakarta." Jejaring itu dibuktikan ketika Soenardi menjadi Ketua Panitia Pemekaran. Kedua, karena visi-misi yang dirumuskan pasangan ini memang cocok mengenai langsung kebutuhan masyarakat. Ketiga, kemampuan perjuangan dan jasa yang telah diberikan Soenardi. Kemampuan itu mencakup kemampuan dalam hal melakukan lobi-lobi politik, menggalang dana, dan

lain-lain. Keempat, pasangan Soenardi, Merly Budiman, dinilai mempunyai pengalaman dan program konkret untuk memajukan pertanian, khususnya petani cengkeh, antara lain dengan membantu di bidang perbankan dan keuangan. Selain karena programnya, pasangan SBY juga dinilai sangat tepat, karena justru berkontribusi untuk memperkuat bukti komitmen dan citra nasionalismenya. Pasangan ini lintas etnis, lintas agama, lintas gender, lintas generasi, dan daerah. Kelima, berdasarkan hasil rapat internal organisasi dan hasil survei yang telah dilakukan.

Untuk membuktikan kesungguhannya dalam mendukung pasangan SBY, Partai Pelopor konon telah menggariskan beberapa langkah, antara lain: (1) mengefektifkan peran kader di setiap desa, setiap kader di desa harus berhasil menggaet 10 orang, (2) membuat tim religius, yang berisi ulama dan pendeta, dan (3) menggerakkan Tim KKSS.

Dengan usaha keras masing-masing, kedua tokoh yang dipasangkan mendadak itu ternyata mengaku kompak, dan meskipun jarang bisa bertemu muka, mereka dapat berbagi tugas dengan baik, termasuk berbagi pembiayaan. Baik MB maupun Soenardi sama-sama menyatakan tidak memiliki formula baku dalam berbagi beban pembiayaan. Mereka hanya menegaskan, MB lebih bertanggung jawab dalam penggalangan dukungan dan pembiayaan di wilayah pesisir: Tutuyan dan Kotamobagu, sedangkan Soenardi di wilayah pegunungan atau Modayag. Seperti yang dituturkan Soenardi:

"Sering saya dengan pasangan membagi tugas untuk hadir atas undangan masyarakat. Karena kami berdua terus menghargai masyarakat, sampai mereka pun terharu dan akan mendukung kami 3 Agustus nanti,"

Menurut Soenardi pembiayaan terbanyak diperlukan untuk makan, kendaraan, dan menyiapkan saksi-saksi. Untuk hal-hal tersebut, Soenardi mengaku telah mengeluarkan uang pribadinya lebih dari 1 milyar. Masing-masing juga mengaku telah membentuk tim-tim suksesnya sendiri yang dikoordinasikan oleh anggota keluarga masing-masing.

I.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Partai Demokrat yang mengusung pasangan SBY memperoleh tiga kursi DPRD di Bolaang Mongondow Timur, dari total kursi 20 orang. Dengan perolehan kursi tersebut Partai Demokrat berhak mengajukan pasangan calon sendiri, tanpa harus bergabung dengan partai politik lain. Tetapi, proses pencalonan melalui Partai Demokrat ternyata tidak berjalan lancar. Ketua DPC Partai Demokrat, Jusuf Haji Ali, rupanya tersinggung dengan langkah-langkah yang dilakukan MB, khususnya dalam mengupayakan rekomendasi DPP Partai Demokrat. Selaku Ketua DPC, Haji Ali mengaku dilangkahi dan merasa diabaikan perannya.

Kekecewaan Haji Ali rupanya telah bermula sejak penetapan hasil Pemilu Legislatif 2009. Haji Ali merasa memenangi pemilu di daerah pemilihan Kotamobagu, tetapi formula dan mekanisme penetapan calon terpilih yang ditentukan oleh KPU menyebabkan Haji Ali dinyatakan tidak terpilih. Menurut Haji Ali penentuan daerah pemilihan telah dimanipulasi oleh KPU, walaupun ia toh tidak menggugat hasil tersebut. Seperti diketahui, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah kabupaten baru hasil pemekaran daerah Bolaang Mongondow. Tetapi, pemekaran daerah belum diikuti dengan pembentukan KPU tersendiri, sehingga pemilu-pemilu masih diselenggarakan oleh KPU

daerah induk, Bolaang Mongondow. Kekecewaan Haji Ali rupanya berlanjut hingga ke proses pencalonan bupati dan wakil bupati. Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, rupanya Haji Ali menginginkan dirinya sendirilah yang dicalonkan, bukan orang lain, apalagi yang bukan kader Partai Demokrat. Perihal keinginan dicalonkan ini juga diakui oleh isteri Haji Ali sendiri. Namun demikian, langkah cepat MB untuk meminta rekomendasi DPP Partai Demokrat, dan berhasil, seakan mementahkan semua dinamika, proses, dan persiapan di bawah. Rekomendasi DPP Partai Demokrat telah turun sebelum pelaksanaan Konggres Partai Demokrat. Ini berbeda dengan kasus Minahasa Utara dan Minahasa Selatan, di mana Partai Demokrat juga bermasalah dalam pengajuan calon dalam pemilukada masing-masing. Pada kasus Minahasa Utara dan Minahasa Selatan sempat turun rekomendasi ganda dari DPP Partai Demokrat, masing-masing ditandatangani Ketua Umum Hadi Utomo dan Ketua Umum baru Anas Urbaningrum. Pada kedua daerah tersebut prosesnya hingga berbuntut sengketa di pengadilan.

Pada kasus Bolaang Mongondow Timur rekomendasi DPP Partai Demokrat telah turun sebelum penyelenggaraan kongres partai, sehingga tidak sempat terjadi rekomendasi ganda. Yang terjadi ketika Haji Ali tengah mengikuti kongres, ia diperintahkan pulang ke daerah bersama dengan Ketua DPC Minahasa Utara dan Minahasa Selatan untuk menyelesaikan proses pencalonan. Dan, seperti telah dikemukakan, berkas pencalonan pasangan SBY yang diusung Partai Demokrat sempat ditolak KPU pada hari terakhir pendaftaran calon, karena Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat belum atau tidak membubuhkan

tanda tangannya. Walaupun proses yang menegangkan ini bisa diselesaikan pada saat-saat terakhir pendaftaran, tetapi perpecahan di tubuh Partai Demokrat Bolaang Mongondow Timur rupanya tidak terelakkan lagi. Jusuf Haji Ali tampaknya benar-benar tak mau mendukung pasangan Soenardi dan Merly Budiman, antara lain, dengan ditunjukkan tidak mau memasang tanda gambar pasangan mereka. Sementara gambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Demokrat tetap dipasang. Haji Ali mengaku sebenarnya telah berusaha untuk ikut mempromosikan calon yang diusung partainya tersebut, tetapi usahanya untuk mengundang mereka dirasakan telah diabaikan. Tampaknya Haji Ali telah benar-benar patah arang dengan pasangan Soenardi-Merly Budiman.

J. CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

J.1. Profil Kandidat

J.1.1. Biografi

Christiany Eugenia Paruntu – lebih populer dengan sapaan **Tetty Paruntu** -- lahir pada 25 September 1967 di Manado, Sulawesi Utara, dari pasangan Prof.Dr.Ir. Jopie Paruntu, M.S., dan Dra. Jenny Y. Tumbuan. Pendidikan SD hingga SMP ia tempuh di sekolah Budi Mulia, Bogor, Jawa Barat, dan kemudian pendidikan setingkat SMA ditempuh di *Harry Carlton Comprehensive School*, Suthon Bomington, Notingham, Inggris. Selanjutnya, Tetty menempuh pendidikan di *Pitman College* (1984), Inggris, jurusan *Business Management*, dan kemudian melanjutkan

pendidikan di *West London College* (1986) mengambil jurusan *Management Information System*. Kemudian, Tetty juga menempuh pendidikan di Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia MAYAGITA – LPI, 1990.

J.1.2. Motivasi Kandidat

Motivasi pencalonan Tetty Paruntu, antara lain, tercermin dari lagu berjudul “Rindu Kampung Halaman”, sebuah lagu yang dibuat khusus untuk kampanye pencalonan dirinya (dinyanyikan oleh penyanyi bernama Vidya), yang diluncurkan di dunia maya. Selain itu, Tetty Paruntu mengaku sangat menikmati politik:

“Saya sangat menikmatinya, ...politik membuat saya lebih bisa mengontrol diri saya untuk bisa melangkah maju. Politik memang keras... Tetapi, politik juga membentuk mental saya untuk tetap fokus pada tujuan akhir.”

Tetty menyadari dan mengaku bahwa dirinya dipandang sebagai sosok yang sukses sebagai perempuan karir dan karenanya terpanggil untuk berbuat sesuatu melalui jalur politik untuk memajukan daerah asalnya.

Politik yang secara awam sering dipandang sebagai dunia yang keras, bagi Tetty Paruntu justru memberikan kenikmatan tersendiri. Pandangan bahwa politik itu kotor hendak ditepis dengan karya yang bermanfaat untuk orang banyak, politik bagi Tetty bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tetty Paruntu yang berasal dari latar belakang keluarga yang akrab dengan kehidupan politik itu secara sadar memilih untuk mengakrabi dunia politik.. Bagi Tetty berpolitik melalui partai merupakan instrumen yang sah dalam negara demokrasi. Dan, ia mengaku sungguh tersentuh melihat

kondisi daerah asalnya. Karena itulah, Tetty melihat peluang kompetisi pemilihan kepala daerah di Minahasa Selatan sebagai ajang untuk mewujudkan cita-cita politiknya.

“Tanggung jawab saya besar sekali untuk memajukan daerah yang sampai saat ini masih sangat terbelakang. Kalau Tuhan yang memilih, pasti Ia akan memberikan hikmat kepada saya untuk memimpin,”

J.1.3. Modal Sosial

Tetty aktif di tiga kegiatan utama yaitu sebagai pengusaha nasional yang sukses, politisi muda, sekaligus pekerja sosial. Saat ini Tetty tercatat sebagai Presiden Direktur PT Puspita Adhiniaga Indonesia (sejak 1992), Presiden Direktur PT Chandra Ekakarya Pratama (sejak 2006), dan Direktur PT Partim Indomakmur. Sebelumnya, Tetty sempat menjadi komisaris PT Chandra Ekakarya Pratama (1999-2006) dan PT Trutama Star (2004-2009). Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang distribusi, alat-alat berat, perangkat telekomunikasi, dan perkapalan.

Sebagai pekerja sosial, Tetty aktif di kepengurusan sejumlah organisasi kemasyarakatan maupun yayasan. Tercatat Tetty mendirikan dan menjadi ketua *Eugenia Ministry* sejak 2002, pimpinan Yayasan Eugenia Ministry sejak 2004, *President Lions Club Jakarta* tahun 2006-2008, Ketua PBVSI Minahasa Selatan tahun 2008-2013, bendahara Lemkari tahun 2002, anggota KNPI Jakarta tahun 1991-1992, dan pernah juga aktif di kepengurusan Kerukunan Keluarga Kawanua tahun 1987-1995. Tetty juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun pelayanan keagamaan sampai saat ini.

Tetty yang mengaku hobi membaca, menonton berita, *fitness*, lari maraton, serta bermain bulu tangkis ini telah

dikaruniai seorang putra bernama Adrian Jopie Dotulong. Tetty juga pernah menyabet penghargaan *Best Dressed Woman Indonesia* tahun 1992 serta sebuah penghargaan dari *Lions Club International* tahun 2007. Agustus 2009 lalu, oleh *Manado Post*, sebuah surat kabar lokal, Tetty dinobatkan sebagai "Ibu Pembangunan Desa" karena peran dan keaktifannya dalam melayani warga masyarakat hingga jauh ke pelosok-pelosok pedesaan.

J.1.4. Modal Politik

Ayah Tetty, Jopie Paruntu adalah mantan rektor Universitas Sam Ratulangi, yang sekarang menjadi Ketua Komisi D DPRD I Sulawesi Utara. Sementara Jenny Y. Tumbuan, ibunda Tetty adalah mantan Ketua DPRD II Minahasa Selatan periode 2004-2009, yang kini masih menjabat sebagai anggota DPRD II serta menjadi Ketua DPD Partai Golkar Minahasa Selatan. Tak heran bila darah politisi mengalir dalam diri Tetty Paruntu, yang mengawali karir politiknya sebagai salah satu pengurus Partai Golkar di Kecamatan Tombasian, Amurang tahun 2003-2008. Ia juga tercatat pernah menjadi anggota Pokja Infokom DPP Partai Golkar tahun 2004-2009. Tetty juga menjadi salah satu fungsionaris DPP Partai Golkar sejak 2007, dan terakhir ia menjabat sebagai Wakil Bendahara DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara.

Tetty Paruntu mengaku mendengar "*MinSel Calling*", panggilan untuk kembali membangun daerahnya, Minahasa Selatan. Rasa tanggung jawab kepada daerah, dukungan masyarakat yang besar dan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menuntun langkahnya, membuat Tetty semakin menegas untuk mencoba memenangkan pemilu pada 2010.

Tetty Paruntu disebut-sebut sebagai salah satu kader terbaik Partai Golkar di Minahasa Selatan saat ini. Setelah melalui serangkaian survei internal Partai Golkar, nama Tetty selalu menempati urutan teratas, sehingga DPP menetapkannya sebagai calon bupati. Bahkan, nama Tetty juga selalu menempati posisi teratas di sejumlah survei internal partai politik lain maupun survei independen. Menyangkut pencalonannya sebagai Bupati Minahasa Selatan, Tetty menegaskan komitmennya,

“Akan saya berikan tubuh, roh, dan jiwa saya untuk melayani masyarakat. Itu adalah visi saya.”

Dalam Pemilukada Minahasa Selatan 2010 ini, Tetty berpasangan dengan Sonny Frans Tandayu, seorang birokrat karir terbaik di Minahasa Selatan. Sonny sengaja dipilih, selain karena pengalamannya di birokrasi, figur yang bersih dan jujur, serta loyal dalam pengabdianya kepada negara, juga karena tujuan kesolidan pemerintahan daerah yang akan dibentuk nantinya. Kombinasi pasangan pengusaha sukses/politisi muda dengan birokrat karir terbaik di MinSel ini diyakini akan memberikan kemenangan maksimal dalam pemilukada.

Untuk meyakinkan bahwa Tetty Paruntu memang layak dipilih, Tetty bersama tim suksesnya memberikan 10 alasan untuk memilih pasangan Tetty Paruntu dan Sonny Tandayu. Kesepuluh alasan tersebut adalah:

Pertama; Warga MinSel mengenal Tetty Paruntu sebagai pribadi yang cerdas, tegas, dan berwibawa sekaligus sebagai sosok yang hangat, simpatik, ramah, membumi, tidak membedakan, dan *good looking*. Sosok Tetty yang

selalu berpenampilan modern, menarik, namun rendah hati itu pun seolah menjadi representasi keramahan dan kehangatan warga MinSel pada umumnya. Itu sebabnya, mulai dari anak-anak, pemuda-pemudi, orang dewasa, hingga para lanjut usia di MinSel merasa cepat akrab dan begitu dekat dengan sosok Tetty Paruntu.

Kedua; Tetty aktif di berbagai organisasi pelayanan sosial dan keagamaan, termasuk memiliki sendiri Eugenia Foundation yang bergerak di bidang pelayanan sosial kemasyarakatan dan pendidikan, serta Eugenia Ministry yang sangat aktif dalam pelayanan kerohanian. Tetty bersama Eugenia Ministry menyelenggarakan *road show* Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di semua kecamatan di MinSel serta sejumlah KKR akbar di Amurang, Manado, Jakarta, dll. Tetty dipastikan akan membawa semangat pelayanan dalam pemerintahannya nanti.

Ketiga, sulit dibantah bahwa Tetty Paruntu merupakan kandidat Bupati MinSel yang paling transparan, paling jelas, dan paling komprehensif dalam memaparkan visi, misi, dan program pembangunannya melalui berbagai saluran komunikasi masyarakat. Ini mengindikasikan spirit transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, dan demokratisasi dalam tata pemerintahan yang akan dipimpinya nanti. Semangat semacam inilah yang sangat dibutuhkan masyarakat MinSel yang ingin maju dan berkembang lebih cepat lagi.

Keempat, Tetty yang berlatar belakang pengusaha sukses telah memiliki kemampuan finansial yang menjanjikan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk korupsi atau

penyelewengan APBD. Tetty berkomitmen kuat agar setiap sen uang rakyat hanya dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan, kemakmuran, dan kemajuan masyarakat.

Kelima, sebagai pengusaha sukses yang berjejaring nasional maupun internasional, Tetty memiliki potensi, keunggulan, dan kemampuan untuk mendatangkan banyak investor bagi percepatan pembangunan ekonomi MinSel. Peran investor saat ini sangatlah vital untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi MinSel mengingat keterbatasan PAD maupun APBD.

Keenam, Tetty Paruntu memilih pasangan yang tepat sebagai calon wakil bupati, yaitu Sonny Frans Tandayu, seorang birokrat karir yang andal dan berkarakter. Sonny yang berpengalaman sebagai birokrat karir dipercaya akan mampu menjadi mempercepat reformasi birokrasi dan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan MinSel nantinya. Kombinasi ideal pengusaha sukses dan birokrat andal ini juga diyakini akan mampu membawa banyak perubahan dan percepatan pembangunan MinSel.

Ketujuh, Tetty memiliki visi jauh ke depan untuk menjadikan MinSel sebagai salah satu kabupaten terbaik di Indonesia, bahkan di dunia dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan SDM, pariwisata, perdagangan, pertanian, kesehatan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Kedelapan: Tetty adalah simbol semangat generasi baru pemimpin MinSel yang didukung oleh litbang, pakar, dan para pemikir muda yang progresif, kreatif, dan inovatif.

Sebab, Tetty sendiri adalah calon bupati termuda sepanjang sejarah pemilukada MinSel yang bertekad melakukan percepatan, kecepatan, dan ketepatan pembangunan MinSel di segala bidang.

Kesembilan: Tetty Paruntu dan Sonny Tandayu yang berpandangan terbuka adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang paling diterima oleh berbagai kelompok sosial, politik, agama, etnis, serta dikenal luas dan dicintai oleh setiap kelompok usia di MinSel, mulai anak-anak, pemuda-pemudi, warga dewasa, hingga warga lanjut usia. Luasnya dukungan ini diyakini akan membawa kemenangan yang signifikan dalam pemilukada MinSel 3 Agustus nanti.

Kesepuluh: Tetty Paruntu adalah calon Bupati MinSel yang paling besar peluangnya untuk menang dalam satu putaran di pemilukada ini. Sebab, Tetty didukung penuh oleh Partai Golkar yang solid dan organisasi-organisasi masyarakat lainnya, serta memiliki persiapan yang sangat matang jauh-jauh hari sebelumnya. Sosialisasi di lapangan, pembentukan tim-tim sukses dan tim kerja di setiap desa maupun kecamatan, serta kampanye media yang sangat intensif selama hampir setahun terakhir menjadikan Tetty selalu menyodok di posisi teratas dalam hampir semua survei terpercaya (LSI, Indobarometer, FPC, dll).

J.2. Proses Kandidasi

J.2.1. Persiapan Kandidasi

Tetty Paruntu boleh dikatakan benar-benar serius menggarap persiapannya untuk maju sebagai kandidat

bupati. Tetty menyatakan keinginan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan bupati sejak tahun lalu, khususnya setelah merasa berhasil membantu kedua orang tuanya dalam memenangi pemilu legislatif 2009. Kini kedua orang tuanya menjadi anggota DPRD, ayahnya untuk Sulawesi Utara dan ibunya di Minahasa Selatan. Menurut pengakuannya banyak teman yang datang dan mendorong agar Tetty bersedia mencalonkan diri. Teman-teman itu pula yang sanggup membantu dan kemudian diikutsertakan dalam tim suksesnya. Tim inilah yang berdiskusi intensif untuk ikut merumuskan visi-misi yang akan diperjuangkannya.

Adapun visi yang diusung Tetty untuk menuju posisi Bupati MinSel adalah sebagai berikut:

*"Mewujudkan pemerintahan yang **cepat membangun dan tepat dalam berinvestasi** dalam suatu kondisi lingkungan masyarakat yang **beriman, produktif, dan sejahtera.**"*

Cepat Membangun dapat dipahami sebagai tekad dan komitmen Tetty Paruntu untuk merealisasikan suatu pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, terkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan pembangunan sehingga daerah Minahasa Selatan dapat mengalami percepatan-percepatan dalam pembangunan dengan hasil-hasil yang sesuai dengan target yang dicanangkan. Percepatan-percepatan pembangunan yang dimaksud tentulah dengan selalu mengedepankan asas pemerataan dan berkeadilan sehingga seluruh masyarakat MinSel menjadi pelaku aktif sekaligus penikmat hasil-hasil pembangunan nantinya.

Tepat Berinvestasi adalah tekad dan komitmen Tetty Paruntu untuk meletakkan investasi sebagai pemicu dan

pemacu pembangunan MinSel. Sebagai kota kecil yang sedang bertumbuh, MinSel membutuhkan investasi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Untuk itulah, dengan pengenalan dan wawasannya akan potensi daerah ini, serta pengalaman menjadi pelaku ekonomi tingkat nasional dan internasional yang sukses, Tetty Paruntu akan benar-benar mengarahkan investasi pada sektor-sektor yang paling potensial untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi MinSel.

Masyarakat yang Beriman, Produktif, dan Sejahtera

menurut Tetty Paruntu adalah upaya untuk mewujudkan suatu kehidupan yang sungguh-sungguh berdaya guna, penuh makna, serta selalu dalam bimbingan Tuhan. Masyarakat yang beriman adalah suatu tataran bentuk masyarakat yang paling ideal dalam menjalankan sebuah pembangunan karena tidak ada kemajuan tanpa melibatkan Tuhan. Masyarakat yang produktif adalah dasar dan sendi-sendi fundamental bagi kemajuan suatu masyarakat. Sebab tidak akan ada percepatan pembangunan dan kemajuan masyarakat tanpa produktivitas yang tinggi. Sementara masyarakat yang sejahtera adalah cita-cita terluhur semua pemimpin kelas dunia. MinSel adalah sebuah kota kecil yang akan dibawa dalam spirit untuk meraih kesejahteraan bersama-sama sehingga namanya akan didengar di kancah nasional bahkan internasional.

Selain merumuskan visi-misi, Tetty Paruntu mengaku telah membentuk tim sukses yang didominasi anak-anak muda yang dinilainya militan, loyal, taktis, kreatif, dan penuh semangat dedikasi. Apabila calon-calon lain baru habis-habisan usai resmi mendapatkan kendaraan politik medio

Maret-April 2010 ini, tim sukses independen Tetty Paruntu justru sudah tersusun dan bergerak efektif sejak Agustus-September 2009 lalu. Tertius Ulaan, motor penggerak tim independen itu mengatakan:

“Sejak awal kami bekerja berdasarkan data-data dan informasi lapangan yang akurat, bukan berdasar asumsi atau perkiraan-perkiraan belaka. Kami merencanakan semua strategi dengan rapi dan selalu punya antisipasi-antisipasi langkah. Makanya, gerak kami sulit dideteksi, tetapi tiba-tiba ada hasil di permukaan. Kuncinya, kami kuasai informasi di lapangan dan punya tim-tim kerja hingga ke tingkat desa-desa, jauh-jauh hari sebelum calon kandidat lain membentuknya.”

Tim sukses Tetty Paruntu juga aktif membuka banyak jalur komunikasi dengan masyarakat (calon pemilih), termasuk di dunia maya. Sejak pertengahan Juni hingga awal Juli tahun ini, tak kurang dari delapan klip video profil Pantas (Paruntu-Tandayu) diluncurkan di Youtube maupun di situs jejaring sosial Facebook. Sebelumnya, untuk sosialisasi Tetty juga sudah memanfaatkan koran lokal, koran *online*, radio, televisi, brosur, VCD, spanduk, baliho, *blog*, *Facebook*, dll.

Beragam tema disuguhkan dalam rekaman-rekaman video profil kandidat bupati dari Partai Golkar ini. Video klip Tetty Paruntu pertama (Album Pop Pantas for MinSel) berisi tayangan lagu yang syairnya menggambarkan profil Tetty Paruntu. “*Nona fasung yang bersahaja, murah senyum dan rela berkorban...*” begitu senandung vokal Rolly Pelealu dalam video tersebut. Sementara, tayangan videonya memperlihatkan aktivitas-aktivitas Tetty saat sosialisasi program-programnya ke tengah masyarakat.

Sementara, klip Tetty Paruntu yang ke-2 lebih menonjolkan sosok Sonny Frans Tandayu, calon Wakil Bupati MinSel yang berlatar belakang birokrat karir. “*Loyal dalam tugasnya cerdas dalam berpikir, kejujuran itulah landasannya,*” demikian

lantunan lagu oleh Vidya. Klip ini mengungkap sejarah perjalanan Sonny Tandayu melalui syair lagu yang cukup manis didengar.

Berikutnya, masih dari Album Pop Pantas, Klip Tetty Paruntu yang ke-3 mengungkap sosok Pantas melalui alunan lagu berjudul "Pantas Mo Se Jadi" oleh Renny Tamara. Tayangan klip ini juga memperlihatkan kemeriahan deklarasi Pantas awal April lalu. Disusul klip Tetty Paruntu ke-4 dengan lagu "Rindu Kampung Halaman", mengisahkan perjalanan studi dan perantauan Tetty hingga akhirnya balik ke MinSel. Yang khas dari lagu alunan Vidya kali ini adalah dominannya iringan musik kolintang, musik kebanggaan masyarakat Minahasa.

Lalu di klip Tetty Paruntu ke-5, Renny Tamara kembali hadir dengan lagu "So Paling Pantas", yang kembali menyuguhkan sosok Tetty Paruntu serta latar belakang keluarganya. ***"la mau MinSel berpendidikan, ia peduli rakyat yang kecil, ia figur cerdas ramah serta takut akan Tuhan,"*** begitu bunyi syairnya. Dilanjutkan dengan klip Tetty Paruntu ke-6 dengan lagu berjudul "So Nda Mo Ta Goda" yang dilantunkan oleh Stevie, ***"Memang banya itu yang ba calon, memang banya itu da ba pangge, mar ta so nda mo ta goda laeng, Tetty Paruntu..."***

Sementara itu, klip Tetty Paruntu Profil ke-7 yang berdurasi 10 menit mengungkap lebih jauh program-program unggulan Pantas. Klip ini dibuka dengan pengenalan profil Tetty diiringi lantunan lagu rohani "Mukjizat Itu Nyata". Bagian berikutnya disuguhkan rekaman-rekaman kegiatan sosialisasi Tetty dan Sonny di MinSel. Baru pada

tiga perempat bagian lainnya disuguhkan wawancara langsung dengan Tetty menyangkut program-program kampanyenya. *“Saya fokusnya bagaimana menciptakan lapangan kerja yang besar untuk daerah kita. Bagaimana caranya, tentu kita akan membangun infrastrukturnya dulu,”* jelas Tetty Paruntu pada klip tersebut.

Dan terbaru, klip Tetty Paruntu hasil kreasi simpatisan Pantas. Video berdurasi 2,38 menit yang berisi foto, slogan, dan rekaman kegiatan ini diklaim sebagai bukti, betapa sosok Tetty dan Sonny berhasil menarik simpati, partisipasi, dan dukungan para simpatisan dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Tetty:

“Selama ini saya ada hubungan baik dengan teman-teman yang *concern*. Mereka peduli untuk membangun Minahasa Selatan. Ada beberapa kawan yang ingin sekali membantu saya apabila saya terpilih menjadi bupati. dan, saya bersyukur serta berterima kasih sekali atas dukungan teman-teman itu,”

J.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Christiany Eugenia Tetty Paruntu yang berpasangan dengan Sonny Frans Tandayu (kemudian pasangan ini memperkenalkan diri dengan sebutan Pantas) diusung oleh Partai Golongan Karya (Partai Golkar), yang mana ibunya sendiri menjadi Ketua DPDnya. Karena itu ada sebagian orang berkomentar bahwa pencalonan ini seakan merupakan usaha pelestarian kekuasaan Partai Golkar pada dinasti keluarga Paruntu. Karena Partai Golkar memenuhi syarat untuk bisa mengajukan pasangan calon sendiri, Partai Golkar tidak merasa perlu berkoalisi dengan parpol lain. Proses internal Partai Golkar tampak berjalan lancar dan cepat, sehingga bisa memunculkan calon, dan kemudian mendeklarasinya relatif lebih awal.

Dengan persiapan dan apa yang sudah dilakukan di lapangan oleh Tetty Paruntu, serta hasil-hasil survei yang meneguhkan potensi elektabilitasnya, DPP Partai Golkar tanpa ragu-ragu menetapkan Tetty Paruntu dan Sonny F Tandayu sebagai calon bupati dan wakil bupati di PemiluKada MinSel 2010. Kelancaran penetapan oleh Partai Golkar tersebut diyakini Tetty sebagai kemenangan awal, sekaligus potret kemenangannya di pemiluKada setelah itu. Tetty sangat yakin bisa menang satu putaran.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati dari Partai Golkar ini sukses menggelar deklarasi pada 25 Mei 2010 di gedung Teguh Bersinar, Amurang, MinSel. Belasan ribu pendukung dan simpatisan Pantas ikut menjadi saksi sejarah sebuah deklarasi kolosal yang meriah namun tertib dan indah ini. Seorang anggota tim sukses Pantas secara guyon mengatakan:

"Banyak warga bilang, ini bukan deklarasi tapi pelantikan,"

Media massa lokal menyebut untuk ukuran sebuah kabupaten, deklarasi Pantas ini sebagai yang terbesar, fantastis, dahsyat, dan spektakuler.

Melalui deklarasi yang luar biasa tersebut, Pantas hendak mengirim pesan kepada MinSel, bahwa mereka adalah pasangan yang sungguh-sungguh dipersiapkan dengan matang dan taktis untuk memenangi pemiluKada MinSel 3 Agustus 2010 nanti. Pantas secara tegas mengklaim bukanlah pasangan dadakan atau coba-coba cari peruntungan belaka. Sebaliknya, Tetty Paruntu dan Sonny Tandayu mengklaim sebagai duet ideal yang secara survei maupun kondisi riil lapangan memiliki elektabilitas serta

dukungan tertinggi. Lebih dari itu, Pantas adalah satu-satunya pasangan yang mendapatkan dukungan paling solid dari organisasi partai pengusung, yaitu Partai Golkar beserta ormas-ormas *underbow*-nya.

Kekompakan dalam mendukung Pantas jelas terlihat dari kehadiran dan keikutsertaan Ketua Umum Partai Golkar Ir. Aburizal Bakrie di deklarasi tersebut. Hingga saat ini, hanya Pantas-lah yang mampu menghadirkan sang ketua umum dalam acara deklarasi. Hadir pula Nurdin Halid (Koordinator Wilayah PG Sulawesi), Stefanus Vreeke Runtu (Bupati Minahasa, calon gubernur Sulut, dan DPD I PG Sulut) dan Marlina Moha Siahaan (Bupati Bolaang Mongondow dan calon wakil gubernur Sulut), Jennie J. Tumbuan selaku Ketua DPD II PG MinSel, Hanny Joost Pajow (calon walikota Manado), dll. Kekompakan semacam ini jelas menjadi dukungan moril yang sangat berarti bagi motivasi kemenangan Pantas di MinSel.

Acara deklarasi Pantas dimulai dengan ibadah pengutusan oleh 12 pendeta GMIM dan KGPM sewilayah Amurang, yang dilanjutkan dengan pidato politik oleh Christiany Eugenia Tetty Paruntu dan Aburizal Bakrie (Ical). Dalam pidatonya, Tetty kembali menegaskan visi dan misinya untuk melakukan perubahan dan percepatan pembangunan dengan basis masyarakat yang beriman, produktif, berdaya saing, dan sejahtera. Sementara, Ical tanpa ragu-ragu menyatakan apresiasinya atas pagelaran deklarasi yang luar biasa ini di depan para hadirin:

"Deklarasi Pantas ini adalah deklarasi terbaik yang pernah saya kunjungi. Saya gembira dengan hasil kerja tim Pantas. Ini harus jadi barometer bagi daerah-daerah lain,"

Ical juga menyatakan bahwa Pantas adalah pilihan tepat Partai Golkar. Sebab, hanya dengan sekali survei saja Pantas sudah di posisi teratas sehingga DPP tidak ragu-ragu mengeluarkan rekomendasi bagi pasangan ini. Sekalipun diprediksi dan diyakini akan memenangkan pemilu MinSel, Ical berpesan agar Pantas tetap bekerja keras dan tidak merasa sombong:

"Pantas harus terus bekerja keras. Jangan sombong dan takabur ketika merasa di atas angin. Tapi tetaplah, bersikap elegan, rendah diri, santun, bersahabat, dan dekat dengan masyarakat."

Ical mengikuti acara deklarasi dari awal hingga bubarannya, ia juga sempat ikut menari Katrili bersama-sama di atas panggung.

Mendapatkan dukungan yang begitu besar dari warga maupun partai politik yang mengusungnya, Tetty Paruntu menegaskan:

"Ini semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Kami akan bekerja keras untuk memenangkan pemilu ini dengan gilang gemilang. Kami tidak akan menyia-nyikan kepercayaan dan setiap dukungan warga. Kami semua sangat antusias menunggu saat-saat yang dinantikan, yaitu pemilihan 3 Agustus nanti."

Semangat, kegairahan, dan optimisme untuk menang tersebut memang terpancar bukan saja pada diri Pantas dan tim sukses, tetapi juga terpancar dari para simpatisan dan pendukung umumnya. Bahkan, salah seorang simpatisan Pantas berseloroh, *"Ibu Tetty sama Pak Tandayu so tinggal mo lantik, nda usah ada pemilihan lagi hehehe..."*

J.2.3. Kandidat dan Institusi Sosial

Keterkaitan Tetty Paruntu dengan institusi sosial, antara lain terlihat dari aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial yang terkait dengannya. Pada Maret 2010 Tetty Paruntu

mengorganisasi kegiatan keagamaan yang disebut Kebaktian Kebangkitan Rohani (KKR) akbar bertajuk "MinSel Diberkati" di Amurang. Gaung kesuksesan penyelenggaraan KKR akbar "MinSel Diberkati" oleh Eugenia Ministry pimpinan Christiany Eugenia Tetty Paruntu pada 15 Maret 2010 lalu seakan bergema cukup lama. Konon perkiraan panitia bahwa KKR akbar itu akan dihadiri 2.000 orang meleset jauh. Di luar dugaan peserta KKR "MinSel Diberkati" ini membludak hingga 5.000 orang. Gedung Teguh Bersinar malam itu penuh sesak dan bahkan ribuan orang terpaksa berdiri di sekeliling halaman gedung tersebut untuk mengikuti KKR dengan pengkotbah Pendeta Gilbert Lumoindong. *"Ini KKR terbesar yang pernah terselenggarakan di MinSel,"* komentar Nofita Ester, salah satu panitia KKR. Sementara Inyong, seorang anggota tim sukses Tetty Paruntu, bahkan memperkirakan peserta KKR malam itu mencapai 7.000 orang. Memang, antusiasme masyarakat MinSel yang luar biasa dalam mengikuti KKR tersebut menunjukkan betapa besarnya kerinduan warga masyarakat untuk dapat hidup dalam kepenuhan rohani. Tetty Paruntu menanggapi hal ini berkomentar:

"Saya melihat kebangkitan rohani yang luar biasa di MinSel sekarang ini. Sungguh, ini merupakan berkat Tuhan yang luar biasa untuk masyarakat MinSel secara keseluruhan. Banyak jiwa mengalami penyembuhan dan kebangkitan kembali,"

KKR yang diselenggarakan pada Maret 2010 lalu itu, konon bukan yang pertama kali diselenggarakan oleh Eugenia Ministry di bawah komando Tetty Paruntu. Diinformasikan bahwa Eugenia Ministry aktif menyelenggarakan KKR sejak tujuh tahun terakhir. Karena itu, KKR berpotensi sebagai pijakan awal ke arah politik. Berangkat dari kebangkitan rohani warga MinSel ini, Tetty melihat adanya potensi energi

yang luar biasa untuk menggerakkan masyarakat menuju cita-cita bersama. Masyarakat MinSel bisa dipersatukan dalam sebuah visi yang sama, yaitu menjadi masyarakat yang beriman, produktif, sejahtera, dan sentosa.

Beriman dalam arti setiap sendi kehidupan dan aktivitas masyarakat dilandasi oleh iman yang teguh dan nilai-nilai religius. Menurut Tetty Iman harus menjadi “pelita dalam kegelapan”, arah dalam perjalanan, dan sumber energi yang tiada habisnya.

Produktif menurut Tetty berarti berdasarkan iman dan nilai-nilai luhur itulah masyarakat akan bangkit dengan kekuatan penuh untuk memperbaiki kehidupannya dari berbagai aspek:

“Kita sesungguhnya memiliki sumber daya yang kaya, baik itu SDM maupun sumber daya alam. Kita tidak boleh menya-nyikan itu semua. Jadi kita harus bangkit, harus aktif, harus menghasilkan banyak hal dengan segala sumber daya yang ada. Produktivitaslah yang menggerakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat MinSel,”

Selanjutnya, dalam visi Tetty Paruntu, produktivitas akan mampu mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera:

“Tidak ada kesejahteraan bisa diraih tanpa produktivitas. Tidak ada produktivitas berkualitas yang tidak menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tali-temali antara iman, produktivitas, dan kesejahteraan itu harus hidup dalam dada setiap warga MinSel. Dari situ kita pasti mampu melangkah dengan penuh motivasi.”

Dan akhirnya, sebuah masyarakat yang sentosa, aman, tenteram, dan damai adalah tujuan hakiki dari pembangunan itu sendiri:

“Visi saya adalah masyarakat MinSel yang sentosa, yang sejahtera, aman dan tenteram. Masyarakat yang terjauhkan dari segala bencana, kesukaran, ataupun gangguan kamtibmas. MinSel yang berproses; beriman, produktif, sejahtera, dan sentosa. Dan, itu semua bisa kita raih dengan iman dan keyakinan kita yang kokoh kepada Tuhan,”

Tetty Paruntu memang sukses dalam bisnis, punya pergaulan yang luas, memiliki keluarga yang selalu mendukung penuh langkah-langkahnya, serta memiliki berbagai aktivitas sosial dan pelayanan yang menguatkan kehidupan rohaninya. Namun, semua orang tidak akan pernah lepas dari deraan masalah. Perjuangan politik Tetty Paruntu dalam Pemilu 2010 juga diakui bukan perkara mudah. Bahkan, di sanalah letak ujian-ujian atau tempaan-tempaan berikutnya, yang mungkin jauh lebih sulit daripada masalah yang baru saja dilaluinya:

“Saya akan tetap selalu mengandalkan Tuhan dan ingin selalu bersekutu dengan-Nya dalam hadirat-Nya. Biarlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati saya,”

K. KARTINI SIMBAR

K.1. Profil Kandidat

K.1.1. Biografi

Kartini Simbar adalah seorang anggota DPRD Minahasa Utara periode 2009-2014. Sebelum bergelut didunia politik Kartini dikenal sebagai seorang pengusaha. Kegiatan usahanya cukup terkenal tidak hanya di wilayah Sulut tetapi juga merambah ke kawasan Indonesia timur seperti Papua dan juga di Jakarta.

Motivasi maju untuk menjadi wakil bupati karena ingin ikut membangun daerah asalnya. Meskipun ia sekarang menjadi anggota legislatif, menurut ia wewenang anggota legislatif itu sangat kecil. Sehingga ia perlu untuk melanjutkan karir politiknya di eksekutif, karena dirasa dimungkinkan untuk membuat kebijakan yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

Dalam perspektif perjuangan gender, Kartini menilai bahwa pembangunan perempuan di Minahasa Selatan masih jauh tertinggal dibanding daerah lain. Faktor utamanya, menurutnya adalah peran penentu kebijakan pembangunan perempuan seperti ketua penggerak PKK di MinSel tidak berfungsi seharusnya. Mereka justru larut dalam kegiatan-kegiatan seremonial yang hanya menjadi pelengkap dan pemanis upacara saja.

Target yang ingin dicapai jika menjadi wabup dalam Pemilu Pilkada MinSel ini adalah untuk meningkatkan peran perempuan sejajar dengan kaum laki-laki. Perempuan di MinSel yang selama ini lebih dipandang sebagai objek saja maka harus dibangkitkan motivasi dan perannya untuk berjuang sejajar dengan laki-laki, tidak hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga, namun harus menjadi ibu rumah tangga yang memiliki prestasi dalam karir pekerjaan maupun aktualisasi lain berupa pengabdian kepada masyarakat sekitarnya.

Sebagai pengusaha sukses, Kartini merasa mampu menularkan kemampuan dan ketrampilan kepada masyarakat khususnya perempuan yang ada di kampung-kampung dengan melakukan pemberdayaan dengan pelatihan-pelatihan keterampilan yang mampu meningkatkan penghasilan dan peran mereka di keluarga.

Kartini Simbar juga dikenal sebagai aktivis sosial keagamaan yang sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial secara langsung di pedesaan maupun melakukan kegiatan-kegiatan persekutuan doa di tengah masyarakat.

K.1.2. Motivasi Kandidat

Ketika pertama berencana mencalonkan diri dalam pemilu pada tersebut, Kartini mengumpulkan keluarganya untuk menjelaskan motivasi dan kepentingannya mengikuti pemilu agar mereka paham, mendukung dan sekaligus menghindari terjadinya KKN antar saudara, ketika ia sedang menjabat.

Kartini sebelumnya tidak memiliki pengalaman di bidang politik. Motivasi terjun ke dunia politik bermula ketika selepas operasi usus buntu di RS Mitra Keluarga Jakarta. Pada saat itu ada temannya yang memberikan penawaran kepadanya untuk bergabung dan aktif dalam politik melalui PDIP. Pada saat pemilu legislatif lalu, Kartini dijanjikan dengan penugasan partai ia akan diberi “nomer jadi”, di Dapilnya. Kenyataannya, dalam susunan calon legislatif, Kartini menduduki nomer urut 10, kekecewaannya tidak bisa ditahan, karena ia merasa dibohongi. Oleh karena itu ia memutuskan pulang ke Minahasa.

Namun di rumahnya kawasan Citraland MinSel, Kartini didatangi dan didaftarkan oleh pengurus PNBK untuk diajukan sebagai Caleg DPRD Minahasa Utara dan akhirnya terpilih sebagai legislator dari PNBK di DPRD MinUt tahun 2009-2014.

Selama sepuluh bulan menjadi legislator, Kartini merasa tidak memiliki cukup wewenang yang memadai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat karena secara kelembagaan DPRD dinilai tidak memiliki wewenang dalam urusan untuk mengambil kebijakan. Semua wewenang justru ada di tangan eksekutif dalam hal ini bupati dan wakil

bupati. Di lain sisi dalam tubuh Dewan sendiri pengambilan keputusan tergantung pada proses *voting*. Menurut pengalaman Kartini, ide-ide yang lahir dari buah pikirannya seringkali gugur ketika sampai pada proses *voting*, terlebih ketika ide-ide yang ia keluarkan diperuntukan membela kepentingan nelayan dan petani. Seperti yang dituturkan kartini kepada peneliti:

"setelah saya duduk 10 bulan di Dewan, saya lihat apa yang saya bisa perbuat di Dewan, sedangkan yang ambil kebijakan semuanya bupati. *Torang* pernah punya usul, bagaimana *torang* memberikan pemberdayaan kelompok petani dan nelayan, karena sebagian besar masyarakat adalah petani dan nelayan, dan kalau berangkat-berangkat studi banding jangan semua yang berangkat, satu dua orang saja yang berangkat dan kepala dinas. Pergi kedaerah mana yang pertaniannya maju, tetapi dua puluh lima tidak setuju ya tidak disetujui. Hah.. makanya dari itu saya punya motivasi untuk mengembangkan saya punya karir keatas saya bermaksud supaya saya bisa mengambil kebijakan yang lebih mengena kemasyarakat.."

(Wawancara dengan Kartini Simbar, tanggal 25 Juli 2010)

Keterbatasan wewenang sebagai anggota dewan, membuat Kartini bertekad untuk maju dalam perebutan kursi eksekutif di Minahasa Selatan (MinSel). Selain itu Kartini mengalami perang batin sebagai anggota DPRD MinSel, ia merasa mendapatkan gaji yang cukup besar padahal ia tidak bisa memberikan kerja terbaiknya untuk masyarakat. Ia membandingkan gaji yang ia peroleh dengan kondisi masyarakat sekitarnya yang mencari uang sepuluh ribu dalam satu hari saja sangat sulit. Kartini menegaskan, keputusannya untuk maju hanya semata untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat petani dan nelayan.

Keputusan untuk maju dalam pemilukada dipikirkan matang-matang oleh Kartini, termasuk harapannya untuk tidak mau terjebak dengan politik balas budi yang dialami oleh bupati terdahulu. Menurut pengamatan Kartini

seringkali bupati yang terpilih tidak bisa kerja secara efektif untuk kepentingan masyarakat, karena terlalu sibuk untuk membagi kue kekuasaan dengan para investor sponsor ketika maju dalam pemilukada. Akhirnya Kartini bertekad bersama Prof. Lombok memperjuangkan karir politik lebih tinggi menjadi bupati dan wakil untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara mandiri tanpa dukungan sponsor tertentu:

“...Kita tidak perlu sponsor, kita dan Pak Prof berjalan dengan pake dana kita punya sendiri ini. Makanya *torang* berani mengambil kebijakan yang bagaimana masyarakat bisa sejahtera, *torang* memberdayakan pengusaha-pengusaha kecil yang nanti bisa mampu memberikan lapangan pekerjaan. Kalau yang disponsori, akhirnya sponsor itu yang setir pemerintahan begitu toh. Dia akan mengambil terlalu banyak, pada akhirnya pengusaha kecil tidak kebagian...”

(Wawancara dengan Kartini Simbar, tanggal 25 Juli 2010)

Berbekal dengan keyakinan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya masyarakat petani dan nelayan yang merupakan mayoritas penduduk di kawasan ini, Kartini sengaja menutup diri dari sponsor guna membiayai perjuangan politiknya, karena ia tidak ingin terikat politik balas budi dengan investor yang mensponsorinya. Dalam kondisi ini, Kartini Simbar merasa dukungan dananya terbatas dibanding calon yang diusung partai besar yang biasanya disediakan pula paket sponsor oleh partai pendukungnya.

K.1.3. Modal Sosial

Modal sosial yang dimiliki pasangan ini dalam maju ke proses pemilukada di Minahasa Selatan, merupakan perpaduan antara modal sosial yang dimiliki Prof. Lombok dengan Kartini Simbar. Prof. Lombok dikenal sebagai akademisi yang sudah berpuluh tahun mengabdikan di dunia pendidikan di Sulut. Popularitasnya tidak diragukan lagi, dalam

berbagai kegiatan pendidikan dan keagamaan yang rutin diadakan masyarakat. Mantan mahasiswa dan keluarganya merupakan sebagian pendukung yang diharapkan dapat tertarik pada popularitas Prof. Lombok.

Kartini Simbar aktivitasnya lebih dibidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan bisnis keluarganya. Keaktifannya dalam dunia ekonomi yang juga ditunjang dengan aktivitasnya dalam kegiatan sosial dan keagamaan ternyata mampu mendulang popularitasnya. Pasangan ini juga telah bersepakat untuk *sharing* pendanaan dengan tanpa melibatkan pihak luar dengan proporsi *sharing* untuk biaya pencalonan ini sebesar 60% dari calon bupati dan 40% calon wakil bupati.

Kartini Simbar juga yakin bahwa pendekatan emosional keagamaan yang sudah dibangunnya selama ini mampu merebut simpati masyarakat. Hal ini terbukti ketika pemilihan legislatif lalu, meskipun PNBK merupakan partai kecil yang tidak dikenal oleh masyarakat, namun ketika digunakan untuk mengajukan figur Kartini Simbar ternyata mampu memenangkan dirinya dalam pemilu legislatif (pileg). Menurutnya apa yang dilakukan oleh figur calon lebih penting dan lebih menentukan dibanding dengan partai politik yang mengusungnya. Di samping itu, nama baik juga lebih menentukan daripada pemberian-pemberian sesaat berbau *money politic*.

Pengalaman Kartini di Pemilu legislatif lalu sangat menginspirasi dirinya dimana ia percaya betul dengan kekuatan doa dan cara-cara yang lebih agamis dibanding dengan upaya-upaya politik kotor seperti *money politic*.

Terbukti, ketika menjelang pemilu legislatif lalu banyak caleg sibuk serangan fajar, namun Kartini dengan jamaahnya justru melakukan KKR dengan mendatangkan Rony Sianturi dari Jakarta. Dan terbukti Kartini memenangkan suara dalam pileg tersebut meskipun berangkat dari PNBK yang merupakan partai sangat tidak diperhitungkan.

K.1.4. Modal Politik

Karir politik Kartini Simbar bisa terbilang masih sangat muda, tidak lebih dari satu tahun. Namun pengalaman sebelumnya sebagai pengusaha sukses ternyata mampu membuat Kartini *survive* dan justru melejit dengan kemampuannya me-lobby banyak parpol untuk menyusun parpol gabungan dalam mengusungnya di pencalonan pemilu pada ini. Kapasitas politik praksis Kartini terlihat ketika ia menjadi satu-satunya caleg yang lolos dari PNBK di MinSel.

K.2. Proses Kandidasi

K.2.1. Persiapan Kandidasi

Kartini Simbar bisa dikatakan sebagai perempuan yang aktif berpolitik. Ini terlihat ketika ia mempersiapkan kendaraan partai politik. Ia melakukan safari politik dengan menggandeng partai kecil yang ada diparlemen dan juga partai non-parlemen. Ketika itu ia bahkan masih belum memiliki orang yang akan menjadi pasangannya.

Proses bertemunya dengan Prof Lombok terbilang unik. Sampai pada hari-hari terakhir, Kartini masih belum menentukan pasangannya. Pada awalnya Kartini memang pernah menjalin komunikasi dengan Prof. Lombok, namun

terputus karena Prof Lombok sebenarnya sudah dalam rencana untuk berpasangan dengan istri mantan Bupati Minahasa Utara (Hety Luntungan), namun dalam detik-detik terakhir calon pasangan Prof. Lombok mengundurkan diri sehingga terjadilah kontak dengan kubu Kartini Simbar yang secara kelembagaan parpol pendukung sudah siap. Prof. Lombok menjelaskan tentang hal ini:

"...Ya selain ibu Kartini, ada ibu Luntungan yang adalah istri dari bupati yang sekarang dekati saya juga. Boleh kita masuk sama-sama, oke lah, ia agak serius. Cuman karena ya ada persoalan internal partai, suaminya jadi calon gubernur dari partai yang sama. Kita dengan ibu juga di partai yang sama dengan bapak. Katanya, syarat partai, nggak boleh di satu partai. Maka *deadline*, ibu yang satu ini mundur. Pada saat ibu mundur, hari itu juga ibu yang sekarang, masuk lagi ibu Kartini...."

(Wawancara dengan Prof.Lombok, 25 Juli 2010)

Sampai jam 5 sore pada hari terakhir pendaftaran (*injury time*) masih belum ada kesepakatan dengan Prof. Lombok, akhirnya jam 19.00 Prof Lombok bertemu dengan Kartini Simbar untuk membicarakan beberapa kesepakatan, salah satunya soal pendanaan. Awalnya agak alot karena Prof. Lombok tidak yakin dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki dengan tanpa melibatkan investor, namun setelah diyakinkan akhirnya sepakat dan beberapa kesepakatan lain berkenaan dengan rencana pengelolaan pemerintahan dan program-program pembangunan yang strategis yang menurut Kartini berpihak pada pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Akhirnya pasangan ini baru mendaftar ke KPUD jam 11.30 malam atau setengah jam sebelum pendaftaran ditutup dengan hanya disertai oleh keluarga dan tim suksesnya.

Penentuan Prof Lombok sebagai pasangan ini menurut Kartini telah dipertimbangkan matang dengan melibatkan keseluruhan keluarga, tim sukses dan partai pendukungnya.

Di samping itu, Kartini juga menilai banyak kelebihan yang dimiliki oleh Prof Lombok khususnya berkaitan dengan popularitas kepemimpinannya selama ini sebagai rektor sebuah universitas negeri terkemuka di Manado. Di samping itu dari hasil diskusi ditemukan bahwa Prof. Lombok ternyata sangat peduli dengan program-program pembangunan yang memberdayakan masyarakat khususnya di desa, melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan kemampuan ekonomi produktif yang kesemuanya diliputi dengan pendekatan agama dan moral. Hanya dalam persoalan pendanaan, meskipun bersepakat untuk *sharing* namun Prof. Lombok masih ragu apakah dengan modal pribadi tersebut mampu mengalahkan calon lain yang secara finansial didukung oleh kekuatan besar di belakangnya.

Ruang komunikasi yang sempat berhenti juga dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Kartini dan Prof. Lombok seputar masalah pendanaan kampanye. Prof. Lombok sebagai mantan Rektor merasa percaya diri bahwa dedikasinya pada dunia pendidikan telah mengharumkan namanya, sehingga popularitas pasangannya akan ikut terangkat. Maka dari itu, Prof. Lombok secara eksplisit juga menyatakan popularitas itu merupakan hal yang penting dalam pemilukada, tetapi tanpa adanya dana kampanye yang cukup itu menjadi sia-sia. Prof. Lombok secara langsung memberikan syarat pendanaan dana yang nominalnya sangat besar.

"...waktu mau daftar hari terakhir tanggal dua puluh tujuh itu, lalu *dorang* telepon kita bilang kalau *dorang* memang mau kita tunggu sampai jam tujuh saya tunggu kalau lebih sampai jam tujuh kita *ndakiyo* saja. Akhirnya mereka cepat-cepat datang *kesinda*, baru kita bicara. Langsung *dorang bartanya* pertama dana, kita bilang *torang jalan saja...*"

(Wawancara dengan Kartini Simbar, tanggal 25 Juli 2010)

Beberapa kesepakatan lain berkenaan dengan rencana pengelolaan pemerintahan dan program-program pembangunan yang strategis yang menurut Kartini berpihak pada pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Akhirnya pasangan ini baru mendaftar ke KPUD jam 22.30 malam atau setengah jam sebelum pendaftaran ditutup dengan hanya disertai oleh keluarga dan tim suksesnya.

Pertimbangan Kartini dan tim pemenangnya untuk berpasangan dengan Prof. Lombok karena kapasitas, kapabilitas, dan popularitas akan mengangkat kredit poin ketika ia maju dalam pilukada seakan berbanding terbalik dengan pertimbangan Prof. Lombok kenapa pada akhirnya ia berpasangan dengan Kartini. Dengan jujur Prof. Lombok mengatakan sebenarnya Kartini adalah pilihan yang terakhir. Pada mulanya memang Prof. Lombok membangun komunikasi dengan Kartini, tetapi karena tidak terjadi kesepakatan, Prof. Lombok membangun komunikasi dengan perempuan kandidat yang lain yakni Ibu Luntungan sebagaimana disebutkan diatas. Karena dinamika politik yang ada dalam tubuh PDIP Ibu Luntungan dan Prof. Lombok gagal menggunakan PDIP untuk maju dalam Pilukada MinSel. Seperti yang dituturkan Prof Lombok :

"...kita sudah oke dengan DPP tau-tau Konferda...tau-tau ibu Mega datang, rupanya mempengaruhi opini. Harus utamakan kader partai. Saya bukan kader partai, ibu Luntungan bukan kader partai. Maka saya dipaksakan lagi harus masuk dengan ketua DPC nya. Saya pikir ini percuma, besoknya langsung mundur lagi. Pada saat saya mundur, satu dua hari kemudian, ibu Luntungan tetap ngotot. Dukung saya, bagaimanapun juga kita masuk di independen. Kita masuk di independen, dua minggu cari dukungan KTP, kita kumpul kurang lebih 20 ribu... Perorangan, sudah terdaftar, sudah oke, verifikasi final. Tinggal mendaftar, pendaftaran lagi kan. Jadi pendaftaran pertama kan verifikasi, dukungannya berupa KTP, surat-surat juga. Jadi, pendaftar yang sudah oke adalah ini..ini..ini. sekarang mendaftar sebagai peserta, batas waktu tanggal 20 juli, jadi sebenarnya saya dengan ibu Luntungan melalui independen. Sudah gagal di independen, lalu ibu Kartini muncul kedua kali, jadi seperti sekarang..."

(Wawancara dengan Prof.Lombok tanggal 25 Juli 2010)

Isu yang diangkat oleh pasangan ini diantaranya isu-isu pemberdayaan dan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, khususnya dengan sasaran sektor pertanian dan perikanan yang merupakan sumber penghidupan mayoritas masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.

K.2.2. Kandidat Dan Partai Pengusung

Kartini Simbar melakukan safari politik dengan menggandeng partai kecil yang ada di parlemen dan juga partai nonparlemen. Komposisi partai pengusung pencalonan Kartini Simbar terdiri atas Partai gabungan (PNBK, PDP, HANURA) ditambah dengan partai-partai partai non-parlemen yang secara keseluruhan mencapai 19% suara yang berarti di atas batas minimal pengajuan suara yang sebesar 15%.

Kemampuan politik Kartini teruji dalam mengkoordinasikan dan memperoleh rekomendasi dari para partai pendukung meskipun pada saat itu masih belum memiliki pasangan calon bupati. Jadi dalam proses kandidasi ini, kendaraan politik dipersiapkan oleh Kartini sedangkan Prof. Lombok justru masuk pada detik-detik terakhir sebelum pendaftaran ditutup.

Selain didukung oleh partai pendukungnya, Kartini juga merasa banyak didukung oleh para kader Golkar yang merasa kecewa karena calon yang diusung oleh Partai Golkar dianggap memiliki cacat moral, sehingga banyak yang lari ke Kartini karena dianggap status moralnya sudah jelas dan teruji dalam berbagai kegiatan sosial yang dilakukan sebelumnya.

L. SOELTJE RAMBI

L.1. Profil Kandidat

L.1.1. Biografi

Soeltje Rambli adalah seorang pengusaha yang tidak memiliki latarbelakang politik. Tetapi ia memiliki lingkungan keluarga yang berkecimpung di dunia politik. Salah satunya adalah tantenya yang berkarir di Partai Golkar, yang berjasa mengenalkan Soeltje pada dunia politik. Termasuk mengenalkannya dengan Andre yang dikemudian hari menjadi pasangan kandidat bupati.

Soeltje merupakan orang yang baru dalam dunia politik, meskipun ia memiliki beberapa anggota keluarga jauhnya yang aktif dalam dunia politik. Soeltje pada awalnya tidak tertarik untuk ikut serta. Karir Soeltje sebenarnya sebagai pegawai negeri yaitu sebagai bidan desa. Pekerjaannya sebagai bidan desa membuatnya akrab dengan "masyarakat kecil"¹. Soeltje sudah terbiasa untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari daerah pegunungan sampai pesisir. Tugasnya sebagai bidan juga mengharuskannya untuk terampil mensosialisasikan program kesehatan dari pemerintah, mulai dari Program Keluarga Berencana yang menyangkut masalah reproduksi, sampai posyandu menyangkut gizi anak. Meskipun sebagai bidan ia sudah terbiasa bertemu dengan masyarakat, tetapi menurutnya itu berbeda sama sekali ketika bertemu dengan masyarakat pada saat kampanye. Bahkan pada awalnya ia merasa ketakutan dan demam panggung.

1. Masyarakat kecil merupakan istilah yang digunakan informan untuk merujuk pada orang miskin yang ada di pedesaan

Ketika suaminya meninggal, Soeltje memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Yesus Maria Yosef (YMY) yang merupakan organisasi Katolik terbesar di Minahasa. Selanjutnya ia juga menjadi suster awam. Suster awam adalah suster yang memberikan pelayanan kepada gereja tetapi ia tidak hidup selibat seperti suster biasa yang bertarak dengan tidak bersuami dan hidup dalam gereja. Suster awam tetap memiliki suami atau berkeluarga dan hidup diluar gereja dan beraktivitas seperti orang awam pada umumnya. Tetapi suster awam ini tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pada gereja dengan menciptakan karya-karya² di rumah sakit, panti asuhan, atau di lingkungan warga.

L.1.2. Motivasi Kandidat

Pada awalnya Soeltje tidak memiliki keinginan untuk ikut bergelut dalam dunia politik. Seperti halnya kebanyakan orang, Soeltje juga memandang politik itu sebagai hal yang kotor dan licik. Tetapi karena dorongan dari tantenya dan Andre yang berusaha meyakinkan Soeltje bahwa politik itu sebenarnya baik, tergantung orang yang berkecimpung disitu. Andre juga menyatakan kalau, politik juga bisa digunakan untuk ibadah kepada Tuhan. Berikut keterangan Soeltje:

“Pada dasarnya motivasi kita itu, kecenderungan untuk melihat orang-orang yang kecil. Makanya waktu diajak komunikasi dengan Pak Andre kita mau, ini juga karena waktu dulu ada almarhum suami kita sering “pelayanan” kepada masyarakat...Ketika bertemu dengan Bapak Andre kenapa tidak masuk kedalam sistem saja bisa bantu banyak orang”

(Wawancara dengan Soeltje Rambli tanggal 25 Juli 2010)

2 Karya-karya merupakan tempat dimana suster awam ini melakukan “pelayanan” atau kerja sosial kepada umat dengan memberikan pelayanan doa

Selain itu, Soeltje juga mengungkapkan motivasinya untuk ikut maju dalam politik adalah karena dirinya adalah orang yang menyukai tantangan.

"...Kita tipe orang yang suka ditantang, makanya keluarga kaget. Ada tante bilang kamu kok sudah tidak seperti yang dulu waktu ada suami. *Ya iyo no*. Sekarang saya berani untuk ditantang, yang penting positif kang tidak menyakiti orang, menjatuhkan orang... yang penting sebelum kita turun kita berdoa dulu pada Tuhan, puji Tuhan setelah pulang kita *enjoy*, enak, ada damai gak ada beban. (Wawancara dengan Soeltje Rambi tanggal 25 Juli 2010)

Kendala umum yang dihadapi orang yang baru terjun dalam dunia politik adalah kemampuan berkomunikasi di depan publik yang membutuhkan jam terbang dan pengalaman. Maka ini tidak bisa dipelajari secara teori, tetapi hanya bisa dipraktikkan. Sehingga pengalaman dan jam terbang ikut membentuk karakter atau gaya seseorang ketika berorasi. Kecanggungan dalam berkomunikasi didepan publik ini juga dialami oleh Soeltje. Seperti yang dituturkan pada peneliti.

"...*kitorang* sebagai kader partai haruslah loyal..siap ditempatkan di mana saja, sementara banyak *torang* lihat kader parpol "...mengalir saja seperti air, tadinya kita gak tau bicara dimuka, takut sekali... Dulu kita gak berani turun kalau gak sama Pak Andre, tetapi sekarang saya termotivasi dan berani turun sendirian. Ada waktu itu undangan, ibu ini ada duka disini, setelah itu ada pertemuan dengan tokoh masyarakat. Saya pikir Cuma *kongkow-kongkow bacerita-bacerita* begitu. Eh ternyata *endak*, dia orang minta untuk kasih buka kesempatan ada tanya jawab..."

(Wawancara dengan Soeltje Rambi tanggal 25 Juli 2010) di daerah, begitu tidak dapat nomer satu langsung tarik diri..itu kan tanda tanya, kader atau bukan?"

Soeltje memaknai jabatan hanya semata sebagai instrumen untuk melakukan "pelayanan"³. Menurutnya jabatan itu tetap harus didasarkan rasa takut pada Tuhan, karena tanpa rasa takut itu, susah untuk kita berbuat

3 Pelayanan disini memiliki arti sebagai ibadah kepada Tuhan dengan cara memberikan bakti kepada masyarakat. Pelayanan dalam konsep Kristologi memiliki beberapa macam bentuk, pelayanan dalam artian yang radikal bisa dilakukan jemaat dengan mengabdikan dirinya dalam Gereja caranya menjadi Pastur atau Suster. Jika tidak bisa, pelayanan juga dapat dilakukan dengan menjadi pejabat yang baik, memberikan sedekah, atau sekedar memberikan jasa untuk mendoakan orang lain.

benar. Karena sebenarnya, Soeltje sendiri memiliki trauma terhadap kebijakan daerah yang berdampak langsung pada dirinya. Peristiwa ini terjadi ketika ia menjadi korban pergusuran dan kehilangan tiga ruko (rumah toko) miliknya di daerah Malalayang.

L.1.3. Modal Sosial

Soeltje dikenal sebagai seorang pengusaha yang dermawan. Sering ia memberikan uang, dengan tujuan amal. Total uang yang diberikanpun sangat fantastis bisa mencapai satu milyar. Sebagaimana disebutkan di atas Soeltje memiliki kegiatan sosial keagamaan sebagai suster awam. Setiap suster awam ini memiliki jemaat atau memiliki karya-karya⁴ pelayanan di rumah sakit, panti asuhan, asrama (pondok), atau karya-karya yang berada di lingkungan warga seperti RT.

Ia juga tergabung dalam jamaah Yesus Maria Yosef (YMY) organisasi Katolik terbesar di Sulawesi Utara. Soeltje juga pernah menjadi bidan desa yang mengharuskan ia aktif turun langsung ke masyarakat dan mensosialisasikan program kesehatan dari pemerintah, maupun memberikan pelayanan kesehatan. Pengalaman ini membuat ia tidak terlalu canggung untuk bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Seperti yang dituturkan oleh Soeltje ketika wawancara dengan peneliti:

"Kita sendiri punya basic kesehatan, kita pernah menjadi bidan sebagai pegawai negeri, kita keliling dari desa ke desa. Kiprahnya ya sering ketemu masyarakat desa. Kita suka pergi ke desa pesisir pantai. Waktu ketemu dengan almarhum suami, ia pengusaha, jadi kita tidak menarik biaya lagi. Sering kita bawa obat untuk masyarakat." (Wawancara dengan Soeltje Rambi tanggal 25 Juli 2010)

4 Karya-karya merupakan tempat dimana suster awam ini melakukan "pelayanan" atau kerja sosial kepada umat dengan memberikan pelayanan doa

L.2. Proses Kandidasi

L.2.1 Persiapan Untuk Kandidasi

Karena latarbelakangnya sebagai suster awam, persiapan yang ia lakukan pertama kali adalah *mondok* di Gereja Bukit Maria selama beberapa hari. Disana ia berpuasa dan berdoa dengan didampingi rekan-rekan suster dan suster awam. Merasa mendapatkan restu dari Tuhan dan Gereja, ia pun memutuskan untuk maju. Gereja memberikan dukungannya bukan sekedar doa, tetapi menggerakkan suster dan suster awam yang memiliki jemaat dan juga karya..

Sebelum memutuskan untuk maju, Soeltje juga melakukan safari politik secara langsung terjun kemasyarakat. Safari ini dilakukan untuk melakukan penjajakan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap dirinya, selain itu ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Safari politik dilakukan secara sadar oleh Soeltje dengan pertimbangan, ketika seseorang memutuskan untuk ikut dalam pemilu, maka popularitas seorang kandidat itu menjadi modal untuk bisa dipilih oleh masyarakat.

"...2009 akhir untuk masuk dalam kompetisi ini, tapi sebelum memutuskan kita ada jalan dulu ke kampung-kampung. Orang juga belum kenal kita, kalau kita mau maju orang harus kenal dulu toh..." (Wawancara dengan Soeltje Rambi tanggal 25 Juli 2010)

Latar belakang Soeltje sebagai bidan desa, menginspirasi dirinya untuk membangun Minahasa Selatan dengan mengutamakan pembangunan masyarakatnya. Menurutnya, sebuah daerah akan maju jika memiliki SDM yang berkualitas, maka baginya kesehatan masyarakat harus diutamakan. Untuk selanjutnya inspirasi ini mempengaruhinya ketika merumuskan visi dan misi. Secara singkat visi dan misi Andre

dan Soeltje adalah "Menjadikan Minahasa Selatan Negeri Serba Mudah Dengan Manajemen Kebenaran.". Sedangkan misinya di antaranya: (1) Menyehatkan rakyat dan lingkungan hidup (*true health governance*); (2) Membuat rakyat pintar (*true education governance*); (3) Memfasilitasi rakyat untuk bekerja (*true working governance*) [sic], (4) Membangun desa (*good village governance*); (5) Membangun infrastruktur penunjang yang handal (*true infrastructure governance*); (6) Meng-HANDALKAN-kan PEREKONOMIAN daerah (*good regional economi governance*).

Semua MISI yang dicanangkan ini akan dilaksanakan dengan manajemen kebenaran yang pada dasarnya adalah pilar dari *good and clean government*. Intinya membangun sistem kesehatan dan memberikan akses dan pelayanan prima di bidang kesehatan kepada seluruh rakyat, khususnya mereka yang kurang mampu mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan. Idealnya, akses kesehatan dibuat semurah mungkin untuk dapat diakses oleh semua kalangan. Melanjutkan kebijakan pendidikan murah secara benar, artinya implementasi pendidikan murah harus terealisasi. Datangi masyarakat, tinggal dengan masyarakat, mulai dari apa yg masyarakat miliki, belajar dan bekerja dengan masyarakat.

Sebagai satu-satunya calon yang memiliki latar belakang agama Katolik, Soeltje melakukan *branding* dengan memosisikan sebagai pasangan yang bergerak berdasarkan nilai-nilai "kebenaran" yang telah ditunjukkan Yesus. *Branding* ini juga nampak pada visi dan misi yang dipaparkan oleh peneliti di paragraf sebelumnya. Tentu saja, dalam upayanya melakukan *branding*, Soeltje juga memiliki modal sosial, yaitu statusnya sebagai suster awam.

Perjumpaan Soeltje dengan dunia politik adalah ketika pada pemilu legislatif tahun 2009, ia ditawari oleh tantenya agar bersedia dicalonkan Partai Golkar sebagai anggota legislatif. Menurut Soeltje, tawaran ini datang padanya tidak terlepas dengan adanya kuota 30% untuk perempuan. Karena belum pernah terpikir untuk masuk dalam dunia politik, maka Soeltje pun menolaknya dengan sambil bercanda, "*Kenapa tante tidak mencalonkan torang untuk bupati saja*". Ternyata, candaan itu berujung pada dimasukkannya nama Soeltje pada bursa bakal calon untuk Bupati Minahasa Selatan dari Partai Golkar. Tetapi Soeltje kalah bersaing dengan calon lainnya. Rupanya semangat yang pada awalnya hanya sekedar bercanda, malah memotivasinya dan tertantang untuk terjun dalam pemilukada secara serius. Bahkan untuk selanjutnya, Soeltje juga pernah melamar PDIP sebagai kendaraan politiknya dalam pemilukada. Karena dianggap syarat yang diajukan PDIP tidak sesuai dengan tawarannya, maka ia memutuskan untuk maju melalui jalur independen.

"...awalnya waktu itu banyak ajakan dari partai politik untuk ikut jadi caleg, keterwakilan perempuan. Tapi *ndak* lah, banyak *sodara iko*. Baru waktu itu Golkar menghubungi kita, tapi saya tolak, aduh terimakasih tawarannya tapi kita belum serius kesitu. Akhirnya kita iseng, gimana kalau jadi bupati saja, sekalian pengambil kebijakan... Pernah *torang* komunikasi dengan PDIP, tetapi dalam PDIP sudah bulat. Siapapun bupatiya, wakilnya tetap Pak Wongkar."

(Wawancara dengan Soeltje Rambi tanggal 25 Juli 2010)

Selanjutnya, untuk menentukan pasangan, ia cenderung memilih orang yang telah ia kenal dan percaya. Ini terbukti ketika ia dilamar partai lain untuk menjadi pasangan cawabup, ia mengajukan syarat bersedia asal calon bupatiya tetap Bapak Andre. Menurut Soeltje, yang paling susah untuk memilih calon adalah mencari calon yang berani membangun komitmen bersama.

L.2.2. Kandidat dan Pasangan

Mencalonkan melalui jalur independen tentu merupakan kerja berat karena absennya mesin politik yang sudah memiliki struktur organisasi yang rapi, yang memiliki konstituen atau basis pendukung sampai level desa maupun RT. Terlebih lagi, pengalaman pernah mengikuti pemilu bagi kandidat atau tim pengusungnya, ikut menentukan kemenangan berkaitan dengan soliditas, penguasaan medan, dsb.

Pada akhirnya, pasangan Andre dan Soeltje bersepakat untuk membagi beban kerja. Soeltje yang memiliki latar belakang sebagai suster awam, memiliki jemaat yang jelas, berkonsentrasi pada konsituen yang beragama Katolik. Dengan melakukan *branding* kesalehan agamanya, Soeltje ingin memaksimalkan dukungan dari masyarakat Katolik. Menggerakkan tarekat suster awam yang juga memiliki karya-karya pelayanan di Rumah Sakit, Panti Asuhan, Asrama (pondok), atau karya-karya yang berada di lingkungan warga seperti RT. Soeltje juga meminta dukungan terbuka kepada asosiasi agama tempat ia berorganisasi yaitu YMY.

Sedangkan Andre Umboh bukanlah orang baru didunia politik. Andre merupakan orang yang pernah berkarir di partai politik yakni di PDIP. Bahkan, Andre pernah terpilih menjadi anggota legislatif Minahasa Selatan, dan menjabat hampir lima tahun. Karena pengalamannya inilah, Andre akan berkonsentrasi untuk menghidupkan kembali konsituen yang pernah memilihnya dan “dibina”nya. Konstituen yang dekat dengan Andre ini, yang kemudian hari menjadi relawan-relawan tim pemenangan Andre-Soeltje ketika maju dalam pilukada.

M. FELLY ESTELITA RUNTUWENE

M.1. Profil Kandidat

M.1.1. Biografi

Felly Estelita Runtuwene, perempuan asli Minahasa Selatan ini adalah ibu dari dua orang anak yang sudah beranjak dewasa. Saat masuk dalam proses kandidasi papan dua di MinSel, Felly sedang menduduki jabatan publik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut dari PDS (Partai Damai Sejahtera). Pernah pula aktif sebagai pengurus KADIN. Suaminya adalah pengusaha yang lebih banyak berkiprah dan tinggal di Jakarta. Dalam keluarga besarnya, Felly adalah orang pertama yang terjun ke dunia politik. Karena kiprah keluarga besarnya dalam ranah publik hanya sebatas sebagai birokrat.

M.1.2. Motivasi Kandidat

Berawal dari dorongan teman-teman sekitar lima tahun yang lalu saat ia menjadi pengurus KADIN di Sulut untuk maju dalam proses kandidasi. Alasan yang dikemukakan teman-temannya ketika itu adalah Felly bisa berbuat sesuatu untuk orang banyak, bisa memperbaiki hal-hal yang tak beres. Mulanya ia menolak dorongan teman-teman itu, sebab baginya dunia politik tak bisa hanya coba-coba.

Namun demikian, perkembangan belakangan setelah ia keluar masuk kampung, dan mendalami peran-peran pemerintah, keinginan untuk menggapai peran-peran pemerintahan itu mulai tumbuh. Sebagaimana dikatakan Felly:

“Berawal mau tahu ini pemerintah punya selera, punya apa sih pemerintah untuk masyarakat? Banyak aset yang tidak tergunakan dengan maksimal. Seakan-akan cuma proyek saja. Dari situ lama-lama ya jadi keinginan yang luar biasa sekali...”. (Wawancara dengan Felly Runtuwene, tanggal 27 Juli 2010)

Lebih jauh lagi, ia juga melihat potensi spesifik Sulut sebagai provinsi yang kaya dengan tanaman kelapa yang di ekspor, tapi petani kelapanya tak bisa merasakan hasilnya. Bahkan untuk ini, Felly mencari tahu lebih dalam dengan cara datang dan berkonsultasi ke Balai Besar Bogor, LIPI Jakarta, dan studi melalui internet. Upaya Felly ini sempat dikritik oleh seseorang, *“...bu kok mau mencari tahu masalah VCO kelapa segala? Jangan menjadi pahlawan kesiangan deh. Nanti Ibu bisa berhadapan dengan sekelompok orang yang kayaknya natap tembok...”* Tetapi Felly kukuh dengan keyakinan, bahwa jika berpihak pada masyarakat, maka tak akan *natap* (membentur) tembok, karena masyarakat ada di belakang untuk mendukungnya.

Jadi, motivasi utama untuk maju dalam kandidasi berawal dari sebuah kegeraman melihat kondisi obyektif di lapangan. Dalam persepsinya, pemerintah daerah seharusnya bisa berbuat banyak untuk melakukan perbaikan hidup masyarakatnya. Namun, upaya perbaikan itu dirasa tak optimal dilakukan oleh pemerintah daerah.

M.1.3. Modal Sosial

Sebagai pengusaha dan istri pengusaha besar, serta sebagai pengurus KADIN, Felly tak sekadar dikenal di tingkat lokal, tapi bahkan nasional. Setidaknya, mantan Ketua KADIN yang saat ini menjadi menteri, Hidayat, secara khusus usai mengisi kegiatan KADIN di Sulut ketika diberitahu pengurus KADIN yang lain bahwa Felly akan maju dalam proses kandidasi, serta merta mendukungnya.

Sementara sebagai perempuan kelahiran Minahasa Selatan, walaupun sempat berkarir di Jakarta mengikuti suami,

sebelum seperti saat ini berkarir sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tetap memiliki jejaring keluarga inti di Minahasa Selatan.

Tak kalah pentingnya adalah jejaring sosial “denominasi Gereja”, khususnya sebagaimana dimiliki oleh Asiano Gammy Kawatu (pasangan papan satu Felly) yang berposisi sebagai Wakil Gereja dari Minahasa. Dalam struktur masyarakat Minahasa, Gereja merupakan institusi keagamaan yang memiliki pengaruh politik cukup kuat. Setidaknya, hal ini diyakini Gammy:

“Denominasi Gereja...cukup kuat...saya Wakil Gereja dari Minahasa. Soliditas itu ada di sana. Secara politis juga bagus, dukungan massa ya juga terbuka di Gereja”.

Lebih khusus lagi, sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulut, dan Plt. Bupati Minahasa Selatan ini memiliki jaringan pengaruh di jajaran birokrasi Minahasa Selatan. Apalagi bila mengingat ayah Gammy yang mantan camat di Minahasa Selatan. Mengenai modal sosial terkait jejaring birokrasi ini, Gammy mengatakan,

“...saya punya latar belakang birokrat, pernah bekerja di sana. Mudah-mudahan ketika saya bekerja cuma tiga bulan di sana menjadi pejabat bupati, katanya turut simpati dengan saya. Ada dukungan dari birokrasi di sana”. (Wawancara dengan Gemmy Asiano, tanggal 25 Juli 2010)

M.1.4. Modal Politik

Saat maju dalam proses kandidasi, Felly sedang berkedudukan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2009-2014 dari Partai Damai Sejahtera. Dalam konstelasi politik lokal di Provinsi Sulawesi Utara umumnya dan Kabupaten Minahasa Selatan khususnya, Partai Damai Sejahtera dapat dikategorikan sebagai partai peringkat menengah. Felly sendiri menjadi salah seorang pengurus Partai Damai Sejahtera.

Sebelum bergabung dalam kepengurusan Partai Damai Sejahtera, Felly sempat ditawari bergabung dan langsung memegang kepengurusan di Partai Golkar di Kabupaten Minahasa Selatan. Tawaran bergabung dengan Partai Golkar itu ditolaknya, karena terkait dengan keharusan struktural menggeser kedudukan *family*-nya yang telah lebih dahulu ada di kepengurusan Golkar. Ia merasa tak enak hati karena harus melanggar mekanisme pengkaderan partai Golkar:

"...kita di Golkar ditawari pertama kali lima tahun lalu untuk menggantikan Ketua Golkar di Minahasa Selatan. Waktu itu saya bilang, 'waduh yang pegang di sana masih saudara saya, tante saya.' Dan saya tahu kalau Golkar ini kaderisasinya yang bagaimana gitu...koq tiba-tiba saya harus duduk di situ. Masak saya harus injak orang lain?"

(Wawancara dengan Felly Runtuwene, tanggal 27 Juli 2010)

Awal keberadaan Felly di kepengurusan Partai Damai Sejahtera bermula dari ajakan temannya satu Gereja sekitar tiga tahun lalu. Ajakan itu dilakukan berulang yang kemudian membuatnya tak nyaman jika tak memenuhinya, seperti yang diungkap Felly,

"Kebetulan teman satu gereja kita di PDS yang mendorong terus ke situ... Saya bilang nggak deh, saya harus pulang pulang ke Sulawesi...ia telpon, ia giring. Karena kita nggak enak udah ulang-ulang begitu, saya cuma saking nggak enak aja... ya udah gitu".

(Wawancara dengan Felly Runtuwene, tanggal 27 Juli 2010)

Dengan demikian keanggotaannya di dalam Partai Damai Sejahtera dan kedudukan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara menjadi modal politik utama Felly dalam kandidasi. Disamping itu, menetapkan pilihan pasangan seorang lelaki yang pernah menjadi pelaksana tugas Bupati Minahasa Selatan, menjadi modal politik juga bagi Felly.

M.2. Proses Kandidasi

M.2.1. Persiapan Kandidasi

Ketika Felly memutuskan untuk maju dalam proses kandidasi ia tak menyadari posisi khususnya sebagai perempuan. Dalam konstruksi kesadaran berpikirnya, perempuan dan lelaki tak ada bedanya secara sosial. Seperti dikatakannya:

"... saya nggak mikir sampai kesana, bahwa saya perempuan atau tidak. Saya pikir toh laki-laki sama dengan perempuan... mungkin yang nggak bisa di laki-laki, perempuan bisa... Jadi kita pikir nggak ada beda".

Meskipun demikian, keberadaan diri sebagai perempuan dalam beberapa momen politik kandidasi memang dirasa menguntungkan. Untuk hal ini Felly mengatakan,

"....untuk momen-momen tertentu diuntungkan sebagai perempuan. Misalnya, kalau laki-laki dalam politik kadang-kadang ada yang keras. Tapi, mungkin karena (kita) perempuan, maka mereka lebih gimana ya...? Lebih nggak enak kali ya kalau menyerang kalau ada *gap*". (Wawancara dengan Felly Runtuwene, tanggal 27 Juli 2010)

Setidaknya di depan umum, menurut persepsi Felly, ada momen yang membuat dirinya sebagai perempuan diuntungkan dalam dinamika politik dengan lelaki. Namun dalam ruang politik yang tak tampak oleh umum, lelaki memperlakukan perempuan sama dengan lelaki:

"...kalau di depan umum mungkin itu yang mereka perlihatkan..., tapi kalau di belakang meja nggak, berusaha mereka gunting gitu. Apa yang mereka lakukan ke laki-laki, mereka lakukan juga ke perempuan"

Secara khusus, dalam ranah domestik, Felly tak seketika mendapat persetujuan dan dukungan suami serta anak-anak saat mengutarakan hendak maju dalam kandidasi. Felly memerlukan waktu berulang kali untuk meyakinkan suami

dan anak-anaknya. Apalagi jarak tempat tinggal mereka, oleh sebab profesi, berjauhan, yaitu Jakarta – Manado, sehingga perlu waktu agak lama untuk berkomunikasi meyakinkan suami dan anak-anaknya. Perihal sikap suaminya diungkapkan oleh Felly:

"...Memang awalnya ia nggak begitu *support*. Ya, karena ia tidak bisa ngebayangin, selama ini aja udah terganggu hubungan kita karena membagi waktu... ia di Jakarta, kita di sini...Tapi kita kasih tahu lagi, kita kasih penjelasan bahwa...banyak orang ingin berbuat lebih, tapi mereka tak mendapat kesempatan. Sementara saya kan sering mendapat kesempatan...Pada saat datang saya sampaikan *bla..bla..bla...* Akhirnya mungkin keinginan kita begitu kuat...ia paham...ia bikin dukungan penuh".

(Wawancara dengan Felly Runtuwene, tanggal 27 Juli 2010)

Begitu juga dengan anaknya yang terbesar, yang sudah kuliah, awalnya keberatan dengan rencana pencalonan Felly. Keberatan anak sulung ini terungkap dari ucapan anaknya yang diutarakan kepada Felly, "*Apa Mama bisa me-manage semua? Udahlah Ma, nggak usah pusing-pusing, ntar mama malah sakit lagi!*". Seperti halnya saat meyakinkan suaminya, kepada anak tertuanya pun Felly butuh waktu untuk menjelaskan. Pada ujungnya, anak sulung Felly pun dapat teryakini, "*Ya udah kalau mama emang maunya begitu, terserah mama deh!*".

Bukti dukungan anak-anaknya itu ditunjukkan lewat kehadiran mereka dari Jakarta dalam deklarasi dan hajatan pencalonan Felly. Sekaligus, momentum kandidat itu dijadikan sarana meningkatkan kepedulian anak-anaknya terhadap daerah asal ibunya. Seperti dikatakan Felly,

"Kemarin datang dua-dua waktu saya deklarasi, kemudian ada acara syukuran, pengucapan syukur di daerah, kayak hajatan. Emang anak-anak ini jarang pulang, tidak begitu suka. Jadi dengan begini mau nggak mau biarlah mereka tahu mamanya punya daerah dan jangan terlalu *cuek* gitu".

(Wawancara dengan Felly Runtuwene, tanggal 27 Juli 2010)

Setelah bisa meyakinkan lingkungan keluarga intinya dan mendapat dukungan penuh, hal berikut yang dilakukan sebagai persiapan kandidasi adalah memastikan partai pengusung. Jalur partai dipilih, karena Felly memiliki basis partai, yaitu PDS. Di MinSel, PDS memiliki 2 kursi di DPRD. Sementara persyaratan pencalonan adalah 5 kursi. Untuk itu, Felly membutuhkan dukungan gabungan partai untuk memenuhi persyaratan kekurangan minimal 3 kursi. Dalam proses menegosiasi partai gabungan itulah Felly membuka kembali komunikasi dengan Asiano Gammy Kawatu untuk menjadi pasangan. Gammy, anak mantan camat di MinSel ini adalah pejabat birokrasi (asisten bidang ekonomi dan pembangunan) di Provinsi Sulut dan pernah menjabat Plt. Bupati MinSel pada awal 2005. Dalam pandangan Felly, Gemmy merupakan sosok pejabat pemerintah yang memiliki reputasi dan bersih,

"...ia kan incumbent juga, walaupun tinggal sekian bulan [waktu persiapannya]. Orang ini relatif bersih selama ia menjabat apa saja... ia memang diperebutkan oleh pasangan-pasangan lain".

Mengingat reputasi itulah, maka dalam komunikasi politik yang berlanjut dan pada tahap akhir pendaftaran pasangan calon, disepakati posisi Felly di papan dua (calon wakil bupati) dan posisi Gammy di papan satu (calon bupati). Nalar yang dikemukakan Felly:

"Tidak mungkinlah ia sebagai calon wakil bupati, sementara ia telah pernah pelaksana tugas bupati, dan ia punya posisi tetap asisten dua di provinsi, itu kan nggak masuk akal".

Isu utama yang diusung Felly dalam proses kandidasi adalah masalah kesehatan. Bahwa isu kesehatan juga diusung kandidat lain, diakui oleh Felly. Namun yang membedakannya dengan kandidat lain adalah Felly merasa lebih serius:

"Kalau kita lihat sama, tapi serius tidaknya disitu aja bedanya...saya rasa begitu, saya lebih serius".

Yang tak kalah penting berikutnya adalah persiapan dana. Peneliti tak memperoleh data kuantitatif menyangkut besaran dana yang dikeluarkan pasangan tersebut, tapi secara kualitatif diakui oleh Felly bahwa untuk kandidasi ini niscaya ada dana, khususnya kontribusi bagi 6 partai pengusung.

"Ada kontribusi, jadi tetap kontribusi. Uhh...jaman sekarang, mana ada yang *free? Even*, saya punya partai sendiri... apa yang kita berikan ada pembagian DPP sekian, DPD I sekian, dan DPD II sekian."

Perihal pentingnya dana ini juga dipertegas oleh Asiano Gammy Kawatu dalam konteks dinamika baru masyarakat MinSel yang cenderung pragmatis:

"...memang saya rasakan bahwa jadi calon bupati dan wakil bupati tanpa duit susah sekarang. Karena masyarakat banyak yang pragmatisme, dan saya juga nggak nyangka di Minahasa Selatan jadi seperti itu".

Fenomena uang itu diyakini Gammy sebagai hal yang baru berkembang belakangan di Minahasa Selatan. Kesiapan dana ini pula yang menjadi salah satu dasar pertimbangan Gammy memilih berpasangan dengan Felly, setelah Gammy gagal kontrak dengan PDIP. Kegagalan kontrak untuk menjadikan PDIP sebagai partai pengusung dikarenakan kecukupan dana:

"..dan akhirnya saya tahu, saya tidak mendapatkan partai itu, karena saya tidak punya duit, tidak punya uang banyak".

Perihal Felly, Gammy mengaku:

"Iya, saya sudah mengenal Ibu Felly. Saya tahu ia anggota legislatif. Saya tahu ia ada uang. Saya tahu ia juga ada massa. Maka, secara politik saya menilai bahwa ia pilihan terakhir saya yang paling pas. Jadi saya berpikir realistis, bahwa Ibu Felly bisa mendapatkan itu, dan dari segi popularitas, kemudian dukungan finansial, kemudian untuk bertarung, saya lihat ada pada Ibu Felly".

M.2.2. Kandidat dan Partai Pengusung

Pasangan Felly dan Gammy saat mendaftar resmi ke KPU Kabupaten MinSel diusung oleh gabungan 6 partai yang setara dengan 7 kursi di DPRD MinSel. *Leading party*-nya adalah PDS yang memiliki 2 kursi di DPRD MinSel, yang sekaligus partai tempat Felly menjadi pengurusnya. Partai lainnya adalah Barnas, PPRN, PKPB, PDP, dan satu partai lagi. Adapun partai pendukung non-parlemen adalah PBB dan Partai Karya Perjuangan.

Diakui oleh Felly dan Gammy, bahwa tak mudah dan tak murah untuk mendapat kendaraan partai. Setidaknya dari sisi nominal, biaya yang diperlukan untuk partai itu mengambil porsi sekitar 20% dari total biaya yang dikeluarkan kandidat. Seperti dikatakan Gammy:

"Partai mungkin 20-an persen. Kemudian untuk publik 60 %, dan 20 % untuk operasional kita".

Dengan dana besar bagi peruntukan partai itu, tak serta merta dukungan dan kinerja partai pengusung dan partai pendukung berjalan optimal. Sebagaimana dikeluhkan oleh Felly:

"...Awalnya juga kita *ndak* mulus. Banyaklah hal yang dibuat oleh oknum-oknum dari partai ini yang ada di DPD I, bahkan DPD II. Tapi begitu turun kesini aduhh, banyak sekali hambatan. Jadi perlu kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi mereka satu-persatu. Apalagi mereka ini pemimpin partai dan anggota dewan. Mereka yang mempunyai kursi. Mereka yang duduk di anggota Dewan di Kabupaten Minahasa Selatan".

(Wawancara dengan Felly Runtuwene, tanggal 27 Juli 2010)

Lebih lanjut lagi Felly menegaskan bahwa partai lebih banyak berorientasi material daripada benar-benar optimal mendukung:

"Awalnya mereka mencoba menyulitkan saya, bahkan mencoba mempengaruhi DPP untuk menggantikan SK yang sudah dikeluarkan. Tapi ini ujung-ujungnya duit juga".

Keluhan Felly perihal peran partai yang tak optimal mendukung dalam kandidasi itu diperkuat oleh Gammy. Dalam ungkapan Gammy dikatakan:

"Setengah-setengah ya.. setengah optimal...pasif lah. Ya, mereka bekerja juga kecil".

Terobosan jalan yang dilakukan Felly untuk mengatasi hambatan partai pengusung dari level lokal adalah dengan menerobos partai ke level DPP,

"Kita ke DPP memang. Lebih baik kita pegang dulu dari atas, nanti dari atas tinggal bagaimana ke bawah. Walaupun kita menghadapi mereka ya luar biasa juga. Mereka juga mencoba menggagalkan sampai detik-detik terakhir". (Wawancara dengan Felly Runtuwene, tanggal 27 Juli 2010)

Namun, semua upaya partai untuk mengganggu itu tak membuat Felly dan Gammy patah arang. Justru gangguan itu makin menggumpalkan semangat dan menjadi kenikmatan politik tersendiri untuk mengatasinya. Dalam ungkapan Felly dikatakan:

"Itu tantangan buat saya. Justru itu memang nikmat setelah kita mendapatkan itu semua.."

M.2.3. Kandidat Dan Lembaga Penyelenggara Pemilukada

Lembaga penyelenggara yang dimaksud disini adalah KPU MinSel dan Panwaslu. Relasi antara pasangan Felly-Gammy dengan penyelenggara pemilukada hingga saat proses kandidasi, cenderung bersifat formal dan fungsional. KPU MinSel dan Panwaslu cenderung bersikap dan menegakkan regulasi dengan mengacu ketentuan yang dibuat KPU Pusat dan Bawaslu. Sehingga, tak ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan kandidat ataupun laki-laki kandidat.

Aturan kandidasi nyaris tak berperspektif gender.

M.2.4. Kandidat Dan Institusi Sosial

Institusi sosial yang lekat terkait dengan Felly dan Gammy terutama adalah Gereja dan dunia usaha (KADIN). Relasi dengan institusi Gereja terjalin tak sekadar karena Felly menjadi jemaat Gereja dan Gammy menjadi pengurus Gereja, tapi juga ditopang oleh kontribusi bantuan material yang secara periodik dilakukan Felly dan Gammy terhadap Gereja. Sedangkan relasi dengan kalangan pengusaha, terpupuk terutama melalui posisi Felly yang juga pengurus KADIN.

Di sisi lain secara personal Felly memang merasa memiliki kelebihan kemampuan *me-lobby*. Sehingga memudahkannya berkomunikasi dan mengembangkan jejaring sosial dengan institusi sosial yang ada di Minahasa Selatan. Perihal kemampuan *me-lobby* ini diyakini oleh Felly sendiri, bahwa dirinya terlatih untuk itu

"Ya, saya kira itu...Saya kira apa yang saya jalani ketika lobby aja, gimana kita menjalin hubungan dengan orang-orang tertentu".

BAB VI

KANDIDASI PEREMPUAN DALAM KEPOLITIKAN LOKAL

Sebelum tahun 1965 sebetulnya keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah barang asing, sejumlah organisasi dan tokoh perempuan yang bisa dikategorikan progresif telah lama mewarnai percaturan politik Indonesia. Sejumlah perempuan juga tercatat menjabat sebagai menteri: Maria Ulfa Soebandrio sebagai menteri sosial dan SK Trimurti sebagai menteri perburuhan. Peran perempuan dalam politik ketika itu bukanlah sesuatu yang tabu. Namun ada pergeseran besar yang terjadi setelah Orde Baru berkuasa. Peran perempuan lebih diarahkan pada sektor domestik, mereka disusutkan perannya dengan hanya menjadi pendamping bagi suaminya yang menjadi pejabat di pemerintahan. Organisasi perempuan progresif tidak ditemukan pada masa ini, karena ada ancaman dicap sebagai "Gerwani". Peran serta perempuan dalam politik otomatis mengalami kemunduran.

Pada era 1980-an, peran aktif perempuan dalam permasalahan sosial dan politik mulai muncul kembali, walau dalam skala dan sebaran yang tidak masif, alih-alih berupa "gerakan" keterlibatan perempuan saat itu masih terbatas di dalam bentuk "kelompok". Umumnya kelompok kesadaran perempuan ini muncul dalam bentuk yang kemudian dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat. Peranan kelompok-kelompok seperti ini menjadi semacam kaderisasi bagi perempuan dan pada perkembangannya kemudian *locus*-nya menjadi makin menyebar di berbagai penjuru Tanah Air, sehingga ketika reformasi politik terjadi pada Mei 1998, buah dari kaderisasi ini telah cukup siap untuk menjadi gerakan. Gerakan perempuan pada awal reformasi ini memperjuangkan agar tercipta kesetaraan untuk perempuan di segala bidang, sembari mengawal berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bernuansa

gender. Selanjutnya selain memperjuangkan kesetaraan melalui advokasi dan pendampingan, gerakan perempuan juga mengusahakan agar tersedia tempat bagi mereka di ruang politik. Alasannya perempuan harus memiliki posisi pengambilan keputusan secara publik jika ingin mengubah nasibnya secara sistematis. Ini dijalankan dengan mendorong partai peserta pemilu untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan dan dengan cara melobi berbagai kebijakan pemerintah supaya memberi ruang bagi perempuan di ranah politik.

Menjelang Pemilu 2004 advokasi mulai diarahkan untuk memperjuangkan kepastian hukum peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, antara lain dengan menysasar paket UU Politik termasuk dengan cara memperjuangkan agar *affirmative action* tercantum dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu. Stategi ini rupanya menampakkan hasilnya dengan naiknya jumlah perempuan di parlemen hasil Pemilu 2009 sebanyak 18%, suatu jumlah tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Jika kuantitas perempuan di dalam parlemen naik, bagaimanakah di tingkat eksekutif? Gerakan perempuan rupanya lebih memfokuskan diri kepada legislatif sehingga upaya di tingkat eksekutif belum tergarap dengan sama baiknya. Penerapan kuota atau *affirmative action* lainnya di tingkat undang-undang yang terkait jabatan publik belum menjadi *mainstream* dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Walau begitu kita tetap bisa menyaksikan adanya kenaikan minat dari perempuan untuk terlibat di dalam jabatan-jabatan eksekutif, termasuk mengincar jabatan eksekutif di tingkat daerah yang mereka masuki melalui keikutsertaannya dalam pemilukada. Tentu fenomena ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh lagi.

Pemilukada dan pemilu pada umumnya, secara tradisional sering dipandang sebagai kontestasi yang bersifat maskulin. Para kontestan menghadapi analogi-analogi yang khas maskulin seperti: 'berjuang',

'memenangkan', 'menghadapi', 'melawan' dan 'menyerang'. Penggunaan analogi semacam dalam pemilu mulai dipertanyakan ketika ada realitas bahwa perempuan juga telah memasuki ranah kontestasi pemilu, termasuk pemilukada. Apakah sifat kontestasi di dalam pemilu itu yang tadinya maskulin lalu mengalami perubahan-perubahan?

Studi mengenai kandidasi perempuan dalam pemilukada ini mengeksplorasi tiga aspek. Pertama, mendeskripsikan kemunculan perempuan kandidat, khususnya berkaitan dengan motivasi perempuan kandidat untuk maju atau *run for office* dalam pemilukada di kabupaten/kota. Kedua, mengeksplorasi proses mengapa seseorang akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi kandidat, baik lewat jalur perseorangan maupun jalur partai politik. Ketiga mengeksplorasi proses kandidasi perempuan di pemilukada.

Di dalam aspek yang pertama, studi ini berupaya memahami kemunculan perempuan kandidat dalam konteks kualitas pemerintahan yang demokratis dan memiliki legitimasi politik. Titik tekan pada aspek ini adalah untuk mengevaluasi keuntungan alam demokrasi yakni sejauhmana warganegara berkeinginan untuk mengikatkan diri pada sistem politik dan mencari jabatan publik. Legitimasi demokrasi sebagai justifikasi sentral dalam mengeksplorasi pencarian jabatan publik, sebagai bagian dari penggambaran representasi politik kaum perempuan. Bagaimanapun juga perempuan mengambil keputusan awal untuk mencari jabatan pasti terkait dengan isu dasar representasi politik.

Yang dilihat dari aspek kedua adalah bagaimana kandidat potensial berupaya mencari jabatan sebagai respon atas struktur peluang politik bagi perempuan. Artinya bagaimana perempuan mengubah *nascent ambition* menjadi *expressive ambition* sehingga akhirnya memutuskan untuk "*running*" dalam pemilukada. Titik tekan pada aspek ini adalah bagaimana perempuan secara aktual mengekspresikan keinginan,

dorongan atau kontemplasinya untuk maju dalam pemilu, baik lewat jalur perseorangan ataupun jalur partai politik. Joseph Schlesinger dalam tulisannya *Ambition and Politics* (1966) dengan paradigma *rational choice*-nya berupaya memahami keputusan seseorang untuk maju dalam mencari jabatan. Kerangka yang dipakai berkaitan dengan konseptualisasi ambisi politik sebagai respon paling strategis atas struktur peluang politik. Lebih spesifik dijelaskan bahwa kandidat politik lebih mungkin mencari jabatan ketika mereka menghadapi keadaan struktural dan politik yang *favorable* bagi dirinya.

Adapun aspek yang ketiga akan mengeksplorasi dimensi-dimensi politik lokal yang ikut berpengaruh dalam kandidasi perempuan di pemilu, seperti aspek sosial dan politik lokal.

Berpijak pada tiga aspek tersebut, studi tentang kandidasi ini merupakan studi kritis karena memberikan pandangan tentang apa dan bagaimana seseorang bisa maju sebagai perempuan kandidat dalam pencarian posisi politik. Tangga karir politik seseorang umumnya dimulai dari level lokal bergerak ke level nasional. Oleh sebab itu keputusan awal para perempuan untuk maju sebagai pemegang jabatan di kabupaten menjadi dasar dalam penelitian ini. Dengan demikian dalam studi ini akan dieksplorasi konsepsi kemunculan ambisi politik atau *nascent ambition* (Fox dan Lawless, 2005; Paul S Hermson dan J Celeste Lay dan Atiya Kai Stokes, 2003), kepentingan yang embrionik atau potensial dalam pemilu baik dalam jabatan sebagai bupati atau wakil bupati yang mendahului keputusan aktual untuk masuk ke dalam kontestasi politik di kabupaten.

Dengan demikian studi ini memfokuskan pada alasan mengapa perempuan maju dalam kandidasi. Ada beberapa alasan perempuan maju dalam kandidasi. *Pertama*, *inner desire* perempuan kandidat. Dalam kontestasi politik, ketika perempuan menginginkan mencapai kekuasaan melalui pemilihan umum maka perempuan tersebut harus memiliki *inner desire*

sebagaimana laki-laki dalam rangka mencapai kekuasaan, ini karena corak politik yang bersifat maskulin. Posisi tradisional perempuan membatasi hasrat perempuan untuk memasuki ruang-ruang sosial di luar lingkup keluarga. Sehingga menarik untuk mengkaji kehendak seperti apa yang melatarbelakangi mereka ini untuk maju. *Kedua*, modal sosial, ekonomi dan politik perempuan merupakan basis yang sangat penting ketika perempuan memutuskan untuk *running for office*. Dalam politik, ekspektasi terhadap kualitas, penampilan dan perilaku kandidat sangat mengikuti *stereotype* gender. Pemimpin yang tangguh, dominan dan asertif, akan lebih *favorable* di mata pemilih, kualitas selalu lebih diasosiasikan dengan maskulinitas daripada feminitas. Internalisasi pandangan bias gender di kalangan pemilih dan bahkan petinggi parpol, berimplikasi pada prasyarat kualitas intelegensia, pemilihan basis massa, pengalaman politik, dan kemampuan finansial yang diberlakukan pada perempuan kandidat. *Ketiga*, keadaan struktural dan peluang politik makin memungkinkan perempuan untuk mengekspresikan ambisi politiknya dalam bentuk ikut dalam kandidasi dan "*running for office*" dalam pemilukada. Untuk itu mengidentifikasi dinamika interaksi antara perempuan kandidat yang potensial dengan institusi pendukung seperti partai politik, penyelenggara pemilu dan CSO menjadi fokus untuk penelitian ini.

A. Motivasi Kandidat

Motivasi perempuan kandidat pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan strategis pada level individu, melainkan juga oleh disposisi sikap seperti keyakinan dirinya, modal sosial dan modal politik dalam membangun jejaring, pengalaman personal dan corak kepolitikan lokal. Karena itu muncul pertanyaan apakah para calon perempuan yang ikut dalam pemilukada mempunyai keinginan dan kepentingan tertentu untuk ikut dalam kandidasi dan kemudian mempertimbangkan untuk '*running for office*' dalam pemilukada?

Penelitian di dua provinsi ini memperlihatkan bahwa motivasi perempuan di dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh kombinasi ambisi personal, dorongan eksternal (lingkaran dalam dan lingkaran luar kandidat), pengalaman berinteraksi dengan institusi sosial dan politik, keberpihakan sosial-budaya daerah, pengasuhan politik dari keluarga, aktivisme politik dan dukungan finansial serta posisi gendernya. Kombinasi tersebut menjadi pertimbangan strategik mengapa seseorang berkeinginan untuk memasuki jabatan-jabatan tertentu dalam pemilu.

A.1. Ambisi Personal

"Ambisi adalah jantung politik" demikian ungkap Fox dan Lawless (2005). Politik adalah bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Setiap kandidat yang pada akhirnya memutuskan untuk mencari jabatan, dia adalah petarung yang berusaha untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Ketika individu yang mengejar kedudukan yang sangat prestisius dan berupaya mencari jabatan puncak dalam profesinya, ketika itu pula dia akan lebih mungkin berpikir tentang pencapaian posisi kekuasaan politik atau mencapai tangga karir politik. Ambisi personal menjadi dorongan motivasi perempuan kandidat yang ditemukan di semua daerah untuk maju menjadi kandidat kepala/wakil kepala daerah.

Pengalaman para perempuan kandidat menyadarkan kita bahwa tidak ada jalan bebas hambatan untuk menjadi pemimpin politik yang berhasil. Jalan itu terjal, bercabang, kental bias maskulinitas. Namun kita belajar dari para perempuan kandidat tersebut bagaimana menjalani jalan terjal tersebut. Perilaku politik yang sering dipandang

sebagai aktivitas maskulin mencakup kemandirian, kualitas pengalaman politik, kecerdasan dan agresivitas. Masyarakat kita masih menganggap sifat mandiri dan agresif bukan sifat yang sewajarnya untuk seorang perempuan.

Dalam politik yang androsentris, kredibilitas, kompetensi diri dan kelayakan politik sering menjadi prasyarat bagi siapapun yang masuk ke dalam kontestasi politik, sehingga kepantasan perempuan dalam jabatan politik diukur dengan menggunakan ukuran laki-laki. Padahal akibat budaya patriarki, pengalaman politik perempuan sangat berbeda dengan pengalaman politik laki-laki. Tantangan yang senantiasa dihadapi perempuan ketika membuktikan bahwa mereka pantas duduk dalam jabatan atau kekuasaan tersebut menjadi semacam dilema pada setiap perempuan kandidat. Pada satu sisi perempuan perlu meyakinkan pemilih bahwa ia kuat, mampu dan cukup pantas menduduki jabatan politik, tetapi pada sisi lain dalam diri perempuan ada kegamangan agar tidak dicap sebagai "perempuan agresif". Umumnya para pemilih merasa takjub sewaktu menemukan seorang politisi perempuan memiliki unsur-unsur maskulin yang mereka kagumi, sehingga ambisi adalah nilai baik dalam pria tetapi merupakan hal buruk dalam diri perempuan. Kandidat pria harus lebih agresif, sedangkan perempuan harus patuh dan pasrah. Hal inilah yang dilematis pada diri perempuan. Pada suatu saat perempuan ingin memenuhi ciri-ciri seorang kandidat yang diharapkan pemilih, pada saat lain perempuan ingin mengafirmasi identitas dirinya kepada pemilih.

Karir Publik Menumbuhkan Rasa Percaya Diri. Karakteristik terpenting yang dimiliki beberapa kandidat adalah

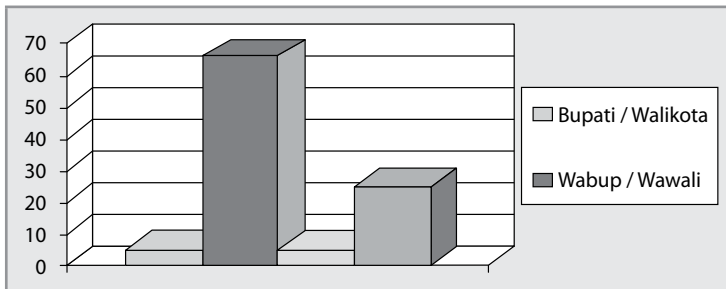
kesadaran bahwa dirinya memiliki kompetensi, sehingga sejak awal mereka mantab menyatakan keinginan untuk maju sebagai kepala daerah. Mereka tidak merasa harus mengubah keputusannya yang disebabkan oleh situasi, orang atau peristiwa. Perempuan memiliki ambisi progresif untuk mengambil inisiatif, memimpin dan menyatakan sikap maju dalam kandidasi. Kandidat perempuan mengungkapkan bahwa mereka merasa tertantang ketika melihat politisi daerahnya ataupun politisi nasional 'berhasil'. Perasaan terpanggil untuk memajukan daerahnya menjadi alasan mengapa para perempuan memutuskan untuk maju dalam kandidasi, bahkan dianggap sebagai 'panggilan Tuhan'. Istilah 'berhasil' tidak hanya dapat dimaknai sebagai keberhasilan untuk mengemban amanah untuk memajukan daerah dan masyarakatnya, tetapi kata berhasil juga meliputi kesuksesan secara material maupun kepopuleran.

Kendati perempuan mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan meningkatkan kehidupan masyarakat, merekapun mengakui ada sisi lain kekuasaan yaitu peluang untuk menerapkan agenda mereka. Gagasan pelayanan kepada masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, begitu tertanam pada diri perempuan kandidat. Kekuatan pendorong dalam aktivitas politik di pemilukada adalah hasrat untuk menolong orang lain dan melayani masyarakat. Inilah kekuasaan dalam definisi perempuan kandidat.

Perempuan merasa memiliki komitmen dan kompetensi diri karena tidak terlepas dari perasaan keberhasilannya dalam

karir publik sebelumnya. Sebelum maju dalam kandidasi para perempuan kandidat telah memiliki karir publik yang cukup memadai seperti sebagai politisi, pengusaha, profesional dan birokrat. Karir publik sebelumnya mencerminkan bahwa perempuan-perempuan tersebut telah mampu berperan sebagai bagian dari pencari nafkah di dalam keluarga. Pengalaman tersebut menjadikan perempuan-perempuan kandidat itu tidak hanya sudah terbiasa terjun di ranah publik, melainkan juga terbiasa berkompetisi. Di dalam ranah publik tentu tidak hanya ada kesempatan tetapi juga ada kompetisi dengan orang lain, termasuk laki-laki. Perempuan demikian tidak lagi sebagai liyan (*others*), melainkan menjadi bagian dari ruang yang sebelumnya telah dimiliki oleh laki-laki. Di bawah ini diagram karir publik perempuan kandidat.

Diagram 1. Profesi Perempuan Kandidat



Hanya saja masih ada terlekat stigma bahwa perempuan harus lemah lembut, sabar, tidak perlu tegas maka perempuan yang memasuki ranah publik seperti di pemilu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar. Ambisi progresif seperti kemampuan bekerja para perempuan kandidat ini selalu dihadap-hadapkan pada stigma bahwa perempuan harus menunjukkan

ketokohnya dari ukuran “moralitas”, sesuatu yang tak pernah diberlakukan pada laki-laki, sehingga status perempuan harus jelas. Bahkan *labeling* perempuan yang “bersih” dari ukuran moralitas dalam kaca mata norma yang dibuat laki-laki, dikonotasikan negatif, yang sangat bertolak belakang bagi kandidat laki-laki. Para perempuan kandidat sering mengalami standart ganda tradisional yang digunakan untuk menilai ambisi ekspresif dan progresif dalam dunia politik. Padahal, ambisi progresif tidak selalu buruk, bahkan sering bersifat konstruktif. Komitmen para perempuan kandidat untuk kemajuan masyarakat daerah relatif menonjol dalam pencalonan ini. Fenomena ini bisa dicermati dari visi dan misi kandidat yang banyak menonjolkan aspek kesejahteraan masyarakat.

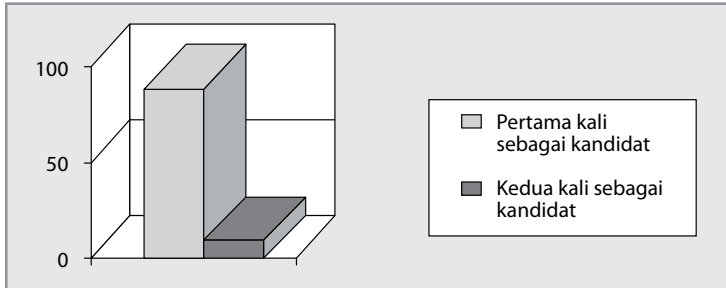
Kehormatan. Reputasi, penghargaan dan pengakuan akan eksistensi diri juga menjadi motivasi perempuan untuk memasuki arena kontestasi. Kekuasaan perempuan adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencari kebanggaan diri. Beberapa perempuan menggunakan kekuasaan untuk memperoleh kehormatan, dan mereka menikmati perasaan sebagai pusat perhatian. Fenomena kandidasi perempuan di Boltim (Bolaang Mongondouw Timur) dalam pemilu pada menjadi sesuatu yang menarik bila dikaitkan dengan usia Boltim yang relatif masih muda (dibentuk tahun 2008), tetapi telah menarik minat para perempuan untuk memasuki arena kontestasi dalam pemilu. Dari ketiga kandidat perempuan disitu, satu perempuan memang sebelumnya telah menjadi kader partai dan telah memperoleh “*political upbringing*” dari keluarga. Bahkan kekalahan bagi perempuan tidak begitu merisaukan, karena dalam pandangan mereka menjadi kandidat pun itu berarti telah

dicatat dan dikenang dalam sejarah kabupaten, apalagi jika berhasil menjadi bupati atau wakil bupati perempuan pertama, tentu merupakan capaian yang lebih bergengsi.

Pengalaman Politik Perempuan di Pemilukada.

Kebanyakan perempuan yang maju dalam pemilukada adalah para pendatang baru, yang baru pertamakali mengikuti kandidasi dalam pemilukada baik diposisi papan satu (bupati/walikota) ataupun di papan dua (wakil bupati/wakil walikota). Di bawah ini gambaran pengalaman perempuan di pemilukada.

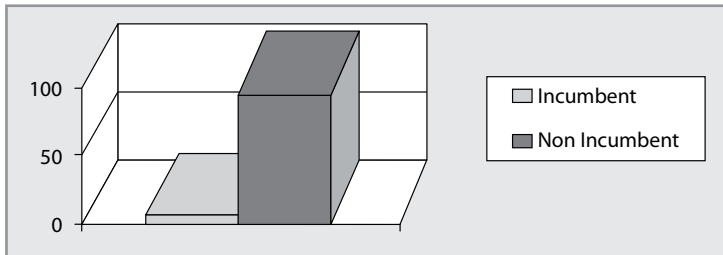
Diagram 2.
Pengalaman Perempuan di Pemilukada



Dari segi aturan dan sistem pemilukada yang di pilih langsung, peluang perempuan semakin terbuka untuk terlibat. Namun dari aspek kuantitas, perempuan baru bermunculan sebagai kandidat pada pemilukada 2010, sebuah fenomena yang menimbulkan pertanyaan. Meskipun para perempuan kandidat kurang memiliki pengalaman kandidasi dalam pemilukada tidak serta merta menyurutkan ambisi mereka untuk maju sebagai kandidat. Namun kurangnya pengalaman mengurus administrasi pemerintahan menjadikan perempuan kurang

memiliki kepercayaan diri atas kemampuannya untuk mengelola daerah, ataupun konflik-konflik politik yang mungkin muncul apabila memperoleh kemenangan dalam kontestasi di pemilukada. Padahal, kandidat perempuanlah yang faktanya justru lebih banyak mengupayakan pembiayaan untuk pencalonannya dibandingkan dengan kandidat laki-laki pasangannya. Di bawah ini gambaran mengenai *incumbent* sebagai kandidat.

Diagram 3.
Perempuan Kandidat Dan Incumbent



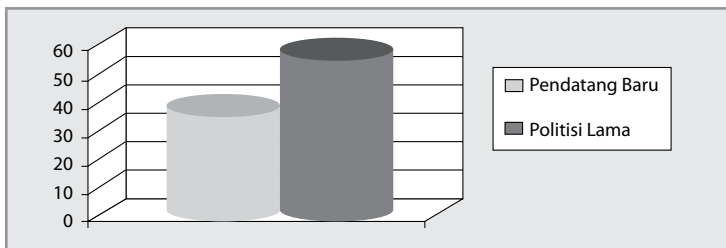
Dari diagram di atas hanya sebagian kecil perempuan yang telah berpengalaman dalam kandidasi dan dia adalah incumbent. Sebagian besar perempuan dalam kandidasi adalah para pendatang baru. Dari 20 perempuan kandidat yang maju dalam pemilukada, hanya ada 4 orang yang dalam posisi sebagai incumbent.

Kontestasi Privat ke Publik. Kontestasi di ranah privat ternyata memunculkan ambisi politik para perempuan untuk berkontestasi di ranah publik. Kontestasi di ranah privat yang melibatkan dua isteri telah dimanipulasi oleh para politisi laki-laki untuk “memecah suara” dan demi kemenangan kandidat lain dalam arena kontestasi. Kontestasi ini menggambarkan bagaimana dunia yang

sangat privat sekalipun dibebaskan ke publik menjadi komoditas politik, dan ekspos terhadap kehidupan privat perempuan benar-benar dieksploitasi oleh politisi parpol untuk pemenangan kandidat lain. Di sinilah politik menampakkan wajah maskulinitasnya, penuh serangan, fitnah dan eksploitasi.

Mahluk Politik Baru. Beberapa kandidat perempuan sebelumnya berkarir sebagai birokrat atau pengusaha, sebuah pekerjaan yang tak pernah bersentuhan dengan politik. Latar belakang karir publik perempuan rupanya turut memberikan dorongan kepada mereka untuk memasuki arena kontestasi politik, sebuah ranah yang sangat berbeda dengan pekerjaan dan karir sebelumnya. Meskipun telah memiliki pengalaman politik yang cukup memadai, namun perempuan kandidat dalam memilih jabatan politiknya jatuh pada posisi yang subordinat terhadap laki-laki, meskipun mereka memiliki basis kemampuan ekonomi yang cukup. Di bawah ini ilustrasi tentang kategori pengalaman perempuan kandidat dalam politik.

Diagram 4.
Pengalaman Politik Perempuan Kandidat



Perempuan memiliki pengalaman politik yang sangat berbeda dengan laki-laki. Umumnya laki-laki dibesarkan oleh

lingkungan yang kompetitif dan terbiasa menjadi “pemain” sehingga mereka terbiasa mengalami kekalahan atau kemenangan. Sebaliknya perempuan terbiasa berinteraksi dalam kelompok kecil yang lebih menekankan kerjasama daripada kompetisi. Maksudnya bahwa perempuan harus bekerja lebih keras (termasuk beradaptasi soal kebiasaan berinteraksi) daripada kolega laki-lakinya di lingkungan manapun termasuk politik ketika ingin mendapatkan kekuasaan.

A.2. Motivasi Idiologis.

Apakah pertimbangan kepentingan idiologis memainkan peranan dalam memunculkan ambisi kandidat perempuan? Kandidat politik tentunya akan mempertimbangkan kualifikasi dirinya untuk maju dalam pemilu. Seringkali estimasi individual atas atribut personal dan optimisme sebagai kandidat politik menjadi dasar untuk mempertimbangkan memasuki arena pemilu.

Laki-laki dan perempuan adalah orang-orang yang berbeda dalam situasi politik obyektif. Laki-laki lebih beruntung mendapatkan pengalaman politik yang cukup memadai dibandingkan dengan perempuan, yang terhambat secara struktural maupun kultural. Oleh sebab itu membangkitkan kesadaran gender akan membangkitkan kesadaran perempuan tentang posisinya saat ini. Dengan kata lain, kesadaran akan “keperempuannya” akan berbanding lurus dengan tumbuhnya motivasi idiologis untuk memperjuangkan kepentingan kesetaraan gender. Kapasitas dan pemahaman gender kurang dipenuhi oleh beberapa kandidat perempuan sehingga mereka tidak

mengedepankan isu kesetaraan gender dan ketidakadilan pada perempuan yang pada akhirnya nampak mereka menjadi netral gender. Padahal semangat dari sebuah isu gender akan mendorong aktivisme tidak hanya pada level massa tetapi juga pada level elit politik. Perempuan menjadi terjebak ke dalam maskulinitas dalam mengejar jabatan sehingga perempuan terjebak dalam agenda laki-laki. Apakah perempuan berpikir tentang penghentian kekerasan, kesehatan reproduksi, HIV AIDS atau penghentian *trafficking*?

Dalam rasionalitas politik, sekali orang benar-benar mencari dan memegang kekuasaan negara, maka preferensi dan semangat ideologi akan memotivasi agenda kebijakan mereka. Fenomena motivasi ideologis ini nampak pada pilihan-pilihan visi-misi kandidat, isu yang diangkat dalam pemilukada.

Ada empat pola motivasi ideologis dari para perempuan kandidat. *Pola pertama*, para perempuan kandidat yang memang sejak awal merupakan aktivis politik atau memiliki kesadaran akan “keperempuanannya”, mereka secara sadar mengangkat isu ketidakadilan gender secara sosial, budaya dan politik. Mereka secara tegas menyatakan keberpihakannya pada persoalan isu ketidakadilan gender dalam visi, misi dan programnya.

Pola ke dua, perempuan kandidat yang dikelilingi dan diproteksi oleh politisi laki-laki pada akhirnya menjadi tidak sensitif gender dalam visi, misi dan programnya dan turut berperilaku maskulin. Kalaupun ada, sering isu gender tersebut sekedar disisipkan melalui program pendidikan,

kesehatan, kemiskinan dan pemberdayaan yang nampak begitu netral gender. Pada pola yang ke dua ini perempuan kandidat sering jatuh ke dalam ambivalensi karena begitu perempuan mengangkat isu perempuan berarti kandidat siap menjadi tidak populer di kalangan pemilih. Tidak semua pemilih mampu memahami dan menerima ide kesetaraan gender. Penyisipan isu gender tersebut akhirnya melahirkan program yang dikemukakan perempuan kandidat nampak netral gender dan tidak mengangkat isu perempuan secara tegas dalam perumusan visi misi karena kandidat harus berhadapan dengan pemilih yang masih sangat maskulin.

Pola ke tiga, perempuan kandidat sadar akan keperempuannya dan memiliki motivasi ideologi, namun demi pertimbangan strategis, tetap memanfaatkan simbol laki-laki untuk meraih kekuasaan. Pada pola ke tiga ini ada kesadaran bahwa untuk melawan ideologi patriarki yang dominan bisa dilakukan dengan cara perlawanan dari dalam. Upaya merubah bangunan sosial politik yang patriarkis tidak selalu dilakukan dengan jalan *vis a vis*, tetapi bisa dengan mengubah bangunan tersebut dari dalam. Bernegosiasi dengan budaya patriarki untuk mengubah bangunan patriarki itu sendiri dengan cara memanfaatkan "keperempuannya" adalah sah-sah saja, misalnya dengan menggunakan simbol-simbol laki-laki untuk memenangkan kontestasi politik demi agenda yang lebih besar.

Pola ke empat, perempuan kandidat yang hidup dan bekerja dalam dunia yang tidak menjadikan jenis kelamin sebagai determinan yang menentukan keberhasilan seseorang. Kandidat perempuan yang dalam pengalamannya hanya sedikit atau tidak mengalami perlakuan bias gender

umumnya mengedepankan sikap dan perilaku tentang pentingnya prestasi ketimbang jenis kelamin, sehingga pada saat menjadi kandidat, perempuan sama sekali dirinya tidak menyadari bahwa ketidaksetaraan gender masih menjadi persoalan kultural, sosial, dan politik. Perempuan kandidat semacam ini nyata-nyata larut ke dalam dunia maskulin, sehingga agenda-agenda memperjuangkan penyeteraan gender, pemberdayaan perempuan, dan program *gender mainstreaming* tidak menjadi motivasi utamanya. Berbagai program yang diuraikan dalam konsep visi-misi kandidat belum secara tajam melihat program pro-gender secara umum dan belum spesifik mengarah pada isu-isu perempuan. Jadi ketidaksadaran akan "keperempuanannya" mengurangi kemampuan responsif gendernya dalam proses kandidasi. Motivasi kesetaraan gender tak muncul sebagai diskursus utama dalam visi dan misi maupun retorika kampanye pada perempuan kandidat.

Konsekuensinya meskipun dari aspek kuantitas, jumlah perempuan yang maju dalam pemilu relatif cukup banyak, namun secara kualitas perempuan tidak sedang mencerminkan perlawanan terhadap tatanan patriarki. Fenomena ini bisa ditelusuri dari minimnya penyuaan isu perempuan seperti isu *trafficking*, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sebuah kondisi kekerasan yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dengan perempuan.

Modal Ekonomi, Sosial dan Politik. Modal sosial dan politik sering menjadi bahan pertimbangan kandidat untuk mengejar karir politiknya. Keberhasilan sebagai pengusaha yang memungkinkan kandidat membangun jejaring

menjadi modal sosial bagi kandidat untuk maju dalam pemilukada. Jejaring yang dimiliki dapat berupa jejaring bisnis, jejaring berdasarkan kesamaan etnis, ras atau gender, serta jejaring politik (untuk kandidat yang sebelumnya telah aktif di dunia politik).

Sejak berlangsung pemilukada secara langsung di Indonesia yaitu sejak Juli 2005 menunjukkan bahwa tiga modal yang dimiliki oleh calon biasanya secara simultan bisa mendukung keberhasilannya. Ketiga modal itu adalah modal ekonomi, sosial dan politik.

Keyakinan Akan Kapasitas Kemampuan Finansial.

Kekayaan material dan keberhasilan finansial memungkinkan individu memiliki fleksibilitas untuk mencari jabatan. Pemilukada merupakan arena pencarian kekuasaan yang melibatkan transaksi politik uang baik antar kandidat ataupun kandidat dengan institusi politik. Para perempuan yang maju dalam pemilukada umumnya memiliki modal ekonomi yang berasal dari dirinya sebagai pengusaha atau dukungan ekonomi keluarga.

Ketika politik diasumsikan sebagai dunia maskulin dan hal ini begitu terinternalisasi ke dalam *mindset* perempuan, sering menghalangi minat perempuan untuk ambil bagian dalam kontestasi politik. Akibatnya ketika perempuan muncul sebagai kandidat di pemilukada, itu lebih sebagai hasil dorongan eksternal atau “provokasi” para politisi di partai yang notabene didominasi laki-laki. “Provokasi” tersebut muncul karena para politisi tersebut melihat kemampuan finansial sang kandidat perempuan sebagai pengusaha yang cukup

sukses. Bahkan masuknya perempuan dalam dunia politik sebenarnya di luar proyeksi dan penaksiran kapabilitasnya selama ini. Dunia politik meskipun mirip dengan dunia bisnis namun memiliki karakter yang sangat berbeda. Di dunia bisnis penguasaan sumber ekonomi merupakan hal yang penting, namun di dunia politik, ekonomi sekedar menjadi instrumen untuk mendapatkan kehormatan dan kebanggaan dengan menjadi pemimpin. Dan demi pemenuhan keinginan tersebut dibutuhkan pengorbanan ekonomi yang luar biasa besarnya dari para perempuan kandidat. Rupanya hal tersebut sangat disadari oleh politisi laki-laki terutama oleh laki-laki sebagai pasangan kandidat. Kurangnya pengalaman politik para perempuan ketika memasuki arena kontestasi politik di pemilu kadal menjadikan perempuan kurang mampu memperhitungkan dan menaksir *costs and benefits* keikutsertaannya dalam kontestasi politik di pemilu kadal.

Dengan demikian keikutsertaan perempuan dalam perebutan jabatan politik disatu sisi menunjukkan adanya kesadaran gender, namun disisi lainnya ini justru dimanfaatkan oleh para politisi laki-laki untuk memperoleh dukungan finansial. Ketika kandidat perempuan sekedar mengandalkan modal ekonomi tetapi kurang pengalaman politiknya maka ia harus berkompromi dengan berpasangan dengan figur publik dan laki-laki.

Stereotipe perempuan sebagai makhluk yang irasional, berperasaan halus dan lembut benar-benar dieksploitasi oleh para politisi laki-laki. Isu-isu kemiskinan, kesengsaraan masyarakat, ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan sebagainya dieksploitasi dengan harapan naluri

keperempuanan para perempuan kandidat muncul serta lantas bersedia mengucurkan dana yang cukup besar untuk pemilukada.

Dalam penelitian ini tampak bahwa kekuasaan dalam pandangan perempuan kandidat akan digunakan untuk mengasihi orang lain. Haruskah perempuan menolak gaya mereka dan berperilaku sebagai laki-laki untuk merasa berkuasa dan dianggap sebagai pemimpin? Kekuasaan yang didefinisikan oleh perempuan melalui mata feminis yaitu kekuasaan yang bernuansa kasih sayang yang tidak berpusat pada diri sendiri tetapi diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi gagasan kekuasaan perempuan mengandung gagasan memberdayakan orang lain, salah satu segi dari kekuasaan ibu. Namun gaya kampanye "feminis" ini menjadikan perempuan kandidat dalam program kerjanya terkesan "boros" dalam membelanjakan anggaran kelak.

Di samping itu ada upaya mensiasati stereotipe gender di kalangan politisi dalam kandidasi. Berbagai karakteristik esensial perempuan seperti "cantik" nyata-nyata dieksploitasi oleh para kandidat sebagai *extra power* untuk kemenangan kandidat. Jadi meskipun perempuan kurang memiliki pengalaman politik yang cukup memadai tidak apalah asal penampilannya menarik. Artinya eksploitasi tubuh perempuan menjadi instrumen dan strategi bagi perempuan untuk mendulang suara dari para pemilihnya. Kecantikan digunakan secara sadar hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan atau memang sebagai katalisator untuk menjalankan agenda lebih jauh.

Di sisi lain perempuan yang maju dalam pemilu meyakini dirinya memiliki modal politik yang cukup memadai, keyakinan ini muncul dari pengalaman berinteraksi dengan berbagai institusi politik. Karir publiknya di legislatif memungkinkan kandidat berjejaring dengan partai politik yang dapat menjadi jembatan pencapaian karir politiknya untuk maju ke papan satu atau dua di daerahnya. Demikian pula karir publiknya di birokrasi telah menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan untuk aktualisasi diri dalam kontestasi politik di pemilu.

A.3. Pengasuhan Politik

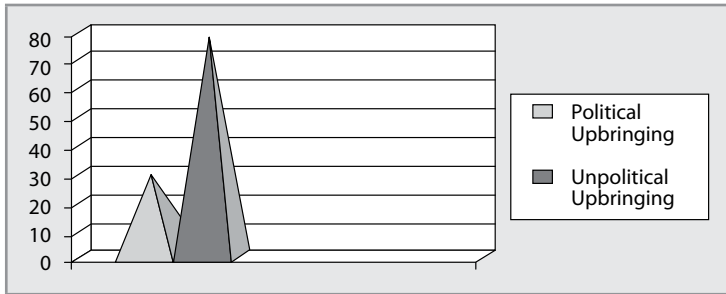
Seperti kita ketahui sejarah mencatat bahwa lingkaran politisi biasanya diisi oleh mereka yang berbeda generasi tetapi datang dari keluarga yang sama. Orang tua yang "sangat sadar" politik sering membentuk dan menciptakan lingkungan politik bagi keluarganya. Seorang perempuan menjadi politikus karena mereka mengidentifikasi dirinya dengan ayah atau paman mereka atau ibu yang aktif dalam bidang politik. Peran laki-laki seperti "ayah atau paman" yang bisa menjadi model peran bagi anak perempuan banyak tersedia, sebaliknya model peran perempuan sangat sedikit, dan hal ini menyulitkan perempuan untuk mendapatkan model tentang pembagian peran kepemimpinan. Para perempuan kandidat tumbuh dewasa seraya menyaksikan model peran dan mentor yang selalu menyertai mereka yaitu ayah, paman, atau lingkaran laki-laki terdekat lainnya dan menjadikan peran tersebut *role model* mereka. Mentor ini sangat terlibat dalam kehidupan

sehari-hari kandidat yang kemudian mengubah keakraban ini menjadi identifikasi untuk menunjukkan kedekatan mereka dengan mentor tersebut.

Proses internalisasi dan sosialisasi politik tersebut diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan pada generasi berikutnya, bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk memperoleh dan memperluas kekuasaan. Pola internalisasi ini berulang ke anak cucu mereka, apalagi keluarga politikus mempunyai keuntungan psikologis karena dibesarkan dalam praksis dunia politik. Perempuan kandidat yang memiliki nama keluarga politikus kawakan dibelakang nama pribadi tentu memiliki "nilai lebih" daripada perempuan kandidat yang datang dari keluarga biasa. Karenanya proses "pewarisan" politik semacam ini sering menjadi pertimbangan untuk memahami proses kandidasi, sehingga tidak mengejutkan bahwa isu sentral politik dalam pemilu adalah nepotisme dan kroniisme.

Pada satu sisi nepotisme dan kroniisme dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi karena menutup akses bagi pihak lain yang bukan termasuk lingkaran dekat para pemain politik. Akan tetapi pada sisi lain nepotisme dan kroniisme telah membuka akses bagi perempuan untuk bisa maju dalam pemilu. Nama besar dan ketokohan keluarga diyakini dapat menjadi jalan masuk bagi perempuan untuk mengikuti kontestasi. Dari pemilu ini beberapa perempuan memang memiliki sejarah keluarga politik. Lihat diagram di bawah ini.

Diagram 5.
Pendidikan Politik Perempuan Kandidat

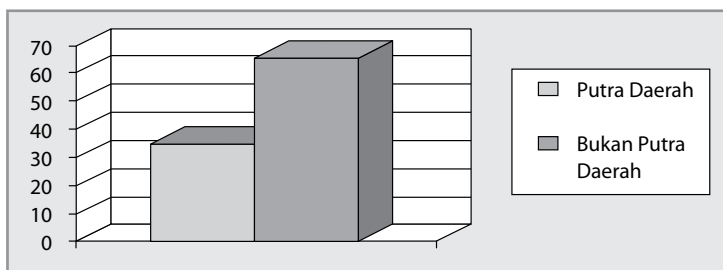


Ketika sejarah politik keluarga yang didominasi oleh figur laki-laki menjadi model peran bagi perempuan kandidat, maka dunia politik menjadi makin identik dengan dunia maskulin. Perempuan harus memasuki dunia maskulin ini yang dipenuhi oleh syarat-syarat dan kualitas maskulin. Situasi politik yang sangat patriarkis nyaris tidak memungkinkan munculnya perempuan secara otonom, yang benar-benar muncul karena kapasitas pribadinya. Akibatnya nepotisme atau kronisme menjadi cara untuk mendapatkan akses pada kekuasaan. Sebagian besar keluarga para perempuan kandidat sudah biasa dalam melakukan *running for office* (menjadi kandidat dalam kontestasi politik). Keluarganya telah lama mengakrabi dunia politik dan ingin mengukuhkan eksistensi keluarga besarnya melalui penerus-penerusnya. Tak pelak memanfaatkan simbol-simbol nama besar orang tua, suami, atau klan menjadi hal yang biasa dalam kontestasi politik lokal.

A.4. Pulangnya Putera Daerah

Kebanyakan kandidat perempuan berkarir dan bekerja di Jakarta, yang kemudian pulang ke kampung halamannya untuk proses kandidasi. Cerita rakyat yang sangat populer di Bumi Tonsea tentang bidadari turun dari kahyangan merupakan ilustrasi yang pas untuk menggambarkan kandidat perempuan yang “turun” dari Jakarta ke kampung halamannya. Sebagai penduduk asli daerah ada perasaan terpanggil untuk kembali dan membangun daerahnya, dan menjadi bupati atau wakil bupati merupakan salah satu jalan yang ditempuh para perempuan kandidat. Kembalinya putera daerah ini menguatkan tesis bahwa kebanyakan kontestan politik dalam pemilu kadal para perantau yang kembali ke kampung halamannya. Bahkan kesadaran calon akan daerahnya muncul ketika kandidat berada di perantauan. Di bawah ini diagram yang menunjukkan fenomena kembalinya putra daerah dalam pemilu kadal.

Diagram 6. Keterikatan Daerah



Kembali ke daerah menunjukkan bahwa jangkauan kontestasi perempuan lebih menyempit yaitu ke tingkat kabupaten daripada ke tingkat regional atau nasional. Para perempuan kandidat beranggapan area kontestasi yang

semakin kecil lebih memungkinkan perempuan untuk mengejar jabatan dibandingkan area kontestasi yang lebih luas (nasional). Artinya bahwa maraknya perempuan berkontestasi di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa perempuan mencari area-area yang lebih dapat diprediksi dan ditaksir peluang kemenangannya bagi perempuan.

A.5. Dorongan Eksternal (lingkaran dalam dan luar kandidat)

Dorongan keinginan seseorang untuk mengekspresikan diri dapat juga berasal dari faktor eksternal, seperti dorongan dari orang tua, suami, teman, atau tawaran partai politik. Dorongan eksternal mengisyaratkan bahwa pada awalnya kandidat tidak pernah memikirkan untuk *running* dalam pemilu, tetapi karena pengaruh *inner circle* kandidat yang menjadi impuls perempuan untuk bersedia berkontestasi.

Ada dua tipologi perempuan kandidat, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai "pengejar jabatan" dan "siap direkrut". Pengejar jabatan mengambil inisiatif untuk mengikuti pemilihan atas kesadaran diri sendiri atau "merekut" dirinya sendiri. Sedangkan kategori kedua "siap direkrut" artinya bahwa mereka maju dalam kandidat dalam posisi posisi pasif dan menanti dukungan pihak lain. Kategori "siap direkrut" adalah tipe perempuan tradisional yang diajari untuk bersikap tidak agresif, tidak meminta-minta, tidak berupaya menonjolkan diri agar orang lain tertarik. Para perempuan kandidat dalam kategori ini mengikuti pemilu atas saran dan rancangan suami, keluarga atau teman terdekat. Pada kategori ini pada awalnya mereka

enggan mencalonkan diri sampai seseorang meyakinkan mereka untuk maju mengejar jabatan.

Dorongan keluarga atau orang terdekat. Beberapa kandidat kepala daerah pada mulanya tidak memiliki rencana bahkan tak berminat untuk maju dalam pemilukada. Namun bujukan dan dorongan dari keluarga ataupun orang-orang terdekat menyebabkan kandidat “terpaksa” maju menjadi calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Desakan dan bujukan orang-orang terdekat telah meluluhkan sikap perempuan sehingga menyanggupi tawaran tersebut. Dengan demikian keberhasilannya mengikuti bursa di pemilukada sebenarnya tidak direncanakan oleh dirinya sendiri dan bahkan cenderung “didisain” oleh politisi laki-laki.

Politik Dinasti: Upaya Melanggengkan Kekuasaan Keluarga. Dorongan keluarga dan teman terdekat dalam pemilukada melahirkan politik dinasti yang nyata-nyata sarat dengan nepotisme dan kroniisme. Perempuan kandidat bahkan menggunakan jargon-jargon kampanye yang biasa dipakai oleh laki-laki kandidat, seolah itu menjadi *trend*. Posisi sebagai isteri *incumbent* menyiratkan masih saratnya politik patriarki dalam pemilukada.

Dalam analisis politik, semua instrumen politik dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian untuk melanggengkan kekuasaan lama adalah dengan cara membangun dinasti baru. Namun dalam analisis gender ini berarti perempuan sedang dimanipulasi oleh kekuatan patriarki

demikian langgengnya kekuasaan laki-laki dan semakin mengukuhkan anggapan bahwa politik adalah dunia laki-laki. Menempatkan isteri atau anak sebagai perempuan kandidat memungkinkan laki-laki mengintervensi kekuasaan isteri.

Tampilnya isteri dan anak merupakan fenomena bagaimana perempuan dijadikan instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan *incumbent*. Dan pola yang biasanya dijalankan adalah eksklusivisme dalam hal rekrutmen pengikut (tidak mempertimbangkan kompetensi tapi yang paling penting adalah ketundukan dan loyalitas), keluarga diutamakan dalam mengisi posisi-posisi penting, pola relasi kekuasaan yang sangat vertikal dan menjaga jarak antara penguasa dengan yang dikuasai, kerap kali tidak transparan dalam menjalankan kekuasaannya.

Istilah dinasti sendiri sebenarnya mengandung kesan konservatif yang kental. Seolah praktek politik yang berlaku masih model kekuasaan kerajaan dimana suksesi kekuasaan dilakukan dengan warisan dari raja terdahulu kepada putra mahkota. Namun model politik dinasti modern kiranya tidak sekaku model kerajaan tersebut. Apa yang ditekankan dalam analogi disini adalah bagaimana pewarisan kekuasaan itu berlangsung dengan hanya berkisar dalam lingkaran keluarga atau kerabat terdekat sehingga masih dapat dikendalikan oleh aktor-aktor elit politik lama. Dalam sebuah sistem, walaupun telah demokratis, model-model lama dengan modifikasi baru tampaknya cepat menyesuaikan diri sehingga tetap dapat bertahan.

Temuan kentalnya politik dinasti ini bukan monopoli Indonesia saja, di lingkup Asia, sejumlah kepemimpinan politik perempuan muncul karena adanya dukungan dari dinasti politik yang telah lama bercokol. Tokoh-tokoh perempuan yang muncul belakangan di Asia seperti Sonia Gandhi (India), Wan Azizah Wan Ismail (Malaysia), Park Geun Hye (Korea Selatan) atau Gloria Macapagal-Arroyo (Filipina) umumnya memiliki latar belakang dinasti politik yang kuat. Mereka mewarisi dinasti kepemimpinan keluarganya secara turun menurun. Fenomena munculnya tokoh-tokoh perempuan di Asia dapat dikaitkan dengan betapa kondisi perpolitikan di wilayah ini yang masih sangat patriarki. Perempuan muncul karena dianggap sebagai simbol alternatif non-partisan terhadap kepemimpinan laki-laki yang dianggap korup. Namun juga dapat diartikan bahwa perempuan dianggap sebagai bukan saingan yang berarti bagi laki-laki di pentas-pentas pemilihan umum. Perempuan kandidat yang dimunculkan untuk menduduki jabatan wakil (wakil bupati atau walikota) dianggap kurang berpotensi untuk mengancam kedudukan sang utama yaitu bupati atau walikotanya. Bagi laki-laki pengendali dinasti politik, kepemimpinan perempuan dilihat sebagai penerus dinasti yang relatif lebih mudah dikendalikan, sehingga pelaksana tugas dinasti berubah, namun kendali masih tetap di tangan laki-laki.

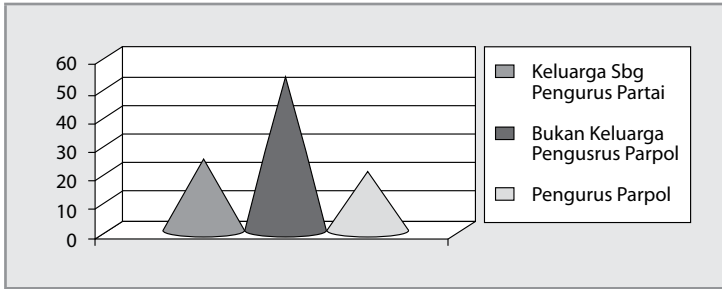
Dorongan Tokoh Agama. Campur tangan tokoh agama yang notabene laki-laki di beberapa wilayah nampak secara kasat mata. Tokoh agama memanfaatkan betul idiologi patriarkinya dengan mendorong perempuan untuk maju sebagai kandidat. Istilah “direstui” oleh tokoh agama menjadi bahasa yang menganalogikan bahwa perempuan memang dinilai layak dan pantas oleh laki-laki untuk maju sebagai

pemimpin. Perempuan kandidat dalam posisi subordinat, tidak setara bahkan sekedar instrumen maskulinitas lembaga keagamaan.

Beberapa simbol “restu” kyai atau “tumpang tangan” pendeta kepada kandidat, mencerminkan bahwa perempuan menginginkan “simbol-simbol politik” untuk memenangkan kontestasi. Beberapa perempuan kandidat sadar betul bahwa dia membutuhkan simbol tokoh agama --yang notabene laki-laki-- untuk pencapaian ambisinya. Artinya perempuan secara sadar berkolaborasi dengan kekuatan patriarki untuk memenangkan kontestasi. Muncul pertanyaan dari sini apakah kolaborasi ini disadari oleh perempuan sebagai sebuah strategi untuk mengikis budaya patriarki atau jangan-jangan perempuan terjebak ke dalam budaya patriarki itu sendiri?

Dinastitokrasi di Parpol. Maraknya politik keluarga di partai politik bisa mengarah pada dinastitokrasi politik. Apa yang ditampilkan dalam pemilu-kada semakin memperkokoh tesis adanya dinastitokrasi di partai politik. Pada sebagian perempuan kandidat mereka memiliki akses untuk maju dalam kandidasi karena suami atau orang tua adalah para politisi yang memiliki posisi penting dan penentu dalam pemilu-kada. Pada satu sisi, akses perempuan di arena kandidasi di pemilu-kada melalui terobosan saudara/suami/orangtua memang cara yang memungkinkan munculnya perempuan kandidat. Hanya dengan cara ini perempuan mampu menembus kekuatan parpol yang sangat maskulin. Namun pada sisi lain, dinastitokrasi parpol bisa mereduksi proses demokratisasi di parpol. Di bawah ini gambar yang menunjukkan relasi perempuan dengan parpol.

Diagram 7.
Relasi Perempuan Kandidat dengan Pengurus Parpol



B. Proses Kandidasi

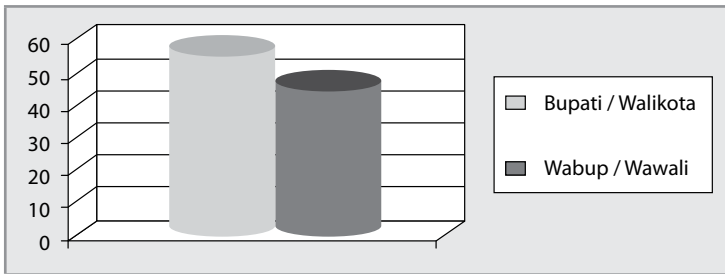
Proses kandidasi perempuan memiliki dinamika yang rumit dan seringkali tidak terduga. Dinamika proses kandidasi perempuan di dua provinsi dapat dipisahkan menjadi tiga kategori, yaitu: hubungan antara perempuan kandidat dengan pasangannya, hubungan perempuan kandidat dengan partai pengusung dan hubungan perempuan kandidat dengan organisasi kemasyarakatan.

Posisi Perempuan Dalam Kandidasi. Dalam pilukada memang lebih banyak perempuan yang maju sebagai bupati dibandingkan sebagai wakil bupati. Setidaknya terdapat 13 perempuan sebagai kandidat bupati dan 7 perempuan kandidat wakil bupati. Dunia politik tetap didominasi dan dikendalikan oleh laki-laki. Meskipun semakin banyak perempuan yang menang dalam pemilu legislatif, politik adalah salah satu benteng terakhir kaum laki-laki. Sedikitnya perempuan terpilih dalam jabatan kepala daerah menunjukkan bahwa perempuan hanya maju sedikit dalam mendobrak dinding pemisah yang membatasi upaya politisi perempuan guna

menduduki jabatan penting di daerah. Namun begitu memasuki pertarungan, seorang perempuan sama banyaknya dengan laki-laki dalam menentukan siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana.

Bila dilihat dari konfigurasi dalam pencalonan hampir seimbang antara yang berkeinginan maju ke papan satu dengan yang maju ke papan dua. Di bawah ini ilustrasinya.

Diagram 8. Posisi Perempuan Sebagai Kandidat



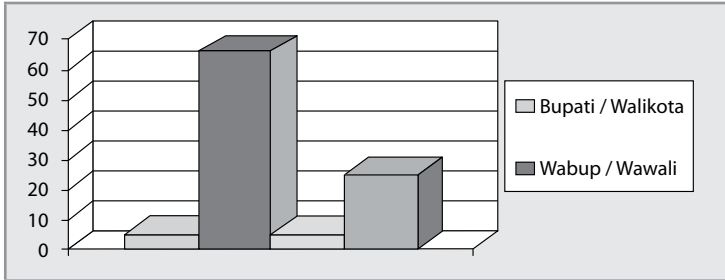
Dari gambar di atas tidak semua perempuan kandidat memilih posisi di papan satu, meskipun pembiayaan finansial dalam kandidasi lebih banyak ditanggung perempuan. Misalnya para kandidat di Sulut lebih banyak yang berposisi sebagai wakil bupati daripada di Jawa Timur, yang hampir 85% perempuan maju di posisi papan satu. Dari tiga perempuan kandidat di Boltim, tidak satupun yang berkeinginan untuk maju ke papan satu, kendati pembiayaan finansial bersumber dari para perempuan. Faktor lokalitas di Boltim ikut berpengaruh terhadap motivasi kandidat. Karena daerah ini sebagai daerah pemekaran yang relatif baru dan belum memiliki infrastruktur politik yang memadai menjadikan perempuan kurang percaya diri untuk maju di papan satu.

B.1. Relasi Perempuan Kandidat dengan Pasangan

Interkoneksi seperti digambarkan di atas sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan sumberdaya finansial yang dimiliki oleh perempuan kandidat. Seluruh perempuan kandidat memiliki karakter yang hampir sama, yaitu memiliki sumberdaya finansial yang sangat kuat. Namun selain modal ekonomi, tentu modal sosial dan politik menjadi pertimbangan dalam kandidasi. Memang kemampuan sumberdaya finansial yang kuat mempengaruhi kinerja mereka saat berkampanye. Biasanya, kandidat yang memiliki sumberdaya keuangan akan berperan lebih aktif dan agresif dalam menyelenggarakan kampanye.

Profesi Pasangan. Para perempuan kandidat memiliki pasangan kandidasi yang adalah para mantan birokrat atau masih menjabat di birokrasi. Oleh karena sifat politik yang maskulin, yang menyulitkan memiliki kemampuan politik yang memadai, dan kesadaran akan kelemahan dalam kemampuan teknis administrasi, maka perempuan kandidat akan memilih pasangan yang datang dari kalangan birokrat sebagai pilihan yang paling pas. Sementara pilihan pasangan pada politisi, selalu didasari oleh pertimbangan kepemilikan massa pendukung, walaupun berpasangan dengan pengusaha juga dibutuhkan oleh perempuan kandidat.

Diagram 9. Profesi Pasangan Kandidat



Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan pasangan kepada *non incumbent* jauh lebih banyak daripada memilih *incumbent*. Memilih pasangan yang merupakan *incumbent* merupakan strategi bagi perempuan untuk bisa memenangkan kontestasi. Perempuan kandidat memilih bergabung dengan *incumbent* didasari oleh anggapannya bahwa sosok tersebut “telah teruji” dalam kepemimpinan sebelumnya. Meskipun dalam kenyataannya menjatuhkan pilihan pada *incumbent* sering menjadi bumerang bagi perempuan.

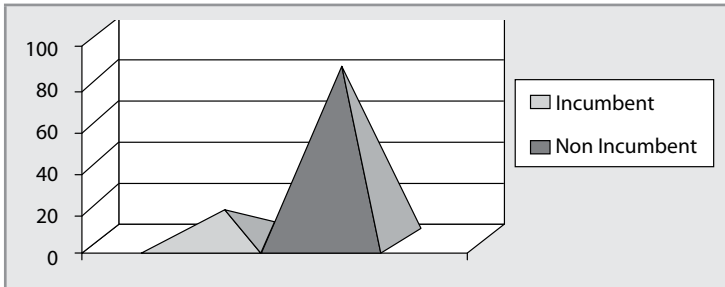


Diagram 10. Pasangan Kandidat

Pola Berpasangan. Pasangan sesama perempuan merupakan fenomena yang cukup unik dalam kontestasi di pemilu pada ini. Situasi obyektif masih menunjukkan bahwa penerimaan kepemimpinan perempuan masih sangat sulit. Oleh karena itu sebuah pilihan yang cukup berani dan beresiko bagi pasangan perempuan-perempuan, khususnya dalam menghadapi pandangan patriarkis di kalangan pemilih. Bagaimanapun muncul juga penolakan sebagian masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, sehingga merubah pandangan secara frontal memang sangat beresiko bagi pasangan perempuan kandidat. Di bawah ini ilustrasinya.

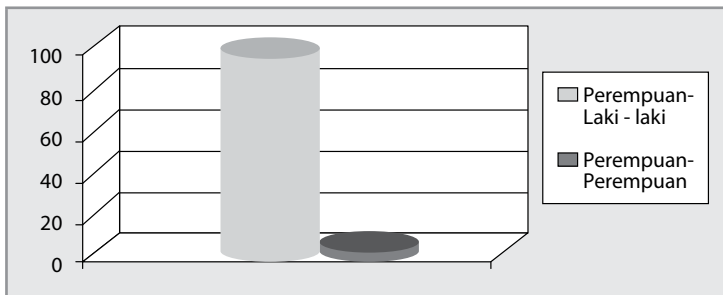


Diagram 11. Pola Pasangan

Perjuangan perempuan di pemilu pada merupakan perjuangan melawan hegemoni politik patriarki. Mereka melawan dengan cara menghindari politik yang berbasis konfrontasi. Mereka menggunakan konsep "*struggle from within*" daripada melalui pola "*struggle from outside the dominant ideology*". Mereka mengganti dikotomi laki-laki-perempuan melalui strategi berbasis kemitraan dengan laki-laki. Artinya mereka meletakkan basis sosial dan kultural baru dalam hal bagaimana relasi diantara perempuan dan laki-laki dalam ruang publik disandarkan pada definisi

baru: kemitraan. Oleh sebab itu pilihan pasangan laki-laki-perempuan dianggap pilihan yang strategis.

Dari segi waktu, pemilihan pasangan memiliki dua pola; yaitu melalui pertimbangan yang cukup lama atau mendadak. Pemilihan pasangan yang mendasarkan pada pertimbangan yang matang dan butuh waktu yang cukup lama mengisyaratkan sebuah kesiapan dan adanya konsolidasi diantara kandidat dan tim pemenangan yang cukup kuat (umumnya butuh waktu 3-6 bulan untuk memilih pasangan kandidat). Namun beberapa perempuan dalam memilih pasangan sangat mendadak. Para kandidat, memilih pasangan baru pada saat *injury time* (beberapa jam sebelum penutupan pendaftaran). Artinya bahwa dalam kandidasi, calon ini sama sekali tidak memikirkan dan menganggap “pentingnya” pasangan dalam kandidasi. Pasangan sekedar memenuhi prasyarat prosedural.

Prosedur Kandidasi. Dalam memilih jalur kandidasi, para perempuan hampir sebagian besar memilih jalur partai daripada jalur perseorangan. Di bawah ini gambar yang menunjukkan jalur yang dipilih perempuan dalam pemilukada.

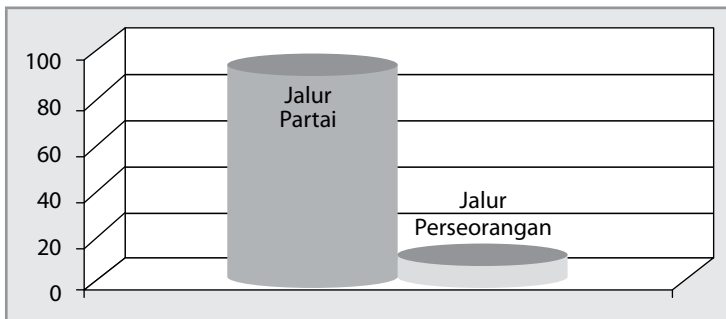


Diagram 12. Prosedur Kandidasi

Jalur perseorangan tidak diminati oleh perempuan kandidat karena jalur ini lebih rumit untuk dilakukan. Sedangkan jalur partai dianggap jauh lebih mudah bagi kandidat karena akan lebih mudah mencari tiket ke partai. Kandidat sering membayangkan ketika kemenangan melalui jalur perseorangan, tentunya akan menghadapi kesulitan, khususnya ketika harus menghadapi banyak partai di legislatif. Oleh karenanya pilihan kandidasi melalui jalur partai jauh lebih mudah pelaksanaannya dibandingkan jalur perseorangan, karena persyaratan jalur perseorangan begitu rumit dan jalur ini tidak memungkinkan adanya mesin yang bekerja di tingkat konstituen.

B.2. Relasi Uang dan Kekuasaan

Dalam model demokrasi elektoral, peralihan kekuasaan atau pergantian jabatan politik dilakukan melalui mekanisme pemilu. Siapapun yang memenangi pemilu, tidak peduli profesi, jenis kelamin, etnis, dan kapasitas asalkan mendapatkan suara terbanyak maka ia berhak untuk menduduki jabatan politik yang diperebutkan. Hanya memang dibutuhkan perjuangan berlipat bagi perempuan untuk bisa mendapatkan suara terbanyak, mengingat masyarakat tempat mereka berkontestasi sudah lama mengadopsi standar-standar ideal laki-laki tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya. Pemimpin yang ideal biasanya dipersepsikan sebagai individu-individu terbaik dari aspek moralitas hingga kapabilitas. Namun demikian, pengalaman pemilukada langsung di Indonesia tidak serta merta menghasilkan pemimpin dengan kualitas mumpuni. Jika penilaian atas kualitas pemimpin daerah dilakukan berdasarkan indikator-indikator, seperti:

demokratisasi, peningkatan kesejahteraan, inklusifitas pembangunan, dan menurunnya korupsi di daerah maka dipastikan masih cukup banyak pejabat terpilih yang sebenarnya tidak masuk dalam kriteria pemimpin ideal.

Kapitalisasi Dalam Pemilukada. Dalam banyak kasus, uang menjadi kekuatan penentu dalam memenangkan pemilukada. Biasanya kandidat menggunakan dua pintu untuk memaksimalkan kekuatan uang dalam pemilukada. Pintu pertama adalah “membeli” dukungan partai politik. Untuk menjadi kandidat calon kepala daerah ada dua jalur yang tersedia, yaitu: jalur pengusungan oleh partai politik dan jalur independen. Jalur pertama ini sangat rentan terhadap praktek jual-beli dukungan. Partai politik menentukan tarif tertentu jika ada kandidat yang ingin menggunakannya sebagai partai pengusung pemilukada. Selain itu, ada tarif tambahan yang harus dikeluarkan oleh kandidat yaitu menggunakan mesin partai politik untuk memobilisasi massa. Biasanya tarif ini masuk dalam kategori biaya kampanye. Semakin besar partai politik, semakin besar tarif yang ditetapkan. Ini adalah praktek terselubung yang tidak ada dalam aturan resmi partai politik.

Pintu kedua adalah jual-beli suara pemilih. Sesaat menjelang pemilihan, kandidat menggelontorkan uang atau memberikan sumbangan untuk mengubah pilihan pemilih saat pencoblosan. Modus yang biasanya dilakukan adalah melalui mesin partai politik, tim sukses, atau memanfaatkan jaringan birokrasi. Cara ini sangat efektif untuk mengubah preferensi politik pemilih terutama pada masyarakat yang memang telah terbiasa melakukan itu. Bagi masyarakat politik, uang bukan sesuatu yang salah, kalau tidak ada

politik uang dalam pemilu pada justru itu salah. Baik praktek jual-beli suara maupun jual-beli dukungan dalam pemilu pada hingga saat ini selalu menjadi persoalan pelik dan sulit dihindarkan. Praktek yang telah berlangsung lama ini bahkan telah bermutasi menjadi pre-seleksi informal dalam rangkaian pemilu pada di Indonesia. Artinya, besaran kekuatan finansial menjadi ukuran kandidat untuk mengikuti pemilu pada bahkan memenangkan pemilu pada. Bahkan, untuk memenangkan pemilu pada di satu daerah ada ambang batas (*threshold*) modal (uang) yang harus dimiliki oleh kandidat.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa politik adalah transaksional benar adanya dan mengandung makna maskulinitas yaitu politik sebagai suatu aktivitas yang membutuhkan “keberanian”, “kotor”, “agresif”. Secara teoritis, kondisi ini membatasi kandidat-kandidat yang memiliki kapasitas namun tidak didukung oleh kekuatan finansial. Demikian halnya dengan kandidat-perempuan kandidat yang secara kultural dan ekonomi ditempatkan bukan sebagai pencari nafkah utama. Kajian tentang hubungan antara dukungan keuangan dan partisipasi politik perempuan menunjukkan bahwa perempuan menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan yang lebih beragam untuk dapat meningkatkan karir politiknya.⁵ Ketidakramahan model demokrasi elektoral di Indonesia terhadap hak politik perempuan untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan terlihat dalam situasi ini.

5 Women's Environment and Development Organization, 2007. Women Candidates and Campaign Finance. Global 50/50 Campaign - Get the Balance Right. Diunduh dari <http://www.wedo.org/wp-content/uploads/women-candidates-and-campaign-finance-report-final.pdf>

Para kandidat umumnya memiliki dukungan finansial yang besar untuk berlomba menduduki posisi nomor satu di dalam kontestasi. Namun pada pemilukada di beberapa daerah, justru menunjukkan fenomena yang berbeda. Walaupun sulit untuk ditelusuri lebih mendalam dan perlu konfirmasi lebih lanjut, beberapa perempuan kandidat mendapatkan dukungan finansial lebih banyak dari sumber tidak langsung (pihak ke tiga), dalam pengertian dukungan finansial lebih banyak bukan dari kantong perempuan kandidat.

B.3. Relasi Partai Politik dan Kandidat

Kontestasi politik di pemilukada memperlihatkan berlangsungnya relasi yang menarik antara partai politik sebagai mesin politik kemenangan dan aktivitas kandidat politik untuk bertarung dalam prosesi pemilukada.

Di beberapa parpol, perempuan kandidat nyata-nyata dimanfaatkan oleh para politisi laki-laki sebagai mesin ATM parpol. Karena tim seleksi parpol didominasi oleh laki-laki –ada keterbatasan jumlah perempuan di kepengurusan parpol– maka perempuan dieksploitasi sumber daya ekonominya untuk mendapatkan rekomendasi atau membeli tiket untuk maju dalam kontestasi.

Namun di beberapa parpol mesin parpol diefektifkan untuk kemenangan pasangan calon. Upaya *branding* digunakan oleh partai dengan memperkuat liputan media, kerja-kerja kemenangan partai ini didukung oleh kerja keras dari kandidat dengan mengunjungi di beberapa segmen pemilih. Kerja-kerja politik dilakukan secara

maksimal baik oleh partai politik maupun kandidat. Dari fenomena kerja-kerja politik diatas dapat dikatakan bahwa perempuan kandidat dalam kontestasi politik tidak saja menjadi subyek yang pasif namun juga menjadi pelaku aktif dalam pemilukada. Sementara di sisi lain hal ini juga memperlihatkan bahwa kandidat tidak hanya membeli partai politik, namun partai politik juga bekerja secara maksimal untuk pemenangan pemilukada.

Konflik Di Parpol Dalam Proses Kandidasi. Proses kandidasi calon kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia selalu diikuti dengan konflik internal partai politik pengusung. Demikian halnya dengan kandidasi calon kepala/wakil kepala daerah perempuan di wilayah penelitian ini. Konflik internal partai politik pengusung biasanya terjadi secara horisontal antara pengurus partai politik di tingkat tertentu dan vertikal antara pengurus partai politik tingkat kabupaten dengan tingkat provinsi ataupun dengan pusat. Jenis pemicu konflik internal partai politik pada wilayah penelitian terbagi menjadi dua. Pertama, konflik internal terjadi karena terdapat lebih dari satu calon yang akan diajukan oleh pengurus partai politik di tingkat kabupaten. Ini terjadi pada kasus pencalonan di DPD PAN Kabupaten Sidoarjo, di Partai Demokrat di Kabupaten Minahasa Utara, Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Selatan.

Kedua, konflik internal partai politik terjadi pada daerah kabupaten pemekaran baru yang belum memiliki infrastruktur kepengurusan partai di tingkat kabupaten, seperti di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Tomohon. Perseteruan terjadi

karena perseteruan pengurus partai politik di kabupaten induk dengan pengurus partai politik di kabupaten pemekaran.

Bila dilihat dari peran partai politik dalam pemilu, parpol hingga sekarang masih menampilkan fungsi instrumen artifisial dalam pendidikan politik. Dalam pemilu, relasi antara kekuasaan, uang dan elit parpol cukup. Ada beberapa hal yang dapat dimaknai akan peran parpol dalam pemilu 2010.

Pragmatisme Politik Dari Parpol. Artinya banyak partai yang bertindak sekedar sebagai “penjual tiket” untuk lolosnya kandidat di arena pemilu. Kondisi ini memunculkan hubungan yang pragmatis antara kandidat dengan parpol. Dalam proses pencalonan, kandidat sudah tidak merasa punya ikatan lagi dengan parpol karena sudah “melunasi” persyaratan yang diperlukan, khususnya “uang sumbangan”, sementara partai politik tidak memiliki kapabilitas dukungan jika tidak diberi dana operasional oleh calon. Dari kondisi ini, memperberat beban kandidat yang harus berjuang sendiri dengan biaya sendiri jika ingin memenangkan persaingan tanpa harus berharap banyak pada kinerja partai politik. Bahkan mesin partai politik tidak berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ini mengindikasikan betapa pragmatisme parpol terjadi dalam pemilu.

Nilai Bargaining Elit Partai Politik. Elit parpol sebagai pemegang tiket dan kendaraan politik memiliki posisi *bargaining* yang tinggi, mereka ini bisa menggunakan

partainya sebagai kendaraan untuk mengusung dirinya sendiri maupun mengusung orang lain, baik kader maupun bukan dengan komitmen politik tertentu.

Dalam kasus Pemilu 2010 di beberapa daerah, komitmen berupa dana yang harus disediakan oleh calon bupati/wakil kepada jajaran elit partai/oknum elit partai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga dana operasional bagi kecamatan-kecamatan.

Faksionalisasi Partai Politik. Pemilu 2010 ternyata semakin memperuncing faksionalisasi di tubuh partai politik. Terkadang terjadi pecahnya kepengurusan atau saling pecat akibat adanya faksionalisasi dalam tubuh partai politik. Ada kalanya seorang kandidat diusung oleh faksi tertentu dan faksi lain akan memboikot sang kandidat. Situasi ini jelas memperberat kandidat dalam kemenangan karena tidak bekerjanya mesin partai politik.

Transisi Kepemimpinan Parpol. Tidak berjalannya mesin partai dalam kemenangan kandidat juga dipicu oleh adanya transisi peralihan kepemimpinan partai di tingkat DPP. Transisi kepemimpinan di tingkat DPP membawa implikasi pada konflik antara kandidat dengan elit parpol di tingkat DPC dan bisa berakibat pada konflik antara kandidat dengan KPUD, atau konflik antara parpol dengan KPUD. Perubahan rekomendasi dari DPP benar-benar dimanfaatkan oleh elit partai politik di tingkat DPC dan juga oleh bakal calon. Implikasinya adalah kekisruhan dalam pendaftaran kandidat lewat jalur partai, sehingga muncul calon ganda untuk satu partai pengusung. Rekomendasi ganda kemudian memicu konflik di internal partai politik di tingkat DPC yang

bahkan konflik ini diikuti dengan saling memecat. Saling pecat muncul karena rekomendasi mengandung makna “dana” bagi petinggi parpol. Setiap kandidat yang disetujui untuk diusung harus membayar jumlah tertentu “untuk biaya kampanye”, meskipun dana tersebut tidak menetes di tingkat DPC ataupun pembiayaan bagi calon.

Saling memanfaatkan rekomendasi nampaknya terjadi dalam pemilukada di beberapa daerah. Oleh karena mengandung makna uang pada setiap rekomendasi, maka para bakal calonpun memanfaatkan peluang politik tersebut dengan melakukan *bypass* terhadap DPC dan secara langsung mencari rekomendasi kepada elit parpol di DPP. Kondisi inilah yang merusak prosedur-prosedur kepartaian di tingkat lokal.

Melihat fenomena di atas konflik di internal partai dalam mengusung kandidat terjadi karena model kekuasaan oligarki parpol yang sangat berorientasi pada sentralitas kekuasaan. Dan model semacam ini secara perlahan mengalami penentangan oleh elit partai di level daerah, sehingga bermunculan beragam konflik dalam pemilukada.

Tak pelak konflik internal partai ini pada akhirnya menyeret KPU ke dalam pusaran konflik antara partai politik dan KPU. Gugatan hukum dari DPC PD ke KPU yang terjadi di Kabupaten Minut dan Kota Tomohon menunjukkan eksekusi konflik internal di parpol dalam mengusung kandidat. Ketika KPU meloloskan salah satu kandidat yang sedang bermasalah dengan parpol, keputusan yang diambil KPU dianggap “cacat hukum”, sehingga muncul berbagai gugatan ke KPU.

Partai Sebagai Mesin Pemenangan. Namun pada sisi lain partai memang dibutuhkan oleh kandidat sebagai mesin pemenang. Relasi interkoneksi ini nampak ketika mesin partai memang sungguh berjalan dalam proses kandidasi ini. Konsolidasi partai yang cukup kuat mampu memenangkan kandidat dalam pertarungan. Parpol melakukan langkah-langkah pemenangan politik dengan melakukan koordinasi dengan asosiasi sukarela yang terfokus pada isu lingkungan hidup, komunitas kaum muda, dan kelompok-kelompok keagamaan.

B.4. Relasi Tim Sukses dan Perempuan Kandidat

Tim sukses bisa dikatakan “selalu sukses” meskipun kandidat yang diusung tidak sukses. Tim sukses ini tumbuh menjamur dan mengklaim mampu mendongkrak suara dengan berbagai strategi yang ditawarkan kepada kandidat. Tim sukses ini bisa memang dibentuk oleh kandidat ataupun yang membentuk sendiri kemudian menawarkan diri kepada kandidat. Bisa berasal dari partai politik pengusung dan pendukung maupun dari kalangan di luar partai politik yang berbasis agama, etnis, ikatan keluarga maupun ormas tertentu.

Seringkali tim sukses ini justru sering menghambat kinerja kandidat, terutama bila terjadi kesulitan dalam koordinasi diantara tim sukses yang beragam. Konsolidasi tim sukses apabila digerakkan oleh partai mungkin cukup membantu bagi kandidat, tetapi ketika konsolidasi tim sukses cukup lemah maka akan menjadi merepotkan bagi kandidat. Semakin banyak partai pendukung terlibat dalam tim sukses semakin sulit untuk mengkoordinasi dan mengendalikannya oleh kandidat.

Mobilitas dan kesungguhan dalam memperjuangkan kemenangan kandidat berbanding lurus dengan seberapa besar dana yang dikeluarkan oleh kandidat kepada tim-tim ini. Dalam banyak kasus, tim ini hanya bersifat formalitas dan tidak memiliki kegiatan dengan alasan tidak adanya dana yang dikucurkan dari kandidat.

B.5. Relasi Perempuan Kandidat dengan Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam kandidasi ini relasi interkonektif antara partai politik, tim sukses dan *civil society* menjadi sangat penting, khususnya untuk memuluskan dalam pencalonan dan kemenangan. Karir publik kandidat yang cukup bagus biasanya membuat mereka telah memiliki jejaring yang cukup masif sampai di tingkat kelurahan menjadi basis bagi kemenangan kandidat. Artinya kandidat mampu mendayagunakan asosiasi sukarela yang terfokus pada isu lingkungan hidup, komunitas kaum muda, dan kelompok-kelompok keagamaan.

Para perempuan kandidat menerobos resistensi pengakuan dan penerimaan publik dan legitimasi politik terhadap perempuan kandidat dengan gaya berpolitik yang sama. Mereka memobilisasi dukungan yang menekankan pengaruh politik mereka melalui simpul jaringan strategis yang terdapat di masyarakat dan pada umumnya para tokoh masyarakat dan agama yang sebagian besar laki-laki. Lewat kemitraan dengan tokoh ini perempuan menepis keraguan tentang kapasitas mereka.

Melalui relasi yang bersifat personal perempuan memanfaatkan dukungan yang kuat dari laki-laki yang menjadi bagian hidupnya (suami atau ayah) sebagai *the significant other*. *The significant other* dalam hal ini merujuk pada individu atau sekelompok orang (plural: *the significant others*) yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan seseorang. Ia menerima dan belajar norma-norma sosial dari *the significant other* itu.⁶ Dukungan *the significant other* dalam menjalani kehidupan publik membantu kandidat melampaui batas-batas gender yang masih ada di masyarakat dan stuktur sosial. Perempuan bisa memiliki kualitas dan kekuatan jika diberi ruang untuk berkembang tanpa diskriminasi gender. Kesetaraan di ruang privat merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang kemudian hari menentukan bobot politik setiap individu. Perempuan sering ragu untuk memanfaatkan dukungan dari *the significant other*, padahal memanfaatkannya tidak selalu bermakna negatif. Memang menggunakan *the significant other* untuk menembus batas-batas diskriminasi gender bisa dimaknai negatif bahwa perempuan tidak akan mampu berkembang tanpa dukungan *the significant other*. Namun posisi *the significant other* penting untuk menerobos bias gender yang telah mengakar di masyarakat dan akan sangat berguna untuk menjaring dukungan populer dan pengembangan wacana untuk menguatkan pencalonan mereka.

6 *The Significant other* juga mengacu pada pasangan bagi seseorang yang bersifat intim tanpa perlu menyebutkan jenis kelamin atau tanpa memberi nama terhadap jenis hubungan itu. Memberi nama pada hubungan misalnya: suami-istri, kekasih, tunangan atau lainnya. Istilah *the significant other* menghindari penamaan seperti itu guna menghindari stereotipe atau salah penyebutan.

Para perempuan memperlihatkan kekuatan mereka yang tidak mau menyerah pada dominasi patriarki. Sebaliknya mereka mampu mengubah hambatan menjadi peluang. Perempuan sangat cerdas memanfaatkan hubungannya dengan the *significant other* untuk memaksimalkan kemampuan dan merebut kesempatan. Ini merupakan strategi politik yang dapat dijalankan oleh perempuan.

B.6. Relasi Perempuan Kandidat dengan KPU

Penyelenggara pemilu, khususnya KPU, tak memperlakukan perempuan kandidat secara khusus. Regulasi yang dibuat dalam batas kewenangan KPU setempat, diberlakukan seragam dan tak melihat perbedaan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, tak ada langkah afirmasi yang dilakukan KPU terhadap perempuan kandidat padahal dalam pemilu legislatif diberlakukan afirmasi.

Dalam fasilitasnya di debat publik KPU menampakkan wajah maskulinnya dengan kebijakan netral gendernya. Artinya KPU kurang memberikan ruang untuk mengakomodasi pada kepentingan perempuan. Fenomena ini bisa dilacak dari tiadanya keharusan bagi kontestan di pemilu untuk menyusun visi, misi dan program yang bermuatan gender baik kepada kandidat yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

Pada sisi lain konflik internal di dalam partai dalam seleksi kandidat kenyataannya berimbas pada perselisihan antara kandidat dengan KPU yang dalam banyak kasus dibawa ke proses hukum.

Sikap KPU ini merupakan buah dari positivisme hukum, yaitu pandangan bahwa hukum esensinya hanya sebatas pasal undang-undang dan tidak dipahami dalam kondisi sosiologisnya, melainkan hanya dijalani sebatas bunyi undang-undang. Hukum diberlakukan tanpa memperhatikan kondisi ketidakadilan terhadap satu kelompok. Perempuan adalah kelompok yang tersisih secara politis, sehingga jika hukum dilaksanakan secara netral gender, justru itu berarti tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Tidak ada kebijakan *affirmative* yang diterapkan oleh KPU dalam soal ini.

C. Struktur Peluang Politik Perempuan Dalam Konteks Lokal

Struktur peluang politik sering mempengaruhi keputusan kandidat untuk maju atau tidak di dalam pemilu. Konteks lokal seperti budaya, pemekaran wilayah, kebiasaan berdemokrasi tentunya memberikan kontribusi pada kemunculan sikap kompetitif orang.

Budaya Politik. Karakter budaya Sulut terdiri dari tiga wilayah budaya yang membentuk karakter masyarakatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Nasrun Sandiah, antropolog dari Universitas Sam Ratulangi, yang memilah ketiga wilayah budaya tersebut ke dalam tiga suku bangsa yang mendiami Kepulauan Sangihe dan Talaud, Bolaang Mongondow, dan Minahasa. Dari ketiga wilayah budaya tersebut, hanya Minahasa yang tidak memiliki sejarah kerajaan. Sedangkan masyarakat di Kepulauan Sangihe dan Talaud dan Bolaang Mongondow mempunyai akar sejarah kerajaan yang panjang. Catatan sejarah menunjukkan, sebelum tahun 1500 Kerajaan Tabukan, Bohontehu, Kendahe, Tahuna, Manganitu, Siau,

dan Tagulandang, tumbuh di sepanjang Kepulauan Sangihe dan Talaud.⁷

Sementara di wilayah Bolaang Mongondow, terdapat Kerajaan Bolaan Uki, Kaidipang, Bintauna, Suwawa, dan Bone. Kerajaan-kerajaan di Bolaang Mongondow umumnya penganut Islam dan kerajaan di Sangihe dan Talaud penganut Kristen atau Katolik. Karakter khas yang melekat di wilayah-wilayah kerajaan juga tampak di kedua wilayah budaya ini. Sifat paternalis maupun kepatuhan yang kuat terhadap pemimpin, misalnya, menjadi karakter masyarakat. Sabda atau perkataan pemimpin akan diikuti dan diinternalisasi oleh masyarakat. Kondisi ini antara lain karena adanya pengkultusan terhadap pemimpin sebagaimana di Bolaang Mongondow. Menurut Nasrun Sandiah sampai saat ini, posisi bupati di Bolaan Mongondow masih dikultuskan. Ajang kontestasi lokal pilkada sedikitnya menyingkap fenomena demikian. Di daerah dengan tradisi dan sifat paternalistiknya masih kuat, seperti di Bolaang Mongondow serta Sangihe dan Talaud, figur pemimpin formal, seperti bupati maupun walikota dan penguasaan jajaran birokrasi, masih faktor penentu untuk mendulang suara.

Berbeda di wilayah kerajaan, berbeda pula karakter di wilayah yang tidak pernah tumbuh kerajaan. Minahasa dalam sejarahnya tidak pernah mengenal sistem kerajaan. Masyarakat di kawasan ini terhimpun dalam walak yang merupakan sebuah komunitas sosial masyarakat tradisional terdiri atas kumpulan beberapa permukiman. Dengan tidak adanya raja atau pemimpin yang harus dikultuskan, hubungan sosial masyarakat Minahasa umumnya didasarkan pada sikap kompetitif dan egaliter⁸ sehingga dinamika politik di daerah

7 Lebih lengkapnya baca artikel yang berjudul *Dua Kultur di Tiga Kawasan*, Kompas edisi Jumat, 20 Februari 2009.

8 menurut Schouten dalam *Leadership and Social Mobility in a South Asia Society: Minahasa 1677-1983*



semacam ini relatif dinamis. Di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kota Bitung, misalnya, pemenang pilkadanya justru diusung oleh partai-partai yang tergolong kecil dan mempunyai latar belakang sebagai pengusaha, bukan birokrasi. Konfigurasi politik semacam inilah yang mewarnai perjalanan politik Sulut saat ini. Tidak tertutup kemungkinan, geliat politik yang semakin dinamis akan mengubah peta politik selama ini.

Di sisi lain, status ekonomi seseorang merupakan faktor yang esensial dalam menentukan status sosial dan politik orang tersebut. Dalam budaya Minahasa, kondisi demikian ditunjukkan oleh kemampuan menggelar pesta besar. Seseorang dikatakan "kaya" apabila dia bisa menggelar pesta besar. Pesta merupakan ekspresi dari *showing and sharing*. Hal semacam ini pula terkait dalam memilih figur para pemimpin. Pemimpin kerap terpilih dari mereka yang mempunyai kemampuan menyejahterakan atau membuat pengikutnya hidup lebih baik. Sehingga proposal sumbangan dalam bentuk pesta pernikahan (pesta suka) dan pesta kematian (pesta duka) juga sering dialamatkan kepada kandidat ketika mendekati masa kampanye.

Temuan data lapangan yang didapat oleh peneliti juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengartikan demokrasi itu sebatas pemilu, dan pemilu merupakan pesta rakyat. Dalam budaya Minahasa yang masyarakatnya sangat gemar berpesta, sangat menyambut suka cita adanya pesta rakyat ini. Karena merupakan pesta rakyat, ini juga diartikan adanya seperangkat acara makan-minum, dansa, musik, layaknya orang berpesta. Sehingga bentuk kampanye yang dilakukan oleh kandidat adalah mengunjungi pesta-pesta yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi tentu saja jika kandidat ingin hadir dalam acara pesta tersebut, terlebih dahulu harus berkontribusi memberikan sumbangan pada pesta itu.

Selain faktor budaya, kecenderungan bersikap rasional masyarakat Minahasa ditunjang pula dengan tingginya mobilitas dan tingkat pendidikan mereka. Pendidikan menjadi salah satu program misi pada tahun 1820 dalam kaitan penyebaran agama Kristen di Indonesia (Enklaar, 1963). Sebagai gambaran, tahun 1860 tak kurang sudah ada 150 sekolah yang dibangun di lebih dari 300 desa di Minahasa. Pendidikan semakin berkembang di Minahasa, yang dengan sendirinya membentuk perbedaan karakter masyarakatnya.

Pengaruh Pemekaran Terhadap Konfigurasi Politik di Sulawesi Utara. Pengalaman kesejarahan telah menempatkan Orang Minahasa sebagai komunitas etnis yang berperan besar dalam berbagai aspek kehidupan di daerah Sulawesi Utara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketersediaan pranata pendidikan modern yang sudah diperkenalkan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dan terpusat di daerah Minahasa, ditunjang oleh ciri budaya dan tradisi *sumekolahnya*.

Pada tahun 1980-an, dalam ranah politik di daerah Sulawesi Utara muncul semangat kesetaraan dari warga komunitas non-etnis Minahasa terutama keinginan dan keterlibatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gejala ini oleh elit politik dan eksekutif di tingkat propinsi ditanggapi dengan kebijakan-politik yang tercermin dalam slogan *bohusami*, sebuah akronim dari bo = Bolaang-Mongondow, hu = Hulontalo (Gorontalo), sa = Sangihe dan Talaud, mi = Minahasa.

Kebijakan ini mengakomodir keterwakilan komunitas etnis pada tataran elit politik terutama eksekutif. Jika gubernurnya orang Minahasa, maka diusahakan agar pejabat pimpinan daerah lainnya seperti sekretaris daerah, ketua DPRD, kepala kejaksaan tinggi,

kapolda serta komandan korem sebaiknya diisi oleh warga komunitas etnis lainnya. Lambat laun kebijakan seperti ini menjadi kesepakatan yang tidak tertulis dan diterapkan hingga unit kerja yang lebih kecil, pada organisasi sosial dan politik. Pada awalnya kebijakan seperti ini mampu meredam riak dinamika politik di daerah. Namun, sepanjang tahun 1990-an, ketika orang Gorontalo merasa sudah saatnya mereka diberi kesempatan menduduki jabatan gubernur dan hal itu tidak terpenuhi, pemekaran wilayah menjadi solusi utama. Kasus ini menjadi pelajaran bagi elite politik di daerah. Slogan politik *bohusami* seakan terlupakan bersamaan dengan pemekaran wilayah propinsi Sulawesi Utara menjadi Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo. Sebagai gantinya, dipopulerkan slogan "*torang samua basudara*" (kita semua bersaudara). Desakan etnisitas maupun alasan kesejahteraan, sampai sekarang pemekaran menjadi komoditas politik yang bisa dijual ketika berkampanye dan masyarakat ramai menyambutnya dengan suka cita.

Secara kultural munculnya perempuan dalam kandidasi pemilukada di Sulut (dalam posisi papan satu maupun papan dua) dimaknai sebagai hal yang biasa, bukan luar biasa. Mungkin hal ini dapat dimengerti, karena keberadaan dan posisi perempuan dalam ranah politik di Minahasa relatif setara dengan lelaki. Bahkan, untuk etnik Tonsea yang proporsinya cukup besar di Sulut, posisi perempuan dalam ranah privat maupun publik lebih dominan terhadap lelaki. Pula, dalam sejarah politik Indonesia, walikota perempuan pertama adalah walikota Manado

Demokrasi Leluhur VS Demokrasi Modern. Dalam kisah rakyat, diyakini ada tiga tokoh sentral terkait dengan nenek moyang orang Minahasa, yaitu Lumimuut, Toar dan Karema. Karema, dimengerti sebagai "manusia langit", dan Lumimuut dan Toar adalah leluhur dan cikal bakal dari orang-orang Minahasa. Manusia awal di Minahasayang

berasal dari Lumimuut dan Toar, dikisahkan adalah pertama, Makarua-Siow atau golongan dua kali sembilan atau yang dikenal sebagai para pengatur peribadatan. Kedua, Makateluh-Pitu atau golongan tiga kali tujuh, yang memiliki peran mengatur pemerintahan. Ketiga, Pasiowan-Telu, atau orang kebanyakan (rakyat). Tempat semula dari Lumimuut dan Toar serta keturunannya disebut Wulur Mahatus. Kelompok-kelompok awal ini kemudian berkembang biak dan bermigrasi ke beberapa wilayah di Tanah Minahasa.

Ketika keturunan Lumimuut-Toar semakin banyak, maka pada suatu waktu mereka mengadakan rapat di sebuah tempat yang ada batu besarnya (batu itu yang kemudian disebut Watu Pinawetengan). Di sana para leluhur Minahasa bermusyawarah untuk bersepakat tentang pembagian tanah. Peristiwa itu menurut perkiraan terjadi sekitar abad VII atau VIII. Berdasarkan penyelidikan Dr. J.P.G. Riedel, Pembagian wilayah minahasa tersebut dibagi dalam beberapa anak suku, yaitu:

- Anak suku Tontewoh (Tonsea): wilayahnya ke timur laut
- Anak suku Tombulu: wilayahnya menuju utara
- Anak suku Toulour: menuju timur (atep)
- Anak suku Tompekawa: ke barat laut, menempati sebelah timur Tombasian Besar

Peristiwa ini yang diyakini sebagai pondasi peradaban Minahasa. Dimana peradaban yang pemerintahannya didasarkan pada nilai-nilai luhur musyawarah sebagai kearifan lokal. Di Minahasa sejak dahulu tidak mengenal adanya pemerintahan yang diperintah oleh raja. Yang ada adalah Walian bertugas sebagai pemimpin agama / adat serta dukun. Tonaas merupakan orang keras, yang ahli dibidang pertanian, kewanuaan, mereka yang dipilih menjadi kepala walak. Teterusan adalah panglima perang. Potuasan sebagai penasehat adat. Semua

jabatan ini bukan diturunkan melainkan dimusyawarahkan dan yang dipilih merupakan orang-orang yang mumpuni. Oleh karena itu, sejak era para leluhurnya, orang Minahasa tidak pernah mengenal pemimpin yang di-*drop* atau ditetapkan dari atas. Orang Minahasa selalu memilih sendiri pemimpinnya lewat proses demokrasi.

Menyatunya prinsip demokrasi pada masyarakat Minahasa juga bisa dilihat dalam praktik hidup setiap keluarga Minahasa yang menghormati asas egaliter -tidak ada perbedaan hak warisan si sulung dan bungsu, anak laki-laki dan perempuan sama saja. Dalam keseharian petani Minahasa sering memunculkan ungkapan *masuat peleng* (semua kita sama) dan itu tercermin dalam pemilihan kepala desa atau para tonaas (pemimpin masyarakat). Biasanya yang terpilih mereka yang rajin, fisik dan kesehatannya tidak diragukan, bermoral tinggi, keluarga dan anak-anaknya bisa dicontoh. Sampai sekarang sistem ini masih hidup dan berlaku di desa-desa Minahasa.

Keberpihakan sosial-budaya daerah perempuan kandidat telah memungkinkan munculnya semangat kompetisi dan peluang untuk kontestasi. Perspektif sosial-budaya yang beranggapan menjadi perempuan pemimpin bukanlah sesuatu yang tabu, sedikit banyak membuka ruang yang berpotensi mendorong partisipasi perempuan lebih besar dalam kontestasi politik. Secara demikian, sejarah dan wacana budaya tentang kepemimpinan perempuan menjadi modal sosial dan politik bagi perempuan kandidat untuk makin percaya diri maju dalam pemilukada.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Perubahan tatanan politik lokal era desentralisasi yang diikuti dengan pemberlakuan sistem pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung, makin membuka struktur kesempatan bagi perempuan dari berbagai macam latar belakang untuk eksis dalam ruang politik. Jika eksistensi perempuan dalam kandidasi anggota lembaga legislatif telah makin meningkat, tak demikian halnya dalam kandidasi pemilukada yang relatif masih baru.

Penyelenggaraan pemilukada secara langsung di Jawa Timur dan Sulawesi Utara pada tahun 2010 menghadirkan fenomena yang agak berbeda dengan pemilukada di wilayah lain, yaitu munculnya cukup banyak perempuan kandidat. Perempuan kandidat yang maju tersebut mengincar posisi yang bervariasi, yaitu sebagai calon bupati atau wakil bupati serta walikota atau wakil walikota.

Penelitian yang terfokus pada pengalaman kandidasi perempuan dalam pemilukada langsung di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Utara ini menghasilkan kesimpulan umum yang bersifat tentatif dan disistematisasi ke dalam tiga kategori jawaban atas pertanyaan: Siapa sebenarnya perempuan kandidat itu? Apa motif perempuan kandidat itu maju dalam kandidasi pemilukada? Bagaimana dinamika kandidasinya?

A.1. Siapa Mereka?

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa keseluruhan perempuan kandidat dalam pemilukada langsung di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Utara adalah perempuan yang berasal atau berada dalam struktur ekonomi-politik yang terkategori kelas menengah-atas dalam lingkup masyarakatnya. Mereka pada dasarnya merupakan bagian kecil dari lapisan masyarakat yang memperoleh akses ekonomi-politik yang lebih baik daripada kebanyakan lapisan masyarakat yang lain. Bisa dikatakan keseluruhan perempuan kandidat itu adalah *the bread-winner*, dan menjadi penikmat struktur ekonomi-politik yang melingkupi mereka.

Selanjutnya, sebagian besar perempuan kandidat itu telah memiliki pengalaman dalam dunia politik, khususnya partai dan/atau legislatif. Sebagian lagi adalah perempuan yang memiliki pengalaman dalam dunia publik, yaitu sebagai pengusaha/dosen/birokrat. Bahkan, dalam proporsi kecil, ada pula yang juga berperan sebagai istri incumbent. Namun, keseluruhan mereka merupakan pemain politik pendatang baru dalam kancah kandidasi pemilukada.

Sebagai pendatang baru dalam kancah politik pemilukada, dimana pemilukadanya sendiri memiliki konsep dan struktur kelembagaan politik baru, perempuan kandidat tidak hadir dengan perspektif gender. Namun mereka hadir dan masuk dalam konsep dan struktur kelembagaan politik lama pemilukada yang cenderung berperspektif netral gender.

Bahkan, nyaris semua perempuan kandidat tak memiliki kesadaran diri sebagai “perempuan” saat awal maju dalam proses kandidasi pemilukada langsung. Kesadaran diri sebagai perempuan dan optimalisasi kemanfaatannya baru muncul belakangan di tengah proses kandidasi. Sifat kesadaran diri ini cenderung sebatas pada perbedaan jenis kelamin dan tidak substantif. Sehingga substansi gender tak terlihat sebagai diskursus utama dalam visi, misi, maupun retorika perempuan kandidat.

Adapun latar belakang keluarga, sebagian besar perempuan kandidat itu berasal dari lingkungan keluarga (orang tua, paman/bibi, suami, kakak/adik) yang terbiasa *running for office*. Bahkan, tak sedikit diantaranya berasal dari lingkaran dalam partai politik. Dengan kata lain, sebagian besar perempuan kandidat itu mengalami proses pengasuhan politik dengan durasi waktu yang beragam dari lingkungan keluarganya.

A.2. Apa Motivasi Maju Dalam Kandidasi?

Hasil penelitian pemilukada langsung di Jawa Timur dan Sulawesi Utara ini mengarah pada kesimpulan, bahwa motif yang mendasari keputusan perempuan kandidat maju dalam proses kandidasi dipengaruhi oleh salah satu atau kombinasi di antara tiga hal berikut: ambisi politik progresif, struktur peluang, dan dipaksa.

Motif yang terkategori dalam ambisi politik progresif mengonstatiskan betapa inisiatif personal dari masing-masing perempuan kandidat begitu kuat. Kerap berawal

dari sukses kecil dalam achievement politik tertentu secara langsung maupun tak langsung yang kemudian berlanjut pada keinginan untuk menggapai sukses politik yang lebih besar. Sukses politik yang lebih besar itu dipersepsi melekat dalam jabatan politik eksekutif sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Untuk sebagian, ambisi politik progresif ini lebih mengacu prinsip rasionalitas. Karena, jabatan politik eksekutif dipersepsi amat prestisius dan menjanjikan raihan ekonomi-politik yang amat memadai. Sebagian yang lain, ambisi politik progresif ini lebih mengacu prinsip filantropi dan/atau religius. Karena, jabatan politik eksekutif dipersepsi sebagai instrumen mengoptimalkan perbaikan kehidupan daerah dan masyarakatnya, serta sebagai alat untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk berkarya bagi masyarakat. Pada sebagian kasus, kisah sukses perempuan pemimpin (perempuan bupati/walikota/papan satu) yang pernah ada di daerah atau wilayahnya menjadi inspirasi yang memperkuat motif ambisi politik progresif.

Adapun motif yang terkategori struktur peluang mengonstatiskan eksistensi perempuan kandidat dalam kandidasi pemilu tidak terutama karena dorongan ambisi personal, melainkan lebih karena adanya struktur peluang yang menghampirinya. Struktur peluang itu bisa berupa “kecelakaan politik” akibat konflik internal partai yang berdampak pada penyingkiran kandidat yang sebelumnya telah dipersiapkan partai, serta memunculkan perempuan kandidat tersebut sebagai alternatif. Di sisi lain, bisa juga struktur peluang itu berupa “popularitas dan penerimaan diri” perempuan kandidat yang lebih menonjol daripada suaminya yang semula dipersiapkan dan hendak di dukungnya dalam persiapan kandidasi. Sehingga, terjadi

pergeseran posisi secara damai dan sukarela dari suami kepada istri dalam penetapan untuk maju dalam proses kandidasi.

Sedangkan motif dipaksa, sekalipun agak spesifik kasusnya, mengonstatiskan dorongan maju perempuan kandidat dalam proses kandidasi dipaksakan oleh kepentingan keluarga terdekatnya yang amat berpengaruh sehingga ia tak mungkin mengelak. Keluarga mempunyai kepentingan untuk mengembangkan politik dinasti, yaitu suatu model kekuasaan yang cenderung berpusat pada keluarga dan kerabat, dan ini telah memaksa perempuan kandidat berperan sebagai instrumen politik dari keluarga untuk menggapai dan atau mempertahankan kekuasaan. Dalam kasus seperti ini ada keengganan dan perasaan terpaksa. Proses kandidasi dijalani semata demi menghormati dan tak ingin melukai perasaan keluarga yang memaksanya. Sekali pun demikian, seiring dengan perjalanan waktu dalam proses kandidasi, perempuan kandidat dapat menikmati proses yang sedang berjalan tersebut, dan cenderung bersikap *nothing to loose* dalam proses kandidasi.

A.3. Bagaimana Dinamik Kandidasi?

Dari dinamika kandidasi perempuan dalam pilukada langsung di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Utara, dapat disimpulkan betapa perempuan kandidat tak pernah bisa terlepas dari hambatan tradisionalnya di ranah domestik. Dalam hal ini, sebagian besar perempuan kandidat tak memiliki kemampuan untuk menjadi individu yang otonom. Upaya meyakinkan keluarga inti (suami dan anak-anak) dengan durasi waktu yang bervariasi, dari cepat

hingga cukup lama, bisa dimaknai sebagai masih kukuhnya pembagian peran publik dan privat dalam struktur keluarga. Mengurus keluarga cenderung dianggap sebagai *female task* daripada *male task*, sehingga ijin dari suami dan anaknya mutlak diperlukan bagi perempuan untuk maju dalam proses kandidasi. Sedangkan laki-laki, jika maju dalam proses kandidasi dipersepsi hanya perlu “memberitahu” pada keluarga inti daripada meminta ijin. Sehingga, secara psikologis perempuan kandidat akan merasa terbebani bila tak mendapat dukungan keluarga intinya.

Secara khusus, memang ditemukan perbedaan sikap dukungan suami terhadap perempuan kandidat. Bagi perempuan kandidat yang suaminya berprofesi sebagai politisi, dukungan itu nyaris seketika dan cepat. Sementara bagi perempuan kandidat yang suaminya berprofesi sebagai non-politisi, dukungan tersebut tak serta-merta datangnya, bahkan dalam beberapa kasus cenderung muncul peentangan. Dukungan suami akhirnya didapat melalui proses persuasi yang memakan waktu.

Selanjutnya, perempuan kandidat cenderung kerap dan/atau mudah dimanipulasi oleh para politisi laki-laki yang sudah lebih lama menjadi pemain politik. Banyak perempuan kandidat yang dieksploitasi kemampuan finansialnya daripada diapresiasi kemampuan kepemimpinan dan manajerialnya. Walaupun memang kemampuan dan kemandirian ekonomi dapat menopang kandidat dalam kandidasi. Mengacu pengalaman pemilukada di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Utara, sebagian besar perempuan kandidat, baik sebagai calon bupati/walikota/papan satu ataupun wakil bupati/

walikota/papan dua, memang memiliki kemampuan finansial yang sangat kuat. Minimal perempuan kandidat memiliki kemampuan memobilisasi sumber dana dari para pihak yang berkepentingan pada kandidasi tersebut. Latar belakang mereka sebagai pengusaha atau istri pengusaha atau istri pejabat, menjadi modal utama mereka untuk membiayai proses kandidasi. Dalam beberapa kasus, perempuan kandidat justru nyaris berperan sebagai “mesin ATM” bagi pasangannya yang kebanyakan laki-laki. Kebutuhan akan kemampuan finansial mengakibatkan arena kontestasi didominasi oleh hadirnya para perempuan pengusaha yang merangkap sebagai politisi.

Berikutnya, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar perempuan kandidat maju dalam proses kandidasi melalui kendaraan partai atau gabungan partai. Amat sangat terbatas yang melalui kendaraan independen. Padahal, proses seleksi dan nominasi perempuan kandidat oleh partai politik atau gabungan partai dalam pemilukada cenderung berlangsung elitis, sentralistik, dan tertutup. Tidak ada prosedur yang transparan, *predictable*, dan membuka ruang afirmasi untuk peran serta perempuan. Akibatnya, proses kandidasi sulit diantisipasi oleh perempuan, apalagi bagi perempuan yang tak memiliki dana memadai untuk kandidasi.

Penelitian ini menemukan bahwa pasangan perempuan kandidat dalam proses kandidasi sebagian besar adalah politisi atau birokrat. Sebagian besar pasangan mereka adalah *non-incumbent*. Sedikit sekali yang berpasangan dengan *incumbent*. Adapun pola pasangannya yaitu perempuan-lelaki atau lelaki-perempuan. Hanya ada satu

kasus dimana perempuan kandidat berpasangan dengan perempuan juga, yaitu di Kabupaten Minahasa utara.

Selanjutnya, dalam keseluruhan dinamika proses kandidasi berkembang pola, bahwa dalam ruang publik yang terbuka dan terekspos, secara khusus perempuan kandidat diperlakukan layaknya stereotype perempuan (mis: harus diperlakukan halus, tak dimaki-maki, tak diperas, dsb.) oleh politisi laki-laki yang berkepentingan dengan pemilukada. Namun, di dalam ruang publik dan privat yang tertutup dan tak terekspos, perempuan kandidat diperlakukan justru sebagaimana layaknya perempuan diperlakukan secara domestik lengkap dengan tekanan-tekanan psikologis-strukturalnya. Seakan hal ini menegaskan betapa dinamika proses kandidasi pemilukada adalah dunia laki-laki, dan perempuan kandidat yang maju dalam proses kandidasi harus siap beradaptasi dengan dunia laki-laki tersebut. Termasuk dalam proses rapat dan negosiasi yang terkait dengan pemilukada cenderung dilakukan malam hari hingga dini hari. Jadwal waktu yang semacam ini jelas tak sensitif gender.

Lebih khusus lagi, penelitian ini juga melihat hadirnya ironi di mana perempuan kandidat justru kerap mendapat resistensi dari kalangan perempuan sendiri. Tampaknya, fenomena queen-bee syndrome (sindroma yang menggambarkan betapa kaum perempuan tak rela menerima perempuan lain yang dipersepsi lebih berprestasi darinya) juga merambah wilayah pemilukada. Bukan hanya itu, bahkan organisasi yang berbasis kepentingan gender tak banyak muncul dan memberi dukungan kepada perempuan kandidat. Padahal, hadirnya organisasi perempuan yang mendukung

perempuan kandidat dalam kandidasi pemilu dapat membangun kepercayaan diri perempuan kandidat.

Akhirnya, terkait dengan lembaga penyelenggara pemilu, relasi perempuan kandidat dengan KPU kabupaten/kota cenderung prosedural dan netral gender. Regulasi yang dibuat dalam batas kewenangan KPU setempat diberlakukan seragam dan tak melihat adanya "gender difference", sehingga kebijakan menjadi sangat netral gender yang tentunya merugikan bagi perempuan.

B. Implikasi Teoritik

Berdasarkan atas temuan data yang didapatkan dari proses penelitian yang telah dilakukan, maka untuk menghubungkan antara temuan riset dan analisis teoritik yang digunakan dalam riset ini ada beberapa hal yang penting untuk menjelaskan implikasi teoritik dari riset kandidasi perempuan ini.

Pertama, riset ini menggunakan analisis gerakan sosial feminis yang menghubungkan antara struktur kesempatan politik politisi perempuan, mobilisasi sumber daya, kontestasi, dan pemaknaan terhadap agenda gender dalam proses politik yang digunakan oleh David Snow (2004) dan Barbara Hobson (2003). Temuan data menunjukkan, bahwa para kandidat perempuan berhasil memanfaatkan struktur kesempatan politik yang ada untuk menampilkan dirinya sebagai kandidat kepala daerah atau bahkan ada yang terpilih menjadi kepala daerah melalui berbagai cara. Struktur kesempatan politik yang tersedia tersebut meliputi: Pertama, adanya konflik dikalangan laki-laki elite partai yang tidak berkesudahan yang mana hal itu memunculkan pilihan kepada perempuan kandidat. Kedua, perempuan kandidat memanfaatkan hubungan keluarga dan atau

kekerabatan yang terkait dengan dinasti politik yang dibangun oleh kepala daerah sebelumnya, dimana hal ini membuat mereka mendapatkan keuntungan politik untuk tampil sebagai kandidat dan memudahkan mereka melakukan mobilisasi sumber daya. Ketiga, struktur kesempatan politik muncul oleh kepentingan partai politik untuk memanfaatkan dan memperoleh dana yang besar dari kandidat yang memiliki sumber daya kapital yang tinggi.

Tiga hal tersebut menjadi unsur utama yang membentuk konfigurasi struktur kesempatan politik dari para perempuan kandidat dalam pemilukada di Jawa Timur dan Sulawesi Utara.

Kedua, hadirnya struktur kesempatan politik tersebut tidak diikuti oleh tampilnya kesadaran politik kepedulian (*recognition politics*) diantara kandidat kepala daerah, yang mana hal itu ditunjukkan melalui hasil wawancara maupun analisis terhadap beberapa visi-misi dan program yang diusung oleh perempuan kandidat. Langkanya diskursus gender dan keberpihakan terhadap agenda perempuan saat mereka masuk kedalam arena politik pemilukada memperlihatkan lemahnya kesadaran politik gender dikalangan perempuan kandidat. Namun demikian, apabila kita mengikuti pembacaan David Snow (2004) yang mengutarakan bahwa dalam perspektif proses pembingkaihan (*framing process perspective theory*) gender-mainstreaming tak secara alamiah muncul dan hadir, tapi pemaknaan gender-mainstreaming tersebut adalah bagian dari proses konstruksi sosial dalam perjumpaan politik dan proses kontestasi serta negosiasi yang dibangun saat agensi politik melakukan interaksi politik dengan konstituen maupun kekuatan sosial dan politik. Berhal demikian, potensi untuk mendorong, memberdayakan dan memperkuat agenda politik gender dan pemberdayaan perempuan dalam bentuk gender-mainstreaming masih terbuka untuk diharapkan. Terbukti pada beberapa kandidat perempuan terindikasi, bahwa ditengah dinamika

proses kandidasi pemilu yang berjalan mulai muncul kepekaan dan sensitifitas gender. Hal ini, antara lain, terlihat dalam atribut maupun retorika kampanye yang ada. Absennya kesadaran politik khas perempuan ini juga bisa dianalisa dari kurang intensifnya gerakan perempuan untuk menemani perempuan-perempuan yang maju di tingkat eksekutif. Selama ini energi gerakan perempuan dipusatkan untuk meningkatkan kehadiran perempuan di parlemen sehingga fokus ke tingkat eksekutif kurang.

Ketiga, membaca kecenderungan hadirnya struktur kesempatan politik dan lemahnya pembingkai agenda politik demokratisasi gender dikalangan perempuan kandidat, maka menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Barbara J. Risman (2004) terkait dengan pemahaman gender sebagai struktur sosial yang meliputi ruang ekonomi, politik dan kebudayaan dapat ditarik kesimpulan, bahwa relasi antara praktik politik dan teori dalam analisis ini menunjukkan betapa relasi struktural gender dalam arena politik yang diteliti masih memperlihatkan begitu kuatnya struktur patriarki dalam arena politik kita. Hal ini, antara lain, yang membuat perempuan kandidat sendiri tidak sadar akan keperempuannya sehingga absen untuk menyusun agenda politik yang pro-perempuan. Namun walaupun perspektif gender absen di dalam program-program para perempuan kandidat, tetap saja kehadiran sosok perempuan mampu membawa kontribusi positif untuk peta perpolitikan di Indonesia. Mereka paling tidak bisa membawa perubahan representasi dan perubahan diskursus. Perubahan representasi dari tadinya hanya laki-laki saja yang muncul sebagai pejabat eksekutif, menjadi sekarang ada perempuan disana. Sedangkan perubahan diskursus terjadi ketika ada pro dan kontra, like and dislike dalam menyikapi hadirnya perempuan kandidat. Secara wacana masyarakat kini bisa memperbincangkan kemungkinan-kemungkinan lain dari pemimpin laki-laki, sekaligus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kedua jenis pemimpin tersebut.

C. Rekomendasi

Mengacu pada kesimpulan dan implikasi teoretik dari hasil penelitian kandidasi perempuan dalam pemilu pada langsung di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Utara, maka direkomendasikan beberapa hal berikut:

Pertama, mendorong dan memfasilitasi perempuan dari beragam latar belakang strata ekonomi-politik, khususnya strata bawah-menengah, untuk maju dalam kandidasi pemilu. Pengedepanan secara khusus perempuan kandidat dari strata bawah-menengah ini mengacu pada pengharapan, bahwa mereka relatif berjarak dengan kepentingan akses komoditi dalam struktur ekonomi-politik yang patriarki. Sehingga, kreativitas dan inovasi yang berperspektif gender lebih mungkin diharapkan dari mereka dalam proses kandidasi.

Kedua, mendorong dan memfasilitasi persiapan perempuan kandidat untuk menumbuhkan kesadaran dirinya sebagai perempuan. Kesadaran diri yang kuat sebagai perempuan merupakan modal sosial/politik awal dan utama yang memungkinkan tumbuhnya kreativitas dan inovasi yang berperspektif gender dalam proses kandidasi. Kreativitas dan inovasi yang berperspektif gender itu harus terekspresi secara jelas dan tegas di dalam visi, misi, dan retorika perempuan kandidat.

Ketiga, mendorong dan memfasilitasi persiapan perempuan kandidat untuk berani mengutarakan ambisi politik yang berperspektif gender. Tak ada yang salah dengan ambisi politik dan masyarakat harus dibiasakan untuk mengetahui ambisi politik kandidat, khususnya ambisi politik perempuan kandidat.

Keempat, memasukkan substansi gender sebagai persyaratan fit and proper test bagi kandidat/pasangan kandidat (laki-laki maupun

perempuan) yang akan maju dalam proses kandidasi di dalam UU Pemilu.

Kelima, membuat regulasi yang mengharuskan parpol memformulasi prosedur rekrutmen kandidat /pasangan kandidat secara transparan, predictable, dan membuka ruang afirmasi untuk peran serta perempuan.

Keenam, harus ada regulasi perihal transparansi penerimaan dan atau pengeluaran dana oleh kandidat terkait dengan donatur dan parpol pengusung/ pendukung, serta ormas pendukung. Secara lebih spesifik yang lebih harus dilakukan adalah meregulasi sistem pengeluaran dana kandidat, bukan sistem penerimaan dana kandidat.

Ketujuh, harus ada regulasi yang mengharuskan partai politik, ormas, KPU/KPUD, Bawaslu/Panwaslu mengakomodasi perspektif gender dalam proses pemilu. Secara khusus, KPU/KPUD harus menegaskan dalam peraturan KPU/KPUD perihal kewajiban setiap pasangan kandidat untuk menyertakan substansi gender di dalam visi, misi, rencana program, dan materi debat kandidat.

Kedelapan, harus dikembangkan sekolah politik di setiap kabupaten/kota, yang peserta pembelajarannya diorientasikan kepada perwakilan segmen-segmen publik di tiap kabupaten/kota, dan muatan pembelajarannya secara khusus terfokus pada upaya mendifusi dan menginternalisasi isu gender bagi masyarakat pemilih dalam pemilu.

Kesembilan, mendorong dan memfasilitas CSO (Civil Society Organisation) dan gerakan perempuan setempat untuk memainkan peranan penting dalam proses kandidasi perempuan. Bagi CSO yang bergiat di bidang pemberdayaan perempuan harus lebih aktif mengidentifikasi tokoh-tokoh perempuan yang berpotensi sebagai perempuan pemimpin,

baik yang ada di dalam maupun di luar parpol, untuk dipromosikan. Bahkan CSO seharusnya melakukan pendampingan intensif terhadap perempuan-perempuan calon kepala daerah. Energi CSO yang selama ini lebih difokuskan pada parlemen hendaknya juga ditingkatkan untuk mendampingi representasi perempuan di tingkat eksekutif.

Kesepuluh, mendorong masyarakat dan institusi politik yang terkait langsung/tak langsung dengan proses kandidasi dalam pemilukada untuk mengagendakan jadwal waktu pertemuan/negosiasi politik dalam rangka pemilukada dalam rentang waktu jam kerja pagi hingga sore, tidak malam hingga dini hari. Hal ini dimaksud sebagai langkah taktis yang sensitif gender.

Kesebelas, perlu dilakukan riset lanjutan untuk mengidentifikasi dan memformulasi model rekonsiliasi perempuan kandidat paska-pemilukada. Riset ini penting, mengingat proses pemilukada pasti menyisakan luka-luka politik. Mengetahui dan memfasilitasi strategi penyembuhan luka politik oleh perempuan kandidat, amatlah berharga dan penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Doug Mc dan Tarrow, Sidney dan Tilly, Charles. 2001. *Dynamics of Contention*. Cambridge UK: Cambridge University Press..
- Castells, Manuel. 1997. *The Power of Identity*. London and New York: Blackwell Publishing.
- Dahlerup, Drude. 2006. *Women Quotas and Politics*. Routledge. New York.
- Hobson, Barbara. 2003. *Recognition Struggles And Social Movements; Contested, Identities, Agency And Power*. UK: Cambridge University.
- Risman, Barbara J. 2004. *Gender as Social Structure: Theory Wrestling with Activism* di *Gender and Society*, Vol. 18, No. 4 (Aug., 2004).
- Snow, David A. Dan Soule, Sarah Anne dan Kriesi, Hanspieter. 2004. *The Blackwell Companion of Social Movements*. London and New York: Blackwell Publishing.
- Hermson, Paul S dan Lay, J Celeste, dan Stokes, Atiya." *Women Running "as women": Candidate Gender, Campaign Issues, and Voter-Targeting Strategies*. *The Journal of Politics*, Vol.65, No.1, Februari 2003.
- Fox, Richard L, dan Lawless, Jennifer L, 2005. "To Run or Not to Run for Office: Explaining Nascent Political Ambition". *American Journal of Political Science*, Vol.49, No.3, Juli 2005.
- <http://emysusanti.com/author/>
- <http://www.antaranews.com/berita/1272893131/>.
- Jawa Pos. 8 Februari 2009
- Jurnal Perempuan No. 63, 2009, Catatan Perjuangan Politik Perempuan.
- Litbang Kompas
- Menado Pos, Juli 2010-Agustus 2010



Partnership for Governance Reform in Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No. 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
INDONESIA
Phone +62-21-7279-9566
Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
<http://www.kemitraan.co.id>

ISBN 978-979-26-9653-0

